



BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah APBD disahkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan APBD. Pemerintah Daerah harus bisa merealisasikan target-target pendapatan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap. Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada DPRD. Sebelum Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2018. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Pemerintah Kota Dumai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.



- b. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai.
- c. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.;
- x. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2017;
- z. Peraturan Walikota Dumai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2017;
- aa. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan



Bab II Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Kinerja APBD

- a. Kebijakan Fiskal/Keuangan
- b. Ekonomi makro

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ikhtisar Realisasi Pendapatan
- b. Ikhtisar Realisasi Belanja
- c. Ikhtisar Pembiayaan
- d. Bidang-bidang organisasi Pemerintah Kota Dumai
- e. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- b. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- c. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Pengungkapan atas Informasi Lainnya

Bab ini memuat informasi tentang hal-hal penting lainnya yang belum diinformasikan dalam bagian pokok laporan keuangan ataupun untuk mempertegas informasi yang telah disajikan dalam pokok pembahasan sebelumnya.

Bab VII Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup atas catatan laporan keuangan yang menyajikan simpulan-simpulan penting berkaitan dengan pelaporan keuangan serta hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan



BAB II
KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO,
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Rencana Kerja Pemerintah yang merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, bertujuan meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang mempunyai tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Fondasi Pembangunan yang berkualitas, dijelaskan bahwa kebijakan pembangunan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengefektifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan Tahun Anggaran 2018.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah guna



kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Selain itu dalam kebijakan keuangan, Pemerintah Kota Dumai melakukan:

a. Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan usaha, baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kota Dumai melalui berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Terlepas dari pertumbuhan dan keberhasilan penggalan potensi pendapatan daerah Kota Dumai, telah diupayakan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan asli daerah dengan cara menerbitkan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberatkan masyarakat. Disamping itu dilakukan perbaikan administrasi pendapatan daerah untuk penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi daerah.



b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit pembendaharaan.

c. Pembiayaan

Dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang/pinjaman.

2. Ekonomi Makro

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (Publikasi BPS tahun 2017)

PDRB Perkapita tahun 2017 yaitu sebesar 101,82 Juta Rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 4,45 % dibanding tahun 2016 yang sebesar 4,18 %, pada tahun 2016 perekonomian bergerak meningkat.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Tanpa Migas			
PDRB ADHK(2010=100) (Milyar Rp)	12.864,61	13.660,60	14.519,92
PDRB ADHB (Milyar Rp)	16.355,31	18.327,19	20.070,78
PDRB/ Kapita ADHK (Juta Rp)	44,98	46,79	48,78
PDRB/ Kapita ADHB (Juta Rp)	57,19	67,78	67,43
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,71	6,19	6,29
Dengan Migas			
PDRB ADHK(2010=100) (Milyar Rp)	20.541,69	21.401,00	22.352,64
PDRB ADHB (Milyar Rp)	25.453,57	27.975,39	30.304,35
PDRB/ Kapita ADHK (Juta Rp)	71,83	73,31	75,1
PDRB/ Kapita ADHB (Juta Rp)	89,09	95,83	101,82
Pertumbuhan Ekonomi	2,03	4,18	4,45



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Tabel 2.2 PDRB kota Dumai Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kategori	PDRB ADHK 2012				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.119.969,76	1.138.071,39	1.139.159,31	1.152.198,89	1.190.685,24
B.	Pertambangan & penggalan	86.479,50	87.258,58	87.421,17	83.885,46	79.731,61
C.	Industri pengolahan	10.414.550,79	11.059.234,35	11.382.355,83	12.032.422,54	12.675.132,10
D.	Pengadaan listrik dan gas.	11.612,14	13.196,95	14.483,65	17.107,96	17.285,13
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.363,44	3.428,96	3.523,70	3.517,99	3.679,72
F.	Bangunan	2.181.412,05	2.081.314,46	2.119.777,31	2.184.087,17	2.275.697,48
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	3.735.616,92	3.771.270,34	3.776.043,56	3.857.613,26	3.967.113,15
H.	Transportasi dan pergudangan	537.461,38	590.801,20	602.752,39	632.138,13	667.090,22
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	134.378,76	146.744,72	150.191,31	154.066,50	163.772,54
J.	Informasi dan komunikasi	206.134,11	229.294,86	245.697,40	255.850,29	269.847,31
K.	Jasa keuangan dan asuransi	471.332,89	285.154,18	265.536,84	265.883,62	263.892,89
L.	Real estate	86.988,13	90.248,56	94.773,07	96.113,61	99.409,55
M,N	Jasa perusahaan	883,50	958,60	1.032,15	1.069,38	1.143,30
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	419.717,32	421.465,77	429.988,77	430.683,13	430.859,42
P.	Jasa pendidikan	82.520,25	89.917,60	94.631,35	95.277,88	97.846,18
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	28.650,41	29.384,74	32.305,65	32.586,29	34.375,97
R.,S,T,U	Jasa lainnya	84.596,52	94.630,46	102.020,06	106.501,69	115.078,72
PDRB		19.605.667,85	20.132.375,72	20.541.693,52	21.401.003,79	22.352.640,53

Tabel 2.3 PDRB kota Dumai Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

No	Sektor/Sub sector	NILAI PDRB (JUTA RUPIAH)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.290.663,15	1.437.574,71	1.551.170,34	1.687.641,38	1.807.094,41
B.	Pertambangan & penggalan	93.218,95	108.904,95	120.471,72	121.859,63	116.791,47
C.	Industri pengolahan	10.909.915,76	12.499.495,37	13.544.271,09	15.088.108,05	16.591.040,63
D.	Pengadaan listrik dan gas.	7.555,57	11.694,09	18.026,24	24.522,43	27.095,27
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.454,51	3.653,86	4.044,55	4.293,05	4.740,69
F.	Konstruksi	2.556.624,71	2.562.176,39	2.869.884,03	3.214.657,79	3.494.631,45
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	4.014.813,24	4.589.145,67	4.691.523,15	5.000.294,68	5.250.799,37
H.	Transportasi dan pergudangan	615.012,00	727.106,64	807.763,79	877.796,94	941.565,35
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	162.081,92	200.381,58	235.071,24	260.520,57	280.817,37
J.	Informasi dan komunikasi	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73	333.681,13



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Sektor/Sub sector	NILAI PDRB (JUTA RUPIAH)				
		2013	2014	2015	2016	2017
K.	Jasa keuangan dan asuransi	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32	374.027,85
L.	Real estate	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46	143.278,74
M.N	Jasa perusahaan	1.070,51	1.223,74	1.419,08	1.554,95	1.662,75
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22	552.865,80
P.	Jasa pendidikan	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32	155.246,60
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22	53.467,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28	175.544,37
PDRB		21.231.766,16	23.628.466,85	25.453.569,61	27.975.396	30.304.350,75

Tabel 2.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kota Dumai Tahun 2013-2017 Atas dasar harga Konstan tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (2013-2017)

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN(%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,03	1,62	0,10	1,14	3,34
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,90	0,19	-4,04	-4,95
C.	Industri Pengolahan	3,78	6,19	2,92	5,71	5,34
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	10,37	13,65	9,75	18,12	1,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,64	1,95	2,76	-0,16	4,60
F.	Konstruksi / Bangunan	3,02	-4,59	1,85	3,03	4,19
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,26	0,95	0,13	2,16	2,84
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,80	9,92	2,02	4,88	5,53
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	9,20	2,35	2,58	6,30
J.	Informasi dan Komunikasi	20,87	11,24	7,15	4,13	5,47
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,44	-39,50	-6,88	0,13	-0,75
L.	Real Estate	4,73	3,75	5,01	1,41	3,43
M.	Jasa Perusahaan	6,23	8,50	7,67	3,61	6,91
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,75	0,42	2,02	0,16	0,04
O.	Jasa Pendidikan	5,51	8,96	5,24	0,68	2,70
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,99	2,56	9,94	0,87	5,49
Q.	Jasa Lainnya	11,39	11,86	7,81	4,39	8,05
PERTUMBUHAN EKONOMI		3,68	2,69	2,03	4,18	4,45

b. Inflasi

Bulan Mei 2017 Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,11% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 130,71 Laju inflasi tahun kalender (Mei 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 2,41% dan laju inflasi “year on year” (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 5,83%. (Berita, BPS Kota Dumai Tahun 2017)



c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai selama lima tahun terakhir senantiasa meningkat IPM Kota Dumai sejak Tahun 2012-2017 berturut turut adalah sebesar 71,07 : 71,59 : 71,86 : 72,20 : 72,96 : 73,46 (publikasi BPS tahun 2018). Dari besaran tersebut disimpulkan bahwa kondisi capaian pembangunan manusia Kota Dumai berada pada kategori tinggi.

d. Angka Harapan Hidup (publikasi BPS tahun 2018)

Tabel 2.5 Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi Riau

Daerah Provinsi	A H H				
	2013	2014	2015	2016	2017
RIAU	70,67	70,76	70,93	70,97	70,99
Kuantan Sengingi	67,64	67,66	67,86	67,92	67,99
Indragiri Hulu	69,63	69,64	69,74	69,79	69,83
Indragiri Hilir	66,50	66,54	66,84	66,95	67,07
Pelalawan	70,04	70,13	70,23	70,39	70,54
Siak	70,51	70,54	70,54	70,59	70,64
Kampar	69,77	69,80	70,00	70,08	70,16
Rokan Hulu	68,85	68,93	69,03	69,17	69,31
Bengkalis	70,38	70,38	70,58	70,63	70,69
Rokan Hilir	69,23	69,27	69,47	69,57	69,66
Kepulauan Meranti	66,38	66,42	66,72	66,85	66,99
Kota Pekanbaru	71,54	71,55	71,65	71,70	71,25
Kota Dumai	70,04	70,05	70,25	70,31	70,37

e. Angka Harapan Lama Sekolah (publikasi BPS tahun 2018)

Tabel 2.6 Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau

Daerah Provinsi	H L S				
	2013	2014	2015	2016	2017
RIAU	12,27	12,45	12,74	12,86	13,03
Kuantan Sengingi	11,79	11,96	12,64	12,81	13,26
Indragiri Hulu	11,29	11,51	11,92	12,24	12,29
Indragiri Hilir	10,50	10,67	11,38	11,58	11,88
Pelalawan	10,84	11,02	11,56	11,68	11,89
Siak	11,64	11,81	12,26	12,56	12,72
Kampar	12,51	12,72	12,86	12,87	13,20
Rokan Hulu	12,09	12,36	12,39	12,59	12,81
Bengkalis	12,22	12,35	12,39	12,72	12,73
Rokan Hilir	11,06	11,42	11,75	12,06	12,25
Kepulauan Meranti	12,23	12,34	12,41	12,74	12,77
Kota Pekanbaru	13,93	14,07	14,86	14,87	14,93



Daerah Provinsi	H L S				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Dumai	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97

f. Rata-rata lama sekolah (publikasi BPS tahun 2018)

Tabel 2.7 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Riau

Daerah Provinsi	R L S				
	2013	2014	2015	2016	2017
RIAU	8,38	8,47	8,49	8,59	8,76
Kuantan Sengingi	7,70	8,17	8,18	8,19	8,20
Indragiri Hulu	7,46	7,55	7,82	7,83	7,89
Indragiri Hilir	6,74	6,81	6,82	6,94	7,18
Pelalawan	7,74	7,82	8,17	8,18	8,19
Siak	8,81	9,05	9,20	9,21	9,40
Kampar	8,62	8,62	8,84	8,85	9,09
Rokan Hulu	7,38	7,83	7,84	7,97	8,18
Bengkalis	8,76	8,80	8,82	8,83	8,89
Rokan Hilir	7,42	7,62	7,62	7,88	7,89
Kepulauan Meranti	7,33	7,44	7,45	7,46	7,47
Kota Pekanbaru	10,93	10,95	10,97	11,20	11,21
Kota Dumai	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67

g. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) : juta Rp/orang/tahun (publikasi BPS tahun 2018)

Tabel 2.8 Pengeluaran Perkapita Provinsi Riau

Daerah Provinsi	Pengeluaran Per Kapita				
	2013	2014	2015	2016	2017
RIAU	10.180	10.262	10.364	10.465	10.667
Kuantan Sengingi	9.676	9.719	9.770	9.892	10.274
Indragiri Hulu	9.656	9.726	9.776	10.068	10.223
Indragiri Hilir	9.680	9.738	9.787	9.911	10.041
Pelalawan	11.342	11.391	11.422	11.641	11.725
Siak	11.397	11.531	11.604	11.826	11.898
Kampar	10.624	10.651	10.710	10.765	10.912
Rokan Hulu	8.717	8.786	8.942	9.065	9.303
Bengkalis	10.598	10.661	10.965	11.325	11.530
Rokan Hilir	8.962	9.051	9.176	9.181	9.250
Kepulauan Meranti	6.876	6.945	7.030	7.194	7.673
Kota Pekanbaru	13.891	14.023	14.126	14.225	14.497
Kota Dumai	10.735	10.870	11.058	11.531	11.531



h. Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran Tahun 2015 dan Tahun 2017 : 11,23 dan 8,94 % (publikasi BPS tahun 2018)

i. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Tahun 2016 dan Tahun 2017 : 4,74 % dan 4,57 % (publikasi BPS tahun 2018)

j. Investasi di Kota Dumai Tahun 2016 - 2017 (publikasi BPS tahun 2018)

1) PMDN : Rp. 2.318.981.600.000 – Rp. 2.007.203.800.000

2) PMA : US\$. 239.924.903,00 - US\$. 132.124.130,00

k. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berjumlah sebanyak 297.638 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 152.731 jiwa dan perempuan sebanyak 144.907 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Dumai adalah sebesar 105.40. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan terdapat sekitar 105 laki laki. Laju Pertumbuhan penduduk Tahun 2017 terhadap tahun sebelumnya sebesar 1,96 persen. Dalam tahun 2017, Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Dumai Kota sebanyak 3.659 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 33 jiwa per km².

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan Pertumbuhan di Kota Dumai Tahun 2017 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		Th.2010	Th.2016	Th.2017	Tahun	Tahun
					2010-2017	2016-2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dumai Barat	36.032	41.479	42.364	2,34	2,13
2.	Dumai Timur	55.106	62.932	64.127	2,19	1,90
3.	Bukit Kapur	38.375	44.447	45.479	2,46	2,32
4.	Sei Sembilan	27.659	31.860	32.546	2,35	2,15
5.	Medang Kampai	10.246	11.701	11.923	2,19	1,90
6.	Dumai Kota	41.535	46.844	47.570	1,96	1,55
7.	Dumai Selatan	46.143	52.645	53.629	2,17	1,87
Jumlah		255.096	291.908	297.638	2,23	1,96

Sumber : BPS Tahun 2018



I. Ketenagakerjaan

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai telah melaksanakan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai, yakni:

- Meningkatkan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki kelompok umur dan pendidikan kejuruan;
- Meningkatkan kesempatan kerja, khususnya di Kota Dumai yakni melalui Dumai Job Fair yang telah dilaksanakan untuk menampung pencari kerja;
- Meningkatkan pelatihan bagi pengangguran khususnya pendidikan menengah; dan
- Mendorong perluasan kesempatan kerja baru melalui kegiatan padat kerja produktif.

Sehingga dengan kebijakan yang telah diterapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai.

Tabel 2.10 Jumlah Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja yang berumur 15 Tahun Keatas berdasarkan jenis kelamin

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	86.752	45.361	132.113
Bekerja	77.012	40.268	117.280
Pengangguran Terbuka	9.740	5.093	14.833
Bukan Angkatan Kerja	14.764	50.486	65.250
Sekolah	6.558	8.273	42.597
Mengurus Rumah Tangga	2.060	40.537	42.597
Lainnya	6.146	1.676	7.822
J U M L A H	101.516	95.847	197.363
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,46	47,33	66,94
Tingkat Pengangguran	11,23	11,23	11,23

Sumber Data: BPS Kota Dumai Melalui Survei Angkatan Kerja Nasional 2015

Jumlah Penduduk Kota Dumai yang merupakan Angkatan Kerja berjumlah 132.113, sedangkan yang bukan Angkatan kerja berjumlah 65.250, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 66,94 % dan Tingkat Pengangguran sebesar 11,23 % , sedangkan Angkatan Kerja yang bekerja menurut status pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 2.11 Persentase Penduduk berumur 15 Tahun Keatas
Yang bekerja menurut status pekerjaan utama**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	12,30	18,50	14,40
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	13,10	7,00	11,00
Berusaha dibantu buruh tetap	3,80	5,40	4,30
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	54,00	43,20	50,30
Pekerja Bebas	13,10	2,70	9,50
Pekerja Keluarga	3,80	23,30	10,50
J U M L A H			100

Sumber Data: BPS Kota Dumai Melalui Survei Angkatan Kerja Nasional 2015



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 disajikan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4. PENDAPATAN	1.142.375.956.774,98	1.225.296.406.097,87	107,26	1.185.013.276.651,81
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00	265.472.760.817,81
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	117.586.537.699,50	127.964.097.216,00	108,83	94.993.765.288,91
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	38.003.028.000,00	30.677.523.061,00	80,72	35.859.444.250,00
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.705.426.187,00	2.189.648.098,00	32,65	1.626.568.826,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.014.408.300,00	118.823.646.066,64	143,14	132.992.982.452,90
4.2. PENDAPATAN TRANSFER	897.066.556.588,48	909.581.771.656,23	101,40	840.223.272.771,00
4.2.1. Transfer Pemerintah Pusat	817.066.556.588,48	810.190.491.050,00	99,16	755.592.886.590,00
4.2.1.1. Bagi Hasil Pajak	74.971.656.588,48	58.145.053.156,00	77,56	42.924.641.373,00
4.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	136.751.398.000,00	158.526.075.439,00	115,92	141.483.331.564,00
4.2.1.3. Dana Alokasi Umum	427.188.089.000,00	427.188.089.000,00	100,00	408.643.780.000,00
4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus	178.155.413.000,00	166.331.273.455,00	93,36	162.541.133.653,00
4.2.3. Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43	84.630.386.181,00
4.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43	84.630.386.181,00
4.2.4. Bantuan Keuangan	0,00	12.649.807.000,00	0,00	79.317.243.063,00
4.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	12.649.807.000,00	0,00	79.317.243.063,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	36.059.720.000,00	0,00	0,00
4.3.1. Pendapatan Hibah	0,00	36.059.720.000,00	0,00	0,00



Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp1.225.296.406.097,87 atau 107.26% dari target APBD Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan sebesar Rp1.142.375.956.774,98 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp40.283.129.446,06 atau 3,40% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.185.013.276.651,81.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp245.309.400.186,50 dengan realisasi sebesar Rp279.654.914.441,64 atau 114,00%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp14.182.153.623,83 atau naik 5,34% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp265.472.760.817,81.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan kepada Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp897.066.556.588,48 dengan realisasi sebesar Rp909.581.771.656,23 atau 101,40%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp9.958.744.177,77 atau turun 1,08% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp919.540.515.834,00.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp36.059.720.000,00, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp36.059.720.000,00.

2. Ikhtisar Realisasi Belanja

Berikut disajikan realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 setelah di konversisesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5.	BELANJA	1.139.723.187.494,98	1.110.153.784.810,74	97,41	1.201.010.119.993,93
5.1.	BELANJA OPERASI	965.422.077.375,39	935.929.550.628,74	96,95	928.389.238.836,10
5.1.1	Belanja Pegawai	495.892.458.089,00	465.147.119.027,00	93,80	462.005.443.318,00
5.1.2	Belanja Barang	461.554.619.286,39	459.683.831.601,74	99,59	455.263.747.518,10
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	2.442.348.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	7.975.000.000,00	11.098.600.000,00	139,17	7.645.200.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan	0,00	0,00	0,00	1.032.500.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
	Sosial				
5.2.	BELANJA MODAL	173.801.110.119,59	174.224.234.182,00	100,24	272.620.881.157,83
5.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.876.765.481,00	24.348.949.518,00	94,10	108.136.910.898,83
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	63.739.500.745,00	58.284.644.837,00	91,44	57.217.635.253,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.374.843.893,59	81.697.002.491,00	99,18	106.910.476.006,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.810.000.000,00	9.893.637.336,00	546,61	355.859.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	TRANSFER	2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	84,64	2.245.267.080,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	84,64	2.245.267.080,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	112.897.354.207,13	0,00	(18.242.110.422,12)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN DAERAH	57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.946.118.427,21
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.896.118.427,21
7.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7.1.6	PEMBIAYAAN NETTO	57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.946.118.427,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	57.935.943.638,00	136.367.362.212,22	235,38	23.704.008.005,09

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.139.723.187.494,98 dengan realisasi sebesar Rp1.110.153.784.810,74 atau 97,41%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp90.856.335.183,19 atau turun 7,56% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.201.010.119.993,93 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan sebesar Rp935.929.550.628,74 atau 96,95% dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan sebesar Rp174.224.234.182,00 atau 100,24% dari anggaran.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 pada Tahun 2018 dan realisasi sebesar Rp0,00.



3. Ikhtisar Pembiayaan

Berikut disajikan realisasi target kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI TA. 2018	%	REALISASI TA 2017
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.946.118.427,21
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.896.118.427,21
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,91	41.946.118.427,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	57.935.943.638,00	136.367.362.212,22	235,38	23.704.008.005,09

Pembiayaan Daerah Kota Dumai TA 2018 dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah

Realisasi pembiayaan penerimaan daerah secara keseluruhan sebesar Rp23.704.008.005,09 atau 40,91% dari yang dianggarkan yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018.

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah

Tahun 2018 tidak ada pengeluaran pembiayaan.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto sebesar Rp23.704.008.005,09 atau 40,91% dari yang dianggarkan merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp136.367.362.212,22 atau 235,38% dari anggaran yang ditetapkan merupakan jumlah dari surplus belanja sebesar Rp112.897.354.207,13 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp23.470.008.005,09

4. Bidang-bidang Organisasi Pemerintah Kota Dumai

Format Susunan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:



a. URUSAN WAJIB

Pada Tahun Anggaran 2018 urusan wajib mendapat alokasi dana sebesar Rp1.280.663.488.811,46 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp1.203.949.987.073,93 atau 94,01% dari anggaran.

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

a) PENDIDIKAN

1) Dinas Pendidikan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp299.963.075.200,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp311.966.543.367,00 atau 104% dari anggaran.

b) KESEHATAN

(1) Dinas Kesehatan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp94.880.335.175,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp94.751.300.554,00 atau 99,86% dari anggaran.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp145.459.238.290,00 termasuk didalamnya anggaran RSUD sebagai BLUD. Sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp165.020.886.661,74 atau 113,45% dari anggaran termasuk di dalamnya realisasi RSUD sebagai BLUD.

c) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp113.776.105.416,55 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp109.237.562.625,00 atau 96,01% dari anggaran.

d) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp46.655.124.755,60 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp31.479.243.343,00 atau 67,47% dari anggaran.

e) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

(1) Satuan Polisi Pamong Praja



Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp9.469.947.440,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.901.699.797,00 atau 94,00% dari anggaran.

(2) *Badan Penanggulangan Bencana Daerah.*

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.439.852.540,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp5.024.763.403,00 atau 78,03% dari anggaran.

(3) *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.*

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp4.422.016.309,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp4.164.082.292,00 atau 94,17% dari anggaran.

f) **SOSIAL**

(1) *Dinas Sosial.*

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp6.495.006.815,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp5.471.138.531,00 atau 84,24% dari anggaran.

2. **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

a) **TENAGA KERJA**

(1) *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp6.280.839.480,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp5.737.839.911,00 atau 91,35% dari anggaran.

b) **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

(1) *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp5.878.313.845,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp6.005.982.528,00 atau 102,17% dari anggaran.

c) **LINGKUNGAN HIDUP**

(1) *Dinas Lingkungan Hidup.*



Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp19.497.018.373,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp19.207.007.915,00 atau 98,51% dari anggaran.

d) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.729.899.700,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp6.968.337.303,00 atau 90,15% dari anggaran.

e) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.739.501.016,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp7.275.337.342,00 atau 83,25% dari anggaran.

f) PERHUBUNGAN

(1) Dinas Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp26.365.988.292,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp22.833.463.044,00 atau 86,60% dari anggaran.

g) KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

(1) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.834.860.183,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp7.394.578.002,00 atau 94,38% dari anggaran.

h) PENANAMAN MODAL

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp12.458.705.400,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp11.084.673.511,00 atau 88,97% dari anggaran.

i) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

(1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata



Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.756.056.768,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.342.481.982,00 atau 95,28% dari anggaran.

j) PERPUSTAKAAN

(1) Dinas *Perpustakaan dan Kearsipan*.

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp4.853.121.956,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp4.722.469.478,00 atau 97,31% dari anggaran.

3. URUSAN PILIHAN

a) KELAUTAN DAN PERIKANAN

(1) Dinas Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.273.981.366,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp6.520.100.645,00 atau 89,64% dari anggaran.

b) PERTANIAN

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp17.534.169.290,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp16.958.809.711,00 atau 96,72% dari anggaran.

c) PERDAGANGAN

(1) Dinas Perdagangan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.724.217.555,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp9.134.494.773,00 atau 104,70% dari anggaran.

4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

a) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp20.050.029.600,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp14.997.587.170,00 atau 74,80% dari anggaran.

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp779.513.000,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp767.050.396,00 atau 98,40% dari anggaran.

(3) Sekretariat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp71.485.826.739,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp57.791.270.426,00 atau 80,84% dari anggaran.

(4) Sekretariat DPRD

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp26.912.032.340,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp22.928.186.659,00 atau 85,20% dari anggaran.

(5) Kecamatan Dumai Barat

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.564.939.390,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp7.510.643.998,00 atau 99,28% dari anggaran.

(6) Kecamatan Dumai Timur

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.647.186.082,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.515.725.228,00 atau 98,48% dari anggaran.

(7) Kecamatan Bukit Kapur

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.574.462.440,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.354.209.116,00 atau 97,43% dari anggaran.

(8) Kecamatan Medang Kampai

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.222.574.920,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp6.769.602.475,00 atau 93,73% dari anggaran.

(9) Kecamatan Sungai Sembilan



Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.387.091.136,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.255.859.333,00 atau 98,44% dari anggaran.

(10) Kecamatan Dumai Kota

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp9.270.695.786,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.886.171.639,00 atau 95,85% dari anggaran.

(11) Kecamatan Dumai Selatan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp9.045.035.304,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp8.752.508.727,00 atau 96,77% dari anggaran.

b) PENGAWASAN

(1) Inspektorat

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp9.134.814.178,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp9.706.476.471,00 atau 106,26% dari anggaran.

c) PERENCANAAN

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp12.737.940.389,83 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp10.914.854.668,00 atau 85,69% dari anggaran.

d) KEUANGAN

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp40.897.519.420,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp40.343.925.231,00 atau 98,65% dari anggaran.

(2) Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp24.289.092.685,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp22.976.393.781,00 atau 94,60% dari anggaran.



e) KEPEGAWAIAN

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun Anggaran 2018 bidang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.889.828.200,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi sebesar Rp6.813.526.854,00 atau 86,36% dari anggaran.

5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

a. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan dalam APBD 2018 sebesar Rp1.142.375.956.774,98 dan terealisasi sebesar Rp1.225.296.406.097,87 atau 107,26%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD dengan realisasi penerimaan 114,00%, dan Pendapatan Transfer dengan realisasi 101,40%. Kalau dianalisis lebih dalam dari segi Pendapatan Asli Daerah, maka realisasi dari pendapatan pajak daerah mencapai 108,83%, pendapatan retribusi daerah 80,72%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 32,65% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 143,14%. Jadi kalau diperhatikan realisasi PAD, terdapat pendapatan asli daerah yang belum tercapai 100% yaitu pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Belanja

Belanja yang ditarget ditargetkan dalam APBD 2018 sebesar Rp1.139.723.187.494,98 dan terealisasi sebesar Rp1.110.153.784.810,74 atau 97,41%. Belanja dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Realisasi belanja operasi 96,95%, realisasi belanja modal 100,24% dan realisasi belanja tidak terduga sebesar 0,00%.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

1. Entitas Pelaporan

- a. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Dumai dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Pemerintah Kota Dumai sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

2. Entitas Akuntansi

- a. Setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- b. Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu, seperti badan layanan umum daerah (BLUD), yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kota Dumai ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Dumai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi



penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

3. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Dumai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah Kota Dumai mulai Tahun 2015 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrual dan Buletin Teknis yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Basis akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta



pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Dumai, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kota Dumai, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
2. keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
3. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

b. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan



Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemda.
- 2) Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pelaporan (pemerintahan Kota Dumai).

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam



suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. cakupan entitas pelaporan;
 - c. periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Surplus/Defisit dari Operasi
 - d. Kegiatan Non Operasional
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - f. Pos Luar Biasa
 - g. Surplus/Defisit-LO

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

KLASIFIKASI

1. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:



- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang;
- i. ekuitas.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

RUANG LINGKUP

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KAS DAN SETARA KAS

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan



bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

KETENTUAN UMUM

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan



keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Tujuan

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib



melaporkannya kepada BUD.

- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.



3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.
4. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
5. Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk pengadaan aset tetap jika dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan di dalam jenis belanja barang dan jasa.

PENGAKUAN

Belanjadiakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - a. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D Nihil.
 - b. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang



dianggap perlu.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.



PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :



- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.



2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LO yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, dan sebagainya.
4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

7. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
8. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu

11.KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



12.KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO DAN POS LUAR BIASA

Tujuan

Kebijakan akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa mengatur perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi surplus/defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang meliputi definisi, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGUKURAN

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
4. Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
5. Yang termasuk ke dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
6. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
7. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Surplus/defisit LO merupakan *bottom line item* atau item babs terakhir dari Laporan Operasional.
2. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang



mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
 5. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan

13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas mengatur perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

Definisi

1. **Kas dan setara kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. **Kas meliputi:**
 - a. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan,
 - b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran,
 - c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
 - d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.



4. **Kas terdiri** dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. **Setara kas meliputi** investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
7. **Setara kas terdiri** dari :
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
8. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
9. **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
10. **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
11. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan maupun Bendahara umum Daerah.

PENGUKURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
 - c. Kebijakan manajemen setara kas.

14.KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Dumai tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.



3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Piutang pendapatan;
 - b. Piutang Lainnya.
5. Piutang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
 - h. Piutang Pendapatan Lainnya.
6. Piutang lainnya terdiri dari:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
 - c. Uang Muka.
7. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

Piutang pendapatan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
4. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau



- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
6. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)
7. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 tahun sampai kurang dari 3 tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang 5 tahun keatas.
8. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
9. Wajib pajak/retribusi dinyatakan bangkrut, tidak ditemukan dan meninggal dunia harus didukung oleh bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (limapuluh) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0 %;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (limapuluh) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.



15.KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
6. Persediaan meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;



- d. Perangko dan materai;
- e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f. Amunisi;
- g. Bahan untuk pemeliharaan;
- h. Suku cadang;
- i. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
- j. Pita cukai dan leges;
- k. Bahan baku ;
- l. Barang dalam proses/setengah jadi;
- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
3. Persediaan diakui sebagai:
 - a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
 - b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

PENGUKURAN PERSEDIAAN

1. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya



cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

2. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
3. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
4. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
5. Untuk persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi, persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*)
6. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.



16. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Dumai baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:



a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

1. Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika



tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
 - a. **Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. **Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk



dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode di atas 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

6. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
7. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;



- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

18. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

RuangLingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.



Definisi

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.



15. Termin(*progressbilling*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berlaku hanya untuk Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan mesin sebesar Rp 1.000.000,00 ke atas.
 - b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 ke atas.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap



pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.



Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang **tidak serupa** atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang **serupa** yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut **tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui** dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan



persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap, terlampir pada bagian akhir kebijakan akuntansi ini.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumensumber yang sah dan



telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
dan

- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usangyangtelah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.



2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.



Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.



2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
4. Biaya-biaya yang dapat distribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;



- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

19.KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

RuangLingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
3. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.



4. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
5. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
6. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
7. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
8. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
9. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

20. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;



- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
6. Bangun, Serah, Kelola (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut



7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
3. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurnagi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi"

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

21. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:



- a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
- b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban muncul antara lain karena:
 - a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
 - c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
 - d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi

1. Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - b. Kewajiban Jangka Panjang.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - e. Utang Beban; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.



5. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya
6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
7. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
8. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
9. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
10. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:
 - a. Utang Dalam Negeri;
 - b. Utang Luar Negeri; dan
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.
11. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
12. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
13. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
14. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
15. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions), diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events) diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events) diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
3. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
4. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
6. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
7. Utang Beban, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
8. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi



belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

10. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/ atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
14. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.
15. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
2. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
3. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
4. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman;
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;



dan

- c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

22. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.



PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

23. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai.

Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan



kebijakan akuntansi yang baru.

7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - c. Kesalahan yang tidak berulang;
 - d. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.



10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akunaset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,



dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun



mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi



19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.



2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.



24. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Definisi

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/ penggunabarang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas entitas akuntansi (entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
2. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh PPKD.
4. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD.



5. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
6. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan PPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.
7. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
8. Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
2. Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah,

PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi (SKPD dan PPKD), dan mengeliminasi akun resiprokal (jika ada).
2. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 1 sampai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 5.



PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian target (%)	Realisasi (Rp)
1.142.375.956.774,98	1.225.296.406.097,87	107,26	1.185.013.276.651,81

Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah Kota Dumai tidak mengalami perubahan, namun hanya mengalami perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan Daerah Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.142.375.956.774,98 dengan realisasi sebesar Rp1.225.296.406.097,87 atau 107,26%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp40.283.129.446,06 atau 3,40% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.185.013.276.651,81.

Pendapatan Daerah Kota Dumai TA 2018 terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, berikut rinciannya:

Tabel 5.1.1. Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00	265.472.760.817,81
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	897.066.556.588,48	909.581.771.656,23	101,40	919.540.515.834,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	36.059.720.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.142.375.956.774,98	1.225.296.405.738,87	107,26	1.185.013.276.651,81



a. Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00	265.472.760.817,81

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp245.309.400.186,50 dengan realisasi sebesar Rp279.654.914.441,64 atau 114,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar Rp14.182.153.623,83 atau 5,34% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp265.472.760.817,81

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Daftar Jenis Pungutan dan dasar hukum Pungutan TA 2018 dapat dilihat pada **Lampiran I**. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	117.586.537.699,50	127.964.097.216,00	108,83	94.993.765.288,91
Pendapatan Retribusi Daerah	38.003.028.000,00	30.677.523.061,00	80,72	35.859.444.250,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.705.426.187,00	2.189.648.098,00	32,65	1.626.568.826,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.014.408.300,00	118.823.646.066,64	143,14	132.992.982.452,90
Jumlah	245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00	265.472.760.817,81

1) Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
117.586.537.699,50	127.964.097.216,00	108,83	94.993.765.288,91

Pendapatan Pajak Daerah Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp117.586.537.699,50 dengan realisasi sebesar Rp127.964.097.216,00 atau 108,83 %, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp32.970.331.927,09 atau 34,71% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp94.993.765.288,91.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2018 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2018 sebesar Rp127.964.097.216,00 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	4.383.077.030,00	3.569.533.379,00	81,44	3.596.681.295,50
Pajak Restoran	3.750.000.000,00	5.583.367.638,00	148,89	4.178.485.984,01
Pajak Hiburan	748.550.000,00	984.303.315,00	131,49	909.846.165,05
Pajak Reklame	1.511.334.125,00	1.815.886.998,00	120,15	1.657.347.947,75
Pajak Penerangan Jalan	25.904.972.845,00	33.921.778.132,00	130,95	26.237.015.928,60
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.700.000,00	0,00	0,00	2.985.200,00
Pajak Parkir	750.000.000,00	30.000.000,00	4,00	37.500.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	2.153.580.000,00	1.383.250.108,00	64,23	2.621.254.094,00
Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	84.480.000,00	73,33	92.390.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	70.000.000.000,00	74.437.783.477,00	106,34	50.417.463.205,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.663.123.699,50	6.153.714.169,00	80,30	5.242.795.469,00
Jumlah	117.586.537.699,50	127.964.097.216,00	108,83	94.993.765.288,91

Rincian Pajak Daerah tahun 2018 sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	4.383.077.030,00	3.569.533.379,00	81,44	3.596.681.295,50
Jumlah	4.383.077.030,00	3.569.533.379,00	81,44	3.596.681.295,50

b) Pajak Restoran

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	3.750.000.000,00	5.583.367.638,00	148,89	4.178.485.984,01
Jumlah	3.750.000.000,00	5.583.367.638,00	148,89	4.178.485.984,01

c) Pajak Hiburan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	748.550.000,00	984.303.315,00	131,49	909.846.165,05
Jumlah	748.550.000,00	984.303.315,00	131,49	909.846.165,05



d) Pajak Reklame

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	1.511.334.125,00	1.815.886.998,00	120,15	1.657.347.947,75
Jumlah	1.511.334.125,00	1.815.886.998,00	120,15	1.657.347.947,75

e) Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	25.904.972.845,00	33.921.778.132,00	130,95	26.237.015.928,60
Jumlah	25.904.972.845,00	33.921.778.132,00	130,95	26.237.015.928,60

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	606.700.000,00	0,00	0,00	2.985.200,00
Jumlah	606.700.000,00	0,00	0,00	2.985.200,00

g) Pajak Parkir

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	750.000.000,00	30.000.000,00	4,00	37.500.000,00
Jumlah	750.000.000,00	30.000.000,00	4,00	37.500.000,00

h) Pajak Air Bawah Tanah

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	2.153.580.000,00	1.383.250.108,00	64,23	2.621.254.094,00
Jumlah	2.153.580.000,00	1.383.250.108,00	64,23	2.621.254.094,00

j) Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	115.200.000,00	84.480.000,00	73,33	92.390.000,00
Jumlah	115.200.000,00	84.480.000,00	73,33	92.390.000,00



k) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	70.000.000.000,00	74.437.783.477,00	106,34	50.417.463.205,00
Jumlah	70.000.000.000,00	74.437.783.477,00	106,34	50.417.463.205,00

l) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	7.663.123.699,50	6.153.714.169,00	80,30	5.242.795.469,00
Jumlah	7.663.123.699,50	6.153.714.169,00	80,30	5.242.795.469,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
38.003.028.000,00	30.677.523.061,00	80,72	35.859.444.250,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp38.003.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.677.523.061,00 atau 80,72%. sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp5.181.921.189,00 atau 14,45%.

Penerimaan retribusi daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2018 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan retribusi daerah dalam Tahun 2018 sebesar Rp30.677.523.061,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.4. Rincian Retribusi Daerah Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Jasa Umum	4.227.195.960,00	1.802.922.250,00	42,65	1.562.565.050,00
Jasa Usaha	21.338.382.040,00	19.485.167.400,00	91,32	20.904.606.941,00
Perizinan Tertentu	12.437.450.000,00	9.389.433.411,00	75,49	13.392.272.259,00
Jumlah	38.003.028.000,00	30.677.523.061,00	80,72	35.859.444.250,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dirincikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum Merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa umum dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.1.5. Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	900.000.000,00	505.315.000,00	56,15	427.890.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.656.771.360,00	90.169.000,00	5,44	18.510.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	153.000.000,00	199.461.000,00	130,37	184.994.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Los	300.000.000,00	309.464.000,00	103,15	309.476.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	126.000.000,00	62.100.000,00	49,29	57.990.000,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	400.000.000,00	13.945.000,00	3,49	27.325.000,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	27.000.000,00	6.692.500,00	24,79	11.890.750,00
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	523.144.600,00	467.823.500,00	89,43	509.870.800,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	5.280.000,00	3.346.250,00	63,38	4.416.700,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	0,00	0,00	0,00	1.251.800,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC	10.200.000,00	6.650.000,00	65,20	8.950.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	125.800.000,00	137.956.000,00	109,66	0,00
Jumlah	4.227.195.960,00	1.802.922.250,00	42,65	1.562.565.050,00

Realisasi akun pendapatan retribusi Jasa Umum per akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	900.000.000,00	505.315.000,00	56,15	427.890.000,00
Jumlah	900.000.000,00	505.315.000,00	56,15	427.890.000,00

(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	1.656.771.360,00	90.169.000,00	5,44	18.510.000,00
Jumlah	1.656.771.360,00	90.169.000,00	5,44	18.510.000,00

(3) Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan	153.000.000,00	199.461.000,00	130,37	184.994.000,00
Jumlah	153.000.000,00	199.461.000,00	130,37	184.994.000,00



(4) Retribusi Pelayanan Pasar – Los

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan	300.000.000,00	309.464.000,00	103,15	309.476.000,00
Jumlah	300.000.000,00	309.464.000,00	103,15	309.476.000,00

(5) Retribusi Pelayanan Pasar – Kios

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan	126.000.000,00	62.100.000,00	49,29	57.990.000,00
Jumlah	126.000.000,00	62.100.000,00	49,29	57.990.000,00

(6) Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Jeep

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	400.000.000,00	13.945.000,00	3,49	27.325.000,00
Jumlah	400.000.000,00	13.945.000,00	3,49	27.325.000,00

(7) Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Minibus

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	27.000.000,00	6.692.500,00	24,79	11.890.750,00
Jumlah	27.000.000,00	6.692.500,00	24,79	11.890.750,00

(8) Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	523.144.600,00	467.823.500,00	89,43	509.870.800,00
Jumlah	523.144.600,00	467.823.500,00	89,43	509.870.800,00

(9) Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	5.280.000,00	3.346.250,00	63,38	4.416.700,00
Jumlah	5.280.000,00	3.346.250,00	63,38	4.416.700,00



(10) Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban – Truck

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.251.800,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.251.800,00

(11) Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan	10.200.000,00	6.650.000,00	65,20	8.950.000,00
Jumlah	10.200.000,00	6.650.000,00	65,20	8.950.000,00

(12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan	125.800.000,00	137.956.000,00	109,66	0,00
Jumlah	125.800.000,00	137.956.000,00	109,66	0,00

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.6. Rincian Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	127.578.000,00	131.754.000,00	103,27	99.750.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	335.000.000,00	344.900.000,00	102,96	339.000.000,00
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	18.007.437.000,00	18.003.831.000,00	99,98	18.137.987.500,00
Retribusi Terminal - tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	530.000.000,00	27.282.000,00	5,15	14.814.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	285.000.000,00	136.548.100,00	47,91	120.802.701,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00	439.689.500,00	97,71	414.931.900,00
Retribusi Rumah potong Hewan	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00	18.080.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pelayanan Bandar Udara	1.263.367.040,00	78.987.800,00	6,25	1.440.560.840,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	310.000.000,00	301.175.000,00	97,15	317.780.000,00
Jumlah	21.338.382.040,00	19.485.167.400,00	91,32	20.904.606.941,00

Realisasi akun pendapatan retribusi Jasa Usaha per akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	11.400.000,00	100,00	99.750.000,00
Sekretariat Daerah	113.178.000,00	115.554.000,00	102,10	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.400.000,00	4.800.000,00	33,33	0,00
Jumlah	127.578.000,00	131.754.000,00	103,27	99.750.000,00

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	335.000.000,00	344.900.000,00	102,96	339.000.000,00
Jumlah	335.000.000,00	344.900.000,00	102,96	339.000.000,00

(3) Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	18.007.437.000,00	18.003.831.000,00	99,98	18.137.987.500,00
Jumlah	18.007.437.000,00	18.003.831.000,00	99,98	18.137.987.500,00

(4) Retribusi Terminal - tempat Kegiatan Usaha

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	900.000,00



(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	530.000.000,00	27.282.000,00	5,15	14.814.000,00
Jumlah	530.000.000,00	27.282.000,00	5,15	14.814.000,00

(6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	285.000.000,00	136.548.100,00	47,91	120.802.701,00
Jumlah	285.000.000,00	136.548.100,00	47,91	120.802.701,00

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	450.000.000,00	439.689.500,00	97,71	414.931.900,00
Jumlah	450.000.000,00	439.689.500,00	97,71	414.931.900,00

(8) Retribusi Rumah potong Hewan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00	18.080.000,00
Jumlah	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00	18.080.000,00

(9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pelayanan Bandar Udara

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	1.263.367.040,00	78.987.800,00	6,25	1.440.560.840,00
Jumlah	1.263.367.040,00	78.987.800,00	6,25	1.440.560.840,00

(10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah –Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan	310.000.000,00	301.175.000,00	97,15	317.780.000,00
Jumlah	310.000.000,00	301.175.000,00	97,15	317.780.000,00



c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.7. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.100.000.000,00	9.084.555.299,00	75,08	10.513.341.186,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	4.600.000,00	46,23	7.400.000,00
Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00	299.758.112,00	100,00	2.757.431.073,00
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	2.000.000,00	520.000,00	26,00	760.000,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	325.500.000,00	0,00	0,00	113.340.000,00
Jumlah	12.437.450.000,00	9.389.433.411,00	75,49	13.392.272.259,00

Realisasi akun pendapatan retribusi Perizinan Tertentu per akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.100.000.000,00	9.084.555.299,00	75,08	10.513.341.186,00
Jumlah	12.100.000.000,00	9.084.555.299,00	75,08	10.513.341.186,00

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.950.000,00	4.600.000,00	46,23	7.400.000,00
Jumlah	9.950.000,00	4.600.000,00	46,23	7.400.000,00



(3) Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	299.758.112,00	100,00	2.757.431.073,00
Jumlah	0,00	299.758.112,00	100,00	2.757.431.073,00

(4) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	2.000.000,00	520.000,00	26,00	760.000,00
Jumlah	2.000.000,00	520.000,00	26,00	760.000,00

(5) Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LRA

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	325.500.000,00	0,00	0,00	113.340.000,00
Jumlah	325.500.000,00	0,00	0,00	113.340.000,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
6.705.426.187,00	2.189.648.098,00	32,65	1.626.568.826,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp6.705.426.187,00 dengan realisasi sebesar Rp2.189.648.098,00 atau 32,65%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp563.079.272,00 atau 34,62% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.626.568.826,00.

Tabel 5.1.8. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
PT Bank Riau	1.347.426.187,00	1.342.156.713,00	99,61	1.626.568.826,00
PT Pembangunan Dumai	5.000.000.000,00	636.087.382,00	12,72	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
PT Pelabuhan Dumai Berseri	358.000.000,00	211.404.003,00	59,05	0,00
Jumlah	6.705.426.187,00	2.189.648.098,00	32,65	1.626.568.826,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri merupakan pendapatan yang berasal dari dividen sebesar Rp1.342.156.713,00 dari anggaran sebesar Rp1.347.426.187,00 atau 99,61% yang dibagikan oleh PT. Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2017 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri tanggal 9 Februari 2018.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Pembangunan Dumai merupakan dividen dari pembagian 55% dari keuntungan Perseroan sebesar Rp1.156.522.513,00 atau sebesar Rp636.087.382,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 12,72% yang dibagikan oleh PT. Pembangunan Dumai. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2017 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Dumai tanggal 3 April 2018.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Pelabuhan Dumai Berseri merupakan dividen dari pembagian 40% dari keuntungan Perseroan sebesar Rp.528.510.010,00 atau sebesar Rp211.404.003,00 dari anggaran sebesar Rp358.000.000,00 atau 59,05% yang dibagikan oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2017 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pelabuhan Dumai Berseri tanggal 15 Mei 2018.

(4) Lain-lain PAD yang sah

Realisasi Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9. Rincian Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran	Realisasi	Rasio (%)	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	73.800.000,00	0,00	19.842.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.350.000.000,00	2.203.601.454,91	163,23	1.344.721.916,76
Penerimaan Bunga Deposito	3.505.136.986,00	2.289.302.925,74	65,31	3.586.445.615,55
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	472.145.738,07	0,00	229.732.964,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.130.032.271,00	0,00	587.157.045,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran	Realisasi	Rasio (%)	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	38.006.889,00	0,00	24.411.665,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	1.594.250.715,76	0,00	1.114.349.115,34
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	110.000.000,00	30.000.000,00	27,27	46.570.000,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	175.914.500,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	78.049.271.314,00	108.210.752.739,31	138,64	88.794.850.457,34
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	2.600.817.399,85	0,00	1.353.181.673,91
Dana Bos	0,00	0,00	0,00	35.891.720.000,00
Bunga BOS	0,00	5.021.433,00	0,00	0,00
Jumlah	83.014.408.300,00	118.823.646.066,64	143,14	132.992.982.452,90

Pendapatan BLUD sebesar Rp108.210.752.739,31 yang terdiri dari BLUD-RSUD sebesar Rp.96.273.930.627,21 dan BLUD-Puskesmas sebesar Rp.11.936.822.112,10 yang digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 untuk BLUD-RSUD dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 tanggal 5 Desember 2014 untuk BLUD-Puskesmas.

Adapun rincian pendapatan BLUD-Puskesmas dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.10. Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.708.727.472,53
BLUD Puskesmas Dumai Barat	909.236.209,37
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.153.793.078,98
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	1.772.588.884,83
BLUD Puskesmas Medang Kampai	799.926.770,39
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.005.106.130,49
BLUD Puskesmas Bukit Timah	478.433.040,44
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	1.996.432.118,85
BLUD Puskesmas Purnama	730.893.331,61
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.381.685.074,61
Jumlah	11.936.822.11,10

a. Pendapatan Transfer

Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
897.066.556.588,48	909.581.771.656,23	101,40	919.540.515.834,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp909.581.771.656,23 atau 101,40% dari anggaran sebesar Rp897.066.556.588,48. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2017



sebesar Rp919.540.515.834,00 terdapat penurunan sejumlah Rp9.958.744.177,77 atau 1,08%.

Tabel 5.1.11. Rincian Pendapatan Transfer tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	817.066.556.588,48	810.190.491.050,00	99,16	755.592.886.590,00
Transfer Pemerintah Provinsi	80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43	84.630.386.181,00
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	12.649.807.000,00	100,00	79.317.243.063,00
Jumlah	897.066.556.588,48	909.581.771.656,23	101,40	919.540.515.834,00

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi 2017 (Rp)
817.066.556.588,48	810.190.491.050,00	99,16	755.592.886.590,00

Berikut ini adalah rincian realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017:

Tabel 5.1.12. Rincian Dana Perimbangan Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak	74.971.656.588,48	58.145.053.156,00	77,56	42.924.641.373,00
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	136.751.398.000,00	158.526.075.439,00	115,92	141.483.331.564,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00	427.188.089.000,00	100,00	408.643.780.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	178.155.413.000,00	166.331.273.455,00	93,36	162.541.133.653,00
Jumlah	817.066.556.588,48	810.190.491.050,00	99,16	755.592.886.590,00

Tahun 2018 realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan adalah sebesar Rp810.190.491.050,00 atau 99,16% dari anggaran sebesar Rp817.066.556.588,48. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2017 sebesar Rp755.592.886.590,00 terdapat kenaikan sejumlah Rp54.597.604.460,00 atau 7,23%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi 2017 (Rp)
74.971.656.588,48	58.145.053.156,00	77,56	42.924.641.373,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.145.053.156,00 atau 77,56% dari anggaran sebesar Rp74.971.656.588,48 dan jika dibandingkan per



31 Desember 2017 sebesar Rp42.924.641.373,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp15.220.411.783,00 atau 35,46%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, serta PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.13. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	10.332.475,00	0,00	36.517.800,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00	2.177.456.238,00	0,00	1.120.523.250,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi kepada seluruh Kab/Kota	0,00	3.235.257.970,00	0,00	6.731.876.309,00
Bagi Hasil Pph ps1 25 dan 29 WPOPND dan Pph Pasal 21	0,00	39.041.536.375,00	0,00	26.144.567.584,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Migas	0,00	13.627.878.553,00	0,00	8.891.156.430,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	26.209.525.000,00	52.591.545,00	0,20	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	48.762.131.588,48	0,00	0,00	0,00
Jumlah	74.971.656.588,48	58.145.053.156,00	77,56	42.924.641.373,00

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2018.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
136.751.398.000,00	158.526.075.439,00	115,92	141.483.331.564,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp158.526.075.439,00 atau 115,92% dari anggaran sebesar Rp136.751.398.000,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp141.483.331.564,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.042.743.875,00 atau 12,05%.



Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.14. Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.202.630.000,00	4.850.581.828,00	115,42	2.465.574.434,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	426.199.000,00	1.813.824.579,00	425,58	434.403.326,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	525.572.127,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	131.179.542.000,00	147.736.029.758,00	112,62	131.227.678.170,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	3.424.404.683,00	100,00	6.322.952.239,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	507.151.268,00
Jumlah	136.751.398.000,00	158.526.075.439,00	115,92	141.483.331.564,00

Penganggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2018.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
427.188.089.000,00	427.188.089.000,00	100,00	408.643.780.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp427.188.089.000,00 dengan realisasi sebesar Rp427.188.089.000,00 atau 100,00%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp18.544.309.000,00 atau 4,54% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp408.643.780.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
178.155.413.000,00	166.331.273.455,00	93,36	162.541.133.653,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp178.155.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp166.331.273.455,00 atau 93,36%. Sedangkan dibandingkan dengan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

realisasi Tahun 2017 maka terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp3.790.139.802,00 atau 2,33% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp162.541.133.653,00.

Rincian Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.15. Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
DAK Bidang Pendidikan	72.766.326.000,00	70.929.015.800,00	97,48	57.036.743.521,00
DAK Bidang Kesehatan	43.012.757.000,00	37.998.235.505,00	88,34	28.628.014.829,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	39.800.500.000,00	0,00	0,00	45.166.788.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4.653.702.000,00	4.539.014.000,00	97,54	3.495.072.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	9.959.728.000,00	3.539.562.300,00	35,54	3.234.323.000,00
DAK Bidang Pertanian	592.760.000,00	569.978.000,00	96,16	147.953.000,00
DAK Bidang Keluarga Berencana	0,00	1.288.400.000,00	0,00	176.555.000,00
DAK Bidang Perdagangan	0,00	1.265.193.750,00	0,00	0,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.046.662.000,00	2.046.662.000,00	100,00	3.080.186.000,00
DAK Bidang Transportasi	3.248.958.000,00	3.239.090.000,00	99,70	0,00
DAK IPD	0,00	38.866.949.000,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pariwisata	1.153.900.000,00	1.136.562.000,00	98,50	0,00
DAK Bidang Kependudukan	920.120.000,00	912.611.100,00	99,18	821.536.000,00
DAK Tambahan	0,00	0,00	0,00	20.753.962.303,00
Jumlah	178.155.413.000,00	166.331.273.455,00	93,36	162.541.133.653,00

2) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43	84.630.386.181,00

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43	84.630.386.181,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai TA 2018 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar



Rp80.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp86.741.473.606,23 atau 108,43%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp2.111.087.425,23 atau 2,49% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp84.630.386.181,00.

Berikut ini adalah rincian dana transfer dari Pemerintah Provinsi :

Tabel 5.1.16. Rincian dana transfer dari Pemerintah Provinsi

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.133.127.499,00	18.745.127.261,41	97,97	19.192.849.981,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.464.860.372,00	15.478.050.865,82	114,95	15.169.378.639,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.265.406.892,00	36.645.688.714,00	117,21	34.177.999.461,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5.758.087.954,00	685.786.048,00	11,91	709.563.019,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.378.517.283,00	15.186.820.717,00	146,33	15.380.595.081,00
Jumlah	80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43	84.630.386.181,00

Realisasi dana bagi hasil dari TA 2018 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 349/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 550/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 947/V/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1138/V/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air



Permukaan Triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 948/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2017) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

3) Bantuan Keuangan Provinsi

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
0,00	12.649.807.000,00	0,00	79.317.243.063,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya dari pemerintah provinsi berupa bantuan keuangan kepada Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp12.649.807.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp66.667.436.063,00 atau turun 84,05% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp79.317.243.063,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari TA 2018 dicatat berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 210/II/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 919/X/2018 tentang Perubahan Kpts Nomor 210/II/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 308/IV/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Realisasi
0,00	36.059.720.000,00	0,00	0,00



1) Pendapatan Hibah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)	Realisasi (Rp)
0,00	36.059.720.000,00	0,00	0,00

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp.36.059.720.000,00 merupakan hibah dana BOS dari pemerintah pusat yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

2. Belanja

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran	Realisasi	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi
1.139.723.187.494,98	1.110.153.784.810,74	97,41	1.201.010.119.993,93

Belanja TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.139.723.187.494,98 dengan realisasi sebesar Rp1.110.206.428.510,74 atau 97,41%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp90.856.335.183,19 atau turun 7,56% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.201.010.119.993,03.

Belanja Daerah Kota Dumai TA 2018 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.17. Rincian Belanja Daerah Kota Dumai TA 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	965.422.077.375,39	935.929.550.628,74	96,95	928.389.238.836,10
Belanja Modal	173.801.110.119,59	174.224.234.182,00	100,24	272.620.881.157,83
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.139.723.187.494,98	1.110.153.784.810,74	97,41	1.201.010.119.993,93

a. Belanja Operasi

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
965.422.077.375,39	935.929.550.628,74	96,95	928.389.238.836,10

Belanja Operasional Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp965.422.077.375,39 dengan realisasi sebesar Rp.935.929.550.628,74 atau 96,95%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi



peningkatan realisasi sebesar Rp7.540.311.792,64 atau naik 0,81% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp928.389.238.836,10 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.18. Rincian Belanja Operasi Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	495.892.458.089,00	465.147.119.027,00	93,80	462.005.443.318,00
Belanja Barang	461.554.619.286,39	459.683.831.601,74	99,60	455.263.747.518,10
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	2.442.348.000,00
Belanja Hibah	7.975.000.000,00	11.098.600.000,00	139,17	7.645.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.032.500.000,00
Jumlah	965.422.077.375,39	935.929.550.628,74	96,95	928.389.238.836,10

1) Belanja Pegawai

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
495.892.458.089,00	465.147.119.027,00	93,80	462.005.443.318,00

Belanja Pegawai Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp495.892.458.089,00 dengan realisasi sebesar Rp465.147.119.027,00 atau 93,80%.Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan tingkatan realisasi sebesar Rp3.141.675.709,00 atau naik 0,68% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp462.005.443.318,00

Tabel 5.1.19. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	273.918.619.444,00	249.453.369.429,00	91,07
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	208.675.222.000,00	204.543.049.250,00	98,02
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.994.520.000,00	5.526.600.000,00	69,13
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.500.000.000,00	2.790.666.659,00	186,04
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.993.092.245,00	1.935.860.656,00	97,13
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.811.004.400,00	897.573.033,00	49,56
Jumlah	495.892.458.089,00	465.147.119.027,00	93,80

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut :



a) **Belanja Gaji dan Tunjangan**

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118.474.242.649,00	104.523.725.063,00	88,22
Dinas Kesehatan	23.515.517.700,00	23.053.024.948,00	98,03
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	16.670.130.700,00	16.537.756.499,00	99,21
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.391.792.070,00	4.663.671.997,00	86,50
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.468.576.320,00	1.411.997.020,00	96,15
Satuan Polisi Pamong Praja	3.157.210.140,00	2.917.041.219,00	92,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.098.771.640,00	1.919.587.685,00	91,46
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	618.036.240,00	574.671.982,00	92,98
Dinas Sosial	1.394.339.860,00	1.007.764.602,00	72,28
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.844.364.480,00	1.663.723.635,00	90,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.625.713.740,00	1.815.709.589,00	111,69
Dinas Lingkungan Hidup	2.287.961.460,00	2.284.729.676,00	99,86
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.976.203.140,00	1.814.780.514,00	91,83
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.851.755.540,00	1.583.680.598,00	85,52
Dinas Perhubungan	6.042.664.000,00	4.994.007.805,00	82,65
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.183.814.518,00	2.103.361.626,00	96,32
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.821.782.500,00	2.788.271.258,00	98,81
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.075.549.360,00	1.930.593.367,00	93,02
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.498.005.940,00	1.471.137.752,00	98,21
Dinas Perikanan	2.033.029.440,00	1.783.368.302,00	87,72
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.668.879.240,00	4.381.272.466,00	93,84
Dinas Perdagangan	2.920.169.880,00	2.499.839.777,00	85,61
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.994.029.600,00	10.272.587.170,00	79,06
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.513.000,00	167.050.396,00	93,06
Sekretariat Daerah	9.044.244.340,00	8.449.257.384,00	93,42
Sekretariat DPRD	2.467.912.340,00	2.475.461.216,00	100,31
Kecamatan Dumai Barat	2.655.101.840,00	2.503.266.452,00	94,28
Kecamatan Dumai Timur	2.960.420.280,00	2.753.292.761,00	93,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.381.696.840,00	3.116.758.573,00	92,17
Kecamatan Medang Kampai	2.935.068.920,00	2.586.230.346,00	88,11
Kecamatan Sungai Sembilan	3.122.530.180,00	2.884.929.526,00	92,39
Kecamatan Dumai Kota	3.416.472.360,00	3.057.198.911,00	89,48
Kecamatan Dumai Selatan	3.221.034.220,00	2.949.183.708,00	91,56
Inspektorat	2.419.434.310,00	2.935.939.371,00	121,35
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.092.177.010,00	2.006.628.014,00	95,91
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.900.066.507,00	9.728.900.512,00	98,27
Badan Pendapatan Daerah	4.875.794.040,00	4.452.031.622,00	91,31
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	1.634.613.100,00	1.390.936.087,00	85,09



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Pelatihan			
Jumlah	273.918.619.444,00	249.453.369.429,00	91,07

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.583.702.000,00	105.227.406.100,00	92,64
Dinas Kesehatan	12.196.800.000,00	12.204.290.000,00	100,06
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	10.732.800.000,00	12.496.680.000,00	116,43
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.522.000.000,00	3.441.210.000,00	97,71
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.118.400.000,00	1.132.400.000,00	101,25
Satuan Polisi Pamong Praja	2.344.200.000,00	2.460.507.700,00	104,96
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.455.600.000,00	1.479.836.000,00	101,67
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	435.600.000,00	463.790.000,00	106,47
Dinas Sosial	1.009.200.000,00	879.400.000,00	87,14
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.375.200.000,00	1.418.620.000,00	103,16
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.426.800.000,00	1.638.707.500,00	114,85
Dinas Lingkungan Hidup	1.770.000.000,00	1.859.300.000,00	105,05
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.554.000.000,00	1.589.250.000,00	102,27
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.378.800.000,00	1.416.100.000,00	102,71
Dinas Perhubungan	3.514.800.000,00	3.249.965.000,00	92,47
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.624.800.000,00	1.720.500.000,00	105,89
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.960.800.000,00	2.292.100.000,00	116,90
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.510.800.000,00	1.566.060.000,00	103,66
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.058.400.000,00	1.114.940.000,00	105,34
Dinas Perikanan	1.458.000.000,00	1.429.500.000,00	98,05
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.976.000.000,00	3.114.400.000,00	104,65
Dinas Perdagangan	1.873.200.000,00	1.888.015.000,00	100,79
Sekretariat Daerah	6.220.800.000,00	6.411.556.250,00	103,07
Sekretariat DPRD	1.628.400.000,00	1.768.300.000,00	108,59
Kecamatan Dumai Barat	1.861.200.000,00	1.989.700.000,00	106,90
Kecamatan Dumai Timur	2.102.400.000,00	2.241.000.000,00	106,59
Kecamatan Bukit Kapur	2.287.200.000,00	2.388.300.000,00	104,42
Kecamatan Medang Kampai	1.956.000.000,00	1.907.500.000,00	97,52



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.226.000.000,00	2.390.860.000,00	107,41
Kecamatan Dumai Kota	2.326.800.000,00	2.386.620.700,00	102,57
Kecamatan Dumai Selatan	2.212.800.000,00	2.307.880.000,00	104,30
Inspektorat	2.696.800.000,00	3.375.050.000,00	125,15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.642.800.000,00	1.714.800.000,00	104,38
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.389.720.000,00	7.304.745.000,00	98,85
Badan Pendapatan Daerah	3.026.400.000,00	3.148.480.000,00	104,03
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.218.000.000,00	1.125.280.000,00	92,39
Jumlah	208.675.222.000,00	204.543.049.250,00	98,02

c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.056.000.000,00	4.725.000.000,00	66,96
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	338.520.000,00	201.600.000,00	59,55
Jumlah	7.994.520.000,00	5.526.600.000,00	69,13

d) Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Badan Pendapatan Daerah	1.500.000.000,00	2.790.666.659,00	186,04
Jumlah	1.500.000.000,00	2.790.666.659,00	186,04

e) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Perhubungan	37.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.760.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.949.832.245,00	1.935.860.656,00	99,28
Jumlah	1.993.092.245,00	1.935.860.656,00	97,13

f) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Kesehatan	13.640.000,00	11.625.000,00	85,23



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	318.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.975.000,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.275.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	45.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.035.000.000,00	371.938.033,00	35,94
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	720.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	600.497.500,00	453.750.000,00	75,56
Dinas Perikanan	22.500.000,00	16.875.000,00	75,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	35.750.000,00	28.385.000,00	79,40
Sekretariat Daerah	3.828.900,00	0,00	0,00
Jumlah	1.811.004.400,00	897.573.033,00	49,12

Rincian Belanja Pegawai per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.1.20. Rincian Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2018

SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	232.057.944.649	209.751.131.163	90,39
Dinas Kesehatan	35.725.957.700,00	35.268.939.948,00	98,72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.928.792.070,00	8.119.881.997,00	90,94
Dinas Perhubungan	10.629.964.000,00	8.615.910.838,00	81,05
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.586.349.360,00	3.496.653.367,00	97,50
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.607.951.320,00	2.544.397.020,00	97,56
Badan Pendapatan Daerah	11.352.026.285,00	12.327.038.937,00	108,59
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.235.839.480,00	3.082.343.635,00	95,26
Dinas Sosial	2.403.539.860,00	1.887.164.602,00	78,52
Dinas Perdagangan	4.829.119.880,00	4.416.239.777,00	91,45
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.809.334.518,00	3.823.861.626,00	100,38
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.530.203.140,00	3.404.030.514,00	96,43
Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	7.652.139.240,00	7.495.672.466,00	97,96
Dinas Perikanan	3.513.529.440,00	3.229.743.302,00	91,92
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.734.977.010,00	3.721.428.014,00	99,64
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.230.555.540,00	2.999.780.598,00	92,86
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.852.613.100,00	2.516.216.087,00	88,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.052.513.740,00	3.454.417.089,00	113,17



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Satuan Polisi Pamong Praja	5.501.410.140,00	5.377.548.919,00	97,75
Dinas Lingkungan Hidup	4.102.961.460,00	4.144.029.676,00	101,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.053.636.240,00	1.038.461.982,00	98,56
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.556.405.940,00	2.586.077.752,00	101,16
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.383.080.000,00	5.534.121.258,00	102,81
KDH-WKDH	779.513.000,00	767.050.396,00	98,40
Sekretariat Daerah	15.268.873.240,00	14.860.813.634,00	97,33
DPRD	20.050.029.600,00	14.997.587.170,00	74,80
Sekretariat Dewan	4.434.832.340,00	4.445.361.216,00	100,24
RSUD	27.402.930.700,00	29.034.436.499,00	105,95
Inspektorat	5.116.234.310,00	6.310.989.371,00	123,35
Kecamatan Dumai Timur	5.062.820.280,00	4.994.292.761,00	98,65
Kecamatan Dumai Barat	4.516.301.840,00	4.492.966.452,00	99,48
Kecamatan Bukit Kapur	5.668.896.840,00	5.505.058.573,00	97,11
Kecamatan Medang Kampai	4.891.068.920,00	4.493.730.346,00	91,88
Kecamatan Sungai Sembilan	5.348.530.180,00	5.275.789.526,00	98,64
Kecamatan Dumai Kota	5.743.272.360,00	5.443.819.611,00	94,79
Kecamatan Dumai Selatan	5.433.834.220,00	5.257.063.708,00	96,75
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.554.689.640,00	3.399.423.685,00	95,63
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.289.786.507,00	17.033.645.512,00	98,52
Jumlah	495.892.458.089,00	465.147.119.027,00	93,80

2) Belanja Barang

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
461.554.619.286,39	459.683.831.601,74	99,59	455.263.747.518,10

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp461.554.619.286,39 dengan realisasi sebesar Rp459.683.831.601,74 atau 99,59%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp4.420.084.083,64 atau naik 0,97% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp455.263.747.518,10.

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Tabel 5.1.21. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	18.921.920.569,71	16.435.975.774,00	86,86



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Belanja Bahan/Material	20.307.703.219,00	18.389.074.575,00	90,55
Belanja Jasa Kantor	123.134.728.174,00	119.283.443.625,00	96,87
Belanja Premi Asuransi	9.989.939.123,00	15.504.024.491,00	155,20
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.300.742.155,00	11.991.920.836,00	73,57
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.219.068.125,00	10.607.821.600,00	80,25
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.321.929.000,00	2.222.806.418,00	66,91
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.492.819.775,00	1.577.224.967,00	63,27
Belanja Sewa Alat Berat	5.753.000.000,00	5.683.593.000,00	98,79
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.086.603.495,00	1.905.888.590,00	61,75
Belanja Makanan dan Minuman	23.345.866.882,00	18.170.686.339,00	77,83
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	432.900.000,00	418.970.000,00	96,78
Belanja Pakaian Kerja	1.338.681.738,00	1.183.908.000,00	88,44
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.470.850.000,00	3.235.518.000,00	93,22
Belanja Perjalanan Dinas	62.694.484.768,96	57.276.754.451,00	91,36
Belanja Pemeliharaan	10.249.580.775,00	8.097.839.585,00	79,01
Belanja Jasa Konsultansi	10.603.161.773,00	9.180.788.025,00	86,59
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.594.270.000,00	5.004.466.450,00	28,44
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	204.500.000,00	173.000.000,00	84,60
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.117.450.717,72	2.966.456.000,00	72,05
Belanja Honorarium Non Pegawai	7.100.000,00	2.300.000,00	32,39
Belanja Honorarium PNS	63.752.312.600,00	72.504.693.516,00	113,73
Belanja Honorarium Non PNS	8.163.480.500,00	6.568.924.580,00	80,47
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	2.689.611.952,00	0,00
Belanja Barang Dana BOS	0,00	24.202.746.349,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.051.525.896,00	44.405.394.478,74	113,71
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hadiah Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat - Alat Persediaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	461.554.619.286,39	459.683.831.601,74	99,59

Rincian Belanja Barang dan jasa per Akun Belanja dapat dilihat pada :



a) Belanja Bahan Pakai Habis

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.536.244.380,00	2.375.288.330,00	93,65
Dinas Kesehatan	1.110.481.375,00	919.926.191,00	82,84
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	815.187.450,00	727.516.737,00	89,25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.541.533.300,00	1.141.310.377,00	74,04
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.516.874.125,88	1.347.982.695,00	88,87
Satuan Polisi Pamong Praja	121.579.900,00	116.400.100,00	95,74
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.255.000,00	83.808.000,00	92,86
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	157.447.650,00	153.493.050,00	97,49
Dinas Sosial	192.669.286,00	184.707.675,00	95,87
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	159.644.850,00	158.383.250,00	99,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	209.155.325,00	193.668.446,00	92,60
Dinas Lingkungan Hidup	703.517.942,00	672.367.173,00	95,57
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	488.277.260,00	462.746.971,00	94,77
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	124.936.013,00	114.127.500,00	91,35
Dinas Perhubungan	482.067.546,00	413.194.066,00	85,71
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	248.113.330,00	206.705.285,00	83,31
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	271.300.084,00	253.091.938,00	93,29
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	137.063.730,00	136.659.772,00	99,71
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	108.815.350,00	106.095.200,00	97,50
Dinas Perikanan	381.782.200,00	356.305.600,00	93,33
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	484.983.800,00	462.806.850,00	95,43
Dinas Perdagangan	191.218.225,00	169.777.900,00	88,79
Sekretariat Daerah	2.524.782.790,00	1.613.959.255,00	63,92
Sekretariat DPRD	482.139.600,00	456.442.697,00	94,67
Kecamatan Dumai Barat	222.575.950,00	222.475.000,00	99,95
Kecamatan Dumai Timur	165.701.305,00	158.324.992,00	95,55
Kecamatan Bukit Kapur	250.848.940,00	248.760.940,00	99,17
Kecamatan Medang Kampai	166.910.000,00	159.925.775,00	95,82
Kecamatan Sungai Sembilan	232.999.176,00	232.953.300,00	99,98
Kecamatan Dumai Kota	174.631.650,00	167.557.700,00	95,95
Kecamatan Dumai Selatan	224.416.736,00	222.283.532,00	99,05
Inspektorat	238.775.489,00	221.833.950,00	92,90
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	371.951.650,83	366.690.700,00	98,59
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	627.076.161,00	521.467.167,00	83,16
Badan Pendapatan Daerah	797.144.800,00	747.143.650,00	93,73



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	368.818.200,00	339.794.010,00	92,13
Jumlah	18.921.920.569,71	16.435.975.774,00	86,86

b) Belanja Bahan/Material

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	705.772.919,00	620.033.079,00	87,85
Dinas Kesehatan	5.413.475.000,00	5.116.159.467,00	94,51
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.079.417.050,00	4.050.574.717,00	99,29
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.253.450.795,00	5.044.507.712,00	80,67
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	366.064.395,00	61.599.600,00	16,83
Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.210.300,00	310.000,00	1,53
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	22.100.000,00	18.850.000,00	85,29
Dinas Sosial	44.886.000,00	26.878.550,00	59,88
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	104.215.750,00	104.215.750,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.610.000,00	39.900.000,00	95,89
Dinas Lingkungan Hidup	345.425.700,00	331.298.200,00	95,91
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	182.050.000,00	172.944.000,00	95,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	148.368.200,00	107.550.000,00	72,49
Dinas Perhubungan	541.818.460,00	531.418.000,00	98,08
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.530.400,00	112.968.500,00	89,99
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.450.000,00	6.315.750,00	97,92
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	63.797.500,00	59.552.500,00	93,35
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
Dinas Perikanan	49.928.900,00	49.928.900,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	345.665.350,00	691.859.850,00	200,15
Dinas Perdagangan	8.500.000,00	8.205.000,00	96,53
Sekretariat Daerah	484.015.000,00	402.257.000,00	83,11
Sekretariat DPRD	64.000.000,00	24.500.000,00	38,28
Kecamatan Dumai Barat	76.300.000,00	76.300.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	111.090.000,00	111.090.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	43.150.000,00	43.150.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	68.624.000,00	68.624.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	92.350.000,00	90.550.000,00	98,05



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Kecamatan Dumai Kota	120.050.000,00	120.050.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	144.575.000,00	129.225.000,00	89,38
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.000.000,00	40.533.000,00	88,12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	44.800.000,00	22.280.000,00	49,73
Badan Pendapatan Daerah	63.000.000,00	54.846.000,00	87,06
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	62.312.500,00	31.900.000,00	51,19
Jumlah	20.307.703.219,00	18.389.074.575,00	90,55

c) Belanja Jasa Kantor

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.744.027.000,00	18.904.462.728,00	148,34
Dinas Kesehatan	9.100.503.600,00	8.695.008.154,00	95,54
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	13.701.858.000,00	12.747.087.068,00	93,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.006.205.643,00	4.681.971.127,00	77,95
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.709.752.800,00	11.167.309.941,00	104,27
Satuan Polisi Pamong Praja	1.033.320.000,00	945.390.147,00	91,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	483.374.800,00	237.093.973,00	49,05
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	420.080.000,00	405.440.053,00	96,51
Dinas Sosial	904.176.209,00	792.774.187,00	87,68
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	909.840.000,00	764.954.340,00	84,08
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	725.595.000,00	637.506.201,00	87,86
Dinas Lingkungan Hidup	7.851.936.800,00	8.267.402.198,00	105,29
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	934.761.200,00	790.533.942,00	84,57
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	939.605.000,00	905.418.130,00	96,36
Dinas Perhubungan	7.309.500.000,00	6.514.128.342,00	89,12
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.333.705.000,00	1.226.139.016,00	91,93
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.434.192.940,00	960.184.530,00	66,95
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	971.494.556,00	864.752.378,00	89,01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	798.530.000,00	747.380.637,00	93,59
Dinas Perikanan	1.794.141.801,00	1.544.251.748,00	86,07
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.849.787.500,00	2.918.621.791,00	102,42
Dinas Perdagangan	1.677.329.000,00	1.575.181.983,00	93,91
Sekretariat Daerah	15.229.214.460,00	12.063.378.723,00	79,21
Sekretariat DPRD	3.319.720.000,00	2.596.579.506,00	78,22



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Kecamatan Dumai Barat	1.840.542.000,00	1.823.363.585,00	99,07
Kecamatan Dumai Timur	2.567.612.260,00	2.536.662.467,00	98,79
Kecamatan Bukit Kapur	1.791.679.600,00	1.750.784.925,00	97,72
Kecamatan Medang Kampai	1.145.260.000,00	1.106.569.704,00	96,62
Kecamatan Sungai Sembilan	1.983.378.000,00	1.937.785.924,00	97,70
Kecamatan Dumai Kota	2.284.149.800,00	2.238.544.278,00	98,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.112.644.000,00	2.082.958.993,00	98,59
Inspektorat	337.588.400,00	268.610.700,00	79,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.396.679.200,00	1.006.015.454,00	72,03
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.121.045.605,00	747.011.302,00	66,64
Badan Pendapatan Daerah	2.467.128.000,00	2.037.493.080,00	82,59
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	904.370.000,00	794.692.370,00	87,87
Jumlah	123.134.728.174,00	119.283.443.625,00	96,87

d) Belanja Premi Asuransi

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Kesehatan	8.716.488.447,00	12.585.708.100,00	144,39
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	853.912.590,00	2.626.135.773,00	307,54
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.216.800,00	3.363.120,00	5,16
Satuan Polisi Pamong Praja	10.560.000,00	7.054.788,00	66,81
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.570.800,00	1.008.000,00	64,17
Dinas Perhubungan	30.480.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	145.740.486,00	131.434.510,00	90,18
Sekretariat DPRD	150.000.000,00	133.350.200,00	88,90
Kecamatan Dumai Kota	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
Jumlah	9.989.939.123,00	15.504.024.491,00	155,20

e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102.310.000,00	85.678.400,00	83,74
Dinas Kesehatan	154.500.000,00	146.352.998,00	94,73
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	127.840.000,00	116.056.920,00	90,78
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.838.910.215,00	1.293.016.796,00	70,31
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	375.481.118,00	329.388.440,00	87,72



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Satuan Polisi Pamong Praja	297.300.000,00	274.900.520,00	92,47
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	467.080.000,00	248.285.800,00	53,16
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	67.935.769,00	67.309.900,00	99,08
Dinas Sosial	179.261.750,00	154.585.697,00	86,23
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.940.000,00	83.986.008,00	92,35
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.354.000,00	65.335.000,00	99,97
Dinas Lingkungan Hidup	3.432.322.000,00	3.137.789.185,00	91,42
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.808.500,00	30.931.370,00	47,73
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.220.000,00	79.417.805,00	87,06
Dinas Perhubungan	217.820.000,00	197.174.766,00	90,52
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.835.400,00	78.465.030,00	76,30
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	211.168.400,00	207.892.000,00	98,45
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	147.439.816,00	136.466.900,00	92,56
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.134.000,00	195.813.660,00	84,72
Dinas Perikanan	266.090.000,00	239.603.316,00	90,05
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	186.888.000,00	170.879.251,00	91,43
Dinas Perdagangan	169.830.200,00	153.174.630,00	92,17
Sekretariat Daerah	4.633.834.637,00	2.199.440.135,00	47,46
Sekretariat DPRD	961.720.000,00	743.228.000,00	77,28
Kecamatan Dumai Barat	64.265.000,00	61.757.560,00	96,10
Kecamatan Dumai Timur	120.390.000,00	109.624.644,00	91,06
Kecamatan Bukit Kapur	37.304.000,00	37.304.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	92.843.000,00	92.243.800,00	99,35
Kecamatan Sungai Sembilan	27.026.000,00	24.735.550,00	91,53
Kecamatan Dumai Kota	105.650.850,00	101.683.950,00	96,25
Kecamatan Dumai Selatan	109.652.000,00	88.250.500,00	80,48
Inspektorat	98.912.000,00	97.645.050,00	98,72
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	368.364.000,00	281.704.891,00	76,47
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	210.032.614,00	70,01
Badan Pendapatan Daerah	289.300.000,00	260.160.560,00	89,93
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	203.011.500,00	191.605.190,00	94,38
Jumlah	16.300.742.155,00	11.991.920.836,00	73,57



f) Belanja Cetak dan Pengandaan

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.174.421.835,00	2.418.852.022,00	76,20
Dinas Kesehatan	1.018.829.065,00	708.645.400,00	69,55
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	47.867.500,00	45.340.100,00	94,72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.278.400,00	267.420.900,00	87,89
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	101.679.300,00	56.036.000,00	55,11
Satuan Polisi Pamong Praja	33.091.400,00	29.285.300,00	88,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.755.800,00	14.964.000,00	48,65
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	219.662.050,00	210.030.750,00	95,62
Dinas Sosial	195.015.910,00	171.601.750,00	87,99
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	216.437.400,00	184.008.900,00	85,02
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	194.680.720,00	159.092.450,00	81,72
Dinas Lingkungan Hidup	104.503.020,00	99.271.250,00	94,99
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	382.418.600,00	356.366.000,00	93,19
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	207.642.741,00	201.325.200,00	96,96
Dinas Perhubungan	395.348.110,00	369.990.035,00	93,59
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	112.255.050,00	93.525.450,00	83,32
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	468.423.976,00	363.845.700,00	77,67
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	103.936.760,00	103.314.000,00	99,40
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.693.566,00	43.785.100,00	93,77
Dinas Perikanan	46.765.800,00	41.239.600,00	88,18
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	160.832.700,00	147.917.405,00	91,97
Dinas Perdagangan	121.982.650,00	98.399.650,00	80,67
Sekretariat Daerah	1.979.665.800,00	1.620.778.100,00	81,87
Sekretariat DPRD	701.373.150,00	538.331.071,00	76,75
Kecamatan Dumai Barat	104.013.600,00	104.010.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	81.020.737,00	81.019.735,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	114.035.000,00	114.034.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	86.993.000,00	83.665.400,00	96,17
Kecamatan Sungai Sembilan	51.872.780,00	45.766.000,00	88,23
Kecamatan Dumai Kota	107.231.126,00	101.676.400,00	94,82
Kecamatan Dumai Selatan	107.475.500,00	101.839.582,00	94,76
Inspektorat	149.550.479,00	95.076.400,00	63,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	287.729.000,00	225.142.200,00	78,25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	729.434.000,00	455.568.150,00	62,46
Badan Pendapatan Daerah	810.539.100,00	696.610.100,00	85,94



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	220.612.500,00	160.047.500,00	72,55
Jumlah	13.219.068.125,00	10.607.821.600,00	80,25

g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	401.800.000,00	202.600.000,00	50,42
Dinas Kesehatan	336.500.000,00	184.410.000,00	54,80
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.800.000,00	1.990.000,00	71,07
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.400.000,00	39.900.000,00	94,10
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	54.500.000,00	90,83
Satuan Polisi Pamong Praja	40.000.000,00	20.000.000,00	50,00
Dinas Sosial	13.000.000,00	4.095.000,00	31,50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.600.000,00	50.357.420,00	87,43
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.450.000,00	25.927.500,00	45,13
Dinas Lingkungan Hidup	50.800.000,00	40.000.000,00	78,74
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.000.000,00	20.000.000,00	71,43
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.950.000,00	29.300.000,00	94,67
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	113.215.000,00	62.280.000,00	55,01
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.600.000,00	20.385.000,00	94,38
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	220.190.000,00	212.422.000,00	96,47
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.855.000,00	2.760.000,00	71,60
Dinas Perikanan	27.000.000,00	13.000.000,00	48,15
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	71.371.000,00	35.000.000,00	49,04
Dinas Perdagangan	18.800.000,00	774.000,00	4,12
Sekretariat Daerah	472.438.000,00	255.177.000,00	54,01
Sekretariat DPRD	802.900.000,00	681.459.998,00	84,87
Kecamatan Dumai Barat	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	500.000,00	500.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	33.950.000,00	33.950.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	31.500.000,00	30.500.000,00	96,83
Inspektorat	27.650.000,00	990.000,00	3,58
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	58.700.000,00	34.248.500,00	58,34
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	157.350.000,00	41.820.000,00	26,58



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Badan Pendapatan Daerah	45.600.000,00	33.250.000,00	72,92
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.260.000,00	17.460.000,00	86,18
Jumlah	3.321.929.000,00	2.222.806.418,00	66,91

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	380.980.000,00	262.138.000,00	68,81
Dinas Kesehatan	133.351.875,00	37.426.550,00	28,07
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	31.000.000,00	13.340.800,00	43,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.400.000,00	2.280.000,00	30,81
Satuan Polisi Pamong Praja	9.000.000,00	7.500.000,00	83,33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	93.182.000,00	54.262.000,00	58,23
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.450.000,00	36.349.446,00	61,14
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.200.000,00	33.105.700,00	73,24
Dinas Lingkungan Hidup	31.800.000,00	19.600.000,00	61,64
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.520.000,00	10.080.000,00	74,56
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	62.699.500,00	43.460.380,00	69,32
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.200.000,00	5.529.000,00	60,10
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	69.240.000,00	60.390.000,00	87,22
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.440.000,00	10.220.000,00	76,04
Dinas Perikanan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	188.000.000,00	117.584.980,00	62,55
Dinas Perdagangan	8.400.000,00	2.080.000,00	24,76
Sekretariat Daerah	1.038.702.000,00	767.400.000,00	73,88
Kecamatan Dumai Barat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Inspektorat	8.900.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	77.054.400,00	13.963.611,00	18,12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	134.800.000,00	27.414.500,00	20,34
Jumlah	2.492.819.775,00	1.577.224.967,00	63,27



i) Belanja Sewa Alat Berat

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.753.000.000,00	5.683.593.000,00	98,79
Jumlah	5.753.000.000,00	5.683.593.000,00	98,79

j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.735.000,00	27.110.000,00	78,05
Dinas Kesehatan	117.050.000,00	60.500.000,00	51,69
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	50.200.000,00	15.000.000,00	29,88
Dinas Sosial	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.100.000,00	39.100.000,00	92,87
Dinas Perhubungan	243.000.000,00	3.000.000,00	1,23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.000.000,00	30.719.700,00	99,10
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	77.237.495,00	70.329.750,00	91,06
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	57.210.000,00	45.100.000,00	78,83
Sekretariat Daerah	2.091.136.000,00	1.294.405.000,00	61,90
Sekretariat DPRD	52.700.000,00	52.100.000,00	98,86
Kecamatan Dumai Barat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	6.630.000,00	6.630.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	59.000.000,00	47.000.000,00	79,66
Kecamatan Medang Kampai	16.565.000,00	12.565.000,00	75,85
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	35.200.000,00	32.700.000,00	92,90
Kecamatan Dumai Selatan	18.120.000,00	18.020.000,00	99,45
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.560.000,00	32.649.140,00	94,47
Badan Pendapatan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22.260.000,00	21.060.000,00	94,61
Jumlah	3.086.603.495,00	1.905.888.590,00	61,75

k) Belanja Makanan dan Minuman

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.514.417.000,00	1.261.169.800,00	83,28
Dinas Kesehatan	2.087.098.000,00	1.482.133.800,00	71,01



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.476.440.000,00	2.282.884.630,00	92,18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.003.882.000,00	696.690.909,00	69,40
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	188.857.000,00	109.697.000,00	58,08
Satuan Polisi Pamong Praja	350.123.000,00	315.753.000,00	90,18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	542.013.600,00	214.670.000,00	39,61
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	164.952.500,00	113.110.500,00	68,57
Dinas Sosial	211.229.000,00	144.319.000,00	68,32
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	174.345.000,00	137.995.000,00	79,15
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	265.059.060,00	254.550.750,00	96,04
Dinas Lingkungan Hidup	235.185.000,00	167.779.000,00	71,34
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.535.000,00	59.210.000,00	71,74
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	556.412.272,00	414.950.000,00	74,58
Dinas Perhubungan	764.595.000,00	701.465.000,00	91,74
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	207.674.550,00	157.508.350,00	75,84
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	219.030.000,00	160.137.600,00	73,11
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	509.648.800,00	467.028.050,00	91,64
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.600.000,00	59.031.000,00	88,64
Dinas Perikanan	44.990.000,00	33.000.000,00	73,35
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	305.626.000,00	248.054.750,00	81,16
Dinas Perdagangan	27.034.600,00	11.302.500,00	41,81
Sekretariat Daerah	5.124.402.000,00	3.892.913.300,00	75,97
Sekretariat DPRD	2.603.111.000,00	1.913.656.000,00	73,51
Kecamatan Dumai Barat	232.555.000,00	232.555.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	215.639.000,00	203.369.500,00	94,31
Kecamatan Bukit Kapur	289.810.000,00	289.810.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	266.625.000,00	266.570.000,00	99,98
Kecamatan Sungai Sembilan	201.220.000,00	201.220.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	243.790.000,00	228.020.000,00	93,53
Kecamatan Dumai Selatan	254.840.000,00	237.372.900,00	93,15
Inspektorat	184.390.000,00	99.094.000,00	53,74
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	559.310.500,00	302.697.500,00	54,12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	427.515.000,00	323.063.000,00	75,57
Badan Pendapatan Daerah	558.627.000,00	376.087.000,00	67,32
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	186.285.000,00	111.817.500,00	60,02
Jumlah	23.345.866.882,00	18.170.686.339,00	77,83



l) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Satuan Polisi Pamong Praja	18.000.000,00	17.700.000,00	98,33
Sekretariat Daerah	149.400.000,00	136.400.000,00	91,30
Sekretariat DPRD	265.500.000,00	264.870.000,00	99,76
Jumlah	432.900.000,00	418.970.000,00	96,78

m) Belanja Pakaian Kerja

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.180.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	240.320.000,00	216.708.000,00	90,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.998.250,00	152.680.000,00	96,03
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	44.262.200,00	34.589.000,00	78,15
Satuan Polisi Pamong Praja	115.150.000,00	106.818.000,00	92,76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.140.000,00	34.336.000,00	37,27
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Dinas Sosial	66.400.000,00	66.200.000,00	99,70
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	164.274.288,00	163.720.000,00	99,66
Dinas Perhubungan	34.500.000,00	34.408.000,00	99,73
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.750.000,00	1.540.000,00	88,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.712.000,00	4.400.000,00	65,55
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.000.000,00	10.694.000,00	66,84
Dinas Perdagangan	20.350.000,00	16.550.000,00	81,33
Sekretariat Daerah	232.390.000,00	223.450.000,00	96,15
Sekretariat DPRD	32.900.000,00	18.800.000,00	57,14
Kecamatan Bukit Kapur	600.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	3.600.000,00	3.360.000,00	93,33
Kecamatan Dumai Selatan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.400.000,00	35.900.000,00	98,63
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.455.000,00	14.455.000,00	100,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
Jumlah	1.338.681.738,00	1.183.908.000,00	88,44



n) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.907.570.000,00	1.799.143.000,00	94,32
Dinas Kesehatan	119.500.000,00	118.925.000,00	99,52
Dinas Sosial	22.000.000,00	21.880.000,00	99,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.750.000,00	15.475.000,00	98,25
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.225.000,00	24.075.000,00	99,38
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	19.400.000,00	97,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	278.180.000,00	245.610.000,00	88,29
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	145.475.000,00	113.425.000,00	77,97
Sekretariat Daerah	788.100.000,00	740.565.000,00	93,97
Sekretariat DPRD	60.000.000,00	59.970.000,00	99,95
Kecamatan Dumai Barat	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	23.000.000,00	13.500.000,00	58,70
Inspektorat	3.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.470.850.000,00	3.235.518.000,00	93,22

o) Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.240.105.592,00	3.043.671.833,00	93,94
Dinas Kesehatan	2.745.649.950,00	2.365.449.587,00	86,15
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	750.500.000,00	748.266.000,00	99,70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.012.278.974,96	1.903.020.966,00	94,57
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.198.430.779,00	1.139.012.147,00	95,04
Satuan Polisi Pamong Praja	753.780.000,00	627.271.523,00	83,22
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	521.060.000,00	405.726.375,00	77,87
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	655.102.100,00	612.591.057,00	93,51
Dinas Sosial	769.538.300,00	747.071.570,00	97,08
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	640.960.000,00	572.324.162,00	89,29
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	818.596.000,00	780.180.392,00	95,31



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Lingkungan Hidup	1.064.812.163,00	1.003.985.799,00	94,29
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	976.996.000,00	975.434.506,00	99,84
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.142.956.900,00	922.676.609,00	80,73
Dinas Perhubungan	381.565.176,00	381.477.397,00	99,98
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.153.313.435,00	1.059.880.610,00	91,90
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.090.200.000,00	1.652.258.035,00	79,05
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	851.459.821,00	818.975.265,00	96,18
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	461.276.000,00	437.741.084,00	94,90
Dinas Perikanan	504.154.500,00	468.054.581,00	92,84
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.448.822.250,00	2.424.490.988,00	99,01
Dinas Perdagangan	837.603.000,00	851.929.833,00	101,71
Sekretariat Daerah	10.187.415.135,00	9.349.047.204,00	91,77
Sekretariat DPRD	11.117.040.250,00	9.706.857.931,00	87,32
Kecamatan Dumai Barat	267.886.000,00	266.357.401,00	99,43
Kecamatan Dumai Timur	208.650.000,00	208.086.129,00	99,73
Kecamatan Bukit Kapur	163.778.060,00	163.625.303,00	99,91
Kecamatan Medang Kampai	251.900.000,00	250.269.450,00	99,35
Kecamatan Sungai Sembilan	185.845.000,00	185.707.233,00	99,93
Kecamatan Dumai Kota	251.745.000,00	251.509.700,00	99,91
Kecamatan Dumai Selatan	252.995.348,00	252.753.603,00	99,90
Inspektorat	2.213.030.500,00	2.079.086.000,00	93,95
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.430.284.629,00	3.160.971.998,00	92,15
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.674.357.106,00	3.425.522.141,00	93,23
Badan Pendapatan Daerah	3.285.237.500,00	2.859.665.310,00	87,05
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.185.159.300,00	1.175.804.729,00	99,21
Jumlah	62.694.484.768,96	57.276.754.451,00	91,36

p) Belanja Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.440.000,00	160.755.000,00	94,87
Dinas Kesehatan	167.000.000,00	153.242.000,00	91,76
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.305.438.000,00	2.273.140.250,00	98,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271.158.450,00	254.182.000,00	93,74
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	80.808.000,00	48.433.000,00	59,94
Satuan Polisi Pamong Praja	28.250.000,00	24.250.000,00	85,84
Badan Penanggulangan	10.700.000,00	3.145.000,00	29,39



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Bencana Daerah			
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	23.500.000,00	11.795.000,00	50,19
Dinas Sosial	138.000.000,00	137.400.000,00	99,57
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	164.100.000,00	116.377.000,00	70,92
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.350.000,00	26.350.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	95.204.000,00	64.000.000,00	67,22
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.000.000,00	87.900.000,00	99,89
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	207.554.350,00	197.980.000,00	95,39
Dinas Perhubungan	418.050.000,00	413.354.200,00	98,88
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.225.000,00	16.400.000,00	56,12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.400.000,00	72.190.000,00	83,55
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	89.540.000,00	89.315.000,00	99,75
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.805.000,00	16.805.000,00	100,00
Dinas Perikanan	195.938.725,00	172.740.000,00	88,16
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	251.900.000,00	250.439.930,00	99,42
Dinas Perdagangan	47.615.000,00	28.215.000,00	59,26
Sekretariat Daerah	3.132.849.500,00	1.694.220.365,00	54,08
Sekretariat DPRD	335.258.000,00	186.680.040,00	55,68
Kecamatan Dumai Barat	114.800.000,00	105.159.000,00	91,60
Kecamatan Dumai Timur	10.532.500,00	9.525.000,00	90,43
Kecamatan Bukit Kapur	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	47.676.000,00	47.630.000,00	99,90
Kecamatan Sungai Sembilan	98.170.000,00	95.652.000,00	97,44
Kecamatan Dumai Kota	29.700.000,00	29.605.000,00	99,68
Kecamatan Dumai Selatan	73.600.000,00	73.257.000,00	99,53
Inspektorat	58.500.000,00	57.665.000,00	98,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	284.350.000,00	230.404.000,00	81,03
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	291.668.250,00	208.878.000,00	71,61
Badan Pendapatan Daerah	603.900.000,00	483.355.800,00	80,04
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	222.600.000,00	222.400.000,00	99,91
Jumlah	10.249.580.775,00	8.097.839.585,00	79,01

q) Belanja Jasa Konsultansi

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.235.217.500,00	1.028.360.000,00	83,25



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Kesehatan	358.086.548,00	453.932.000,00	126,77
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.403.400.000,00	1.127.745.475,00	80,36
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.222.579.625,00	4.537.361.800,00	86,88
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	990.500.000,00	799.126.000,00	80,68
Dinas Sosial	5.520.000,00	5.478.000,00	99,24
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38.800.000,00	38.800.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	136.900.000,00	136.444.000,00	99,67
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.000.000,00	3.740.000,00	62,33
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	160.000.000,00	159.760.000,00	99,85
Dinas Perhubungan	150.000.000,00	148.200.000,00	98,80
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.000.000,00	43.774.000,00	99,49
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	57.700.000,00	57.307.000,00	99,32
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.084.000,00	13.074.000,00	99,92
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	55.568.450,00	48.751.450,00	87,73
Dinas Perdagangan	36.500.000,00	21.467.700,00	58,82
Sekretariat Daerah	549.146.550,00	430.614.000,00	78,42
Kecamatan Dumai Barat	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.000.000,00	18.152.600,00	75,64
Badan Pendapatan Daerah	81.950.000,00	81.850.000,00	99,88
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22.359.100,00	15.000.000,00	67,09
Jumlah	10.603.161.773,00	9.180.788.025,00	86,59

r) Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.060.000.000,00	984.052.500,00	92,84
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.556.000.000,00	2.745.500.000,00	18,86
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	109.590.000,00	82.490.000,00	75,27
Dinas Perikanan	100.000.000,00	99.990.000,00	99,99
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	837.435.000,00	585.093.950,00	69,87
Sekretariat Daerah	931.245.000,00	507.340.000,00	54,48
Jumlah	17.594.270.000,00	5.004.466.450,00	28,44



s) **Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	204.500.000,00	173.000.000,00	84,60
Jumlah	204.500.000,00	173.000.000,00	84,60

t) **Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.000.000,00	67.000.000,00	87,01
Dinas Kesehatan	76.000.000,00	22.384.000,00	29,45
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	972.500.000,00	959.455.000,00	98,66
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.000.000,00	102.500.000,00	51,77
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	81.803.717,72	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	45.500.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.500.000,00	13.500.000,00	24,77
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00	22.500.000,00	56,25
Dinas Sosial	24.250.000,00	18.000.000,00	74,23
Dinas Lingkungan Hidup	201.000.000,00	83.000.000,00	41,29
Dinas Perhubungan	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.000.000,00	31.500.000,00	36,63
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.000.000,00	54.000.000,00	66,67
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	174.000.000,00	128.670.000,00	73,95
Dinas Perdagangan	78.700.000,00	17.370.000,00	22,07
Sekretariat Daerah	47.400.000,00	45.000.000,00	94,94
Sekretariat DPRD	540.000.000,00	436.500.000,00	80,83
Inspektorat	66.700.000,00	63.480.000,00	95,17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.000.000,00	5.000.000,00	20,83
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	242.700.000,00	198.950.000,00	81,97
Badan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	197.450.000,00	49,36
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	543.397.000,00	437.197.000,00	80,46
Jumlah	4.117.450.717,72	2.966.456.000,00	72,05



u) Belanja Honorarium Non Pegawai

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Satuan Polisi Pamong Praja	4.900.000,00	2.300.000,00	46,94
Sekretariat Daerah	2.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	7.100.000,00	2.300.000,00	32,39

v) Belanja Honorarium PNS

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.875.979.000,00	2.522.366.000,00	87,70
Dinas Kesehatan	11.062.108.600,00	10.277.474.730,00	92,91
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	28.948.600.000,00	42.335.447.852,00	146,24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.438.400.000,00	1.285.500.000,00	89,37
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	410.860.000,00	241.870.000,00	58,87
Satuan Polisi Pamong Praja	883.080.000,00	826.045.000,00	93,54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	242.600.000,00	144.400.000,00	59,52
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.437.300.000,00	1.391.600.000,00	96,82
Dinas Sosial	643.920.000,00	573.500.000,00	89,06
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	255.400.000,00	248.550.000,00	97,32
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205.130.000,00	198.450.000,00	96,74
Dinas Lingkungan Hidup	380.280.000,00	295.530.000,00	77,71
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	612.050.000,00	517.700.000,00	84,58
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	226.175.000,00	195.146.500,00	86,28
Dinas Perhubungan	408.450.000,00	394.640.000,00	96,62
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	283.880.000,00	276.130.000,00	97,27
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	678.210.000,00	349.710.000,00	51,56
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	260.270.000,00	238.770.000,00	91,74
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	111.250.000,00	109.000.000,00	97,98
Dinas Perikanan	106.760.000,00	86.180.000,00	80,72
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	380.655.000,00	370.485.000,00	97,33
Dinas Perdagangan	280.070.000,00	208.800.000,00	74,55
Sekretariat Daerah	3.137.195.000,00	2.749.245.100,00	87,63
Sekretariat DPRD	600.000.000,00	441.100.000,00	73,52
Kecamatan Dumai Barat	43.750.000,00	43.750.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Kecamatan Dumai Timur	37.300.000,00	37.300.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	57.800.000,00	57.700.000,00	99,83
Kecamatan Medang Kampai	48.850.000,00	48.850.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	45.500.000,00	45.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	85.450.000,00	84.050.000,00	98,36
Kecamatan Dumai Selatan	94.900.000,00	87.700.000,00	92,41
Inspektorat	593.010.000,00	374.940.000,00	63,23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.546.120.000,00	1.168.050.000,00	75,55
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.982.350.000,00	2.440.800.000,00	81,84
Badan Pendapatan Daerah	1.756.940.000,00	1.470.603.334,00	83,70
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	591.720.000,00	367.810.000,00	62,16
Jumlah	63.752.312.600,00	72.504.693.516,00	113,73

w) Belanja Honorarium Non PNS

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.190.682.000,00	2.013.026.080,00	91,89
Dinas Kesehatan	674.600.000,00	571.100.000,00	84,66
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.535.540.000,00	1.064.455.000,00	69,32
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.000.000,00	161.200.000,00	99,51
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	36.700.000,00	22.800.000,00	62,13
Satuan Polisi Pamong Praja	170.700.000,00	161.457.500,00	94,59
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156.000.000,00	142.400.000,00	91,28
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	62.100.000,00	55.900.000,00	90,02
Dinas Sosial	497.118.500,00	390.285.500,00	78,51
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.100.000,00	44.700.000,00	94,90
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68.400.000,00	37.900.000,00	55,41
Dinas Lingkungan Hidup	40.300.000,00	36.700.000,00	91,07
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	353.800.000,00	86.800.000,00	24,53
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.400.000,00	23.700.000,00	80,61
Dinas Perhubungan	75.100.000,00	69.650.000,00	92,74
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.275.000,00	91.225.000,00	89,20
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.850.000,00	18.500.000,00	58,08
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.200.000,00	18.200.000,00	90,10



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
Dinas Perikanan	167.200.000,00	162.800.000,00	97,37
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.800.000,00	41.200.000,00	91,96
Dinas Perdagangan	72.000.000,00	64.600.000,00	89,72
Sekretariat Daerah	650.915.000,00	596.315.000,00	91,61
Sekretariat DPRD	286.300.000,00	212.400.000,00	74,19
Kecamatan Dumai Barat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	11.075.000,00	10.275.000,00	92,78
Kecamatan Dumai Selatan	11.875.000,00	10.275.000,00	86,53
Inspektorat	12.600.000,00	12.200.000,00	96,83
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	185.800.000,00	158.200.000,00	85,15
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.500.000,00	51.200.000,00	93,94
Badan Pendapatan Daerah	335.100.000,00	169.610.500,00	50,61
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	33.500.000,00	25.900.000,00	77,31
Jumlah	8.163.480.500,00	6.568.924.580,00	80,47

x) Honorarium Pengelola Dana Bos

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.689.611.952,00	0,00
Jumlah	0,00	2.689.611.952,00	0,00

y) Belanja Barang Dana Bos

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Bos SD	0,00	17.622.829.784,00	0,00
Bos SMP	0,00	6.596.338.565,00	0,00
Jumlah	0,00	24.219.168.349,00	0,00

Adapun Rincian Belanja BLUD Tahun 2018 sebagai berikut:

Uraian	BLUD RSUD (Rp)	BLUD Puskesmas (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa Kantor	3.710.598.390,30	2.179.832.634,00	5.890.431.024,30
Belanja Persediaan	31.395.538.709,00	1.630.940.850,00	33.026.479.559,00
Belanja Pemeliharaan	4.858.882.412,00	188.148.659,00	5.047.031.071,00



Uraian	BLUD RSUD (Rp)	BLUD Puskesmas (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	224.499.100,00	205.481.018,00	429.980.118,00
Belanja Lain-lain	11.472.706,44	0,00	11.472.706,44
Jumlah Total			44.405.394.478,74

3) Belanja Subsidi

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
0,00	0,00	0,00	2.442.348.000,00

Belanja Subsidi Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp2.442.348.000,00 dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2.442.348.000,00.

4) Belanja Hibah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
7.975.000.000,00	11.098.600.000,00	139,17	7.645.200.000,00

Belanja Hibah Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp7.975.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.098.600.000,00 atau 139,17%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp3.453.400.000,00 atau 45,17% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp7.645.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.22. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	6.025.000.000,00	9.193.600.000,00	152,59	7.645.200.000,00
Kelompok/Anggota Masyarakat	1.950.000.000,00	1.905.000.000,00	97,69	0,00
Jumlah	7.975.000.000,00	11.098.600.000,00	139,17	7.645.200.000,00

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 305/BPKAD/2018 Tentang Penunjukkan Penerima Hibah Dan Besaran Uang Yang Dihilahkan Tahun 2018. Rincian penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan tahun 2018 sebagai mana lampiran sebagai berikut:

Tabel 5.1.23. Rincian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilahkan (Rp)
Komisi Pemilihan Umum	Jl. HR. Soebrantas No 135. Dumai	825.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan (Rp)
Majlis Ulama Indonesia Kota Dumai	Jl. HR. Soebrantas Dumai	75.000.000,00
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Dumai	Kantor Wali Kota Dumai	1.350.000.000,00
Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 170	300.000.000,00
Persatuan Mubaligh Dumai Kota Dumai	Jl. HR Soebrantas. Dumai	150.000.000,00
Pramuka Kota Dumai	Jl. Kesehatan Dumai Timur	175.000.000,00
Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kota Dumai	Jl. HR. Soebrantas. Dumai	1.000.000.000,00
Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai Bukit Kapur	100.000.000,00
Komite Reformasi Masyarakat Dumai	Jl. Datuk Laksamana Dumai Kota	200.000.000,00
Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai Bukit Kapur. Dumai	75.000.000,00
Forum Pembauran Kebangsaan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai Kota Dumai	Jl. Jeruk Dumai Kota Dumai	75.000.000,00
Forum Pembauran Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Dumai	Jl. Utama Karya No. 3 Dumai Timur	75.000.000,00
Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Dumai	Jl. HR. Soebrantas. Dumai	100.000.000,00
Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai	Jl. Putri Tujuh Dumai Timur Kota Dumai	350.000.000,00
Komisi Penanggulangan AIDS Kota Dumai	Jl. Kesehatan Dumai Timur. Kota Dumai	75.000.000,00
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai	Jl. Kesehatan Dumai Timur. Kota Dumai	400.000.000,00
Masjid Al Hidayah	Jl. Meranti 2 RT 01 Dumai Selatan Kota Dumai	20.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Pembangunan RT 01 Medang Kampai Dumai	20.000.000,00
Mushollah Al Hidayah	Jl. Wonosari RT 01 Bukit Kapur Dumai	20.000.000,00
Mushollah Al Mutmainnah	Jl. Inpres II. gg Damai RT 20 Bukit Kapur Kota Dumai	20.000.000,00
Masjid Hidayatul Falah	Jl. Anggur Timur RT 22 Dumai Kota. Dumai	20.000.000,00
Masjid Abdullah	Jl. Ahmad Yani. gg Damai Dumai Selatan. Dumai	20.000.000,00
Mushollah Al Muttaqin	Jl. Ratu Sima. gg Mushollah RT 04 Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Masjid Nurul Huda	Jl. Nenas gg. Masjid Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Mushollah Arief Rahman Hakim	Komplek YAKTAPENA. Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Masjid An Nur	Jl. Jaya Indah gg Nurul Wahyu RT 08 Dumai Timur. Dumai	20.000.000,00
Masjid Al Firman	Jl. P. Diponegoro Dumai Kota. Dumai	20.000.000,00
Masjid Al Kausar	Jl. Lestari Medang Kampai. Dumai	20.000.000,00
Masjid Darul Nafis	Jl. Pelajar gg Masjid Darun Nafis Permai Dumai Timur. Dumai	20.000.000,00
Masjid As Sunnah	Jl. Pangkalan Durian RT12 Sungai Sembilan. Dumai	20.000.000,00
Mushollah Nurhadad	Jl. Harapan. Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Masjid Al Ikhsan	Jl. Nuri RT 24 Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Mushollah Nur Hidayah	Jl. Bahtera RT 12 Dumai Barat dumai	20.000.000,00
Mushollah Baitul Ulum	Jl. Rindu Darat RT 22 Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Masjid Hidayatul Islamiyah	Jl. Dermaga Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Masjid Al Makmur	Jl. Cendana Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan (Rp)
Masjid Nurul Yakim	Jl. Tuanku Tambusai RT 07 Dumai Selatan. Dumai	20.000.000,00
Masjid Hidayatul Awam	Jl. Harapan RT 12 Dumai Barat Dumai	20.000.000,00
Mushollah Al Mukmin	Jl. Parit Pisang Mas Dumai Barat. Dumai	20.000.000,00
Mushollah Nurul Huda	Jl. Sempurna gg Fajar Sari Dumai Selatan	20.000.000,00
Mushollah At Taqwa	Jl. Tuanku Tambusai Bukit Kapur. Dumai	20.000.000,00
Masjid Abu Bakar Ash Siddiq	Jl. Nelayan Laut no 001 Dumai Barat Dumai	20.000.000,00
Masjid Mu'awanah	Jl. Datuk Laksamana. gg Muawanah Dumai Timur	20.000.000,00
Masjid Al Ijtihad	Jl. Utama Karya RT 03 Dumai Timur Dumai	20.000.000,00
Masjid Al Ikhlas	Jl. Utama Bukit Kapur Dumai	20.000.000,00
Mushollah Al Munawarah	Jl. Parit Tugu RT 04 Medang Kampai Dumai	20.000.000,00
Mushollah Sirojul Huda	Jl. Bangun Sari gg Nenas Tanjung Palas Dumai	20.000.000,00
Gereja Bethel Indonesia Jemaat Air Bersih	Jl. Air Bersih No 35 Dumai Timur dumai	20.000.000,00
Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Timah	Jl. Tuanku Tambusai Gg Putra 7 KM 7 Dumai Selatan Dumai	20.000.000,00
Gereja Bethel Injil Sepenuh	Jl. Batu Bintang RT 05 Dumai Selatan Dumai	20.000.000,00
Gereja GPPS Immanuel Kota Dumai	Jl. Batu Bintang Dumai Timur Dumai	20.000.000,00
Jumlah		6.025.000.000,00

Realisasi belanja hibah tahun 2018 sebesar Rp.11.098.600.000,00 lebih besar Rp.3.123.600.000,00 dari anggarannya sebesar Rp7.975.000.000,00 merupakan belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa DAK Non Fisik berdasarkan lampiran XVI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2018 yang anggarannya belum terakomodir dalam PERDA APBD murni Kota Dumai tahun 2018 dan baru terakomodir pada perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan baru terakomodir pada perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



5) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
0,00	0,00	0,00	1.032.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial Dumai TA 2018 Anggaran sebesar Rp0,00 dan Realisasinya sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 Rp.1.032.500.000,00.

b. Belanja Modal

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
173.801.110.119,59	174.224.234.182,00	100,24	272.620.881.157,83

Belanja Modal Kota Dumai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp173.801.110.119,59 dengan realisasi sebesar Rp174.224.234.182,00 atau 100,24%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp98.396.646.975,83 atau turun 36,09% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp272.620.881.157,83. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja modal dengan realisasi sebesar 100,24% yang realisasinya melebihi dari pagu anggarannya dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Belanja modal yang melebihi penganggarannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Lampiran XV.

Tabel 5.1.24. Rincian Belanja Modal Tahun 2018

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	25.876.765.481,00	24.348.949.518,00	94,10	108.136.910.898,83
Belanja Gedung dan Bangunan	63.739.500.745,00	58.284.644.837,00	91,44	57.217.635.253,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.374.843.893,59	81.697.002.491,00	99,18	106.910.476.006,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.810.000.000,00	9.893.637.336,00	546,61	355.859.000,00
Jumlah	173.801.110.119,59	174.224.234.182,00	100,24	272.620.881.157,83

Dari realisasi belanja modal sejumlah Rp174.224.234.182,00 tersebut di atas sudah termasuk belanja modal BLUD-RSUD Kota Dumai sebesar Rp3.413.235.649,00.

Adapun anggaran dan realisasi jenis belanja modal per SKPD sebagai berikut:

1) Belanja Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	9.997.900,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu	531.355.000,00
Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.605.153.644,00
Belanja Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	60.000.000,00
Belanja Pengadaan Alat Ukur	424.682.000,00
Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	61.678.000,00
Belanja Pengadaan Alat Kantor	1.674.646.400,00
Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.107.061.804,00
Belanja Pengadaan Komputer	4.617.496.683,00
Belanja Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	533.904.518,00
Belanja Pengadaan Alat Studio	1.003.779.150,00
Belanja Pengadaan Alat Kedokteran	3.071.143.020,00
Belanja Pengadaan Alat Kesehatan	1.045.268.249,00
Belanja Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.558.191.080,00
Belanja Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	781.919.000,00
Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.202.539.400,00
Belanja Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	33.883.100,00
Belanja Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	26.250.570,00
Jumlah	24.348.949.518,00

(a) Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	9.997.900,00
Jumlah	9.997.900,00

(b) Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	151.770.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	199.885.000,00
Sekretariat Daerah	179.700.000,00
Jumlah	531.355.000,00



(c) Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	942.340.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	247.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	48.963.414,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	329.670.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.352.755,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	470.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	63.338.050,00
Dinas Perdagangan	595.521.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	428.301.325,00
Badan Pendapatan Daerah	463.467.100,00
Jumlah	3.605.153.644,00

(d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00
Jumlah	60.000.000,00

(e) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.980.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.987.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.315.000,00
Dinas Perdagangan	169.400.000,00
Sekretariat Daerah	4.000.000,00
Jumlah	424.682.000,00

(f) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	49.800.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.878.000,00
Jumlah	61.678.000,00

(g) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	68.900.000,00
BLUD RSUD	1.155.181.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.560.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.800.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	33.872.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	14.112.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.260.000,00
Sekretariat Daerah	303.611.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.350.000,00
Jumlah	1.674.646.400,00

(h) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.147.314.000,00
Dinas Kesehatan	147.428.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	161.906.000,00
BLUD RSUD	961.126.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.140.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	17.200.000,00
Dinas Sosial	21.285.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.287.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	35.876.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.680.000,00
Dinas Perhubungan	44.770.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	87.226.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.400.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	142.200.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.272.045,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35.710.000,00
Dinas Perdagangan	22.880.500,00
Sekretariat Daerah	703.676.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	17.416.000,00
Kecamatan Dumai Kota	24.200.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	38.820.909,00
Inspektorat	4.400.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	292.924.200,00
Badan Pendapatan Daerah	63.118.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	32.805.150,00
Jumlah	4.107.061.804,00



(i) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.381.261.000,00
Dinas Kesehatan	104.512.300,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	37.940.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.832.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	91.300.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.410.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.600.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00
Dinas Sosial	45.750.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.024.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	44.110.000,00
Dinas Perhubungan	236.665.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.050.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.800.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	59.820.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	96.800.000,00
Dinas Perikanan	20.263.598,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.590.000,00
Dinas Perdagangan	34.217.250,00
Sekretariat Daerah	163.970.000,00
Sekretariat DPRD	16.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	33.165.375,00
Kecamatan Medang Kampai	15.510.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	31.039.800,00
Kecamatan Dumai Selatan	29.920.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.221.900,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	286.971.400,00
Badan Pendapatan Daerah	266.464.060,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	146.289.000,00
Jumlah	4.617.496.683,00

(j) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	94.875.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.350.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	24.796.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	109.043.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.619.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.214.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.950.000,00
Sekretariat Daerah	96.541.000,00
Kecamatan Medang Kampai	9.999.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	18.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	27.170.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.720.200,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.627.318,00
Jumlah	533.904.518,00

(k) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.400.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	44.043.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.770.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.415.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	23.210.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.820.000,00
Sekretariat Daerah	288.428.000,00
Kecamatan Medang Kampai	30.800.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	7.760.000,00
Kecamatan Dumai Kota	7.700.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	4.070.000,00
Inspektorat	20.466.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.099.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	143.754.700,00
Badan Pendapatan Daerah	194.642.350,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19.401.000,00
Jumlah	1.003.779.150,00

(l) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	581.029.881,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.490.113.139,00
Jumlah	3.071.143.020,00



(m) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.000.000,00
Dinas Kesehatan	228.722.000,00
BLUD Puskesmas Dumai Kota	101.007.500,00
BLUD Puskesmas Dumai Barat	30.210.000,00
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	14.921.100,00
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	113.264.000,00
BLUD Puskesmas Medang Kampai	25.425.000,00
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	68.400.000,00
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	60.476.687,00
BLUD Puskesmas Purnama	35.350.000,00
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	50.901.100,00
BLUD RSUD	311.590.862,00
Jumlah	1.045.268.249,00

(n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	765.015.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	38.234.580,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.460.000,00
Dinas Perdagangan	613.481.000,00
Jumlah	1.558.191.080,00

(o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	781.919.000,00
Jumlah	781.919.000,00

(p) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Perhubungan	1.202.539.400,00
Jumlah	1.202.539.400,00

(q) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralengkapan Non Senjata Api

Uraian	Jumlah (Rp)
Sekretariat Daerah	33.883.100,00
Jumlah	33.883.100,00



(r) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Uraian	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.300.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.950.570,00
Jumlah	26.250.570,00

Rincian belanja peralatan dan mesin masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.229.824.130,00	4.567.874.000,00	107,99	34.183.999.518,00
Dinas Kesehatan	3.888.435.519,00	3.442.776.468,00	88,54	10.020.679.285,83
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	466.635.000,00	412.049.000,00	88,30	275.973.500,00
Dinas Perhubungan	1.542.842.050,00	1.483.974.400,00	96,18	769.357.000,00
Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	226.168.930,00	224.751.000,00	99,37	131.850.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	547.500.000,00	338.500.000,00	61,83	111.510.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.208.600.000,00	987.691.510,00	81,72	919.804.265,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	109.396.200,00	98.287.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	67.400.000,00	67.035.000,00	99,46	137.623.000,00
Dinas Perdagangan	218.865.000,00	1.435.499.750,00	655,88	209.989.500,00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	130.804.000,00	126.628.755,00	96,81	125.677.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	369.960.000,00	167.848.050,00	45,37	54.995.250,00
Dinas Perikanan	72.700.000,00	20.263.598,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	116.220.000,00	84.919.200,00	73,07	382.539.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.090.680.000,00	375.350.000,00	34,41	626.719.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	239.350.000,00	205.122.468,00	85,70	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.370.000,00	45.024.000,00	99,24	240.826.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	42.203.000,00	30.025.000,00	71,14	122.504.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	483.796.000,00	472.397.914,00	97,64	1.020.859.710,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	55.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.005.100,00	133.286.045,00	99,46	20.718.000,00
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	986.600.000,00	976.263.000,00	98,95	910.493.700,00
KDH-WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Nama SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Sekretariat Daerah	2.194.766.141,00	1.773.809.100,00	80,82	7.452.855.070,00
DPRD				
Sekretariat DPRD	102.538.000,00	16.000.000,00	15,60	518.379.125,00
RSUD	5.227.650.000,00	5.200.134.981,00	99,47	48.994.046.225,00
Inspektorat	25.473.000,00	24.866.000,00		
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	15.741.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	51.160.000,00	50.581.375,00	98,87	49.861.500,00
Kecamatan Medang Kampai	56.560.000,00	56.309.000,00	99,56	128.037.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	56.800.000,00	56.799.800,00	100,00	2.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	33.730.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	102.307.500,00	99.980.909,00	97,73	82.059.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	125.073.400,00	57.700.570,00	46,13	56.100.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.643.352.511,00	1.245.301.625,00	75,78	431.713.500,00
Jumlah	25.876.765.481,00	24.348.949.518,00	94,10	108.136.910.898,83

Belanja modal peralatan dan mesin untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi sebesar 107,99% dan Dinas Perdagangan dengan realisasi 655,88% yang realisasinya melebihi dari pagu anggarannya dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

2) Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja bangunan dan gedung tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.646.404.837,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	198.000.000,00
Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	226.210.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.214.030.000,00
Jumlah	58.284.644.837,00

Rincian Belanja bangunan dan gedung per akun SKPD tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

(a) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.069.888.295,00



Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	7.928.403.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	18.763.797.542,00
BLUD RSUD	287.382.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.450.138.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	514.700.000,00
Dinas Perhubungan	24.202.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	398.256.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	936.955.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	186.400.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	476.164.000,00
Dinas Perdagangan	44.900.000,00
Sekretariat Daerah	443.308.000,00
Kecamatan Medang Kampai	19.950.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	41.128.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60.833.000,00
Jumlah	55.646.404.837,00

(b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Uraian	Jumlah (Rp)
BLUD RSUD	198.000.000,00
Jumlah	198.000.000,00

(c) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	226.210.000,00
Jumlah	226.210.000,00

(d) Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.000.000,00
Dinas Perhubungan	2.198.030.000,00
Jumlah	2.214.030.000,00

Adapun rincian belanja modal bangunan dan gedung per skpd dapat dirinci sebagai berikut:

Nama SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.562.424.195,00	24.069.888.295,00	84,27	39.784.783.190,00
Dinas Kesehatan	6.855.693.600,00	7.928.403.000,00	115,65	3.745.049.352,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Nama SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.552.852.000,00	1.466.138.000,00	94,42	5.773.405.800,00
Dinas Perhubungan	2.398.887.950,00	2.222.232.000,00	92,64	2.549.484.095,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	953.800.000,00	936.955.000,00	98,23	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	506.090.000,00	226.210.000,00	44,70	431.982.000,00
Dinas Perdagangan	70.100.000,00	44.900.000,00	64,05	122.400.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	499.000.000,00	476.164.000,00	95,42	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	190.000.000,00	60.833.000,00	32,02	29.745.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	515.300.000,00	514.700.000,00	99,88	349.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	64.360.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	186.916.000,00	186.400.000,00	99,72	265.330.000,00
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.000.000,00	398.256.000,00	99,56	488.937.000,00
Sekretariat Daerah	490.000.000,00	443.308.000,00	90,47	49.969.000,00
RSUD	20.495.537.000,00	19.249.179.542,00	93,92	3.562.439.816,00
Kecamatan Medang Kampai	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	42.900.000,00	41.128.000,00	95,87	0,00
Jumlah	63.739.500.745,00	58.284.644.837,00	91,44	57.217.635.253,00

Belanja modal gedung dan bangunan untuk Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar 115,65% yang realisasinya melebihi dari pagu anggarannya dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

3) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pengadaan Jalan	70.431.300.321,00
Belanja Pengadaan Jembatan	1.756.335.000,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	184.638.000,00



Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.500.167.000,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air	664.726.000,00
Belanja Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	59.700.000,00
Belanja Pengadaan Jaringan Air Minum	4.909.360.600,00
Belanja Pengadaan Jaringan Listrik	1.186.875.570,00
Belanja Pengadaan Jaringan Telepon	3.900.000,00
Jumlah	81.697.002.491,00

Rincian Belanja bangunan dan gedung per akun SKPD tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

(a) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.086.616.821,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.047.437.500,00
Dinas Perhubungan	297.246.000,00
Jumlah	70.431.300.321,00

(b) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.756.335.000,00
Jumlah	1.756.335.000,00

(c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Uraian	Jumlah (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	184.638.000,00
Jumlah	184.638.000,00

(d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.500.167.000,00
Jumlah	2.500.167.000,00

(e) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	664.726.000,00
Jumlah	664.726.000,00



(f) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	59.700.000,00
Jumlah	59.700.000,00

(g) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.909.360.600,00
Jumlah	4.909.360.600,00

(h) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.164.855.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.993.520,00
Dinas Perdagangan	10.027.050,00
Jumlah	1.186.875.570,00

(i) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon

Uraian	Jumlah (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	3.900.000,00
Jumlah	3.900.000,00

Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	5.552.365.900,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	991.547.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.488.133.893,59	70.917.205.421,00	102,06	94.960.821.853,00
Dinas Perhubungan	300.000.000,00	297.246.000,00	99,08	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.275.510.000,00	10.212.292.500,00	83,19	5.198.155.253,00
Badan Pendapatan Daerah	229.000.000,00	188.538.000,00	82,33	0,00
Dinas Perdagangan	10.200.000,00	10.027.050,00	98,30	207.586.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	72.000.000,00	71.693.520,00	99,57	0,00
Jumlah	82.374.843.893,59	81.697.002.491,00	99,18	106.910.476.006,00



Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dengan realisasi sebesar 102.06% yang realisasinya melebihi dari pagu anggarannya dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

4) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengadaan Buku	9.142.587.236,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	751.050.100,00
Jumlah	9.893.637.336,00

Rincian Belanja aset tetap lainnya per akun SKPD tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

(a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Uraian	Jumlah (Rp)
BOS SD	6.396.591.801,00
BOS SMP	2.745.995.435,00
Jumlah	9.142.587.236,00

(b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	751.050.100,00
Jumlah	751.050.100,00

Rincian belanja aset tetap lainnya per SKPD tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Pencapaian Anggaran %	Realisasi 2017 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.810.000.000,00	9.893.637.336,00	546,61	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	238.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	99.859.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Jumlah	1.810.000.000,00	9.893.637.336,00	546,61	355.859.000,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan terdiri dari :



Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.050.000.000,00	0,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Belanja Modal dari dana BOS	0,00	9.142.587.236,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	760.000.000,00	751.050.100,00	98,82
Jumlah	1.810.000.000,00	9.893.637.336,00	546,61

c. Belanja Tak Terduga

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja tak terduga juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat. yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun 2018, tidak terdapat Realisasi Belanja Tak Terduga.

d. Transfer

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	84,64	2.245.267.080,00

1) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	84,64	2.245.267.080,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.652.769.280,00 dan terealisasi sebesar Rp2.245.267.080,00 atau sebesar 84,64%. Belanja ini dianggarkan untuk belanja bantuan partai politik.



Tabel 5.1.24. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik

Nama Partai Politik	Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	365.201.280,00	365.201.280,00	100,00
Partai Golongan Karya	217.675.800,00	217.675.800,00	100,00
Partai Amanah Nasional	239.282.640,00	239.282.640,00	100,00
Partai Hanura	133.820.280,00	133.820.280,00	100,00
Partai Bulan Bintang	123.516.920,00	123.516.000,00	100,00
Partai Keadilan Sejahtera	159.724.800,00	159.724.800,00	100,00
PKPI	109.980.000,00	109.980.000,00	100,00
Partai Persatuan Pembangunan	189.825.480,00	189.825.480,00	100,00
Partai Nasdem	200.992.680,00	200.992.680,00	100,00
Partai Gerindra	262.293.840,00	262.293.840,00	100,00
Partai Demokrat	144.733.680,00	144.733.680,00	100,00
Partai Kebangkitan Bangsa	98.220.600,00	98.220.600,00	100,00
Tambahan	407.501.280,00	0,00	0,00
Jumlah	2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	85,00

Surplus/(Defisit)

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
0,00	112.897.354.207,13	0,00	(18.242.110.422,12)

Surplus terjadi apabila Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Kota Dumai TA 2018 tidak menganggarkan Surplus namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp112.897.354.207,13. Jika dibandingkan dengan realisasi defisit Tahun 2017 maka terjadi kenaikan sebesar Rp131.139.464.629,25 atau naik 718,88% dari realisasi tahun lalu sebesar defisit Rp18.242.110.422,12.

3. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

1) Penggunaan SiLPA

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.896.118.427,21

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp57.935.943.638,00 yang terealisasi sebesar Rp23.470.008.005,09 merupakan penggunaan SiLPA. Bila dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2017 terdapat penurunan



sebesar Rp18.426.110.422,12 atau sebesar 43,98% dari realisasi sebesar Rp41.896.118.427,21.

2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rasio)
0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

3) Pembiayaan Neto

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran	Realisasi	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi
57.935.943.638,00	23.470.008.005,09	40,51	41.946.118.427,21

Pembiayaan Netto Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp57.935.943.638,00 yang terealisasi sebesar Rp23.470.008.005,09 atau 40,51% dan bila dibanding dengan Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp18.426.110.422,12 atau 43,98% dari realisasi sebesar Rp41.946.118.427,21.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2018			Tahun 2017
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
57.935.943.638,00	136.367.362.212,22	235,38	23.704.008.005,09

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp57.935.943.638,00 yang terealisasi sebesar Rp136.367.362.212,22 atau sebesar 235,38 %. Apabila dibanding dengan Tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp112.663.354.207,13 atau 475,29%.



2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
23.704.008.005,09	42.234.550.427,21

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp23.704.008.005,09.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
23.470.008.005,09	41.896.118.427,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu sebesar Rp23.470.008.005,09.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
136.367.362.212,22	23.704.008.005,09

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp136.552.079.012,22 yang diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	1.225.296.405.738,87
Belanja Operasi	1.112.451.695.590,74
Surplus/defisit	112.897.354.207,13
Pendapatan Pembiayaan	23.704.008.005,09
Penggunaan SAL	23.470.008.005,09
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	136.367.362.212,22

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
0,00	338.432.000,00

Tidak Ada Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.



5.2.5 LAIN-LAIN

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
(234.000.000,00)	0,00

Koreksi akibat kelebihan transfer ke Provinsi Riau atas sisa bantuan keuangan Provinsi Riau TA.2017 pada tahun 2018 sebesar 234.000.000,00.

5.2.6 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
136.367.362.162,22	23.704.008.005,09

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp136.367.362.162,22 Tidak terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas di LAK dengan SiLPA.



3. PENJELASAN POS POS NERACA

1. Aset

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
2.785.056.552.199,94	2.512.198.686.059,58	272.857.866.140,36	10,86

Aset Kota Dumai TA 2018 Rp2.785.056.552.199,94 atau naik sebesar Rp272.857.866.140,36 atau 10,86% dari TA 2017 sebesar Rp2.512.198.686.059,58.

Aset Kota Dumai TA 2018 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.1 Rincian Aset

Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan	
			(Rp)	%
Aset lancar	236.738.834.175,01	90.009.397.787,60	146.729.436.387,41	163,02
Investasi Jangka Panjang	84.204.398.346,11	89.453.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,87)
Aset Tetap	2.416.464.649.314,15	2.276.695.864.562,62	139.768.784.751,53	5,91
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	52.850.811.834,67	56.040.010.705,70	(3.189.198.871,03)	(5,69)
Jumlah	2.785.056.552.199,94	2.512.198.686.059,58	272.857.866.140,37	10,86

a. Aset Lancar

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
236.738.834.175,01	90.009.397.787,60	146.729.436.387,41	163,02

Aset Lancar Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp236.738.834.175,01 atau naik sebesar Rp146.729.436.387,41 atau 163,02% dari TA 2017 sebesar 90.009.397.787,60.

Aset Lancar Kota Dumai TA 2018 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD-RSUD, Kas Lainnya (Dana BOS), Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang – DBH Provinsi, Piutang Lainnya, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar

Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
			(Rp)	Rasio %
Kas di Kas Daerah	116.017.573.189,01	16.052.857.478,52	99.964.715.710,49	622,72
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.519.591,00	58.000.000,00	(54.480.409,00)	(93,93)
Kas di Bendahara	0,00	75,54	(75,54)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
			(Rp)	Rasio %
Penerimaan				
Kas di BLUD	20.258.261.206,21	7.720.939.176,64	12.537.322.029,57	162,38
Kas di Bendahara BOS	88.167.317,00	58.371.062,00	29.796.255,00	51,05
Piutang Pajak Daerah	90.083.846.561,80	73.432.477.404,47	16.651.369.157,33	22,68
Piutang Retribusi Daerah	2.050.534.999,09	2.398.714.438,09	(348.179.439,00)	(14,52)
Piutang Lain- lain PAD yang Sah	326.630.064,64	429.497.718,55	(102.867.653,91)	(23,95)
Piutang Transfer - DBH Provinsi	12.615.607.856,77	0,00	12.615.607.856,77	0,00
Piutang Lainnya	36.468.870.699,41	27.493.803.943,50	8.975.066.755,91	32,64
Penyisihan Piutang	(56.183.505.320,84)	(51.695.435.666,55)	(4.488.069.654,29)	8,68
Asuransi dibayar dimuka	132.185.800,84	107.364.963,17	24.820.837,67	23,12
Persediaan	14.877.142.210,08	13.952.807.193,67	924.335.016,41	6,62
Jumlah	236.738.834.175,01	90.009.397.787,60	146.729.436.387,41	163,02

1) Kas Di Kas Daerah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
116.017.573.189,01	16.052.857.478,52	99.964.715.710,49	622,72

Kas di Kas Daerah Kota Dumai TA 2018 disajikan sebesar Rp116.017.573.189,01 atau naik sebesar Rp99.964.715.710,49 atau sebesar 622,72% dari TA 2017 sebesar Rp16.052.857.478,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.3 Rincian Kas Daerah Kota Dumai

Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan) (Rp)
Menurut Bank/Deposito				
Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110,92	80.017.571.685,86	14.720.330.536,56	65.297.241.149,30
Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.111,09	0,00	66.921,00	(66.921,00)
Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.000,09	0,00	0,00	0,00
Bank Syariah Mandiri	7038923522	1.503,15	0,00	1.503,15
Bank Mandiri	172-00-0123123-4	0,00	32.460.020,96	(32.460.020,96)
Deposito		36.000.000.000,00	1.300.000.000,00	34.700.000.000,00
Jumlah		116.017.573.189,01	16.052.857.478,52	99.964.715.710,49



2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
3.519.591,00	58.000.000,00	(54.480.409,00)	(0,94)

Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada tahun 2018 saldo kas di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas umum daerah per 31 Desember 2018 terdiri dari :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	159.091,00
2	Dinas Perdagangan	3.360.500,00
Jumlah		3.519.591,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp159.091,00 merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2018 dan sudah disetorkan pada bulan Januari tahun 2019 pada Dinas Kesehatan dan Sebesar Rp3.360.500,00 saldo kas di bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
0,00	75,54	(75,54)	0,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

4) Kas BLUD

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
20.258.261.206,21	7.720.939.176,64	12.537.322.029,57	162,38

Kas di BLUD Tahun 2018 sebesar Rp20.258.261.206,21 Jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp7.720.939.176,64 maka mengalami kenaikan sebesar Rp12.537.322.029,57 atau sebesar 162,38%.

Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD-RSUD dan Puskesmas Kota Dumai tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 30 Desember 2009.



Tabel 5.3.4 Rincian Saldo Kas Di Masing-Masing BLUD

No	Rekening Bank	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank (Rp)
A	BLUD RSUD			
	Kas BLUD RSUD	19.003.355.587,96	7.226.094.392,49	11.777.261.195,47
B	BLUD PUSKESMAS :			
	Kas di Bank			
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	235.865.779,38	52.325.557,85	183.540.221,53
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	47.802.830,67	4.683.152,30	43.119.678,37
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	160.954.344,00	37.468.438,02	123.485.905,98
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	247.198,10	29.915.007,27	(29.667.809,17)
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	66.618.728,37	1.770.255,98	64.848.472,39
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	265.954.863,28	220.943.382,79	45.011.480,49
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	9.651.036,47	105.102,03	9.545.934,44
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	185.105.623,97	1.399.381,12	183.706.242,85
9	BLUD Puskesmas Purnama	36.290.891,24	15.142.748,63	21.148.142,61
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	246.239.322,77	130.269.758,16	115.969.564,61
	Kas Tunai :			
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	0,00	0,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	24.000,00	0,00	24.000,00
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	50.000,00	(50.000,00)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	0,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	0,00	0,00
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	151.000,00	772.000,00	(621.000,00)
9	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	0,00	0,00
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas BLUD Puskesmas	1.254.905.618,25	494.844.784,15	760.060.834,10
	JUMLAH KAS BLUD	20.258.261.206,21	7.720.939.176,64	12.537.322.029,57

5) Kas Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
88.167.317,00	58.371.062,00	29.796.255,00	51,05



Nilai akhir kas lainnya sebesar Rp88.167.317,00 merupakan sisa kas yang berada pada Bendahara Dana BOS Tahun 2018 berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS dari masing-masing Sekolah Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai termasuk didalamnya berupa bunga dari rekening masing-masing sekolah. Nilai kas lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp29.796.255,00 atau 51,05% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp58.371.062,00. Untuk kas lainnya tahun 2018 sebesar Rp88.167.317,00 yang telah disajikan di dalam Neraca Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Berikut rincian sisa kas Dana BOS tahun 2018:

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS KAS BOS (Rp)	RELISASI PENERIMAAN TAHUN 2018 (Rp)	REALISASI BELANJA DANA BOS TAHUN 2018 (Rp)	SISA DANA BOS BESERTA BUNGA REKENING BOS PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)
1	BOS SD	49.764.075,00	26.221.195.322,00	26.192.345.178,00	78.614.219,00
2	BOS SMP	8.606.987,00	9.843.546.111,00	9.842.600.000,00	9.553.098,00
JUMLAH		58.371.062,00	36.064.741.433,00	36.084.228.737,00	88.167.317,00

Rincian Kas BOS

No	Keterangan	Saldo Kas Dari Penerimaan BOS (Rp)	Saldo Kas Dari Penerimaan Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
1	BOS SD	74.538.538,00	4.075.681,00	78.614.219,00
2	BOS SMP	8.606.987,00	946.111,00	9.553.098,00
Jumlah		83.145.525,00	5.021.792,00	88.167.317,00

6) Piutang Pajak Daerah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
90.083.846.561,80	73.432.477.404,47	16.651.369.157,33	22,68

Piutang Pajak Daerah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp90.083.846.561,80 atau naik sebesar Rp16.651.369.157,33 atau 22,68% dari TA 2017 sebesar Rp73.432.477.404,47.

Akun piutang pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Piutang Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Pajak	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
1	Piutang Pajak Hotel	507.301.755,00	308.329.990,70	198.971.764,30	64,53
2	Piutang Pajak Restoran	932.420.600,61	822.822.626,71	109.597.973,90	13,32



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
3	Piutang Pajak Hiburan	169.426.485,00	149.389.535,00	20.036.950,00	13,41
4	Piutang Pajak Reklame	562.712.023,00	537.873.023,00	24.839.000,00	4,62
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.061.908.707,00	702.791.262,87	359.117.444,13	51,10
6	Piutang Pajak Air Tanah	409.766.570,00	368.405.546,00	41.361.024,00	11,23
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99.244.672,00	99.244.672,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	86.338.565.749,19	70.441.120.748,19	15.897.445.001,00	22,57
9	Piutang Pajak Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah		90.083.846.561,80	73.432.477.404,47	16.651.369.157,33	22,68

a) Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp507.301.755,00 atau naik sebesar Rp198.971.764,30 atau 64,53% dari TA 2017 sebesar Rp308.329.990,70.

Akun piutang pajak hotel merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak hotel daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.6 Piutang Pajak Hotel Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2008	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00
2	Tahun 2009	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
3	Tahun 2010	131.532.900,00	0,00	0,00	131.532.900,00
4	Tahun 2011	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00
5	Tahun 2012	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00
6	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2015	316.996,00	0,00	316.996,00	0,00
9	Tahun 2016	43.528.685,00	0,00	780.500,00	42.748.185,00
10	Tahun 2017	53.743.353,70	0,30	31.142.260,00	22.601.094,00
11	Tahun 2018	0,00	3.768.505.143,00	3.537.293.623,00	231.211.520,00
Jumlah		308.329.990,70	3.768.505.143,30	3.569.533.379,00	507.301.755,00



b) Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp932.420.600,61 atau naik sebesar Rp109.597.973,90 atau 13,32% dari TA 2017 sebesar Rp822.822.626,71 Akun piutang pajak Restoran merupakan selisih antara nilai pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak restoran daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Piutang Pajak Restoran Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2009	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00
2	Tahun 2010	32.063.963,00	0,00	0,00	32.063.963,00
3	Tahun 2011	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00
4	Tahun 2012	2.063.500,00	0,00	0,00	2.063.500,00
5	Tahun 2013	8.298.600,00	0,00	0,00	8.298.600,00
6	Tahun 2014	45.301.350,00	0,00	0,00	45.301.350,00
7	Tahun 2015	10.063.862,00	0,00	100.063,00	9.963.799,00
8	Tahun 2016	536.512.335,00	0,00	3.023.910,00	533.488.425,00
9	Tahun 2017	168.685.220,71	18,90	99.913.136,00	68.772.103,61
10	Tahun 2018	0,00	5.692.965.593,00	5.480.330.529,00	212.635.064,00
Jumlah		822.822.626,71	5.692.965.611,90	5.583.367.638,00	932.420.600,61

c) Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp169.426.485,00 atau naik sebesar Rp20.036.950,00 atau 13,41% dari TA 2017 sebesar Rp149.389.585,00.

Akun piutang pajak hiburan merupakan selisih antara nilai pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak hiburan daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

5.3.8 Tabel Piutang Pajak Hiburan Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	Tahun 2011	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00
3	Tahun 2012	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00
4	Tahun 2013	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00
5	Tahun 2014	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	Tahun 2015	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
7	Tahun 2016	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00
8	Tahun 2017	18.564.149,00	0,00	12.964.149,00	5.600.000,00
9	Tahun 2018	0,00	1.004.340.265,00	971.339.166,00	33.001.099,00
Jumlah		149.389.535,00	1.004.340.265,00	984.303.315,00	169.426.485,00

d) Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp562.712.023,00 atau naik sebesar Rp24.839.000,00 atau 4,62% dari TA 2017 sebesar Rp537.873.023,00.

Akun piutang pajak reklame merupakan selisih antara nilai pajak reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak reklame daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Piutang Pajak Reklame Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2005	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2	Tahun 2006	2.667.205,00	0,00	0,00	2.667.205,00
3	Tahun 2007	2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00
4	Tahun 2008	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
5	Tahun 2009	2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00
6	Tahun 2010	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00
7	Tahun 2011	15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00
8	Tahun 2012	25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00
9	Tahun 2013	69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00
10	Tahun 2014	162.412.240,00	0,00	830.375,00	161.581.865,00
11	Tahun 2015	50.165.028,00	0,00	826.650,00	49.338.378,00
12	Tahun 2016	110.692.472,00	0,00	0,00	110.692.472,00
13	Tahun 2017	90.125.053,00	0,00	43.452.525,00	46.672.528,00
14	Tahun 2018	0,00	1.843.193.400,00	1.773.244.850,00	69.948.550,00
Jumlah		537.873.023,00	1.843.193.400,00	1.818.354.400,00	562.712.023,00

e) Piutang Pajak Penerang Jalan

Piutang Pajak Penerangan jalan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp1.061.908.707,00 atau naik sebesar Rp359.117.444,13 atau 51,10% dari TA 2017 sebesar Rp702.791.262,87.

Akun piutang pajak penerangan jalan merupakan selisih antara nilai pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang



dibayarkan oleh wajib pajak penerangan jalan daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.10 Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2008	(0,13)	0,13	0,00	0,00
2	Tahun 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2012	5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00
6	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2017	697.367.863,00	0,00	587.272.303,00	110.095.560,00
11	Tahun 2018	0,00	14.671.366.467,00	13.724.976.720,00	946.389.747,00
Jumlah		702.791.262,87	14.671.366.467,13	14.312.249.023,00	1.061.908.707,00

f) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp409.766.570,00 atau naik sebesar Rp41.361.024,00 atau 11,23% dari TA 2017 sebesar Rp368.405.546,00. Akun piutang pajak air tanah merupakan selisih antara nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak air tanah daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.11 Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2017	Mutasi		Tahun 2018
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2011	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
2	Tahun 2012	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00
3	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2014	2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00
5	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2016	6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00
7	Tahun 2017	355.825.646,00	0,00	30.676.670,00	325.148.976,00
8	Tahun 2018	0,00	1.424.611.132,00	1.352.573.438,00	72.037.694,00
Jumlah		368.405.546,00	1.424.611.132,00	1.383.250.108,00	409.766.570,00



g) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp99.244.672,00 TA 2018 tidak ada penambahan.

7. Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
2.050.534.999,09	2.398.714.438,09	(348.179.439,00)	(14,52)

Piutang Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2018 sebesar Rp2.050.534.999,09 atau turun sebesar Rp348.179.439,00 atau 14,52% dari TA 2017 sebesar Rp2.398.714.438,09.

Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh wajib retribusi termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D). Pengakuan saldo Piutang Retribusi tersebut hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan tahun sebelumnya. Piutang Retribusi daerah ini terdapat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan yaitu :

Tabel 5.3.12 Piutang Retribusi Daerah Per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Perhubungan	45.316.250,00	131.260.750,00	(85.944.500,00)	(65,48)
2	Badan Pendapatan Daerah	1.871.673.749,09	2.126.974.688,09	(255.300.939,00)	(12,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Kesehatan	82.905.000,00	75.385.000,00	7.520.000,00	9,98
5	Sekretariat Daerah	0,00	14.454.000,00	(14.454.000,00)	100,00
Jumlah		2.050.534.999,09	2.398.714.438,09	(348.179.439,00)	(14,52)

Perincian berdasarkan jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
1	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.813.830.835,09	2.069.671.774,09	(255.840.939,00)	(12,36)
2	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57.302.914,00	57.302.914,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	82.905.000,00	75.385.000,00	7.520.000,00	9,98
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	540.000,00	14.454.000,00	(13.914.000,00)	100,00



No	Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
6	Piutang Retribusi Terminal	0,00	6.835.000,00	(6.835.000,00)	100,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.944.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.380.000,00	446.000,00	1.934.000,00	100,00
9	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	14.992.250,00	123.979.750,00	(108.987.500,00)	100,00
Jumlah		2.050.534.999,09	2.398.714.438,09	(348.179.439,00)	(14,52)

a) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang Retribusi izin gangguan Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp50.640.000,00 Tidak ada penambahan di TA 2018.

b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp14.992.250,00.

Tabel 5.3.14 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	0,00
Jumlah		14.454.000,00	0,00	14.454.000,00	0,00

c) Piutang Retribusi Terminal

Piutang Retribusi Piutang Retribusi Terminal Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp57.850.000,00.

Tabel 5.3.15 Piutang Retribusi Terminal Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi Terminal	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1		57.850.000,00	0,00	57.850.000,00	0,00
Jumlah		57.850.000,00	0,00	57.850.000,00	0,00



d) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp2.380.000,00 naik sebesar Rp1.934.000,00 atau 433,63% dari TA 2017 sebesar Rp446.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00
2	Tahun 2018	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
Jumlah		446.000,00	2.380.000,00	446.000,00	2.380.000,00

e) Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp14.992.250,00 turun sebesar Rp57.432.500,00 atau 79,30% dari TA 2017 sebesar Rp72.424.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.17 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2017	72.424.750,00	0,00	72.424.750,00	0,00
2	Tahun 2018	0,00	14.992.250,00		14.992.250,00
Jumlah		72.424.750,00	14.992.250,00	0,00	14.992.250,00

f) Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi izin gangguan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp1.813.830.835,09 atau turun sebesar Rp255.840.939,00 atau 12,36% dari TA 2017 sebesar Rp2.069.671.774,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.18 Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2005	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00
2	Tahun 2006	51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00
3	Tahun 2007	45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00
4	Tahun 2008	20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00
5	Tahun 2009	45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00
6	Tahun 2010	266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00
7	Tahun 2011	72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00
8	Tahun 2012	121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00
9	Tahun 2013	183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00
10	Tahun 2014	133.918.425,00	0,00	3.951.000,00	129.967.425,00



No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
11	Tahun 2015	119.485.014,00	0,00	0,00	119.485.014,00
12	Tahun 2016	224.483.849,00	0,00	0,00	224.483.849,00
13	Tahun 2017	781.377.968,09	0,00	254.777.139,00	526.600.829,09
14	Tahun 2018	0,00	43.917.173,00	41.029.973,00	2.887.200,00
Jumlah		2.069.671.774,09	43.917.173,00	299.758.112,00	1.813.830.835,09

g) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp27.944.000,00

Tabel 5.3.19 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2018	0,00	27.944.000,00	0,00	27.944.000,00
Jumlah		0,00	27.944.000,00	0,00	27.944.000,00

h) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp82.905.000,00 atau naik sebesar Rp7.520.000,00 atau 9,98% dari TA 2017 sebesar Rp75.385.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.20 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	17.700.000,00	108.085.000,00	42.880.000,00	82.905.000,00
Jumlah		17.700.000,00	108.085.000,00	42.880.000,00	82.905.000,00

i) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Ruang/Gedung

Piutang Retribusi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp27.944.000,00.



Tabel 5.3.21 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Ruang/Gedung Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2018	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Jumlah		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00

j) Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi izin gangguan Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp57.302.914,00. Tidak ada penambahan di TA 2018.

8. Piutang PAD Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
326.630.064,64	429.497.718,55	(102.867.653,91)	(23,95)

Nilai akhir piutang PAD Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp326.630.064,64 mengalami penurunan sebesar Rp102.867.653,91 atau 23,95% dari TA 2017 sebesar 429.497.718,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22 Piutang PAD Lainnya Daerah Per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Pajak	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Badan Pendapatan Daerah	326.630.064,64	288.428.950,64	38.201.114,00	13,24
2	PPKD	0,00	141.068.767,91	(141.068.768)	(100,00)
Jumlah		326.630.064,64	429.497.718,55	(102.867.653,91)	(23,95)

Tabel 5.3.23 Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Pajak	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Piutang Denda Pajak	74.841.766,00	54.025.622,00	20.816.144,00	38,53
2	Piutang Denda Retribusi	251.788.298,64	234.403.328,64	17.384.970,00	7,42
3	Piutang Bunga Deposito Rek BSM	0,00	413.740,91	(413.740,91)	(100,00)
4	Piutang Bunga Deposito Rek Bank Riau	0,00	140.655.027,00	(140.655.027,00)	(100,00)
Jumlah		326.630.064,64	429.497.718,55	(102.867.653,91)	(23,95)



1. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp74.841.766,00 atau naik sebesar Rp20.816.144,00 atau 38,53% dari TA 2017 sebesar Rp54.025.622,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24 Piutang Denda Pajak Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Denda Pajak Hotel	8.691.069,00	24.127.866,00	4.880.426,00	27.938.509,00
2	Denda Pajak Restoran	15.578.465,00	26.959.227,00	26.726.206,00	15.811.486,00
3	Denda Pajak Hiburan	3.805.614,00	6.246.289,00	6.114.285,00	3.937.618,00
4	Denda Pajak Reklame	21.096.383,00	10.028.923,00	9.712.190,00	21.413.116,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2018	4.096.235,00	301.178.909,00	301.178.880,00	4.096.264,00
6	Denda Pajak Air Tanah	757.856,00	50.958.176,00	50.071.259,00	1.644.773,00
Jumlah		54.025.622,00	419.499.390,00	398.683.246,00	74.841.766,00

2. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp251.788.298,64 atau naik sebesar Rp17.384.970,00 atau 7,42% dari TA 2017 sebesar Rp234.403.328,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.25 Piutang Denda Retribusi Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Denda Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tahun 2017	234.403.328,64	0,00	0,00	234.403.328,64
2	Tahun 2018	0,00	23.186.559,00	5.801.589,00	17.384.970,00
Jumlah		234.403.328,64	23.186.559,00	5.801.589,00	251.788.298,64

9. Piutang Transfer DBH Provinsi

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	%
12.615.607.856,77	0,00	12.615.607.856,77	0,00

Piutang DBH Provinsi Kota Dumai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp12.615.607.856,77 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.26 Piutang DBH Provinsi Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang DBH Provinsi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang PKB	0,00	4.087.563.854,59	0,00	4.087.563.854,59
2	Piutang BBN - KB	0,00	2.491.590.876,18	0,00	2.491.590.876,18
3	Piutang PBB - KB	0,00	5.947.276.590,00	0,00	5.947.276.590,00
4	Piutang AP	0,00	89.176.536,00	0,00	89.176.536,00
Jumlah		0,00	12.615.607.856,77	0,00	12.615.607.856,77

10. Piutang Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
36.468.870.699,41	27.493.803.943,50	8.975.066.755,91	32,64

Piutang Lainnya Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp36.468.870.699,41 atau naik sebesar Rp8.975.066.755,91 atau 32,64% dari TA 2017 sebesar Rp27.493.803.943,50. Piutang lainnya ini terdapat pada PPKD, BLUD-RSUD dan BLUD-Puskesmas yaitu sebesar :

Tabel 5.3.27 Piutang Lainnya per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
1	PPKD	3.272.783.604,41	1.706.611.162,50	1.566.172.441,91	91,77
2	BLUD-RSUD	32.830.424.095,00	25.495.169.781,00	7.335.254.314,00	28,77
3	BLUD-Puskesmas	365.663.000,00	292.023.000,00	73.640.000,00	25,22
Jumlah		36.468.870.699,41	27.493.803.943,50	8.975.066.755,91	32,64

a) Piutang Lainnya pada PPKD

Piutang Lainnya pada PPKD Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp3.272.783.604,41 atau naik sebesar Rp1.566.172.441,91 atau 91,77% dari TA 2017 sebesar Rp1.706.611.162,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.28 Piutang Lainnya per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Piutang Denda Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang pengembalian penyertaan PT Air Bersih	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2	Piutang bunga Koperasi Putri Tujuh	7.653.399,37	0,00	0,00	7.653.399,37
3	Piutang PT Pembangunan Dumai	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
4	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	688.947.763,13	409.796.504,31	22.406.212,40	1.076.338.055,04
5	Piutang Gaji PNS	0,00	944.782.150,00	0,00	944.782.150,00
6	Piutang Dana Transfer Provinsi	0,00	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00
Jumlah		1.706.611.162,50	1.588.578.654,31	22.406.212,40	3.272.783.604,41



1) Piutang pengembalian penyertaan PT Air Bersih

Piutang pengembalian penyertaan PT Air Bersih sebesar 1.000.000.000,00 timbul dari gagalnya Investasi Pemerintah Kota Dumai pada PT Air Bersih (sebelumnya bernama PT. Tirta Dumai Bersemai). PT Air Bersih tidak pernah beroperasi dan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Hal tersebut lebih dipertegas dengan status Badan Hukum PT Air Bersih yang bermasalah (sedang dalam proses hukum) di Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan Pengadilan Negeri Kota Dumai (Perdata), masing-masing Putusan Badan Arbitrase tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 277/III/ARB-BANI/2008 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai nomor putusan 41/Pdt.P/2008/PN.DUM, tanggal 02 Februari 2008 Pemerintah Kota Dumai dimenangkan dalam kasus perkara yang berkonsekuensi nilai investasi pemerintah kota tersebut adalah merupakan hak Pemerintah Kota Dumai. Keputusan ini diperkuat dengan keputusan banding berdasarkan keputusan Makamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 22 Oktober 2009, reg. Nomor 515 K/Pdt.Sus/2009 menyatakan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.P/2008/PN.DUM, tanggal 02 Februari 2008. PT Air Bersih sesuai dengan keputusan tersebut wajib mengembalikan investasi Pemerintah Kota Dumai ke Kas Daerah.

2) Piutang bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman sebesar Rp7.653.399,37 per tanggal 31 Desember 2017. Piutang ini merupakan piutang yang timbul atas bunga pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh, yaitu 0,5% dari pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 selama 10 Tahun (sejak November 2001 hingga Desember 2011) sebesar Rp25.570.066,02.

3) Piutang PT Pembangunan Dumai

Piutang PT Pembangunan Dumai sebesar Rp19.080.000,00 merupakan piutang yang timbul atas pembagian sewa gedung. Nilai sebesar Rp9.160.000,00 merupakan pendapatan sewa gedung yang belum diterima dari tahun 2012-2015, dan Rp9.920.000,00 merupakan sewa gedung tahun 2016 yang belum disetor. Untuk sewa gedung tahun 2012-2015 telah disetor ke kas daerah tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp9.070.000,00 sehingga sisa sewa gedung yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp10.010.000,00.

4) Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2018 sebesar Rp1.076.338.055,04 merupakan klaim Pemerintah Kota Dumai terhadap PNS Sdr. IS sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Jumlah tersebut berdasarkan Ketetapan Tim Majelis sesuai dengan SKTJM No. 01/TPKD/2017 tanggal 30 Maret 2017.

5) Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS merupakan terlanjur bayar gaji kepada PNS yang dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 18 orang PNS sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Terlanjur bayar gaji tersebut sebesar Rp944.782.150,00. Rincian piutang gaji PNS dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



6) Piutang Dana Transfer Provinsi

Piutang Dana Transfer Provinsi merupakan kelebihan pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2017 yang dikembalikan ke Provinsi pada Tahun Anggaran 2018. Piutang Dana Transfer Provinsi sebesar Rp.234.000.000,00.

b) Piutang Lainnya pada BLUD-RSUD

Piutang lainnya dari BLUD - RSUD tersebut dibenarkan karena sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009. Dimana dalam surat keputusan tersebut disebutkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam pengelolaan utang, piutang, dan investasi berdasarkan ketetapan kedua huruf (d) poin.

Piutang Lainnya pada BLUD-RSUD Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp32.830.424.095,00 atau naik sebesar Rp7.335.254.314,00 atau 28,77% dari TA 2017 sebesar Rp25.495.169.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Piutang Lainnya BLUD-RSUD Tahun 2018 dan 2017

No	Rincian Piutang BLUD-RSUD	Tahun 2017 (Rp)	Mutasi		Tahun 2018
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang jasa pelayanan	25.430.016.448,00	32.297.964.309,00	24.939.656.662,00	32.788.324.095,00
	Piutang jasa pelayanan tahun 2017	23.851.568.080,00	0,00	23.173.489.439,00	0,00
	Piutang jasa pelayanan tahun 2016	1.132.858.664,00	0,00	860.194.692,00	0,00
	Piutang jasa pelayanan tahun 2015	355.344.164,00	0,00	201.384.250,00	0,00
	Piutang jasa pelayanan tahun 2014	70.850.148,00	0,00	31.261.501,00	0,00
	Piutang jasa pelayanan tahun 2013	19.395.392,00	0,00	14.028.442,00	0,00
	Koreksi Piutang	0,00	0,00	659.298.338,00	0,00
2	Piutang Sewa	65.153.333,00	37.260.000,00	60.313.333,00	42.100.000,00
	Piutang Sewa tahun 2017	49.293.333,00	0,00	49.293.333,00	0,00
	Piutang Sewa tahun 2016	15.860.000,00	0,00	11.020.000,00	0,00
	Jumlah	25.495.169.781,00	32.335.224.309,00	24.999.969.995,00	32.830.424.095,00

c) Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas

Piutang BLUD - Puskesmas juga telah sesuai dengan telah Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 tanggal 5 Desember 2014.

Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp365.663.000,00 atau naik sebesar Rp73.640.000,00 atau 25,22% dari TA 2017 sebesar Rp292.023.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



11. Penyisihan Piutang

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
(56.183.505.320,84)	(51.695.435.666,55)	(4.488.069.654,29)	8,68

Penyisihan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp56.183.505.320,84. Jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan sebesar Rp4.488.069.654,29 atau 8,68 dari TA 2017 sebesar minus Rp51.695.435.666,55.

Penyisihan tersebut muncul akibat penerapan SAP berbasis akrual. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 5.3.30 Penyisihan Piutang per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	(3.250.500,00)	(1.770.000,00)	(1.480.500,00)	83,64
2	BLUD RSUD	(1.169.770.046,79)	(3.867.671.718,70)	2.697.901.671,91	(69,76)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(25.320.000,00)	(5.064.000,00)	(20.256.000,00)	400,00
4	Badan Pendapatan Daerah	(54.985.164.774,04)	(47.820.929.947,85)	(7.164.234.826,19)	14,98
Jumlah		(56.183.505.320,84)	(51.695.435.666,55)	(4.488.069.654,29)	8,68

12. Persediaan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
14.877.142.210,08	13.952.807.193,67	924.335.016,41	6,62

Persediaan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp14.877.142.210,08 atau naik sebesar Rp924.335.016,41 atau 6,62% dari TA 2017 sebesar Rp13.952.807.193,67. dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.31 Persediaan Per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.609.550,00	8.466.900,00	(4.857.350,00)	(57,37)
2	Dinas Kesehatan	4.997.860.952,08	4.433.470.017,67	564.390.934,41	12,73
3	BLUD Puskesmas Dumai Kota	4.190.300,00	10.853.000,00	(6.662.700,00)	(61,39)
4	BLUD Puskesmas Dumai Barat	7.003.500,00	4.661.000,00	2.342.500,00	50,26
5	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.865.000,00	1.236.650,00	628.350,00	50,81
6	BLUD Puskesmas	323.000,00	1.344.000,00	(1.021.000,00)	(75,97)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
	Sungai Sembilan				
7	BLUD Puskesmas Medang Kampai	3.863.500,00	4.822.000,00	(958.500,00)	(19,88)
8	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	9.433.000,00	9.891.000,00	(458.000,00)	(4,63)
9	BLUD Puskesmas Bukit Timah	643.550,00	615.000,00	28.550,00	4,64
10	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	4.197.750,00	3.635.400,00	562.350,00	15,47
11	BLUD Puskesmas Purnama	3.650.500,00	4.447.000,00	(796.500,00)	(17,91)
12	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	12.382.000,00	7.297.450,00	5.084.550,00	69,68
13	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.695.163.581,00	2.984.096.178,00	(1.288.932.597,00)	(43,19)
14	BLUD RSUD	6.006.345.915,00	3.622.218.516,00	2.384.127.399,00	65,82
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	908.952.880,00	1.542.099.610,00	(633.146.730,00)	(41,06)
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	306.899.800,00	345.348.728,00	(38.448.928,00)	(11,13)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.928.825,00	1.945.575,00	(16.750,00)	(0,86)
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.050.000,00	2.125.000,00	(1.075.000,00)	(50,59)
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.227.021,00	2.958.900,00	268.121,00	9,06
20	Dinas Sosial	790.556,00	1.484.818,00	(694.262,00)	(46,76)
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	750.400,00	608.750,00	141.650,00	23,27
22	Dinas Lingkungan Hidup	42.697.063,00	15.810.442,00	26.886.621,00	170,06
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.184.730,00	2.101.800,00	7.082.930,00	336,99
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	302.716.416,00	464.021.600,00	(161.305.184,00)	(34,76)
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	864.165,00	0,00	864.165,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	188.000.647,00	215.467.483,00	(27.466.836,00)	(12,75)
27	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.490.200,00	1.492.800,00	(2.600,00)	(0,17)
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.577.419,00	2.125.427,00	28.451.992,00	1.338,65
28	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	457.300,00	746.500,00	(289.200,00)	(38,74)
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	952.200,00	82.275,00	869.925,00	1.057,34
30	Dinas Perikanan	6.376.000,00	1.857.195,00	4.518.805,00	243,31
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	73.671.600,00	49.834.650,00	23.836.950,00	47,83
32	Dinas Perdagangan	1.019.000,00	1.042.200,00	(23.200,00)	(2,23)
33	Sekretariat Daerah	16.613.850,00	11.349.545,00	5.264.305,00	46,38
34	Sekretariat DPRD	7.478.980,00	8.886.975,00	(1.407.995,00)	(15,84)
35	Kecamatan Dumai	1.513.000,00	4.297.510,00	(2.784.510,00)	(64,79)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	Rasio %
	Barat				
36	Kecamatan Dumai Timur	987.800,00	788.150,00	199.650,00	25,33
37	Kecamatan Bukit Kapur	1.432.200,00	615.749,00	816.451,00	132,59
38	Kecamatan Medang Kampai	1.326.750,00	1.465.750,00	(139.000,00)	(9,48)
39	Kecamatan Sungai Sembilan	601.000,00	323.400,00	277.600,00	85,84
40	Kecamatan Dumai Kota	7.064.900,00	7.507.500,00	(442.600,00)	(5,90)
41	Kecamatan Dumai Selatan	718.460,00	666.180,00	52.280,00	7,85
42	Inspektorat	2.132.600,00	3.968.030,00	(1.835.430,00)	(46,26)
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.565.700,00	99.956.500,00	(24.390.800,00)	(24,40)
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.721.400,00	5.083.140,00	(1.361.740,00)	(26,79)
45	Badan Pendapatan Daerah	124.957.000,00	58.912.000,00	66.045.000,00	112,11
46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	890.250,00	778.900,00	111.350,00	14,30
	Jumlah	14.877.142.210,08	13.952.807.193,67	924.335.016,41	6,62

Tabel 5.3.32 Persediaan per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Rincian Persediaan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio%
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	280.333.160,00	31.753.251,00	248.579.909,00	782,85
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	327.980.640,00	619.334.678,00	(291.354.038,00)	(47,04)
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	8.805.000,00	3.867.000,00	4.938.000,00	127,70
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	327.768.246,00	151.951.350,00	175.816.896,00	115,71
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	98.311.500,00	67.414.450,00	30.897.050,00	45,83
6	Persediaan Isi tabung gas	19.951.000,00	48.480.000,00	(28.529.000,00)	(58,85)
7	Persediaan Barang Cetakan	455.560.100,00	463.338.401,00	(7.778.301,00)	(1,68)
8	Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan	5.676.666.284,23	4.727.462.067,88	949.204.216,35	20,08
9	Persediaan Bahan obat-obatan	5.879.498.032,05	5.947.380.358,79	(67.882.326,74)	(1,14)
10	Persediaan Bahan kimia	1.583.168.247,80	1.785.772.327,00	(202.604.079,20)	(11,35)
11	Persediaan Suku Cadang Sarana	219.100.000,00	106.053.310,00	113.046.690,00	106,59
	Jumlah	14.877.142.210,08	13.952.807.193,67	924.335.016,41	6,62



a) **Persediaan Alat Tulis Kantor**

Persediaan Alat Tulis Kantor Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp280.333.160,00 atau naik sebesar Rp248.579.909,00 atau 782,85% dari TA 2017 sebesar Rp31.753.251,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.33 Persediaan ATK per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.547.400,00	3.947.400,00	(1.400.000,00)	(35,47)
2	Dinas Kesehatan	95.570.900,00	77.276.500,00	18.294.400,00	23,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.377.000,00	4.909.850,00	(2.532.850,00)	(51,59)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.788.507,00	0,00	6.788.507,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.756.800,00	1.451.000,00	4.305.800,00	296,75
	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	(240.140.400,00)	240.140.400,00	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.187.625,00	1.760.375,00	(572.750,00)	(32,54)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.050.000,00	2.125.000,00	(1.075.000,00)	(50,59)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.245.974,00	452.800,00	793.174,00	175,17
9	Dinas Sosial	503.800,00	584.050,00	(80.250,00)	(13,74)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	497.900,00	551.750,00	(53.850,00)	(9,76)
11	Dinas Lingkungan Hidup	286.165,00	0,00	286.165,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.150.800,00	(1.150.800,00)	(100,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.319.330,00	59.150,00	3.260.180,00	5.511,72
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.490.200,00	1.492.800,00	(2.600,00)	(0,17)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.830.919,00	1.753.427,00	77.492,00	4,42
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	457.300,00	1.005.400,00	(548.100,00)	(54,52)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	952.200,00	82.275,00	869.925,00	1.057,34
20	Dinas Perikanan	0,00	788.195,00	(788.195,00)	(100,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	360.600,00	153.650,00	206.950,00	134,69
22	Dinas Perdagangan	319.000,00	994.200,00	(675.200,00)	(67,91)
23	Sekretariat Daerah	6.515.050,00	4.628.945,00	1.886.105,00	40,75



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
24	Sekretariat DPRD	3.085.780,00	3.205.975,00	(120.195,00)	(3,75)
25	Kecamatan Dumai Barat	615.000,00	2.442.960,00	(1.827.960,00)	(74,83)
26	Kecamatan Dumai Timur	552.200,00	455.400,00	96.800,00	21,26
27	Kecamatan Bukit Kapur	784.200,00	233.749,00	550.451,00	235,49
28	Kecamatan Medang Kampai	663.000,00	1.465.750,00	(802.750,00)	(54,77)
29	Kecamatan Sungai Sembilan	337.000,00	147.400,00	189.600,00	128,63
30	Kecamatan Dumai Kota	4.562.300,00	5.500.000,00	(937.700,00)	(17,05)
31	Kecamatan Dumai Selatan	407.460,00	355.180,00	52.280,00	14,72
32	Inspektorat	1.142.700,00	1.673.630,00	(530.930,00)	(31,72)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67.157.700,00	88.272.000,00	(21.114.300,00)	(23,92)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	442.400,00	3.283.140,00	(2.840.740,00)	(86,53)
35	Badan Pendapatan Daerah	66.369.500,00	58.912.000,00	7.457.500,00	12,66
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	890.250,00	778.900,00	111.350,00	14,30
Jumlah		280.333.160,00	31.753.251,00	248.579.909,00	782,85

b) Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp327.980.640,00 atau turun sebesar Rp291.354.038,00 atau 47,04% dari TA 2017 sebesar Rp619.334.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.34 Persediaan Alat Listrik per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	2.179.000,00	328.000,00	1.851.000,00	564,33
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	20.971.640,00	34.308.050,00	(13.336.410,00)	(38,87)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	568.000,00	5.680.000,00	(5.112.000,00)	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	301.143.000,00	343.897.728,00	(42.754.728,00)	(12,43)
5	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	232.957.900,00	(232.957.900,00)	(100,00)
6	Dinas Perikanan	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
7	Sekretariat DPRD	1.259.000,00	2.163.000,00	(904.000,00)	(41,79)
Jumlah		327.980.640,00	619.334.678,00	(291.354.038,00)	(47,04)



c) Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya

Persediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp8.805.000,00 atau naik sebesar Rp4.938.000,00 atau 127,70% dari TA 2017 sebesar Rp3.867.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.35 Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD
Tahun 2018 dan 2017**

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	8.805.000,00	3.843.000,00	4.962.000,00	129,12
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	24.000,00	(24.000,00)	(100,00)
Jumlah		8.805.000,00	3.867.000,00	4.938.000,00	127,70

d) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp327.768.246,00 atau naik sebesar Rp175.816.896,00 atau 115,71% dari TA 2017 sebesar Rp175.816.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Persediaan Peralatan Kebersihan per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	3.564.000,00	3.834.800,00	(270.800,00)	(7,06)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	282.059.700,00	138.748.450,00	143.311.250,00	103,29
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.773,00	0,00	322.773,00	0,00
4	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	7.182.500,00	(7.182.500,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	185.400,00	185.200,00	200,00	0,11
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	270.000,00	995.600,00	(725.600,00)	(72,88)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	57.000,00	(57.000,00)	(100,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	39.983.123,00	0,00	39.983.123,00	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	(73.700,00)	73.700,00	(100,00)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Perikanan	386.000,00	219.000,00	167.000,00	76,26
13	Kecamatan Medang Kampai	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	673.500,00	802.500,00	(129.000,00)	(16,07)
Jumlah		327.768.246,00	151.951.350,00	175.816.896,00	115,71



e) Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp98.311.500,00 atau naik sebesar Rp30.897.050,00 atau 45,83% dari TA 2017 sebesar Rp67.414.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.37 Persediaan Bahan Bakar Minyak per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	87.686.000,00	59.820.000,00	27.866.000,00	46,58
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	682.500,00	122.250,00	560.250,00	458,28
3	Sekretariat Daerah	7.683.000,00	5.672.200,00	2.010.800,00	35,45
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.260.000,00	1.800.000,00	460.000,00	25,56
Jumlah		98.311.500,00	67.414.450,00	30.897.050,00	45,83

f) Persediaan Isi tabung gas

Persediaan Isi tabung gas Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp19.951.000,00 atau turun sebesar Rp28.529.000,00 atau 58,85% dari TA 2017 sebesar Rp48.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38 Persediaan Isi Tabung Gas per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19.951.000,00	48.480.000,00	(28.529.000,00)	(58,85)
Jumlah		19.951.000,00	48.480.000,00	(28.529.000,00)	(58,85)

g) Persediaan Barang Cetak

Persediaan Barang Cetak Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp455.560.100,00 atau turun sebesar Rp7.778.301,00 atau 1,68% dari TA 2017 sebesar Rp463.338.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.39 Persediaan Barang Cetak per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.062.150,00	4.519.500,00	(3.457.350,00)	(76,50)
2	Dinas Kesehatan	33.612.200,00	54.817.750,00	(21.205.550,00)	(38,68)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	107.426.000,00	161.153.000,00	(53.727.000,00)	(33,34)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	555.800,00	0,00	555.800,00	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.711.047,00	1.510.500,00	200.547,00	13,28



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
7	Dinas Sosial	286.756,00	900.768,00	(614.012,00)	(68,17)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.865.400,00	951.000,00	4.914.400,00	516,76
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	188.000.647,00	215.467.483,00	(27.466.836,00)	(12,75)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.661.500,00	372.000,00	28.289.500,00	7.604,70
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	(209.200,00)	209.200,00	(100,00)
14	Dinas Perikanan	4.130.000,00	850.000,00	3.280.000,00	385,88
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	953.000,00	151.000,00	802.000,00	531,13
16	Dinas Perdagangan	700.000,00	48.000,00	652.000,00	1.358,33
17	Sekretariat Daerah	2.415.800,00	1.048.400,00	1.367.400,00	130,43
18	Sekretariat DPRD	3.134.200,00	3.518.000,00	(383.800,00)	(10,91)
19	Kecamatan Dumai Barat	898.000,00	1.854.550,00	(956.550,00)	(51,58)
20	Kecamatan Dumai Timur	435.600,00	332.750,00	102.850,00	30,91
21	Kecamatan Bukit Kapur	648.000,00	382.000,00	266.000,00	69,63
22	Kecamatan Medang Kampai	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	264.000,00	176.000,00	88.000,00	50,00
24	Kecamatan Dumai Kota	2.502.600,00	2.007.500,00	495.100,00	24,66
25	Kecamatan Dumai Selatan	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	989.900,00	2.294.400,00	(1.304.500,00)	(56,86)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.734.500,00	10.882.000,00	(3.147.500,00)	(28,92)
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00
29	Badan Pendapatan Daerah	58.587.500,00	0,00	58.587.500,00	0,00
Jumlah		455.560.100,00	463.338.401,00	(7.778.301,00)	(1,68)

h) Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan

Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp5.676.666.284,23 atau naik sebesar Rp949.204.216,35 atau 20,08% dari TA 2017 sebesar Rp4.727.462.067,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.40 Persediaan BHP Kesehatan per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	1.187.742.748,23	855.868.842,88	331.873.905,35	38,78
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.161.326.120,00	3.871.593.225,00	289.732.895,00	7,48



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	302.449.416,00	0,00	302.449.416,00	0,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.148.000,00	0,00	25.148.000,00	0,00
Jumlah		5.676.666.284,23	4.727.462.067,88	949.204.216,35	20,08

i) Persediaan Bahan obat-obatan

Persediaan Bahan obat-obatan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp5.879.498.032,05 atau turun sebesar Rp67.882.326,74 atau 1,14% dari TA 2017 sebesar Rp5.947.380.358,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.41 Persediaan Bahan Obat-obatan per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	2.725.572.496,05	3.106.831.039,79	(381.258.543,74)	(12,27)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.106.715.536,00	2.343.721.869,00	762.993.667,00	32,55
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	463.962.450,00	(463.962.450,00)	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.210.000,00	32.865.000,00	14.345.000,00	43,65
Jumlah		5.879.498.032,05	5.947.380.358,79	(67.882.326,74)	(1,14)

j) Persediaan Bahan kimia

Persediaan Bahan Kimia Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp1.583.168.247,80 atau turun sebesar Rp202.604.079,20 atau 11,35% dari TA 2017 sebesar Rp1.785.772.327,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.42 Persediaan Bahan Kimia per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Kesehatan	900.680.707,80	319.652.585,00	581.028.122,80	181,77
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	679.773.600,00	3.278.000,00	676.495.600,00	20.637,45
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.430.366.300,00	(1.430.366.300,00)	(100,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	2.713.940,00	15.810.442,00	(13.096.502,00)	(82,83)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	16.665.000,00	(16.665.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.583.168.247,80	1.785.772.327,00	(202.604.079,20)	(11,35)

k) Persediaan Suku Cadang Sarana



Persediaan Suku Cadang Sarana Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp219.100.000,00 atau naik sebesar Rp113.046.690,00 atau 106,59% dari TA 2017 sebesar Rp106.053.310,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43 Persediaan Suku Cadang Sarana per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.100.000,00	106.053.310,00	113.046.690,00	106,59
Jumlah		219.100.000,00	106.053.310,00	113.046.690,00	106,59

13. Asuransi dibayar dimuka

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
132.185.800,84	107.364.963,17	24.820.837,67	23.12

Asuransi dibayar dimuka adalah bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum dibebankan seluruhnya pada akhir tahun berjalan. Asuransi dibayar dimuka pada tahun 2018 sebesar Rp132.185.800,84 atau naik sebesar Rp24.820.837,67 atau 23.12% dari TA 2017 sebesar Rp107.364.963,17 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.43 Asuransi dibayar dimuka per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
				(Rp)	Rasio%
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.366.666,67	4.695.834,00	670.832,67	14,29
2	Sekretariat Daerah	6.337.500,00	95.549.254,17	(89.211.754,17)	(93,37)
3	Sekretariat DPRD	120.481.634,17	7.119.875,00	113.361.759,17	1.592,19
Jumlah		132.185.800,84	107.364.963,17	24.820.837,67	23,12

b. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
84.204.398.346,11	89.453.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,87)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp84.204.398.346,11 atau turun sebesar Rp5.249.014.657,55 atau 5.87% dari TA 2017 sebesar Rp89.453.413.003,66 Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.44 Rincian Investasi Jangka Panjang per Jenis Tahun 2018 dan 2017

Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
			(Rp)	Rasio %
Investasi Non Permanen Lainnya	8.917.780.000,00	8.915.980.000,00	1.800.000,00	0,02
Penyisihan Investasi Non	(8.657.780.000,00)	(8.655.980.000,00)	1.800.000,00	0,02



Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
			(Rp)	Rasio %
Permanen Lainnya				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	83.944.398.346,11	89.193.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,88)
	84.204.398.346,11	89.453.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,87)

1. Investasi Non Permanen

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
8.917.780.000,00	8.915.980.000,00	1.800.000,00	0,02

a. Investasi Non Permanen Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
8.917.780.000,00	8.915.980.000,00	1.800.000,00	0,02

Investasi Non Permanen Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp8.915.980.000,00 mengalami Kenaikan Sebesar Rp1.800.000,00 atau 0,02% dari TA 2017 sebesar Rp8.915.980.000,00 Rincian Investasi Non Permanen Tahun 2018 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.45 Rincian Investasi Non Permanen Lainnya per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Nama Peminjam	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi				
	-Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pinjaman kepada lembaga lainnya				
	-Koperasi Putri Tujuh	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
	- Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Diseperindag	571.900.000,00	570.100.000,00	1.800.000,00	0,02
	- Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	1.085.880.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.917.780.000,00	8.915.980.000,00	1.800.000,00	0,02

1) Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi

Pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) berlangsung sejak Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang digunakan dalam rangka penyaluran dana bergulir kepada masyarakat/kelompok masyarakat. LEK merupakan lembaga penyalur dana bergulir kepada masyarakat. LEK berhak untuk menilai kelayakan peminjam dalam mengelola dana. Nilai yang disajikan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dumai untuk tahun yang berakhir 31



Desember 2008 dan 2007 oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Toha, CPA tertanggal 29 Maret 2010.

2) Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh

Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Puteri Tujuh sebesar Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Nopember 2001. Dana tersebut digunakan oleh Koperasi Puteri Tujuh untuk membeli sebidang tanah yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Nilai Pinjaman Koperasi Putri tujuh sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp260.000.000 pinjaman tersebut telah dibayar di tahun 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 tahun 2017 sebesar Rp90.000.000,00, dan tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00.

3) Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Disperindag

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00 Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2018 masih terdapat tunggakan sebesar Rp571.900.000,00. Daftar pinjaman dan tunggakan dana bergulir Dinas Perdagangan periode 2007 dan 2008 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Berdasarkan hasil Pengawasan dan Pembinaan Penerima Bantuan Modal Usaha TA. 2007 dan 2008 yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2014 dari sisa tunggakan sebesar Rp571.900.000,00 didapat hasil :

No.	Hasil Pengawasan	Jumlah
1.	Meninggal Dunia	15 Orang
2.	Tidak Diketahui Keberadaannya	40 Orang
3	Lunas	21 Orang
4.	Usaha Tutup dan Tak Sanggup Membayar dan alasan lainnya	360 Orang
Total		436 Orang

4) Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Usaha Kecil. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total sebesar Rp2.250.000.000.000,00 Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2018 masih terdapat tunggakan sebesar Rp1.085.880.000,00. Daftar pinjaman dan tunggakan UKM periode 2007 dan 2008 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

b) Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %



(8.657.780.000,00)	(8.655.980.000,00)	(1.800.000,00)	0,02
--------------------	--------------------	----------------	------

Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp8.657.780.000,00. merupakan penyisihan dana bergulir sebesar 100% atas dana bergulir yang jatuh tempo mulai lima tahun ke atas. yang terdiri dari penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK sebesar Rp7.000.000.000,00. penyisihan pinjaman usaha kecil dan koperasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp571.900.000,00 dan penyisihan investasi non permanen pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.085.880.000,00.

b. Investasi Permanen

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
83.944.398.346,11	89.193.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,88)

Investasi Permanen Kota Dumai Tahun 2018 sebesar Rp83.944.398.346,11 atau turun sebesar Rp5.249.014.657,55 dari TA 2017 sebesar Rp89.193.413.003.66. Penurunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
83.944.398.346,11	89.193.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,88)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 sebesar Rp83.944.398.346,11 atau turun sebesar Rp5.249.014.657,55 dari TA 2017 sebesar Rp89.193.413.003,66. tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.46 Rincian Investasi Permanen per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Nama	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	PT.Bank Riau	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00
2	PT.Pelabuhan Dumai Berseri	7.534.333.819,56	7.000.061.181,52	534.272.638,05	7,63
3	PT.Pembangunan Dumai	31.695.513.346,54	31.844.353.355,14	(148.840.008,60)	(0,47)
4	PT Riau Air Line	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	34.111.551.180,00	39.745.998.467,00	(5.634.447.287,00)	(14,18)
Jumlah		83.944.398.346,11	89.193.413.003,66	(5.249.014.657,55)	(5,88)

a) PT.Bank Riau

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.203.000.000,00 yang terdiri dari atas 52.030 lembar saham dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,50%. Dengan demikian penilaian penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan metode cost.



b) PT. Pelabuhan Dumai Berseri

Nilai Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai Berseri per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.534.333.819,56 dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,95%, sehingga disajikan dengan metode ekuitas. Perhitungan nilai penyertaan pada PT Pelabuhan Dumai Berseri berdasarkan Laporan Keuangan 2018 PT Pelabuhan Dumai Berseri (Audited) dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
a	Modal dan Cadangan		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	8.217.600.000,00	Modal Saham
2	Laba/Rugi Ditahan	(1.214.037.037,00)	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Laba/Rugi Periode Berjalan	758.688.411,00	Laba Tahun Berjalan
	Deviden	(224.148.503,00)	Tahun Berjalan
	Koreksi Laba Ditahan	0,00	-
	Jumlah a	7.538.102.871,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,95%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	7.534.333.819,56	Ekuitas Yang Diakui Sebesar Kepemilikan

c) PT.Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp31.695.513.346,54 dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,97%. Penilaian penyertaan modal pada PT Pembangunan Dumai dengan menggunakan metode equity. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 sebesar Rp28.000.000.000,00 ditambah penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp2.050.000.000,00 dan modal tambahan berupa aset tetap tanah sebesar Rp1.122.264.000,00 ditambah penambahan modal Rp10.000.000,00 ditambah saldo Rugi tahun 2018 sebesar Rp148.884.674,00 dikalikan dengan persentase kepemilikan.

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
a	Modal dan Cadangan		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	31.182.264.000,00	Modal Saham
2	Laba / (Rugi) Ditahan	671.645.528,00	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Laba / (Rugi) Periode Berjalan	1.330.468.258,00	Laba Tahun Berjalan
	Deviden	(1.479.352.932,00)	Tahun Berjalan
	Koreksi Laba Ditahan	0,00	
	Jumlah a	31.705.024.854,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,97%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	31.695.513.346,54	Ekuitas Yang Diakui Sebesar Kepemilikan



d) PT.Riau Air Line

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Airline per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.400.000.000,00 terdiri dari 5.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham. Persentase kepemilikan Pemerintah Kota Dumai pada PT. Riau Airline per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,42% menggunakan metode cost. Dan selama Tahun 2016, Pemerintah Kota Dumai tidak menambah penyertaan modalnya pada PT Riau Airline.

e) PDAM Tirta Dumai Bersemay

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemay per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.111.551.180,00. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai penyertaan modal Tahun 2014 sebesar Rp63.623.912.000,00, dengan prosentase kepemilikan sebesar 100% dikurangi saldo laba-rugi ditahan sebesar Rp29.021.763.953,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp5.634.447.287,00 Penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemay dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Modal dan Cadangan		
1	Modal Awal (Aset)	53.303.392.000,00	
	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	10.320.520.000,00	
	Jumlah Modal	63.623.912.000,00	
2	Laba / (Rugi) Ditahan	(23.877.913.533,00)	Saldo laba (rugi) Tahun Lalu
3	Laba / (Rugi) Ditahan	(5.124.811.526,00)	Tahun Berjalan
4	Koreksi Saldo Laba (Rugi)	(509.635.761,00)	
	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	34.111.551.180,00	Ekuitas Akhir 100%

c. Aset Tetap

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
2.411.262.507.844,15	2.276.695.864.562,62	134.566.643.281,53	5,91

Aset Tetap Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp2.411.262.507.844,15 atau mengalami peningkatan sebesar Rp134.566.643.281,53 atau 5,91 dengan TA 2017 sebesar Rp2.276.695.864.562,62. rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.47 Aset Tetap per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Tanah	574.877.948.914,11	315.801.435.970,00	259.076.512.944,11	82,04
2	Peralatan dan Mesin	550.163.057.868,88	535.374.716.324,56	14.788.341.544,32	2,76



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
3	Gedung dan Bangunan	804.630.710.921,33	788.877.396.830,24	15.753.314.091,10	2,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.142.448.007.445,23	2.063.566.603.064,09	78.881.404.381,15	3,82
5	Aset Tetap Lainnya	31.685.503.907,87	24.317.205.372,87	7.368.298.535,00	30,30
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	212.826.622.471,92	206.189.872.475,87	6.636.749.996,05	3,22
7	Akumulasi Penyusutan	(1.905.369.343.685,19)	(1.657.431.365.475,00)	(247.937.978.210,19)	14,96
Jumlah		2.411.262.507.844,15	2.276.695.864.562,62	134.566.643.281,53	5,91

Peningkatan aset tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI (Rp)
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	179.589.750.395,56
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	26.953.836.956,83
Reklasifikasi Masuk	3.461.469.551,28
Hibah	16.742.219.804,00
Hasil Inventarisasi	388.984.367.944,11
Koreksi Pencatatan	5.464.639.820,20
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	621.196.284.471,98
Pengurangan (b)	
Penghapusan	10.448.718.133,10
Transfer ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	26.953.836.956,84
Reklasifikasi Keluar	3.276.284.551,28
Hibah	3.856.188.000,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	21.823.361.955,06
Koreksi Pencatatan	165.664.441.983,98
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	232.022.831.580,26
Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan (c)	(249.338.945.740,19)
Kenaikan/(Penurunan) = (a) - (b) + (c)	139.834.507.151,53

Keterangan:



1. Pengadaan adalah penambahan aset tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan. sedangkan penghapusan adalah kebalikannya yaitu pengurangan aset tetap karena dihapuskan.
2. Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan aset tetap akibat aset tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan. sedangkan transfer ke aset tetapnya adalah pengurangan aset tetap KDP akibat telah selesai Tahun pelaporan.
3. Transfer masuk adalah penambahan aset tetap dari SKPD lain dalam satu entitas pelaporan. sedangkan Transfer keluar adalah pengurangan aset tetap akibat penyerahan aset tetap ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan.
4. Reklasifikasi masuk adalah penambahan aset tetap dari jenis aset tetap yang lain atau aset lainnya dalam satu SKPD. sedangkan reklasifikasi keluar adalah pengurangan aset tetap kepada jenis aset tetap yang lain atau aset lainnya dalam satu SKPD.
5. Penerimaan Hibah adalah penambahan aset tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun. sedangkan pemberian hibah adalah pengurangan aset tetap akibat memberikan aset tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.
6. Koreksi pencatatan adalah mengkoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam laporan keuangan (akun aset tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
7. Koreksi Rekon Saldo Awal (LK audited dengan BI Tahun 2017) adalah mengkoreksi pencatatan baik kurang/lebih catat dalam laporan keuangan akibat rekonsiliasi saldo aset tetap audited Tahun 2016 dengan Buku Inventaris Tahun 2017

Penambahan aset tetap hasil pengadaan APBD 2018 sebesar Rp179.589.750.395,56 jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp 174.257.095.382,00 sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2018 terdapat selisih lebih sebesar Rp 5.332.655.013,56. Selisih lebih tersebut disebabkan oleh penambahan aset yang berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan utang pada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	174.257.095.382,00
	Belanja Pegawai	8.700.000,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	6.387.941.098,56
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	377.661.887,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	18.781.978.542,00
	Masuk dari BM JJI	194.639.520,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	2.874.285.001,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	1.105.138.915,00
	Jumlah ---1	203.987.440.345,56



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2.	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(2.557.819.477,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bangunan	(592.102.931,00)
	Keluar ke aset JJI	(15.780.000,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	(49.800.000,00)
	Keluar ke aset KDP	(18.767.997.542,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	(864.813.000,00)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(1.549.377.000,00)
	Jumlah ---2	(24.397.689.950,00)
3.	Selisih lebih/(kurang)	179.589.750.395,56

Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
574.877.948.914,11	315.801.435.970,00	259.076.512.944,11	82,04

Aset Tanah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp574.877.948.914,11 naik sebesar Rp259.076.512.944,11 atau 82,04% dari TA 2017 sebesar Rp315.801.435.970,00.

Kenaikan tersebut diantaranya disebabkan pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Dumai melakukan perhitungan nilai aset tetap tanah dibawah jalan sebesar Rp353.344.718.944,11 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 310/BPKAD/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan nilai aset tetap tanah dibawah jalan Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya terdapat kenaikan Aset Tanah yang diperoleh dari hibah tanah yang berasal dari PT. PATRA DOCK DUMAI berdasarkan berita acara serah terima tanggal 11 Juli 2016 tentang penyerahan tanah EKS-PT.PATRA DOCK dan berdasarkan laporan penilaian oleh KPKNL DUMAI No. SR-10/WKN.03/KNL.05/2019 Tanggal 22 Februari 2019 Senilai Rp15.574.122.000,00 terhadap bidang tanah.

Dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.47 Aset Tanah per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.554.750.350,00	128.481.964.850,00	(106.927.214.500,00)	(83,22)
2	Dinas Kesehatan	4.801.567.100,00	4.303.950.500,00	497.616.600,00	11,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.917.768.000,00	3.917.768.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan	355.563.218.944,11	2.218.500.000,00	353.344.718.944,11	15.927,19



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
	Penataan Ruang				
5	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	1.323.700.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	739.200.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	3.168.670.000,00	(263.670.000,00)	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	1.444.800.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	100,00
10	Dinas Perhubungan	11.948.585.000,00	13.346.245.000,00	(1.397.660.000,00)	(10,47)
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.713.409.191,00	9.713.409.191,00	0,00	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	106.624.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	6.759.158.571,00	0,00	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	13.048.562.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perdagangan	7.521.146.640,00	8.082.026.640,00	(560.880.000,00)	(6,94)
16	Sekretariat Daerah	108.796.125.046,00	110.102.695.146,00	(1.306.570.100,00)	(1,19)
17	Kecamatan Dumai Barat	1.658.107.992,00	1.658.107.992,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Timur	2.480.278.280,00	2.677.478.280,00	(197.200.000,00)	
19	Kecamatan Bukit Kapur	820.615.000,00	276.165.000,00	544.450.000,00	0,00
20	Kecamatan Medang Kampai	342.320.000,00	342.320.000,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	928.530.250,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Dumai Kota	1.977.777.000,00	1.977.777.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Selatan	898.283.550,00	1.129.483.550,00	(231.200.000,00)	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	15.574.122.000,00	0,00	15.574.122.000,00	0,00
Jumlah		574.877.948.914,11	315.801.435.970,00	259.076.512.944,11	82,04

Peningkatan aset tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI (Rp)
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	0,00
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

URAIAN		NILAI (Rp)
	Transfer Masuk	1.754.216.600,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	15.574.122.000,00
	Hasil Inventarisasi	353.344.718.944,11
	Koreksi Pencatatan	12.150.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	370.685.207.544,11
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	165.710.000,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	1.754.216.600,00
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	263.670.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	109.425.098.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	111.608.694.600,00
	Kenaikan/(Penurunan) --2	259.076.512.944,11

Tabel 5.3.48 Mutasi Aset Tanah per OPD Tahun 2018 dan 2017

NO	OPD	TAHUN 2017 (Rp)	MUTASI		TAHUN 2018 (Rp)
			TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.481.964.850,00	-	106.927.214.500,00	21.554.750.350,00
2	Dinas Kesehatan	4.303.950.500,00	1.197.616.600,00	700.000.000,00	4.801.567.100,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.917.768.000,00	-	-	3.917.768.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.218.500.000,00	353.344.718.944,11	-	355.563.218.944,11
9	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	-	-	1.323.700.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	-	-	739.200.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.168.670.000,00	-	263.670.000,00	2.905.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	-	-	1.444.800.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan	54.300.000,00	-	-	54.300.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	OPD	TAHUN 2017 (Rp)	MUTASI		TAHUN 2018 (Rp)
			TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
	Keluarga Berencana				
15	Dinas Perhubungan	13.346.245.000,00	12.150.000,00	1.409.810.000,00	11.948.585.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.713.409.191,00	-	-	9.713.409.191,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	-	-	106.624.000,00
20	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	-	-	6.759.158.571,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	-	-	13.048.562.000,00
22	Dinas Perdagangan	8.082.026.640,00	-	560.880.000,00	7.521.146.640,00
23	Sekretariat Daerah	110.102.695.146,00	-	1.306.570.100,00	108.796.125.046,00
25	Kecamatan Dumai Barat	1.658.107.992,00	-	-	1.658.107.992,00
26	Kecamatan Dumai Timur	2.677.478.280,00	-	197.200.000,00	2.480.278.280,00
27	Kecamatan Bukit Kapur	276.165.000,00	544.450.000,00	-	820.615.000,00
28	Kecamatan Medang Kampai	342.320.000,00	-	-	342.320.000,00
29	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	-	-	928.530.250,00
30	Kecamatan Dumai Kota	1.977.777.000,00	-	-	1.977.777.000,00
31	Kecamatan Dumai Selatan	1.129.483.550,00	-	231.200.000,00	898.283.550,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	15.574.122.000,00	-	15.574.122.000,00
	JUMLAH	315.801.435.970	370.673.057.544,11	111.596.544.600,00	574.877.948.914,11

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
550.163.057.868,88	535.374.716.324,56	14.788.341.544,32	2,76

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp550.163.057.868,88 atau naik sebesar Rp14.788.341.544,32 atau 2,76% dari TA 2017 sebesar Rp535.374.716.324,56 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.49 Rincian Aset Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017	Peningkatan (Penurunan)
----	----------	------------	------------	-------------------------



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79.286.144.620,63	76.594.789.486,06	2.691.355.134,57	3,50
2	Dinas Kesehatan	44.745.913.409,83	43.240.387.360,83	1.505.526.049,00	3,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah	155.528.847.996,30	151.049.713.657,50	4.479.134.338,80	2,92
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.098.883.990,08	36.189.439.791,08	(90.555.801,00)	0,05
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.719.470.746,00	3.585.686.746,00	133.784.000,00	3,73
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.353.551.275,00	3.332.832.275,00	20.719.000,00	0,62
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.659.428.910,00	8.601.728.340,00	57.700.570,00	0,67
8	Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.064.421.284,00	2.024.421.284,00	40.000.000,00	0,35
9	Dinas Sosial	3.259.301.400,00	2.858.002.400,00	401.299.000,00	14,04
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.385.198.100,00	4.323.941.250,00	61.256.850,00	1,42
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.186.257.792,00	2.138.708.187,00	47.549.605,00	2,22
12	Dinas Lingkungan Hidup	15.581.385.234,00	15.313.386.750,00	267.998.484,00	1,75
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.951.470.225,00	5.352.281.725,00	(400.811.500,00)	(7,49)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.838.347.898,00	2.481.077.898,00	357.270.000,00	14,40
15	Dinas Perhubungan	19.726.764.391,00	18.941.309.991,00	785.454.400,00	5,08
16	Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	3.574.981.209,09	3.606.601.354,00	(31.620.144,91)	(1,82)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.318.497.859,00	5.395.822.485,00	922.675.374,00	17,04
18	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	2.347.437.144,00	2.277.149.267,00	70.287.877,00	3,09
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.188.472.488,40	2.772.850.676,40	415.621.812,00	14,99
20	Dinas Perikanan	5.182.850.863,00	6.930.690.743,00	(1.747.839.880,00)	(25,22)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.792.199.268,20	11.614.178.218,00	178.021.050,20	1,53
22	Dinas Perdagangan	5.119.444.597,86	3.932.692.514,53	1.186.752.083,33	30,18
23	Sekretariat Daerah	63.758.116.440,16	61.337.743.390,16	2.420.373.050,00	3,95
24	Sekretariat DPRD	14.421.119.347,00	15.201.547.502,00	(780.428.155,00)	(5,13)
25	Kecamatan Dumai Barat	1.561.647.580,00	1.773.554.080,00	(211.906.500,00)	(11,95)
26	Kecamatan Dumai Timur	2.194.720.170,00	2.385.959.860,00	(191.239.690,00)	(8,02)
27	Kecamatan Bukit Kapur	1.787.851.885,00	1.782.749.529,00	5.102.356,00	0,29
28	Kecamatan Medang Kampai	2.756.135.846,00	2.802.770.284,00	(46.634.438,00)	(1,66)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
				(Rp)	Rasio %
29	Kecamatan Sungai Sembilan	2.170.700.680,00	2.390.871.020,00	(220.170.340,00)	(9,21)
30	Kecamatan Dumai Kota	1.638.674.212,35	1.660.755.464,34	(22.081.251,99)	(1,33)
31	Kecamatan Dumai Selatan	1.541.163.255,00	1.448.662.346,00	92.500.909,00	6,39
32	Inspektorat	3.310.186.491,00	3.337.367.567,00	(27.181.076,00)	(0,81)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.782.341.520,00	7.745.931.820,00	36.409.700,00	0,47
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.639.345.762,00	4.405.944.137,00	1.233.401.625,00	0,00
35	Badan Pendapatan Daerah	12.966.629.164,98	12.145.977.479,66	820.651.685,32	6,76
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.725.154.814,00	4.397.189.446,00	327.965.368,00	0,00
Jumlah		550.163.057.868,88	535.374.716.324,56	14.788.341.544,32	2,76

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	Nilai (Rp)
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	26.361.143.023,00
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	1.458.309.000,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	612.879.190,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Pencatatan	5.823.733.820,09
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	34.256.065.033,09
Pengurangan (b)	
Penghapusan	1.687.525.638,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	1.458.309.000,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	13.415.500.829,10
Koreksi Pencatatan	2.906.388.021,67
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	19.467.723.488,77
Kenaikan/(Penurunan) --2	14.788.341.544,32



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Jika penambahan aset peralatan dan mesin hasil pengadaan APBD 2018 sebesar Rp26.361.143.023,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp24.348.949.518,00 sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2018 terdapat selisih kecil sebesar Rp2.012.193.505,00. Selisih lebih tersebut disebabkan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang tidak jadi aset serta adanya belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi aset gedung dan aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penambahan dari:	
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	21.844.000,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	18.181.000,00
	Masuk dari BM JJI	31.673.520,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	2.523.744.957,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	445.109.915,00
	Jumlah ---1	3.040.553.392,00
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(82.796.887,00)
	Keluar ke aset JJI	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	(49.800.000,00)
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	(864.813.000,00)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT (salah Penganggaran)	(30.950.000,00)
	Jumlah ---2	(1.028.359.887,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	2.012.193.505,00

Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.50 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2018 dan 2017

NO	Nama OPD	TA 2017	Mutasi		TA 2018
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.594.789.486,06	11.768.262.777,00	9.076.907.642,43	79.286.144.620,63
2	Dinas Kesehatan	43.240.387.360,83	3.349.290.581,00	1.843.764.532,00	44.745.913.409,83
3	Rumah Sakit Umum Daerah	151.049.713.657,50	5.710.744.895,80	1.231.610.557,00	155.528.847.996,30
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.189.439.791,08	428.049.000,00	518.604.801,00	36.098.883.990,08
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.585.686.746,00	368.624.000,00	234.840.000,00	3.719.470.746,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.332.832.275,00	30.025.000,00	9.306.000,00	3.353.551.275,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	Nama OPD	TA 2017	Mutasi		TA 2018
			Tambah	Kurang	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.601.728.340,00	57.700.570,00	-	8.659.428.910,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.024.421.284,00	74.919.000,00	34.919.000,00	2.064.421.284,00
9	Dinas Sosial	2.858.002.400,00	402.685.000,00	1.386.000,00	3.259.301.400,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.323.941.250,00	98.287.000,00	37.030.150,00	4.385.198.100,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.138.708.187,00	312.266.000,00	264.716.395,00	2.186.257.792,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	15.313.386.750,00	334.821.434,00	66.822.950,00	15.581.385.234,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.352.281.725,00	-	400.811.500,00	4.951.470.225,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.481.077.898,00	357.270.000,00	-	2.838.347.898,00
15	Dinas Perhubungan	18.941.309.991,00	1.483.974.400,00	698.520.000,00	19.726.764.391,00
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.606.601.354,00	160.628.755,09	192.248.900,00	3.574.981.209,09
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.395.822.485,00	979.263.000,00	56.587.626,00	6.318.497.859,00
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.277.149.267,00	407.591.000,00	337.303.123,00	2.347.437.144,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.772.850.676,40	478.923.235,00	63.301.423,00	3.188.472.488,40
20	Dinas Perikanan	6.930.690.743,00	20.263.598,00	1.768.103.478,00	5.182.850.863,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.614.178.218,00	181.246.050,20	3.225.000,00	11.792.199.268,20
22	Dinas Perdagangan	3.932.692.514,53	1.435.499.750,00	248.747.666,67	5.119.444.597,86
23	Sekretariat Daerah	61.337.743.390,16	2.434.919.100,00	14.546.050,00	63.758.116.440,16
24	Sekretariat DPRD	15.201.547.502,00	16.000.000,00	796.428.155,00	14.421.119.347,00
25	Kecamatan Dumai Barat	1.773.554.080,00	12.000.000,00	223.906.500,00	1.561.647.580,00
26	Kecamatan Dumai Timur	2.385.959.860,00	0,00	191.239.690,00	2.194.720.170,00
27	Kecamatan Bukit Kapur	1.782.749.529,00	50.581.375,00	45.479.019,00	1.787.851.885,00
28	Kecamatan Medang Kampai	2.802.770.284,00	56.309.000,00	102.943.438,00	2.756.135.846,00
29	Kecamatan Sungai Sembilan	2.390.871.020,00	56.799.800,00	276.970.140,00	2.170.700.680,00
30	Kecamatan Dumai Kota	1.660.755.464,34	53.964.000,00	76.045.252,00	1.638.674.212,35
31	Kecamatan Dumai Selatan	1.448.662.346,00	99.980.909,00	7.480.000,00	1.541.163.255,00
32	Inspektorat	3.337.367.567,00	33.066.000,00	60.247.076,00	3.310.186.491,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.745.931.820,00	84.919.200,00	48.509.500,00	7.782.341.520,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.405.944.137,00	1.245.301.625,00	11.900.000,00	5.639.345.762,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	Nama OPD	TA 2017	Mutasi		TA 2018
			Tambah	Kurang	
35	Badan Pendapatan Daerah	12.145.977.479,66	1.190.266.510,00	369.614.824,68	12.966.629.164,98
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.397.189.446,00	481.622.468,00	153.657.100,00	4.725.154.814,00
37	Pengelola	-			
	JUMLAH	535.374.716.324,56	34.256.065.033,09	19.467.723.488,78	550.163.057.868,88

2) Gedung dan Bangunan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		Rp	Rasio %
804.630.710.921,33	788.877.396.830,24	15.753.314.091,10	2,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp804.630.710.921,33 atau naik sebesar Rp15.753.314.091,10 atau 2,00% dari TA 2017 sebesar Rp788.877.396.830,24.

Tabel 5.3.51 Rincian Aset Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Penambahan (Pengurangan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	329.568.509.678,41	305.377.071.224,84	24.191.438.453,57	7,92
2	Dinas Kesehatan	53.777.378.675,91	45.478.854.564,58	8.298.524.111,33	18,25
3	Rumah Sakit Umum Daerah	95.262.365.072,56	93.003.275.997,50	2.259.089.075,06	2,43
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.689.953.631,51	51.223.847.893,77	(15.533.894.262,26)	(17,41)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.563.407.000,00	2.476.944.000,00	86.463.000,00	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	700.000.000,00	533.011.000,00	166.989.000,00	31,33
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	551.796.600,00	457.406.600,00	94.390.000,00	20,64
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.526.383.375,00	3.526.383.375,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	2.931.827.750,00	2.796.269.750,00	135.558.000,00	4,85
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.551.139.406,00	4.461.764.706,00	89.374.700,00	2,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	775.950.003,60	776.537.003,60	(587.000,00)	100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.026.465.475,00	19.852.660.915,00	(11.826.195.440,00)	100,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	805.980.000,00	93.390.000,00	11,59



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Penambahan (Pengurangan)	
				(Rp)	Rasio %
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.108.346.000,00	1.274.886.000,00	833.460.000,00	65,38
15	Dinas Perhubungan	50.273.673.006,06	64.718.696.231,35	(14.445.023.225,29)	(22,32)
16	Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	4.527.743.845,83	4.686.143.845,83	(158.400.000,00)	(3,38)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.666.739.000,00	3.227.668.000,00	439.071.000,00	13,60
18	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	17.338.740.026,54	2.982.722.688,00	14.356.017.338,54	481,31
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.070.655.362,36	3.884.255.362,36	186.400.000,00	4,80
20	Dinas Perikanan	4.439.283.810,00	5.998.133.665,00	(1.558.849.855,00)	(25,99)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.696.831.999,00	8.062.161.549,00	634.670.450,00	7,87
22	Dinas Perdagangan	19.179.596.560,74	19.128.196.560,74	51.400.000,00	0,27
23	Sekretariat Daerah	70.045.748.477,76	70.411.398.717,36	(365.650.239,60)	(0,52)
24	Sekretariat DPRD	23.244.083.240,00	23.262.433.240,00	(18.350.000,00)	(0,08)
25	Kecamatan Dumai Barat	5.546.001.544,17	5.462.992.544,17	83.009.000,00	1,52
26	Kecamatan Dumai Timur	6.899.751.779,38	6.665.682.185,33	234.069.594,05	3,51
27	Kecamatan Bukit Kapur	4.365.904.783,57	3.012.338.000,00	1.353.566.783,57	44,93
28	Kecamatan Medang Kampai	2.953.348.540,54	2.888.768.540,54	64.580.000,00	2,24
29	Kecamatan Sungai Sembilan	3.848.484.117,53	3.629.196.236,79	219.287.880,74	6,04
30	Kecamatan Dumai Kota	3.657.967.252,61	3.284.227.009,68	373.740.242,93	11,38
31	Kecamatan Dumai Selatan	6.696.061.137,72	2.696.163.893,87	3.999.897.243,85	148,36
32	Inspektorat	4.612.311.552,92	4.612.311.552,92	0,00	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.648.228.055,00	7.587.395.055,00	60.833.000,00	0,80
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.080.192.239,60	0,00	1.080.192.239,60	0,00
35	Badan Pendapatan Daerah	6.424.903.922,00	6.330.050.922,00	94.853.000,00	1,50
36	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	4.481.568.000,00	4.301.568.000,00	180.000.000,00	0,00
Jumlah		804.630.710.921,33	788.877.396.830,24	15.753.314.091,09	2,00

Peningkatan aset gedung dan bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	Nilai (Rp)
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	42.496.632.188,20
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	21.422.838.401,83



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

URAIAN	Nilai (Rp)
Reklasifikasi Masuk	3.166.537.551,28
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	272.077.000,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Pencatatan	1.464.352.075,07
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	68.822.437.216,38
Pengurangan (b)	
Penghapusan	7.839.851.613,20
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	21.422.838.401,84
Reklasifikasi Keluar	109.747.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	8.382.820.925,96
Koreksi Pencatatan	13.849.513.109,22
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	53.069.123.125,29
Kenaikan/(Penurunan) --2	15.753.314.091,09

Jika penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan hasil pengadaan APBD 2018 sebesar Rp42.496.632.188,20 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp58.284.644.837,00 sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2018 terdapat selisih lebih kecil sebesar Rp15.788.012.648,80. Selisih lebih tersebut disebabkan oleh belanja modal gedung dan bangunan yang menjadi aset KDP, aset peralatan dan mesin dan menjadi persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Masuk dari Belanja Pegawai	8.700.000,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	3.339.297.962,20
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	82.796.887,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	0,00
	Masuk dari BM JJI	158.766.000,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	350.540.044,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	572.292.000,00
	Jumlah ---1	4.512.392.893,20
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(18.181.000,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0,00
	Keluar ke aset JJI	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Uraian	Nilai
	Keluar ke aset KDP	(18.763.797.542,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ektra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(1.518.427.000,00)
	Jumlah ---2	(20.300.405.542,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	(15.788.012.648,80)

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.52 Rincian Aset Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2018 dan 2017

NO	Nama OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	305.377.071.224,84	24.953.497.339,00	762.058.885,43	329.568.509.678,41
2	Dinas Kesehatan	45.478.854.564,58	8.738.854.032,30	440.329.920,97	53.777.378.675,91
3	Rumah Sakit Umum Daerah	93.003.275.997,50	2.259.089.075,06	-	95.262.365.072,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.223.847.893,77	4.506.117.218,18	20.040.011.480,44	35.689.953.631,51
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.476.944.000,00	196.210.000,00	109.747.000,00	2.563.407.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	533.011.000,00	700.000.000,00	533.011.000,00	700.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	457.406.600,00	94.390.000,00	-	551.796.600,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.526.383.375,00	-	-	3.526.383.375,00
9	Dinas Sosial	2.796.269.750,00	142.878.000,00	7.320.000,00	2.931.827.750,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.461.764.706,00	92.374.700,00	3.000.000,00	4.551.139.406,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	776.537.003,60	-	587.000,00	775.950.003,60



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	Nama OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.852.660.915,00	59.700.000,00	11.885.895.440,00	8.026.465.475,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	805.980.000,00	93.390.000,00	-	899.370.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.274.886.000,00	859.340.000,00	25.880.000,00	2.108.346.000,00
15	Dinas Perhubungan	64.718.696.231,35	1.077.056.000,00	15.522.079.225,29	50.273.673.006,06
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.686.143.845,83	-	158.400.000,00	4.527.743.845,83
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.227.668.000,00	442.030.000,00	2.959.000,00	3.666.739.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.982.722.688,00	14.356.017.338,54	-	17.338.740.026,54
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.884.255.362,36	186.400.000,00	-	4.070.655.362,36
20	Dinas Perikanan	5.998.133.665,00	-	1.558.849.855,00	4.439.283.810,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.062.161.549,00	668.520.450,00	33.850.000,00	8.696.831.999,00
22	Dinas Perdagangan	19.128.196.560,74	51.400.000,00	-	19.179.596.560,74
23	Sekretariat Daerah	70.411.398.717,36	1.360.550.000,00	1.726.200.239,60	70.045.748.477,76
24	Sekretariat DPRD	23.262.433.240,00	-	18.350.000,00	23.244.083.240,00
25	Kecamatan Dumai Barat	5.462.992.544,17	83.009.000,00	-	5.546.001.544,17
26	Kecamatan Dumai Timur	6.665.682.185,33	234.069.594,05	-	6.899.751.779,38
27	Kecamatan Bukit	3.012.338.000,00	1.353.566.783,57	-	4.365.904.783,57



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	Nama OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
	Kapur				
28	Kecamatan Medang Kampai	2.888.768.540,54	67.580.000,00	3.000.000,00	2.953.348.540,54
29	Kecamatan Sungai Sembilan	3.629.196.236,79	219.287.880,74	-	3.848.484.117,53
30	Kecamatan Dumai Kota	3.284.227.009,68	409.054.321,49	35.314.078,56	3.657.967.252,61
31	Kecamatan Dumai Selatan	2.696.163.893,87	3.999.897.243,85	-	6.696.061.137,72
32	Inspektorat	4.612.311.552,92	-	-	4.612.311.552,92
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.587.395.055,00	60.833.000,00	-	7.648.228.055,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	1.080.192.239,60	-	1.080.192.239,60
35	Badan Pendapatan Daerah	6.330.050.922,00	297.133.000,00	202.280.000,00	6.424.903.922,00
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.301.568.000,00	180.000.000,00	-	4.481.568.000,00
37	Pengelola	-			
	JUMLAH	788.877.396.830,24	68.822.437.216,38	53.069.123.125,29	804.630.710.921,32

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
2.142.448.007.445,23	2.063.566.603.064,09	78.881.404.381,15	3,82

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp2.142.448.007.445,23 atau naik sebesar Rp78.881.404.381,15 dari TA 2017 sebesar Rp2.063.566.603.064,09.

Peningkatan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Tabel 5.3.53 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017	Penambahan (pengurangan)	
				Rp	Rasio %
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.042.079.542.345,59	1.971.144.006.459,44	70.935.535.886,15	3,60
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	81.489.452.550,00	70.595.432.050,00	10.894.020.500,00	100,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.350.000,00	(3.350.000,00)	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.890.000,00	98.280.000,00	(94.390.000,00)	0,00
5	Dinas Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.910.000,00	869.910.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	451.068.000,00	2.281.253.200,00	(1.830.185.200,00)	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	3.782.938.176,65	3.584.758.176,65	198.180.000,00	5,53
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.170.607.395,00	975.994.000,00	2.194.613.395,00	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perikanan	2.269.837.986,00	5.883.796.186,00	(3.613.958.200,00)	(61,42)
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.375.902.542,00	2.375.902.542,00	0,00	0,00
15	Dinas Perdagangan	105.304.450,00	105.304.450,00	0,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	5.540.271.000,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
18	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	93.845.000,00	197.588.000,00	0,00
Jumlah		2.142.448.007.445,23	2.063.566.603.064,09	78.881.404.381,14	3,82

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	82.935.613.899,03
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	2.197.963.395,00
Reklasifikasi Masuk	195.932.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	223.864.614,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Pencatatan	0,01



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian		Nilai
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	85.553.373.908,04
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	755.630.881,90
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	2.197.963.395,00
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	3.592.518.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	21.440.200,00
	Koreksi Pencatatan	104.417,050
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	6.671.969.526,90
	Kenaikan/(Penurunan) --2	78.881.404.381,14

Jika penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan hasil pengadaan APBD 2018 sebesar Rp82.935.613.899,03 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp81.784.739.491,00 sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2018 terdapat selisih lebih sebesar Rp1.150.874.408,03 Selisih kurang tersebut disebabkan oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan menjadi aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan KDP , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Masuk dari Belanja Modal	0,00
	Masuk dari Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	1.345.513.928,03
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	0,00
	Masuk dari BM JJI	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Jumlah ---1	1.345.513.928,03
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(15.893.520,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(158.766.000,00)
	Keluar ke aset JJI	(15.780.000,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	(4.200.000,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Uraian	Nilai
	Keluar ke Ektra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	
	Jumlah ---2	(194.639.520,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	1.150.874.408,03

Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.54 Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2018 dan 2017

NO	NAMA OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.971.144.006.459,44	72.055.594.963,05	1.120.059.076,91	2.042.079.542.345,58
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	70.595.432.050,00	10.894.020.500,00		81.489.452.550,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	3.350.000,00		3.350.000,00	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.280.000,00		94.390.000,00	3.890.000,00
5	Dinas Sosial	12.500.000,00			12.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.910.000,00			869.910.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.281.253.200,00		1.830.185.200,00	451.068.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00			2.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	3.584.758.176,65	198.180.000,00		3.782.938.176,65
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	975.994.000,00	2.194.613.395,00		3.170.607.395,00
11	Dinas Perikanan	5.883.796.186,00		3.613.958.200,00	2.269.837.986,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.375.902.542,00			2.375.902.542,00
13	Dinas Perdagangan	105.304.450,00	10.027.050,00	10.027.050,00	105.304.450,00
14	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00			5.540.271.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	93.845.000,00	197.588.000,00		291.433.000,00
16	Pengelola		3.350.000,00		3.350.000,00
	Jumlah	2.063.566.603.064,09	85.553.373.908,05	6.671.969.526,91	2.142.448.007.445,23

5) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
31.685.503.907,87	24.317.205.372,87	7.368.298.535,00	30,30

Aset Aset tetap lainnya Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp31.685.503.907,87 atau naik sebesar Rp7.368.298.535,00 dari TA 2017 sebesar Rp24.317.205.372,87.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.55 Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017	Penambahan (Pengurangan)	
				Rp	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.416.804.804,22	16.153.983.269,22	7.262.821.535,00	44,96
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	69.365.000,00	69.365.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	12.527.500,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	250.018.000,00	250.018.000,00	0,00	100,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.120.000,00	34.120.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	888.216.000,00	838.416.000,00	49.800.000,00	5,94
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	2.768.700,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	1.120.620.270,00	1.120.620.270,00	0,00	0,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.014.422.033,65	3.955.145.033,65	59.277.000,00	1,50
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.228.715.000,00	1.228.715.000,00	0,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	280.779.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	302.562.600,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Barat	13.012.000,00	13.012.000,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Timur	7.152.000,00	7.152.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Medang Kampai	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	9.552.000,00	9.552.000,00	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		31.685.503.907,87	24.317.205.372,87	7.368.298.535,00	30,30



Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	Nilai (Rp)
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	7.347.078.535,00
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	59.277.000,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	7.406.355.535,00
Pengurangan (b)	
Penghapusan	0,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	3.600.000,00
Koreksi Pencatatan	34.457.000,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	38.057.000,00
Kenaikan/(Penurunan) --2	7.368.298.535,00

Jika penambahan Aset Tetap Lainnya hasil pengadaan APBD 2018 sebesar Rp7.347.078.535,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp 9.926.498.536,00 sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2018 terdapat selisih kurang sebesar Rp2.579.420.001,00 Selisih lebih tersebut disebabkan oleh belanja modal aset tetap lainnya menjadi aset peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Masuk dari Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	294.865.000,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	0,00
	Masuk dari BM JJI	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Jumlah ---1	294.865.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Uraian	Nilai
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(2.523.744.957,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(350.540.044,00)
	Keluar ke aset JJI	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	Jumlah ---2	(2.874.285.001,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	(2.579.420.001,00)

Rincian Aset Tetap Lainnya Adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.56 Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2018 dan 2017

NO	NAMA OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.153.983.269,22	7.297.278.535,00	34.457.000,00	23.416.804.804,22
2	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	69.365.000,00	0,00	0,00	69.365.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	0,00	0,00	12.527.500,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	250.018.000,00	0,00	0,00	250.018.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.579.000,00	0,00	0,00	3.579.000,00
7	Dinas Sosial	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.120.000,00	0,00	0,00	34.120.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	838.416.000,00	49.800.000,00	0,00	888.216.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	0,00	0,00	2.768.700,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.120.620.270,00	0,00	0,00	1.120.620.270,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.955.145.033,65	59.277.000,00	0,00	4.014.422.033,65
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.228.715.000,00	0,00	0,00	1.228.715.000,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	0,00	0,00	280.779.000,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	0,00	0,00	302.562.600,00
18	Kecamatan Dumai Barat	13.012.000,00	0,00	0,00	13.012.000,00
19	Kecamatan Dumai Timur	7.152.000,00	0,00	0,00	7.152.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	NAMA OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
20	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00
21	Kecamatan Medang Kampai	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	9.552.000,00	0,00	0,00	9.552.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	JUMLAH	24.317.205.372,87	7.406.355.535,00	38.057.000,00	31.685.503.907,87

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		Rp	Rasio %
212.826.622.471,92	206.189.872.475,87	6.636.749.996,05	3,22

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan atau belum memiliki nilai manfaat hingga Tahun anggaran berakhir. Per 31 Desember 2018, jumlah KDP Pemerintah Kota Dumai adalah sebesar Rp 212.826.622.471,92 atau naik sebesar Rp6.636.749.996,05 bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp206.189.872.475,87

Tabel 5.3.57 Rincian KDP per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Penambahan (Pengurangan)	
				(Rp)	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.290.899.463,33	8.795.608.463,33	495.291.000,00	5,63
2	Dinas Kesehatan	201.958.436,00	352.436.248,00	(150.477.812,00)	(42,70)
3	RSUD	19.565.654.417,00	0,00	19.565.654.417,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.829.538.095,59	194.122.790.704,54	(13.293.252.608,95)	(6,85)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	256.550.500,00	256.550.500,00	0,00	100,00
6	Dinas Sosial	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00	288.685.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	170.009.560,00	(120.509.560,00)	100,00
9	Dinas Perhubungan	99.638.000,00	99.638.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	100,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	120.509.560,00	0,00	120.509.560,00	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.261.340.000,00	1.261.340.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Penambahan (Pengurangan)	
				(Rp)	Rasio %
13	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	178.335.000,00	(30.365.000,00)	(17,03)
14	Sekretariat DPRD	567.149.000,00	567.149.000,00	0,00	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	0,00
Jumlah		212.826.622.471,92	206.189.872.475,87	6.636.749.996,05	3,22

Koreksi kurang pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan pengembalian uang muka atas penagihan (klaim) jaminan uang muka kepada PT. Nidya Karya sebesar Rp10.736.445.203,00 pada tanggal 16 September 2011. Total KDP tercatat tersebut merupakan pembayaran progress fisik pekerjaan sebesar 23,91% atau sebesar Rp16.868.773.987,00 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor 09/BA-PKPPP/DPU-CK/2009/PKT.1 Tanggal 21 Desember 2009. KDP dimaksud adalah Pekerjaan Proyek Engineering, Procurement dan Construction (EPC) Pembangunan Uprating IPA dari kapasitas 40 lt/dtk menjadi 80 lt/dtk di Jl. Jenderal Sudirman dan Pembangunan baru IPA kapsitas 250 lt/dtk di Bukit Timah oleh PT. Nindya Karya tercatat pada KIB F Dinas PUPR Kota Dumai sebesar Rp26.761.780.491,00 yang terdiri dari Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran Termin Progres Pekerjaan.

Peningkatan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	Nilai (Rp)
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	20.449.282.750,33
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
Transfer Masuk	120.509.560,00
Reklasifikasi Masuk	99.000.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Pencatatan	8.550.000,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (a)	20.677.342.310,33
Pengurangan (b)	
Penghapusan	0,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	120.509.560,00
Reklasifikasi Keluar	3.166.537.551,28
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
Koreksi Pencatatan	10.736.445.203,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

URAIAN	Nilai (Rp)
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
Jumlah (b)	14.023.492.314,28
Kenaikan (Penurunan) --2	6.653.849.996,05

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.645.296,05 dengan rincian sebagai berikut:

1	Belanja Pegawai	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.681.285.208,33
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.763.797.542,00
4	Masuk dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.200.000,00
5	Transfer Masuk	120.509.560,00
6	Reklas Masuk	99.000.000,00
7	Transfer Keluar	(120.509.560,00)
8	Reklas Keluar	(3.166.537.551,28)
9	Koreksi Pencatatan	(10.744.995.203,00)
	Jumlah	6.636.749.996,05

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.58 Rincian Mutasi KDP per OPD Tahun 2018 dan 2017

NO	NAMA OPD	TA 2017	MUTASI		TA 2018
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.795.608.463,33	495.291.000,00	0,00	9.290.899.463,33
2	Dinas Kesehatan	352.436.248,00	5.983.333,33	156.461.145,33	201.958.436,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	19.565.654.417,00	0,00	19.565.654.417,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.122.790.704,54	422.904.000,00	13.716.156.608,95	180.829.538.095,59
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	256.550.500,00	0,00	0,00	256.550.500,00
6	Dinas Sosial	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00	0,00	0,00	288.685.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	170.009.560,00	0,00	120.509.560,00	49.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	99.638.000,00	0,00	0,00	99.638.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	120.509.560,00	0,00	120.509.560,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.261.340.000,00	0,00	0,00	1.261.340.000,00
13	Sekretariat Daerah	178.335.000,00	0,00	30.365.000,00	147.970.000,00
14	Sekretariat DPRD	567.149.000,00	0,00	0,00	567.149.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	0,00	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00
	JUMLAH	206.189.872.475,87	20.660.242.310,33	14.023.492.314,28	212.826.622.471,92



8. Akumulasi Penyusutan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
(1.905.369.343.685,19)	(1.657.431.365.475,00)	(247.937.978.210,19)	14,96

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan dan tercatat sebagai lawan akun aset tetap (Contra Account). Hingga 31 Desember 2018 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar minus Rp1.905.369.343.685,19 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar minus Rp1.657.431.365.475,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2018	Rp 1.657.431.365.475,00
Beban Penyusutan Per 31 Desember 2018	Rp 162.044.514.977,92
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2017	Rp 87.893.463.232,27
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp 1.905.369.343.685,19

Jika dibandingkan Kenaikan akumulasi Penyusutan minus Rp247.937.978.210,19 dengan beban penyusutan tahun 2018 Rp162.044.514.977,92 terdapat selisih sebesar minus Rp87.893.463.232,27 yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya serta akibat dari penghapusan aset tetap, hibah dan transfer keluar dari Pemerintah Kota Dumai. Berikut daftar akumulasi penyusutan per SKPD Tahun 2018 :

Tabel 5.3.59 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017	Penambahan (Pengurangan)	
				Rp	Rasio %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(91.407.486.079,31)	(109.229.113.999,68)	17.821.627.920,37	(16,32)
2	Dinas Kesehatan	(34.436.240.479,79)	(29.570.524.867,78)	(4.865.715.612,01)	16,45
3	RSUD	(110.550.309.546,79)	(88.851.147.497,35)	(21.699.162.049,44)	24,42
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.397.026.604.628,73)	(1.172.560.766.449,32)	(224.465.838.179,41)	19,26
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(17.751.499.443,42)	(15.097.235.949,36)	(2.654.263.494,06)	17,58
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.025.787.532,09)	(2.819.244.575,44)	(206.542.956,65)	7,33
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.392.681.632,07)	(6.522.709.398,83)	(869.972.233,24)	13,34
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	(2.330.653.507,82)	(2.019.990.658,54)	(310.662.849,28)	15,38
9	Dinas Sosial	(3.410.547.963,31)	(2.934.638.137,39)	(475.909.825,92)	16,22
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.432.423.770,79)	(4.576.131.017,73)	(856.292.753,06)	18,71



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017	Penambahan (Pengurangan)	
				Rp	Rasio %
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.668.863.506,97)	(1.587.762.920,04)	(81.100.586,94)	(100,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(11.182.454.828,17)	(11.028.120.471,98)	(154.334.356,19)	1,40
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.468.138.243,90)	(4.348.608.923,75)	(119.529.320,15)	2,75
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.081.994.054,18)	(1.772.120.934,60)	(309.873.119,58)	17,49
15	Dinas Perhubungan	(32.049.078.523,99)	(40.557.752.513,26)	8.508.673.989,27	(20,98)
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(3.670.720.176,36)	(3.711.607.535,86)	40.887.359,50	(1,10)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.388.039.971,05)	(4.332.357.536,66)	(55.682.434,39)	1,29
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(4.740.672.328,02)	(2.591.609.442,00)	(2.149.062.886,02)	82,92
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.811.293.598,20)	(2.658.810.058,06)	(152.483.540,14)	5,74
20	Dinas Perikanan	(6.598.961.643,41)	(10.048.432.343,72)	3.449.470.700,31	(34,33)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(13.403.259.861,46)	(13.482.880.291,09)	79.620.429,63	(0,59)
22	Dinas Perdagangan	(9.530.677.056,63)	(6.914.552.489,58)	(2.616.124.567,05)	37,84
23	Sekretariat Daerah	(69.506.213.106,47)	(60.832.530.275,40)	(8.673.682.831,07)	14,26
24	Sekretariat DPRD	(17.688.988.556,72)	(16.193.651.605,43)	(1.495.336.951,29)	9,23
25	Kecamatan Dumai Barat	(2.445.516.517,93)	(2.492.082.050,00)	46.565.532,07	(1,87)
26	Kecamatan Dumai Timur	(3.404.749.360,70)	(2.727.939.724,26)	(676.809.636,44)	24,81
27	Kecamatan Bukit Kapur	(2.662.648.572,06)	(2.096.041.904,45)	(566.606.667,61)	27,03
28	Kecamatan Medang Kampai	(3.126.973.531,60)	(2.921.081.131,91)	(205.892.399,69)	7,05
29	Kecamatan Sungai Sembilan	(2.689.601.433,42)	(2.588.450.906,20)	(101.150.527,21)	3,91
30	Kecamatan Dumai Kota	(1.873.046.279,79)	(1.670.043.654,27)	(203.002.625,53)	12,16
31	Kecamatan Dumai Selatan	(1.824.250.497,01)	(1.552.972.640,72)	(271.277.856,29)	17,47
32	Inspektorat	(3.570.067.778,41)	(3.168.862.532,74)	(401.205.245,67)	12,66
33	Badan Perencanaan Pembangunan	(7.746.673.635,29)	(6.681.910.482,55)	(1.064.763.152,74)	15,94



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017	Penambahan (Pengurangan)	
				Rp	Rasio %
	Daerah				
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	(3.620.931.893,23)	(2.819.408.855,48)	(801.523.037,75)	100,00
35	Badan Pendapatan Daerah	(10.533.957.337,31)	(9.562.658.963,52)	(971.298.373,79)	10,16
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(5.317.336.808,78)	(4.907.612.736,06)	(409.724.072,71)	8,35
Jumlah		(1.905.369.343.685,19)	(1.657.431.365.475,00)	(247.937.978.210,19)	14,96

d. Aset Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		Rp	Rasio %
52.850.811.834,67	56.040.010.705,70	(3.189.198.871,03)	(5,69)

Aset Lainnya Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp52.850.811.834,67 atau turun sebesar Rp3.189.198.871,03 atau 5,69% dari TA 2017 sebesar Rp56.040.010.705,70.

Aset Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain. Rincian Aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.60 Rincian Aset Lainnya per Jenis Tahun 2018 dan 2017

Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
			(Rp)	Rasio %
Tagihan Penjualan Angsuran	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.440.032.500,00	5.286.321.000,00	(846.288.500,00)	(16,01)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17.232.681.084,08	8.262.120.000,00	8.970.561.084,08	108,57
Aset Tidak Berwujud	5.881.538.138,10	4.325.517.628,72	1.556.020.509,38	35,97
Akumulasi Amortisasi aset Tidak Berwujud	(2.875.170.370,60)	(1.390.528.910,53)	(1.484.641.460,07)	106,77
Aset Lain-lain	24.920.209.173,09	36.398.744.860,51	(11.478.535.687,42)	(31,54)
Dana CD Pertamina	3.173.821.310,00	3.080.136.127,00	93.685.183,00	3,04
Jumlah	52.850.811.834,67	56.040.010.705,70	(3.189.198.871,03)	(5,69)

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	0,00



Tagihan Penjualan Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp77.700.000,00 atau tidak ada perbedaan dengan tahun 2017.

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Sisa Tagihan (Rp)
1	Toyota Kijang	BM 160 R	8.400.000,00
2	Nissan Terrano Grandroad XTR	BM 1957 RS	69.300.000,00
Jumlah			77.700.000,00

2. Tagihan Penjualan Angsuran

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		Rp	Rasio %
4.440.032.500,00	5.286.321.000,00	(846.288.500,00)	(16,01)

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp4.440.032.500,00 atau naik sebesar Rp846.288.500,00 dibandingkan dengan tahun 2017.

Petikan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Febuari 2018 a.n. IS dijatuhkan pidana penjara 6(enam) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp3,593.744.000,00 paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh JAKsa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
17.232.681.084,08	8.262.120.000,00	8.970.561.084,08	108,57

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp17.232.681.084,08 naik sebesar Rp8.970.561.084,08 dari TA 2017 sebesar Rp8.262.120.000,00 Kemitraan ini berupa aset Pemerintah Kota Dumai atas tanah dan bangunan yang terdiri dari:

- Sebidang tanah seluas 13.645,75 m² dengan nilai Rp1.218.240.000,00 di kelurahan Rimba Sekampung yang dikelola oleh PT Panca Belia Primakarsa dengan perubahan perjanjian terakhir Nomor 500/EK/2002/314 yang di atasnya didirikan Pasar dan Komplek Pertokoan Pasar Pulau Payung. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 20 Tahun. terhitung sejak Tahun 2002 hingga 2022. Dalam perjanjian kontrak dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi berupa 14 Unit Los Ikan. 11 Unit Los Daging dan 60 Unit Los Sayur serta 1 unit kantor



UPTD (Lantai III) dengan nilai total sebesar Rp1.218.240.000,00 dan setelah perjanjian berakhir Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan bangunan dan seisinya.

- b) Sebidang tanah seluas 5.180,00 m² senilai Rp7.043.880.000,00 di Kelurahan Bintan yang dikelola oleh PT. Inti Griya Sakti dengan perjanjian Nomor 570/Disperindagkopin/2007/253 tanggal 4 April 2007 dan jangka waktu BOT selama 25 Tahun. terhitung sejak 2007 hingga 2032. Peruntukan tanah tersebut digunakan oleh PT. Ramayana (pihak ketiga) sebagai plaza. Dalam perjanjian kontrak. Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi sebesar USD6.000 per Tahun selama perjanjian berlangsung. Terkait dengan hak atas bangunan dan fasilitas pendukung lainnya akan menjadi hak Pemerintah Kota Dumai setelah masa perjanjian berakhir.
- c) Pada tanggal 14 Maret 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-74/KN.4/2019 perihal Tindak Lanjut atas Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada KKKS menyatakan bahwa penggunaan lahan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah Tanpa Persetujuan Menteri Keuangan.
- d) Selain itu, atas pemanfaatan tanah di Kelurahan Bintan yang peruntukannya digunakan oleh PT. Ramayana adalah merupakan tanah eks Terminal Penumpang Tipe A mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia. Atas kedua kondisi tersebut di atas, Pemerintah Kota Dumai akan melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperjelas status kelanjutan kemitraan dengan pihak ketiga tersebut.
- e) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kota Dumai Dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri Nomor 13 /DISHUB/2018 dan 003/PT. PDB-PEMKO DUMAI/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, objek perjanjian KSP ini adalah barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga di Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama Mitra	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1	PT Panca Belia Primakarsa	1.218.240.000,00	1.218.240.000,00
2	PT Inti Griya Sakti	7.043.880.000,00	7.043.880.000,00
3	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	8.970.561.084,08	0,00
JUMLAH		17.232.681.084,08	8.262.120.000,00



4 Aset Tak Berwujud

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
3.006.367.767,50	2.934.988.718,20	71.379.049,30	2,43

Aset tidak berwujud Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp3.006.367.767,50 disajikan sebesar nilai bersihnya (dikurangi akumulasi amortisasi). Aset tidak berwujud nilai brutonya sebesar Rp5.881.538.138,09 dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar minus Rp2.875.170.370,60. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.934.988.718,20 atau naik sebesar Rp71.379.049,30.

5 Aset Lain-lain

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	%
24.920.209.173,09	36.398.744.860,51	(11.478.535.687,42)	(31,54)

Aset Lain-Lain Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp24.920.209.173,09 atau turun sebesar Rp11.478.535.687,42 atau 31,54% dari TA 2017 sebesar Rp36.398.744.860,51 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.61 Rincian Aset Lain-lain per Jenis Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Aset Lain-lain	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
				(Rp)	Rasio%
1	Aset Rusak Berat	18.317.100.173,09	13.892.683.045,00	4.424.417.128,09	31,85
2	Hasil inventarisasi Tahun 2008 (yang belum diserahkan kepada pihak ketiga)	0,00	319.428.500,00	(319.428.500,00)	(100,00)
3	Saldo selisih hasil inventarisasi Tahun 2008	0,00	16.349.765.187,42	(16.349.765.187,42)	(100,00)
4	Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.603.109.000,00	5.836.868.128,08	766.240.871,92	13,13
Jumlah		24.920.209.173,09	36.398.744.860,51	(11.478.535.687,42)	(31,54)

1) Aset Rusak Berat

Jumlah aset tetap yang rusak berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.317.100.173,09 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.62 Rincian Aset Rusak per OPD Tahun 2018 dan 2017

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	329.625.255,00	330.925.255,00
2	Dinas Kesehatan APBD	7.500.000,00	7.500.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	1.303.451.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	Nama OPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
4	BLUD RSUD	0,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.613.418.128,09	776.550.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.745.895.000,00	1.745.895.000,00
7	Dinas Tatakota. Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	85.000.000,00	85.000.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00
10	Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00
11	Dinas Sosial	44.341.570,00	44.341.570,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	181.750.000,00	181.750.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.000.000,00	83.000.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.484.551,00	19.484.551,00
17	Dinas Perhubungan	1.164.026.900,00	1.164.026.900,00
18	Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	26.920.500,00	26.920.500,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	551.978.683,00	551.978.683,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	307.353.417,00	307.353.417,00
22	Dinas Perikanan	1.206.842.750,00	1.657.267.750,00
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	388.750.000,00	388.750.000,00
24	Dinas Perdagangan	0,00	0,00
25	Kantor Pelayanan Pasar	0,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	782.122.000,00	782.122.000,00
27	Sekretariat DPRD	2.821.661.050,00	2.478.936.050,00
28	Kecamatan Dumai Barat	202.462.821,00	202.462.821,00
29	Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00
30	Kecamatan Bukit Kapur	59.479.440,00	59.479.440,00
31	Kecamatan Medang Kampai	92.363.392,00	92.363.392,00
32	Kecamatan Sungai Sembilan	510.982.722,00	510.982.722,00
33	Kecamatan Dumai Kota	47.078.000,00	47.078.000,00
34	Kecamatan Dumai Selatan	145.169.944,00	145.169.944,00
35	Inspektorat	63.500.000,00	63.500.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	379.734.050,00	379.734.050,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00	0,00
38	Badan Pendapatan Daerah	11.800.000,00	11.800.000,00
39	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	438.860.000,00	438.860.000,00
Jumlah		18.317.100.173,09	13.892.683.045,00



2) Hasil inventarisasi Tahun 2008 (yang belum diserahkan kepada pihak ketiga)

Saldo hasil inventarisasi Tahun 2008 (yang belum diserahkan kepada pihak ketiga) sebesar Rp319.428.500,00 pada tahun 2018 telah dilakukan penghapusan berdasarkan SK WALIKOTA No.843/BPKAD/2018 Tanggal 27 Desember 2018.

3) Saldo selisih hasil inventarisasi Tahun 2008

Saldo selisih hasil inventarisasi Tahun 2008 merupakan selisih inventarisasi tahun 2008 sebesar Rp16.349.765.187,42 pada tahun 2018 telah dilakukan koreksi pencatatan berdasarkan SK WALIKOTA No.330/BPKAD/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang koreksi pencatatan terhadap penyajian aset lain-lain pada neraca Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018.

4) Aset yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga

Saldo Aset yang akan diserahkan pada pihak ketiga sebesar Rp6.603.109.000,00 merupakan penambahan aset Gedung dan Bangunan yang belum ada berita acara serah terima kepada pihak ketiga.

6. Dana CD Pertamina

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
3.173.821.310,00	3.080.136.127,00	93.685.183,00	3,04

Dana CD Pertamina Kota Dumai TA 2018 Meningkat sebesar Rp93.685.183,00 dari Tahun lalu yang berasal dari pendapatan jasa giro Tahun 2018.

Dana di rekening CD Pertamina di Bank Riau dengan No.104.02.000.75 disajikan ke dalam kelompok aset lainnya karena belum dapat digunakan sampai negosiasi ulang dengan PT Pertamina UP II Dumai.

2. Kewajiban

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
48.523.936.881,98	32.873.821.074,23	15.650.115.807,75	47,61

Kewajiban Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp48.523.936.881,98 atau naik sebesar Rp15.650.115.807,75 dari TA 2017 sebesar Rp32.873.821.074,23. Kewajiban tersebut seluruhnya berupa Kewajiban Jangka Pendek.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
48.523.936.881,98	32.873.821.074,23	15.650.115.807,75	47,61



Kewajiban Jangka Pendek tersebut berupa utang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.63 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Jenis Tahun 2018 dan 2017

Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
			(Rp)	Rasio %
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	159.091,00	186.159.787,61	(186.000.696,61)	(99,91)
Pendapatan Diterima Dimuka	283.333.334,00	706.256.126,33	(422.922.792,33)	(59,88)
Utang Beban	46.760.612.541,98	31.981.405.160,29	14.779.207.381,69	46,21
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.479.831.915,00	0,00	1.479.831.915,00	0,00
Jumlah	48.523.936.881,98	32.873.821.074,23	15.650.115.807,75	47,61

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
159.091,00	186.159.787,61	(186.000.969,61)	(99,91)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp159.091,00 merupakan pajak yang belum disetorkan ke pusat pada bulan Januari 2019.

2) Pendapatan diterima dimuka

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
283.333.334,00	706.256.126,33	(422.922.792,33)	(59,88)

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp283.333.334,00 turun sebesar Rp422.922.792,33 atau 59,88% dari TA 2017 sebesar Rp706.256.126,33 pada RSUD.

3) Utang Beban

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
46.760.612.541,98	31.981.405.160,29	14.779.207.381,69	46,21

Utang Beban sebesar Rp46.760.612.541,98 naik sebesar Rp14.779.207.381,69 atau 46,21% dari TA 2017 sebesar Rp31.981.405.160,29.

Utang Beban Timbul karena Pemerintah Kota Dumai menerima hak atas barang/jasa. termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah Kota Dumai harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.64 Rincian Utang Beban Tahun 2018 dan 2017

No	Keterangan	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	Rasio %
1	PUSKESMAS DUMAI KOTA	72.613.250,00	7.380.000,00	65.233.250,00	883,92
2	PUSKESMAS DUMAI BARAT	44.702.000,00	31.224.000,00	13.478.000,00	43,17
3	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	147.188.000,00	17.587.500,00	129.600.500,00	736,89
4	PUSKESMAS SEI 9	74.067.500,00	43.796.000,00	30.271.500,00	69,12
5	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	77.073.000,00	28.495.250,00	48.577.750,00	170,48
6	PUSKESMAS BUMI AYU	52.295.500,00	9.516.000,00	42.779.500,00	449,55
7	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	4.180.000,00	6.412.000,00	(2.232.000,00)	(34,81)
8	PUSKESMAS JAYAMUKTI	184.311.000,00	84.054.000,00	100.257.000,00	119,28
9	PUSKESMAS PURNAMA	9.155.000,00	2.678.000,00	6.477.000,00	241,86
10	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	111.512.000,00	70.640.000,00	40.872.000,00	57,86
11	RSUD-BLUD	45.983.515.291,98	31.679.622.410,29	14.303.892.881,69	45,15
Jumlah		46.760.612.541,98	31.981.405.160,29	14.779.207.381,69	46,21

Berdasarkan rekonsiliasi bidang Akuntansi dengan PPK -SKPD pada RSUD terdapat koreksi utang beban sebesar Rp277.837.531,00, hal ini disebabkan dokumen sebagai dasar pengakuan utang tidak ditemukan.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
1.479.831.915,00	0,00	1.479.831.915,00	0,00

Pada Tahun 2018 Utang jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.479.831.915,00 merupakan SP2D yang sudah diterbitkan tapi belum dicairkan per 31 Desember 2018. Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.479.831.915,00 merupakan utang jangka pendek pada Dinas PUPR sebesar Rp87.737.000,00 ini merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pengadaan Jembatan Desa dan Utang Jangka pendek sebesar Rp1.392.094.915,00 pada RSUD.

3. Ekuitas

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan (Penurunan)	
		(Rp)	Rasio %
2.736.532.615.317,96	2.479.324.864.985,34	257.207.750.332,62	10,37



Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.736.532.615.317,96 dengan uraian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp	2.479.324.864.985,34
Surplus/Defisit LO	Rp	139.218.220.955,15
Penyesuaian / Mutasi :		
Penambahan	Rp	222.625.542.434,16
Pengurangan	<u>Rp</u>	<u>(104.636.013.056,69)</u>
Ekuitas Akhir	Rp	2.736.532.615.317,96

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



5.4. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan LO, Beban dan Surplus/(Defisit) LO Pemerintah Kota Dumai.

1. Pendapatan – LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Penaikan/Penurunan (Rp)	Rasio %
1.264.356.718.755,11	1.205.026.009.878,69	59.330.708.876,42	4,92

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai TA 2018 sebesar Rp1.264.356.718.755,11 mengalami kenaikan sebesar Rp59.330.708.876,42 atau 4,92% jika dibandingkan TA 2017 sebesar Rp1.205.026.009.878,69 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.4.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Asli Daerah	304.883.091.971,11	279.577.945.456,69	25.305.146.514,42	9,05
Pendapatan Transfer	921.681.145.885,00	919.540.515.834,00	2.140.630.051,00	0,23
Lain.lain Pendapatan yang sah	37.792.480.899,00	5.907.548.588,00	31.884.932.311,00	539,73
Jumlah	1.264.356.718.755,11	1.205.026.009.878,69	59.330.708.876,42	4,92

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Rasio %
304.883.091.971,11	279.577.945.456,69	25.305.146.514,42	9,05

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2018 dan TA 2017. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp304.883.091.971,11 Jika dibandingkan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp279.577.945.456,69 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami Kenaikan sebesar Rp25.305.146.514,42 atau 9,05%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2018 dan 2017



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Pajak Daerah	145.075.023.215,33	101.736.707.548,99	43.338.315.666,34	42,60
Pendapatan Retribusi Daerah	30.329.343.622,00	36.587.422.593,09	(6.258.078.971,09)	(17,10)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.723.920.736,05	2.761.947.088,80	(38.026.352,75)	(1,38)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	126.754.804.397,73	138.491.868.225,81	(11.737.063.828,08)	(8,47)
Jumlah	304.883.091.971,11	279.577.945.456,69	25.305.146.514,42	9,05

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat di rinci dan di jelaskan sebagai berikut :

1) **Pendapatan Pajak Daerah - LO**

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
145.075.023.215,33	101.736.707.548,99	43.338.315.666,34	42,60

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada TA 2018. sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada TA 2018 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2018.

Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2018 terealisasi sebesar Rp145.075.023.215,33 Jika dibandingkan pada TA 2017 terealisasi sebesar Rp101.736.707.548,99 Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp43.338.315.666,34 atau 42,60%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pajak Hotel	3.768.505.143,00	3.560.140.889,20	208.364.253,80	5,85
Pajak Restoran	5.692.965.593,00	4.189.629.935,72	1.503.335.657,28	35,88
Pajak Hiburan	1.004.340.265,00	896.720.414,05	107.619.850,95	12,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	20.155.815.867,00	26.543.194.752,60	(6.387.378.885,60)	(24,06)
Pajak Penerangan Jalan Non	14.125.079.709,00	0,00	14.125.079.709,00	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
PLN				
Pajak Galian Gol. C	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	30.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)
Pajak Air Tanah	1.424.611.132,00	2.967.900.603,00	(1.543.289.471,00)	(52,00)
Pajak Sarang Burung Walet	84.480.000,00	92.390.000,00	(7.910.000,00)	(8,56)
Pajak Reklame	2.300.282.859,33	1.203.981.836,42	1.096.301.022,91	91,06
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB,P2)	90.335.228.478,00	56.996.968.449,00	33.338.260.029,00	58,49
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	2.985.200,00	(2.985.200,00)	(100,00)
Pajak BPHTB	6.153.714.169,00	5.242.795.469,00	910.918.700,00	17,37
Jumlah	145.075.023.215,33	101.736.707.548,99	43.338.315.666,34	42,60

2) **Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
30.329.343.622,00	36.587.422.593,09	(6.258.078.971,09)	(17,10)

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai, Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Dumai didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Pendapatan Retribusi Daerah LO pada TA 2018 sebesar Rp30.329.343.622,00 Jika dibandingkan TA 2017 terealisasi sebesar Rp36.587.422.593,09 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp6.258.078.971,09 atau 17,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2018 dan 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	101.100.000,00	114.204.000,00	(13.104.000,00)	(11,47)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	308.695.000,00	324.565.000,00	(15.870.000,00)	(4,89)
Dinas Perikanan	439.689.500,00	414.931.900,00	24.757.600,00	5,97
Dinas Lingkungan Hidup	505.315.000,00	427.890.000,00	77.425.000,00	18,09
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.000.000,00	18.080.000,00	2.920.000,00	16,15
Dinas Perhubungan	18.755.140.650,00	20.368.795.841,00	(1.613.655.191,00)	(7,92)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	344.900.000,00	339.000.000,00	5.900.000,00	1,74
Dinas Tenaga Kerja	0,00	113.340.000,00	(113.340.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.089.155.299,00	10.520.741.186,00	(1.431.585.887,00)	(13,61)
Badan Pendapatan Daerah	43.917.173,00	3.384.464.666,09	(3.340.547.493,09)	(98,70)
Dinas Perdagangan	715631000,00	561.410.000,00	154.221.000,00	27,47
Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
Jumlah	30.329.343.622,00	36.587.422.593,09	(6.258.078.971,09)	(17,10)

Masing – masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan LO TA 2018 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Retribusi Jasa Umum - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	505.315.000,00	427.890.000,00	77.425.000,00	18,09
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	118.113.000,00	18.510.000,00	99.603.000,00	538,10
Retribusi Pelayanan Pasar	577.675.000,00	561.410.000,00	16.265.000,00	2,90
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	491.807.250,00	554.755.050,00	(62.947.800,00)	(11,35)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	29.216.000,00	15.260.000,00	13.956.000,00	91,45



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	137.956.000,00	0,00	137.956.000,00	0,00
Jumlah	1.860.082.250,00	1.577.825.050,00	282.257.200,00	17,89

b). Retribusi Jasa Usaha - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	771.435.000,00	777.769.000,00	(6.334.000,00)	(0,81)
Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Terminal	17.945.441.000,00	18.197.277.500,00	(251.836.500,00)	(1,38)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	439.689.500,00	414.931.900,00	24.757.600,00	5,97
Retribusi Rumah Potong Hewan	21.000.000,00	18.080.000,00	2.920.000,00	16,15
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	79.115.600,00	83.060.851,00	(3.945.251,00)	(4,75)
Retribusi Pelayanan Bandar Udara	78.987.800,00	1.499.172.440,00	(1.420.184.640,00)	(94,73)
Jumlah	19.335.668.900,00	20.990.291.691,00	(1.654.622.791,00)	(7,88)

c). Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.084.555.299,00	10.513.341.186,00	(1.428.785.887,00)	(13,59)
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	43.917.173,00	3.384.464.666,09	(3.340.547.493,09)	(98,70)
Retribusi Izin Trayek / Kartu Pengawasan (KP)	520.000,00	760.000,00	(240.000,00)	(31,58)
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	113.340.000,00	(113.340.000,00)	(100,00)
Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol	4.600.000,00	7.400.000,00	(2.800.000,00)	(37,84)
Jumlah	9.133.592.472,00	14.019.305.852,09	(4.885.713.380,09)	(34,85)



Realisasi akun pendapatan retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Lingkungan Hidup	505.315.000,00	427.890.000,00	77.425.000,00	18,09
Jumlah	505.315.000,00	427.890.000,00	77.425.000,00	18,09

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	118.113.000,00	18.510.000,00	99.603.000,00	538,10
Jumlah	118.113.000,00	18.510.000,00	99.603.000,00	538,10

3. Retribusi Pelayanan Pasar - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perdagangan	577.675.000,00	561.410.000,00	16.265.000,00	2,90
Jumlah	577.675.000,00	561.410.000,00	16.265.000,00	2,90

4. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	29.216.000,00	15.260.000,00	13.956.000,00	91,45
Jumlah	29.216.000,00	15.260.000,00	13.956.000,00	91,45

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perdagangan	137.956.000,00	0,00	137.956.000,00	0,00
Jumlah	137.956.000,00	0,00	137.956.000,00	0,00

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretaris Daerah	101.100.000,00	114.204.000,00	(13.104.000,00)	(11,47)
Dinas Kesehatan	308.695.000,00	324.565.000,00	(15.870.000,00)	(4,89)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	344.900.000,00	339.000.000,00	5.900.000,00	1,74
Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
Jumlah	771.435.000,00	777.769.000,00	(6.334.000,00)	(0,81)

7. Retribusi Terminal - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	17.945.441.000,00	18.197.277.500,00	(251.836.500,00)	(1,38)
Jumlah	17.945.441.000,00	18.197.277.500,00	(251.836.500,00)	(1,38)

8. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perikanan	439.689.500,00	414.931.900,00	24.757.600,00	5,97
Jumlah	439.689.500,00	414.931.900,00	24.757.600,00	5,97

9. Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.000.000,00	18.080.000,00	2.920.000,00	16,15
Jumlah	21.000.000,00	18.080.000,00	2.920.000,00	16,15

10. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	79.115.600,00	83.060.851,00	(3.945.251,00)	(4,75)
Jumlah	79.115.600,00	83.060.851,00	(3.945.251,00)	(4,75)

11. Retribusi Pelayanan Bandar Udara- LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	78.987.800,00	1.499.172.440,00	(1.420.184.640,00)	(94,73)
Jumlah	78.987.800,00	1.499.172.440,00	(1.420.184.640,00)	(94,73)

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.084.555.299,00	10.513.341.186,00	(1.428.785.887,00)	(13,59)
Jumlah	9.084.555.299,00	10.513.341.186,00	(1.428.785.887,00)	(13,59)



13. Retribusi Izin Gangguan / Keramaian - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Pendapatan Daerah	43.917.173,00	3.384.464.666,09	(3.340.547.493,09)	(98,70)
Jumlah	43.917.173,00	3.384.464.666,09	(3.340.547.493,09)	(98,70)

14. Retribusi Izin Trayek / Kartu Pengawasan (KP) - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	520.000,00	760.000,00	(240.000,00)	(31,58)
Jumlah	520.000,00	760.000,00	(240.000,00)	(31,58)

15. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Tenaga Kerja	0,00	113.340.000,00	(113.340.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	113.340.000,00	(113.340.000,00)	(100,00)

16. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.600.000,00	7.400.000,00	(2.800.000,00)	(37,84)
Jumlah	4.600.000,00	7.400.000,00	(2.800.000,00)	(37,84)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
2.723.920.736,05	2.761.947.088,80	(38.026.352,75)	(1,38)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.723.920.736,05 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp2.761.947.088,80 maka mengalami Penurunan sebesar Rp38.026.352,75 atau -1,38%.

4) Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
126.754.804.397,73	138.491.868.225,81	(11.737.063.828,08)	(8,47)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Lain-lain PAD Yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya TA 2018 Sebesar Rp126.754.804.397,73 Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp138.491.868.225,81, Lain-lain PAD Yang Sah – LO mengalami penurunan sebesar Rp11.737.063.828,08 atau, (8,47%) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Perbandingan Lain – Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2018 dan Lain – Lain PAD yang Sah 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	73.800.000,00	19.842.000,00	53.958.000,00	271,94
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	846.288.500,00	(846.288.500,00)	(100,00)
Jasa Giro Kas Daerah	1.987.983.135,91	1.200.517.154,76	787.465.981,15	65,59
Jasa Giro Kas Bendahara	215.618.319,00	144.204.762,00	71.413.557,00	49,52
Bunga Rekening Dana BOS	5.021.433,00	0,00	5.021.433,00	100,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	1.581.232.860,00	3.048.044.873,00	(1.466.812.013,00)	(48,12)
Pendapatan Bunga Deposito BSM	559.906.092,36	538.524.177,97	21.381.914,39	3,97
Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri	7.095.205,47	231.865.068,49	(224.769.863,02)	(96,94)
Pendapatan Denda Pajak	1.150.848.415,00	595.423.794,00	555.424.621,00	93,28
Pendapatan Denda Retribusi	55.391.859,00	140.567.346,64	(85.175.487,64)	(60,59)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	472.145.738,07	229.732.964,00	242.412.774,07	105,52
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.594.250.715,76	1.280.038.921,70	314.211.794,06	24,55
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	175.914.500,00	0,00	175.914.500,00	100,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Lain,lain PAD yang Sah Lainnya	2.600.817.399,85	1.314.453.611,91	1.286.363.787,94	97,86
Fasilitas Umum	30.000.000,00	46.570.000,00	(16.570.000,00)	(35,58)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	102.993.207.197,00	81.358.350.620,00	21.634.856.577,00	26,59
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	790.115.000,00	682.433.766,00	107.681.234,00	15,78
Pendapatan BLUD Puskesmas	12.308.225.511,10	10.859.542.959,84	14.48.682.551,26	13,34
Pendapatan Dana BOS	0,00	35.930.469.062,00	(35.930.469.062,00)	(100,00)
Lain,lain Pendapatan BLUD Yang Sah	153.231.016,21	24.998.643,50	128.232.372,71	512,96
Jumlah	126.754.804.397,73	138.491.868.225,81	(11.737.063.828,08)	(8,47)

Realisasi akun pendapatan asli daerah lainnya per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – PPKD - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	73.800.000,00	19.842.000,00	53.958.000,00	271,94
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	175.914.500,00	0,00	175.914.500,00	100,00
Jasa Giro Kas Daerah	1.987.983.135,91	1.200.517.154,76	787.465.981,15	65,59
Jasa Giro Kas Bendahara	215.618.319,00	144.204.762,00	71.413.198,00	49,52
Bunga Rekening Dana BOS	5.021.433,00	0,00	5.021.433,00	100,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	1.581.232.860,00	3.048.044.873,00	(1.466.812.013,00)	(48,12)
Pendapatan Bunga Deposito BSM	559.906.092,36	538.524.177,97	21.381.914,39	3,97
Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri	7.095.205,47	231.865.068,49	(224.769.863,02)	(96,94)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	472.145.738,07	229.732.964,00	242.412.774,07	105,52
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	846.288.500,00	(846.288.500,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan dari Pengembalian	1.594.250.715,76	1.280.038.921,70	314.211.794,06	24,55
Lain, lain PAD yang Sah Lainnya	2.600.817.399,85	1.313.820.251,91	1.286.997.147,94	97,96
Fasilitas Umum	30.000.000,00	46.570.000,00	(16.570.000,00)	(35,58)
Jumlah	9.303.785.399,42	8.899.448.673,83	404.336.725,59	4,54

b) Dinas Kesehatan – LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan BLUD Puskesmas	12.308.225.511,10	10.859.542.959,84	1.448.712.551,26	13,34
Lain, lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	21.000,00	(21.000,00)	(100,00)
Jumlah	12.308.225.511,10	10.859.563.959,84	1.448.691.551,26	(86,66)

c) Badan Pendapatan Daerah - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Denda Pajak	1.150.848.415,00	595.423.794,00	555.424.621,00	93,28
Pendapatan Denda Retribusi	23.186.559,00	140.567.346,64	(117.380.787,64)	(83,51)
Lain, lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	612.360,00	(612.360,00)	(100,00)
Jumlah	1.174.034.974,00	736.603.500,64	437.431.473,36	59,38

d) RSUD

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	102.993.207.197,00	81.358.350.620,00	21.634.856.577,00	26,59
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	790.115.000,00	682.433.766	107.681.234,00	15,78
Lain, lain Pendapatan BLUD Yang Sah	153.231.016,21	24.998.644	128.232.372,71	512,96
Jumlah	103.936.553.213,21	82.065.783.029,50	21.870.770.183,71	555,33

e) Dinas Perhubungan - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Denda Retribusi	32.205.300,00	0,00	32.205.300,00	100,00
Jumlah	32.205.300,00	0,00	32.205.300,00	100,00



f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - LO

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Dana BOS SD	0,00	26.380.469.062,00	(26.380.469.062,00)	(100,00)
Pendapatan Dana BOS SMP	0,00	9.550.000.000,00	(9.550.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	35.930.469.062,00	(35.930.469.062,00)	(100,00)

B. Pendapatan Transfer - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
921.681.145.885,00	919.540.515.834,00	2.140.630.051,00	0,23

Pendapatan Transfer LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai.

Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp921.681.145.885,00. Jika dibandingkan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2017 sebesar Rp919.540.515.834,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.140.630.051,00 atau 0,23%.

Pendapatan Transfer LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi.

Rincian realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Perbandingan Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat , Dana Perimbangan	810.190.491.050,00	755.592.886.590,00	54.597.604.460,00	7,23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	98.840.847.835,00	84.630.386.181,00	14.2104.61.654,00	16,79
Bantuan Keuangan	12.649.807.000,00	79.317.243.063,00	(66.667.436.063,00)	(84,05)
Jumlah	921.681.145.885,00	919.540.515.834,00	2.140.630.051,00	0,23



1) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
810.190.491.050,00	755.592.886.590,00	54.597.604.460,00	7,23

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018:

Tabel 5.4.7 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Bagi Hasil Pajak	58.145.053.156,00	42.924.641.373,00	15.220.411.783,00	35,46
Bagi Hasil Bukan Pajak	158.526.075.439,00	141.483.331.564,00	17.042.743.875,00	12,05
Dana Alokasi Umum	427.188.089.000,00	408.643.780.000,00	18.544.309.000,00	4,54
Dana Alokasi Khusus	166.331.273.455,00	162.541.133.653,00	3.790.139.802,00	2,33
Jumlah	810.190.491.050,00	755.592.886.590,00	54.597.604.460,00	7,23

Tahun 2018 realisasi Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan adalah sebesar Rp810.190.491.050,00 jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp755.592.886.590,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp54.597.604.460,00 atau 7,23% dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
58.145.053.156,00	42.924.641.373,00	15.220.411.783,00	35,46

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.145.053.156,00 jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp42.924.641.373,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp15.220.411.783,00 atau 35,46%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Pertambangan, PBB Perkebunan. PBB Perhutanan serta PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Bagi Hasil PBB Non Migas	13.627.878.553,00	8.891.156.430,00	4.736.722.123,00	53,27
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan	10.332.475,00	36.517.800,00	(26.185.325,00)	(71,71)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	2.177.456.238,00	1.120.523.250,00	1.056.932.988,00	94,32
Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	3.287.849.515,00	6.731.876.309,00	(3.444.026.794,00)	(51,16)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	39.041.536.375,00	26.144.567.584,00	12.896.968.791,00	49,33
Jumlah	58.145.053.156,00	42.924.641.373,00	15.220.411.783,00	35,46

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan,peraturan sebagai berikut :

1) Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017. Bagian Daerah sebesar Rp58.145.053.156,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp10.332.475,00. Sektor Perhutanan sebesar Rp2.177.456.238,00. dan Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp13.627.878.553,00.

2) Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2018. Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata sebesar Rp3.287.849.515,00.

3) Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebesar Rp65.803.249.857,00.



b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA) – LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
158.526.075.439,00	141.483.331.564,00	17.042.743.875,00	12,05

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp158.526.075.439,00 jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp141.483.331.564,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp17.042.743.875,00 atau 12,05%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari dana reboisasi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.850.581.828,00	2.465.574.434,00	2.385.007.394,00	96,73
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	507.151.268,00	(507.151.268,00)	(100,00)
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	1.813.824.579,00	434.403.326,00	1.379.421.253,00	317,54
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	701.234.591,00	525.572.127,00	175.662.464,00	33,42
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	147.736.029.758,00	131.227.678.170,00	16.508.351.588,00	12,58
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3.424.404.683,00	6.322.952.239,00	(2.898.547.556,00)	(45,84)
Jumlah	158.526.075.439,00	141.483.331.564,00	17.042.743.875,00	12,05

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2018 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan, peraturan sebagai berikut :

1) Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebesar Rp4.850.581.828,00.

2) Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan



Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebesar Rp1.813.824.579,00.

3) Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebesar Rp701.234.591,00.

4) Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK,07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018 Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebesar Rp147.736.029.758,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp147.736.029.758,00 dan Gas Bumi sebesar Rp3.424.404.683,00.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
427.188.089.000,00	408.643.780.000,00	18.544.309.000,00	4,54

Pemerintah Kota Dumai menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2017 dicatat Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp427.188.089.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang Diterima Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.4.10 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

DAU	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00	408.643.780.000,00	18.544.309.000,00	4,54
Jumlah	427.188.089.000,00	408.643.780.000,00	18.544.309.000,00	4,54



d) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Dana Alokasi Khusus

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
166.331.273.455,00	162.541.133.653,00	3.790.139.802,00	2,33

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11 Perbandingan Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
DAK Bidang Kesehatan	37.998.235.505,00	28.628.014.829,00	9.370.220.676,00	32,73
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.046.662.000,00	3.080.186.000,00	(1.033.524.000,00)	(33,55)
DAK Bidang Transportasi	3.239.090.000,00	0,00	3.239.090.000,00	0,00
DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	38.866.949.000,00	0,00	38.866.949.000,00	0,00
DAK Bidang Infrastruktu Air Minum	4.539.014.000,00	3.495.072.000,00	1.043.942.000,00	29,87
DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi	3.539.562.300,00	3.234.323.000,00	305.239.300,00	9,44
DAK Bidang Pertanian	569.978.000,00	147.953.000,00	422.025.000,00	285,24
DAK Bidang Infrastruktu Jalan	0,00	45.166.788.000,00	(45.166.788.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Keluarga Berencana	1.288.400.000,00	176.555.000,00	1.111.845.000,00	629,74
DAK Bidang Pendidikan	70.929.015.800,00	57.036.743.521,00	13.892.272.279,00	24,36
DAK Bidang Perdagangan	1.265.193.750,00	0,00	1.265.193.750,00	0,00
DAK Bidang Pariwisata	1.136.562.000,00	0,00	1.136.562.000,00	0,00
DAK Bidang Kependudukan	912.611.100,00	821.536.000,00	91.075.100,00	11,09
Penyelesaian Tambahan DAK Fisik Tahun 2016	0,00	20.753.962.303,00	(20.753.962.303,00)	(100,00)
Jumlah	166.331.273.455,00	162.541.133.653,00	3.790.139.802,00	2,33

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
0,00	0,00	0,00	0,00



3) Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
98.840.847.835,00	84.630.386.181,00	14.210.461.654,00	16,79

Realisasi transfer pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018 sebesar Rp98.840.847.835,00 Jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp84.630.386.181,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp14.210.461.654,00 atau 16,79% adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Perbandingan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Transfer Pemerintah Provinsi	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pajak Kendaraan Bermotor	22.316.457.488,00	19.192.849.981,00	3.123.607.507,00	16,27
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.969.641.742,00	15.169.378.639,00	2.800.263.103,00	18,46
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.592.965.304,00	34.177.999.461,00	8.414.965.843,00	24,62
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	774.962.584,00	709.563.019,00	65.399.565,00	9,22
Pajak Rokok	15.186.820.717,00	15.380.595.081,00	(193.774.364,00)	(1,26)
Jumlah	98.840.847.835,00	84.630.386.181,00	14.210.461.654,00	16,79

Realisasi dana bagi hasil dari TA 2018 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 349/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 550/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 947/V/2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 1138/V/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak



Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018

4) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
12.649.807.000,00	79.317.243.063,00	(66.667.436.063,00)	(84,05)

Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya LO dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp12.649.807.000,00 bila di bandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya LO dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp79.317.243.063,00

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2018 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 210/II/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2018
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 919/X/2018 tentang Perubahan Kpts, 210/II/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Berupa Gaji Guru Bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2018
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, 308/IV/2018 Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2018

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
37.792.480.899,00	5.907.548.588,00	31.884.932.311,00	539,73

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp37.792.480.899,00 Jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.907.548.588,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp31.884.932.311,00 atau 539,73% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.4.13 Perbandingan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Hibah	37.792.480.899,00	5.907.548.588,00	31.884.932.311,00	539,73
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.792.480.899,00	5.907.548.588,00	31.884.932.311,00	539,73

1) Pendapatan Hibah - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
37.792.480.899,00	5.907.548.588,00	31.884.932.311,00	539,73

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Berikut adalah SKPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan Aset yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.14 Pendapatan Hibah

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	272.077.000,00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	267.242.000,00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum	223,864,614.00	Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga
Dinas Perpustakaan	404.914.190,00	Hibah Dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	359.405.095,00	Hibah Dari BKKBN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	205.258.000,00	Hibah Dari Kementerian Dalam Negeri
PPKD	36.059.720.000,00	Pendapatan Hibah Dana BOS
Jumlah	37.792.480.899,00	

2. Beban – LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
1.125.006.435.619,96	1.069.839.806.916,49	55.166.628.703,47	5,16

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar, benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berjalan. dengan realisasi Beban Kota Dumai selama tahun 2018 adalah sebesar Rp1.125.006.435.619,96 jika dibandingkan pada tahun 2017



Rp1.069.839.806.916,46 maka mengalami kenaikan sebesar Rp55.166.628.703,47 atau 5,16 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Perbandingan Beban LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Beban Pegawai	465.147.119.027,00	443.963.377.358,00	21.183.741.669,00	4,77
Beban Persediaan	107.850.852.965,17	94.364.855.235,98	13.485.997.729,19	14,29
Beban Jasa	286.493.347.356,47	263.283.318.272,74	23.210.029.083,73	8,82
Beban Pemeliharaan	12.388.459.271,94	15.881.811.593,00	(3.493.352.321,06)	(22,00)
Beban Perjalanan Dinas	61.377.808.688,00	56.426.363.931,00	4.951.444.757,00	8,78
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	2.442.348.000,00	(2.442.348.000,00)	(100,00)
Beban Hibah	11.098.600.000,00	15.760.901.892,00	(4.662.301.892,00)	(29,58)
Beban Bantuan Sosial	0,00	1.032.500.000,00	(1.032.500.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	162.218.551.611,14	150.906.460.966,03	11.312.090.645,11	7,50
Beban Penyisihan Piutang	7.331.282.938,23	13.402.804.404,74	(6.071.521.466,52)	(45,30)
Beban Bantuan Keuangan	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	0,00	0,00
Beban Lain, lain	8.855.146.682,01	10.129.798.183,00	(1.274.651.500,99)	(12,58)
Jumlah	1.125.006.435.619,96	1.069.839.806.916,49	55.166.628.703,47	5,16

Realisasi akun Beban LO dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Beban Pegawai - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
465.147.119.027,00	443.963.377.358,00	21.183.741.669,00	4,77

Beban Pegawai menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.16 Beban Pegawai LO

Beban Pegawai	Tahun 2018 (Rp)
Gaji dan Tunjangan	249.453.369.429,00
Tambahan Penghasilan PNS	204.543.049.250,00
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.526.600.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	2.790.666.659,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.935.860.656,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	897.573.033,00
Jumlah	465.147.119.027,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Beban pegawai LO disajikan dengan basis akrual. Beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA, Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah diterbitkan dan diterima PPK, Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp465.147.119.027,00 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp443.963.377.358,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp21.183.741.669,00 atau 4,77 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.17 Perbandingan Beban Pegawai LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	767.050.396,00	764.992.446,00	2.057.950,00	0,27
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.997.587.170,00	12.094.674.648,00	2.902.912.522,00	24,00
Sekretariat Daerah	14.860.813.634,00	13.950.730.221,00	910.083.413,00	6,52
Sekretariat DPRD	4.445.361.216,00	4.097.977.402,00	347.383.814,00	8,48
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.516.216.087,00	2.452.291.456,00	63.924.631,00	2,61
Dinas Kesehatan	35.268.939.948,00	32.806.798.287,00	2.462.141.661,00	7,50
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.404.030.514,00	3.256.952.798,00	147.077.716,00	4,52
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.586.077.752,00	2.436.172.795,00	149.904.957,00	6,15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.721.428.014,00	3.356.870.497,00	364.557.517,00	10,86
Badan Pendapatan Daerah	12.327.038.937,00	11.193.453.454,00	1.133.585.483,00	10,13
Satuan Polisi Pamong Praja	5.377.548.919,00	5.069.294.877,00	308.254.042,00	6,08
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.823.861.626,00	3.569.640.982,00	254.220.644,00	7,12
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.544.397.020,00	2.374.552.448,00	169.844.572,00	7,15
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.495.672.466,00	7.151.997.750,00	343.674.716,00	4,81
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.038.461.982,00	972.070.170,00	66.391.812,00	6,83
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.496.653.367,00	3.288.151.529,00	208.501.838,00	6,34
Dinas Perdagangan	4.416.239.777,00	4.283.597.092,00	132.642.685,00	3,10
Dinas Lingkungan Hidup	4.144.029.676,00	3.813.125.347,00	330.904.329,00	8,68
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	209.751.131.163,00	206.933.532.252,00	2.817.598.911,00	1,36
Dinas Perikanan	3.229.743.302,00	3.162.161.874,00	67.581.428,00	2,14
Dinas Perhubungan	8.615.910.838,00	9.310.932.367,00	(695.021.529,00)	(7,46)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.119.881.997,00	7.946.096.877,00	173.785.120,00	2,19
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.999.780.598,00	3.025.302.456,00	(25.521.858,00)	(0,84)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.082.343.635,00	2.828.508.479,00	253.835.156,00	8,97
Inspektorat	6.310.989.371,00	4.770.276.816,00	1.540.712.555,00	32,30
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.454.417.089,00	3.044.093.513,00	410.323.576,00	13,48
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.534.121.258,00	5.091.454.873,00	442.666.385,00	8,69
Dinas Sosial	1.887.164.602,00	2.047.992.781,00	(160.828.179,00)	(7,85)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	29.034.436.499,00	26.380.286.894,00	2.654.149.605,00	10,06
Kecamatan Bukit Kapur	5.505.058.573,00	5.394.513.663,00	110.544.910,00	2,05
Kecamatan Dumai Barat	4.492.966.452,00	4.211.025.809,00	281.940.643,00	6,70
Kecamatan Dumai Kota	5.443.819.611,00	5.323.134.995,00	120.684.616,00	2,27
Kecamatan Dumai Selatan	5.257.063.708,00	4.863.202.935,00	393.860.773,00	8,10
Kecamatan Dumai Timur	4.994.292.761,00	4.673.372.956,00	320.919.805,00	6,87
Kecamatan Medang Kampai	4.493.730.346,00	4.624.898.746,00	(131.168.400,00)	(2,84)
Kecamatan Sungai Sembilan	5.275.789.526,00	4.940.001.769,00	335.787.757,00	6,80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.399.423.685,00	3.281.838.632,00	117.585.053,00	3,58
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.033.645.512,00	15.177.404.472,00	1.856.241.040,00	12,23
Jumlah	465.147.119.027,00	443.963.377.358,00	21.183.741.669,00	4,77

Realisasi akun Beban Pegawai LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Gaji dan Tunjangan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	167.050.396,00	164.992.446,00	2.057.950,00	1,25
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.272.587.170,00	8.503.674.648,00	1.768.912.522,00	20,80
Sekretariat Daerah	8.449.257.384,00	8.180.285.221,00	268.972.163,00	3,29
Sekretariat DPRD	2.475.461.216,00	2.308.092.402,00	167.368.814,00	7,25
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.390.936.087,00	1.402.601.456,00	(11.665.369,00)	(0,83)
Dinas Kesehatan	23.053.024.948,00	22.146.130.387,00	906.894.561,00	4,10



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.814.780.514,00	1.760.557.798,00	54.222.716,00	3,08
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.471.137.752,00	1.405.852.795,00	65.284.957,00	4,64
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.006.628.014,00	1.852.895.497,00	153.732.517,00	8,30
Badan Pendapatan Daerah	4.452.031.622,00	4.435.671.066,00	16.360.556,00	0,37
Satuan Polisi Pamong Praja	2.917.041.219,00	2.832.973.627,00	84.067.592,00	2,97
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.103.361.626,00	2.021.630.982,00	81.730.644,00	4,04
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.411.997.020,00	1.353.752.448,00	58.244.572,00	4,30
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.381.272.466,00	4.294.462.750,00	86.809.716,00	2,02
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	574.671.982,00	558.100.170,00	16.571.812,00	2,97
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.930.593.367,00	1.916.546.529,00	14.046.838,00	0,73
Dinas Perdagangan	2.499.839.777,00	2.515.408.342,00	(15.568.565,00)	(0,62)
Dinas Lingkungan Hidup	2.284.729.676,00	2.169.050.347,00	115.679.329,00	5,33
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.523.725.063,00	105.477.015.987,00	(953.290.924,00)	(0,90)
Dinas Perikanan	1.783.368.302,00	1.794.351.837,00	(10.983.535,00)	(0,61)
Dinas Perhubungan	4.994.007.805,00	5.297.700.830,00	(303.693.025,00)	(5,73)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.663.671.997,00	4.757.251.877,00	(93.579.880,00)	(1,97)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.583.680.598,00	1.707.702.456,00	(124.021.858,00)	(7,26)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.663.723.635,00	1.568.923.479,00	94.800.156,00	6,04
Inspektorat	2.935.939.371,00	2.463.401.816,00	472.537.555,00	19,18
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.815.709.589,00	1.643.193.513,00	172.516.076,00	10,50
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.788.271.258,00	2.603.855.961,00	184.415.297,00	7,08
Dinas Sosial	1.007.764.602,00	1.185.417.781,00	(177.653.179,00)	(14,99)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	16.537.756.499,00	15.725.776.894,00	811.979.605,00	5,16
Kecamatan Bukit Kapur	3.116.758.573,00	3.197.213.663,00	(80.455.090,00)	(2,52)
Kecamatan Dumai Barat	2.503.266.452,00	2.400.975.809,00	102.290.643,00	4,26
Kecamatan Dumai Kota	3.057.198.911,00	3.101.449.995,00	(44.251.084,00)	(1,43)
Kecamatan Dumai Selatan	2.949.183.708,00	2.799.482.935,00	149.700.773,00	5,35



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Dumai Timur	2.753.292.761,00	2.657.097.956,00	96.194.805,00	3,62
Kecamatan Medang Kampai	2.586.230.346,00	2.722.898.746,00	(136.668.400,00)	(5,02)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.884.929.526,00	2.817.171.769,00	67.757.757,00	2,41
PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.919.587.685,00	1.897.918.632,00	21.669.053,00	1,14
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.728.900.512,00	8.528.259.472,00	1.200.641.040,00	14,08
Jumlah	249.453.369.429,00	244.169.740.319,00	5.283.629.110,00	2,16

2) Tambahan Penghasilan PNS - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	6.411.556.250,00	5.770.445.000,00	641.111.250,00	11,11
Sekretariat DPRD	1.768.300.000,00	1.505.125.000,00	263.175.000,00	17,49
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.125.280.000,00	1.049.690.000,00	75.590.000,00	7,20
Dinas Kesehatan	12.204.290.000,00	10.647.027.900,00	1.557.262.100,00	14,63
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.589.250.000,00	1.496.395.000,00	92.855.000,00	6,21
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.114.940.000,00	1.030.320.000,00	84.620.000,00	8,21
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.714.800.000,00	1.503.975.000,00	210.825.000,00	14,02
Badan Pendapatan Daerah	3.148.480.000,00	2.961.015.000,00	187.465.000,00	6,33
Satuan Polisi Pamong Praja	2.460.507.700,00	2.236.321.250,00	224.186.450,00	10,02
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.720.500.000,00	1.548.010.000,00	172.490.000,00	11,14
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.132.400.000,00	1.020.800.000,00	111.600.000,00	10,93
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.114.400.000,00	2.851.775.000,00	262.625.000,00	9,21
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	463.790.000,00	413.970.000,00	49.820.000,00	12,03
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.566.060.000,00	1.371.605.000,00	194.455.000,00	14,18
Dinas Perdagangan	1.888.015.000,00	1.745.688.750,00	142.326.250,00	8,15
Dinas Lingkungan Hidup	1.859.300.000,00	1.644.075.000,00	215.225.000,00	13,09
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.227.406.100,00	101.456.516.265,00	3.770.889.835,00	3,72
Dinas Perikanan	1.429.500.000,00	1.351.750.000,00	77.750.000,00	5,75
Dinas Perhubungan	3.249.965.000,00	3.114.460.000,00	135.505.000,00	4,35



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.441.210.000,00	3.173.845.000,00	267.365.000,00	8,42
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.416.100.000,00	1.317.600.000,00	98.500.000,00	7,48
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.418.620.000,00	1.254.335.000,00	164.285.000,00	13,10
Inspektorat	3.375.050.000,00	2.306.875.000,00	1.068.175.000,00	46,30
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.638.707.500,00	1.400.900.000,00	237.807.500,00	16,98
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.292.100.000,00	2.017.380.000,00	274.720.000,00	13,62
Dinas Sosial	879.400.000,00	862.575.000,00	16.825.000,00	1,95
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	12.496.680.000,00	10.654.510.000,00	1.842.170.000,00	17,29
Kecamatan Bukit Kapur	2.388.300.000,00	2.197.300.000,00	191.000.000,00	8,69
Kecamatan Dumai Barat	1.989.700.000,00	1.810.050.000,00	179.650.000,00	9,93
Kecamatan Dumai Kota	2.386.620.700,00	2.221.685.000,00	164.935.700,00	7,42
Kecamatan Dumai Selatan	2.307.880.000,00	2.063.720.000,00	244.160.000,00	11,83
Kecamatan Dumai Timur	2.241.000.000,00	2.016.275.000,00	224.725.000,00	11,15
Kecamatan Medang Kampai	1.907.500.000,00	1.902.000.000,00	5.500.000,00	0,29
Kecamatan Sungai Sembilan	2.390.860.000,00	2.122.830.000,00	268.030.000,00	12,63
PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.479.836.000,00	1.383.920.000,00	95.916.000,00	6,93
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.304.745.000,00	6.649.145.000,00	655.600.000,00	9,86
Jumlah	204.543.049.250,00	190.073.909.165,00	14.469.140.085,00	7,61

3) Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	,	0,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.725.000.000,00	3.591.000.000,00	1.134.000.000,00	31,58
Sekretariat DPRD	201.600.000,00	284.760.000,00	(83.160.000,00)	(29,20)
Jumlah	5.526.600.000,00	4.475.760.000,00	1.050.840.000,00	23,48



4) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Pendapatan Daerah	2.790.666.659,00	1.881.735.996,00	908.930.663,00	48,30
Jumlah	2.790.666.659,00	1.881.735.996,00	908.930.663,00	48,30

5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Pendapatan Daerah	1.935.860.656,00	1.782.290.656,00	153.570.000,00	8,62
Jumlah	1.935.860.656,00	1.782.290.656,00	153.570.000,00	8,62

6) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	11.625.000,00	13.640.000,00	(2.015.000,00)	(14,77)
Dinas Perdagangan	28.385.000,00	22.500.000,00	5.885.000,00	26,16
Dinas Perikanan	16.875.000,00	16.060.037,00	814.963,00	5,07
Dinas Perhubungan	371.938.033,00	898.771.537,00	(526.833.504,00)	(58,62)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	453.750.000,00	470.218.912,00	(16.468.912,00)	(3,50)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	132.740.736,00	(132.740.736,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	0,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	5.760.000,00	(5.760.000,00)	(100,00)
Jumlah	897.573.033,00	1.579.941.222,00	(682.368.189,00)	(43,19)

B. Beban Persediaan - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
107.850.852.965,17	94.364.855.235,98	13.485.997.729,19	14,29

Beban Persediaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.18 Beban Persediaan LO

Beban Persediaan	Tahun 2018 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	33.416.456.405,67
Beban Persediaan Bahan/Material	37.576.493.867,50
Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor	9.679.927.555,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Beban Persediaan	Tahun 2018 (Rp)
Beban Cetak dan Penggandaan	12.617.795.753,00
Beban Makan dan Minum	972.090.331,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.800.000,00
Beban Pakaian kerja lapangan	75.388.000,00
Beban Pakaian Olahraga	1.920.000,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.518.966.450,00
Beban Persediaan Dana BOS	8.975.014.603,00
Jumlah	107.850.852.965,17

Pencatatan persediaan Kota Dumai menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai beban persediaan, sehingga pada akhir periode beban persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari beban operasional.

Realisasi beban persediaan selama TA 2018 sebesar Rp107.850.852.965,17 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp94.364.855.235,98 maka mengalami kenaikan sebesar Rp13.485.997.729,19 atau 14,29% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.19 Perbandingan Beban LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	5.371.708.050,00	5.880.180.278,00	(508.472.228,00)	(8,65)
Sekretariat DPRD	1.563.922.763,00	1.620.906.237,00	(56.983.474,00)	(3,52)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	630.530.160,00	495.057.530,00	135.472.630,00	27,37
Dinas Kesehatan	7.901.177.930,59	5.658.512.456,69	2.242.665.473,90	39,63
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.118.642.041,00	1.572.592.100,00	(453.950.059,00)	(28,87)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	288.804.375,00	248.949.625,00	39.854.750,00	16,01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	866.352.469,00	850.989.762,00	15.362.707,00	1,81
Badan Pendapatan Daerah	1.636.034.750,00	1.443.579.850,00	192.454.900,00	13,33
Satuan Polisi Pamong Praja	371.220.150,00	314.080.325,00	57.139.825,00	18,19
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	473.666.835,00	382.207.355,00	91.459.480,00	23,93
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.542.254.223,00	2.111.133.797,00	2.431.120.426,00	115,16
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.982.266.925,00	710.792.080,00	1.271.474.845,00	178,88
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	441.417.579,00	481.524.434,00	(40.106.855,00)	(8,33)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	498.887.772,00	646.983.500,00	(148.095.728,00)	(22,89)
Dinas Perdagangan	388.951.300,00	371.365.925,00	17.585.375,00	4,74



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Lingkungan Hidup	3.975.322.877,00	3.038.894.154,00	936.428.723,00	30,81
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.454.997.384,00	13.903.218.689,00	551.778.695,00	3,97
Dinas Perikanan	719.476.972,00	805.298.527,00	(85.821.555,00)	(10,66)
Dinas Perhubungan	2.841.912.937,00	2.949.634.157,00	(107.721.220,00)	(3,65)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.094.904.789,00	8.219.953.008,00	874.951.781,00	10,64
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.240.787.928,00	771,020,000,00	469,767,928,00	60,93
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	520.099.750,00	423.231.250,00	96.868.500,00	22,89
Inspektorat	318.745.780,00	344.312.908,00	(25.567.128,00)	(7,43)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	444.681.731,00	730.737.737,00	(286.056.006,00)	(39,15)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	766.192.392,00	828.520.573,00	(62.328.181,00)	(7,52)
Dinas Sosial	493.007.237,00	530.810.688,00	(37.803.451,00)	(7,12)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	40.338.178.479,58	34.339.018.245,29	5.999.160.234,29	17,47
Kecamatan Bukit Kapur	441.012.489,00	473.446.491,00	(32.434.002,00)	(6,85)
Kecamatan Dumai Barat	459.978.510,00	492.622.320,00	(32.643.810,00)	(6,63)
Kecamatan Dumai Kota	482.561.900,00	469.209.100,00	13.352.800,00	2,85
Kecamatan Dumai Selatan	530.585.334,00	501.475.995,00	29.109.339,00	5,80
Kecamatan Dumai Timur	453.698.221,00	466.835.103,00	(13.136.882,00)	(2,81)
Kecamatan Medang Kampai	378.297.175,00	377.557.250,00	739.925,00	0,20
Kecamatan Sungai Sembilan	388.436.700,00	379.209.200,00	9.227.500,00	2,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	295.816.000,00	337.467.425,00	(41.651.425,00)	(12,34)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.136.321.057,00	1.193.527.161,00	(57.206.104,00)	(4,79)
Jumlah	107.850.852.965,17	94.364.855.235,98	13.485.997.729,19	14,29

Realisasi akun Beban Persediaan LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Beban Bahan Pakai Habis - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	1.612.073.150,00	1.847.785.003,00	(235.711.853,00)	(12,76)
Sekretariat DPRD	457.466.892,00	479.395.270,00	(21.928.378,00)	(4,57)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	339.682.660,00	234.619.030,00	105.063.630,00	44,78
Dinas Kesehatan	1.876.010.741,00	1.292.135.771,00	583.874.970,00	45,19



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	460.578.441,00	1.074.243.400,00	(613.664.959,00)	(57,13)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	105.225.275,00	82.375.825,00	22.849.450,00	27,74
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	387.934.000,00	529.251.297,00	(141.317.297,00)	(26,70)
Badan Pendapatan Daerah	739.686.150,00	675.504.650,00	64.181.500,00	9,50
Satuan Polisi Pamong Praja	116.972.650,00	260.581.950,00	(143.609.300,00)	(55,11)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	206.707.885,00	164.430.155,00	42.277.730,00	25,71
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.372.087.623,00	1.690.345.672,00	(318.258.049,00)	(18,83)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	437.451.900,00	375.656.830,00	61.795.070,00	16,45
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	153.425.476,00	140.813.025,00	12.612.451,00	8,96
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	136.948.972,00	200.946.700,00	(63.997.728,00)	(31,85)
Dinas Perdagangan	180.480.150,00	128.482.775,00	51.997.375,00	40,47
Dinas Lingkungan Hidup	632.384.050,00	361.093.110,00	271.290.940,00	75,13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.376.688.330,00	10.965.828.675,00	(8.589.140.345,00)	(78,33)
Dinas Perikanan	355.066.795,00	439.239.605,00	(84.172.810,00)	(19,16)
Dinas Perhubungan	1.791.541.066,00	2.044.355.615,00	(252.814.549,00)	(12,37)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.139.311.097,00	1.368.459.100,00	(229.148.003,00)	(16,74)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	405.330.278,00	125.127.010,00	280.203.268,00	223,94
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	158.494.100,00	187.479.620,00	(28.985.520,00)	(15,46)
Inspektorat	222.364.880,00	251.821.874,00	(29.456.994,00)	(11,70)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	193.382.281,00	460.769.780,00	(267.387.499,00)	(58,03)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	252.929.446,00	257.953.133,00	(5.023.687,00)	(1,95)
Dinas Sosial	184.787.925,00	222.749.341,00	(37.961.416,00)	(17,04)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	15.097.991.517,67	16.281.490.243,92	(1.183.498.726,25)	(7,27)
Kecamatan Bukit Kapur	248.210.489,00	260.118.491,00	(11.908.002,00)	(4,58)
Kecamatan Dumai Barat	224.302.960,00	283.324.770,00	(59.021.810,00)	(20,83)
Kecamatan Dumai Kota	168.495.400,00	174.780.600,00	(6.285.200,00)	(3,60)
Kecamatan Dumai Selatan	222.231.252,00	222.502.745,00	(271.493,00)	(0,12)
Kecamatan Dumai Timur	158.228.192,00	162.274.203,00	(4.046.011,00)	(2,49)
Kecamatan Medang Kampai	160.489.775,00	218.408.050,00	(57.918.275,00)	(26,52)
Kecamatan Sungai Sembilan	232.763.700,00	228.095.600,00	4.668.100,00	2,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.883.000,00	85.681.000,00	(798.000,00)	(0,93)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	523.847.907,00	410.641.835,00	113.206.072,00	27,57
Jumlah	33.416.456.405,67	44.188.761.753,92	(10.772.305.348,25)	(24,38)

2) Beban Persediaan Bahan/Material - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	402.257.000,00	701.871.000,00	(299.614.000,00)	(42,69)
Sekretariat DPRD	24.500.000,00	36.550.000,00	(12.050.000,00)	(32,97)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	31.900.000,00	28.700.000,00	3.200.000,00	11,15
Dinas Kesehatan	4.637.161.982,59	2,496,055,956.69	2,141,106,025.90	85,78
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	284.812.000,00	72,838,000.00	211,974,000.00	291,02
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.700.000,00	7.099.000,00	(399.000,00)	(5,62)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.533.000,00	36.386.165,00	4.146.835,00	11,40
Badan Pendapatan Daerah	54.846.000,00	20.000.000,00	34.846.000,00	174,23
Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00	16.875.000,00	(4.875.000,00)	(28,89)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	112.968.500,00	47.412.400,00	65.556.100,00	138,27
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	91.599.600,00	43.362.625,00	48.236.975,00	111,24
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	694.179.850,00	97.433.000,00	596.746.850,00	612,47



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	18.850.000,00	31.550.000,00	(12.700.000,00)	(40,25)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	59.552.500,00	50.955.600,00	8.596.900,00	16,87
Dinas Perdagangan	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	344.394.702,00	175.948.344,00	168.446.358,00	95,74
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	620.033.079,00	592.371.299,00	27.661.780,00	4,67
Dinas Perikanan	49.928.900,00	165.616.622,00	(115.687.722,00)	(69,85)
Dinas Perhubungan	531.418.000,00	520.708.660,00	10.709.340,00	2,06
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.795.100.412,00	5.581.101.832,00	213.998.580,00	3,83
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	571.512.450,00	401.873.650,00	169.638.800,00	42,21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	104.215.750,00	68.504.480,00	35.711.270,00	52,13
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39.900.000,00	44.591.900,00	(4.691.900,00)	(10,52)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.315.750,00	8.347.500,00	(2.031.750,00)	(24,34)
Dinas Sosial	26.878.550,00	33.980.000,00	(7.101.450,00)	(20,90)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	22.345.151.841,91	15.765.363.626,37	6.579.788.215,54	41,74
Kecamatan Bukit Kapur	43.150.000,00	61.650.000,00	(18.500.000,00)	(30,01)
Kecamatan Dumai Barat	76.300.000,00	18.800.000,00	57.500.000,00	305,85
Kecamatan Dumai Kota	120.050.000,00	89.400.000,00	30.650.000,00	34,28
Kecamatan Dumai Selatan	129.225.000,00	95.000.000,00	34.225.000,00	36,03
Kecamatan Dumai Timur	111.090.000,00	109.240.000,00	1.850.000,00	1,69
Kecamatan Medang Kampai	68.624.000,00	22.600.000,00	46.024.000,00	203,65
Kecamatan Sungai Sembilan	90.550.000,00	81.000.000,00	9.550.000,00	11,79
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	310.000,00	18.975.000,00	(18.665.000,00)	(98,37)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.280.000,00	22.008.750,00	271.250,00	1,23
Jumlah	37.576.493.867,50	27.564.170.410,06	10.012.323.457,44	36,32



3) Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	1.737.967.200,00	1.489.839.000,00	248.128.200,00	16,65
Sekretariat DPRD	543.241.000,00	539.603.817,00	3.637.183,00	0,67
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	98.900.000,00	74.020.000,00	24.880.000,00	33,61
Dinas Kesehatan	88.646.557,00	455.488.569,00	(366.842.012,00)	(80,54)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	21.800.000,00	33.220.250,00	(11.420.250,00)	(34,38)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	133.094.000,00	124.724.000,00	8.370.000,00	6,71
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	209.595.769,00	70.754.450,00	138.841.319,00	196,23
Badan Pendapatan Daerah	203.480.000,00	293.940.000,00	(90.460.000,00)	(30,77)
Satuan Polisi Pamong Praja	213.518.000,00	5.250.000,00	208.268.000,00	3967,01
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.465.000,00	65.739.300,00	(5.274.300,00)	(8,02)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	277.031.000,00	334.252.750,00	(57.221.750,00)	(17,12)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	118.425.820,00	116.673.750,00	1.752.070,00	1,50
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	59.311.900,00	100.644.909,00	(41.333.009,00)	(41,07)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	116.582.300,00	175.899.200,00	(59.316.900,00)	(33,72)
Dinas Perdagangan	102.518.500,00	164.234.150,00	(61.715.650,00)	(37,58)
Dinas Lingkungan Hidup	2.899.272.875,00	2.409.293.690,00	489.979.185,00	20,34
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.952.000,00	0,00	60.952.000,00	100,00
Dinas Perikanan	176.531.677,00	162.312.300,00	14.219.377,00	8,76
Dinas Perhubungan	121.497.000,00	131.742.400,00	(10.245.400,00)	(7,78)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	911.419.880,00	1.030.338.226,00	(118.918.346,00)	(11,54)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.620.000,00	82.110.000,00	(19.490.000,00)	(23,74)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.633.500,00	0,00	73.633.500,00	100,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	52.885.000,00	55.354.057,00	(2.469.057,00)	(4,46)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Perlindungan Anak				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	171.390.996,00	86.505.000,00	84.885.996,00	98,13
Dinas Sosial	109.125.000,00	141.275.015,00	(32.150.015,00)	(22,76)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	275.450.737,00	261.502.725,00	13.948.012,00	5,33
Kecamatan Bukit Kapur	35.884.000,00	35.587.000,00	297.000,00	0,83
Kecamatan Dumai Barat	54.409.000,00	57.794.500,00	(3.385.500,00)	(5,86)
Kecamatan Dumai Kota	92.835.200,00	96.900.000,00	(4.064.800,00)	(4,19)
Kecamatan Dumai Selatan	77.289.500,00	93.975.250,00	(16.685.750,00)	(17,76)
Kecamatan Dumai Timur	103.463.144,00	115.524.000,00	(12.060.856,00)	(10,44)
Kecamatan Medang Kampai	65.943.000,00	42.218.200,00	23.724.800,00	56,20
Kecamatan Sungai Sembilan	19.445.000,00	20.270.000,00	(825.000,00)	(4,07)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	195.659.000,00	215.841.425,00	(20.182.425,00)	(9,35)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	135.644.000,00	191.828.176,00	(56.184.176,00)	(29,29)
Jumlah	9.679.927.555,00	9.274.656.109,00	405.271.446,00	4,37

4) Beban Cetak dan Penggandaan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	1.619.410.700,00	1.840.685.275,00	(221.274.575,00)	(12,02)
Sekretariat DPRD	538.714.871,00	565.357.150,00	(26.642.279,00)	(4,71)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	160.047.500,00	157.718.500,00	2.329.000,00	1,48
Dinas Kesehatan	987.293.650,00	1.244.568.160,00	(257.274.510,00)	(20,67)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	351.451.600,00	392.290.450,00	(40.838.850,00)	(10,41)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.785.100,00	34.750.800,00	9.034.300,00	26,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	228.289.700,00	214.597.850,00	13.691.850,00	6,38
Badan Pendapatan Daerah	638.022.600,00	454.135.200,00	183.887.400,00	40,49
Satuan Polisi Pamong Praja	28.729.500,00	31.373.375,00	(2.643.875,00)	(8,43)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	93.525.450,00	86.125.500,00	7.399.950,00	8,59



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	56.036.000,00	43.172.750,00	12.863.250,00	29,79
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	147.115.405,00	121.028.500,00	26.086.905,00	21,55
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	209.830.203,00	208.516.500,00	1.313.703,00	0,63
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	103.314.000,00	219.182.000,00	(115.868.000,00)	(52,86)
Dinas Perdagangan	97.747.650,00	78.649.000,00	19.098.650,00	24,28
Dinas Lingkungan Hidup	99.271.250,00	92.559.010,00	6.712.240,00	7,25
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.422.309.372,00	2.345.018.715,00	77.290.657,00	3,30
Dinas Perikanan	37.959.600,00	38.130.000,00	(170.400,00)	(0,45)
Dinas Perhubungan	397.456.871,00	252.827.482,00	144.629.389,00	57,20
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.020.900,00	240.053.850,00	24.967.050,00	10,40
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	201.325.200,00	161.909.340,00	39.415.860,00	24,34
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	183.756.400,00	167.247.150,00	16.509.250,00	9,87
Inspektorat	96.380.900,00	92.491.034,00	3.889.866,00	4,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	158.514.450,00	170.022.000,00	(11.507.550,00)	(6,77)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	335.556.200,00	475.714.940,00	(140.158.740,00)	(29,46)
Dinas Sosial	172.215.762,00	132.806.332,00	39.409.430,00	29,67
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.843.611.052,00	1.403.088.650,00	440.522.402,00	31,40
Kecamatan Bukit Kapur	113.768.000,00	116.091.000,00	(2.323.000,00)	(2,00)
Kecamatan Dumai Barat	104.966.550,00	132.703.050,00	(27.736.500,00)	(20,90)
Kecamatan Dumai Kota	101.181.300,00	108.128.500,00	(6.947.200,00)	(6,42)
Kecamatan Dumai Selatan	101.839.582,00	89.998.000,00	11.841.582,00	13,16
Kecamatan Dumai Timur	80.916.885,00	79.796.900,00	1.119.985,00	1,40
Kecamatan Medang Kampai	83.240.400,00	94.331.000,00	(11.090.600,00)	(11,76)
Kecamatan Sungai Sembilan	45.678.000,00	49.843.600,00	(4.165.600,00)	(8,36)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.964.000,00	16.970.000,00	(2.006.000,00)	(11,82)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	454.549.150,00	569.048.400,00	(114.499.250,00)	(20,12)
Jumlah	12.617.795.753,00	12.520.929.963,00	96.865.790,00	0,77



5) Beban Makan dan Minum - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	271.505.000,00	153.464.000,00	118.041.000,00	76,92
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	700.585.331,00	580.719.000,00	119.866.331,00	20,64
Jumlah	972.090.331,00	734.183.000,00	237.907.331,00	32,40

6) Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
Jumlah	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00

7) Beban Pakaian kerja lapangan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	75.388.000,00	46.854.000,00	28.534.000,00	60,90
Jumlah	75.388.000,00	47.304.000,00	28.084.000,00	59,37

8) Beban Pakaian Olahraga - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	1.920.000,00	16.350.000,00	(14.430.000,00)	(88,26)
Jumlah	1.920.000,00	16.350.000,00	(14.430.000,00)	(88,26)

9) Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	0,00	18.500.000,00	(18.500.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	21.840.000,00	0,00	21.840.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.745.500.000,00	0,00	2.745.500.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	585.093.950,00	0,00	585.093.950,00	100,00
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	82.490.000,00	0,00	82.490.000,00	100,00
Dinas Perikanan	99.990.000,00	0,00	99.990.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	984.052.500,00	0,00	984.052.500,00	100,00
Jumlah	4.518.966.450,00	18.500.000,00	4.500.466.450,00	24.326,85



10) **Beban Persediaan Dana BOS - LO**

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.975.014.603,00	0,00	8.975.014.603,00	100,00
Jumlah	8.975.014.603,00	0,00	8.975.014.603,00	100,00

C. **Beban Jasa - LO**

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
286.493.347.356,47	263.283.318.272,74	23.210.029.083,73	8,82

Beban Jasa menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.20 Perbandingan Beban Jasa

Beban Jasa	Realisasi 2018 (Rp)
Beban Jasa Kantor	122.680.513.880,30
Beban Jasa Asuransi	15.596.805.566,73
Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	2.407.186.041,00
Beban Jasa Sewa Gedung	2.222.806.418,00
Beban Jasa Sewa Kendaraan	1.577.224.967,00
Beban Jasa Sewa Alat, alat Berat	5.683.593.000,00
Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor	1.905.888.590,00
Beban Jasa Konsultasi	5.231.975.464,34
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	173.000.000,00
Beban Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.750.935.265,00
Beban Honorarium PNS , LO	70.238.362.261,10
Beban Honorarium Non PNS , LO	10.743.260.580,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	12.843.434.151,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	8.435.158.833,00
Beban Makanan dan Minuman	18.164.806.339,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	418.970.000,00
Beban Pakaian Kerja	1.183.908.000,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari , Hari Tertentu	1.522.470.000,00
Beban Pakaian Lainnya	1.713.048.000,00
Jumlah	286.493.347.356,47

Beban Jasa Kota Dumai TA 2018 terealisasi sebesar Rp286.493.347.356,47 jika dibandingkan TA 2017 Rp263.283.318.272,74 maka mengalami kenaikan sebesar Rp23.210.029.083,73 atau 8,82% dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Tabel 5.4.21 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	23.760.827.388,00	26.236.056.994,83	(2.475.229.606,83)	(9,43)
Sekretariat DPRD	7.011.555.079,00	6.815.815.286,00	195.739.793,00	2,87
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.063.342.060,00	2.970.039.770,00	(906.697.710,00)	(30,53)
Dinas Kesehatan	36.771.414.575,70	30.570.286.747,00	6.201.127.828,70	20,28
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.487.115.312,00	1.859.020.152,00	(371.904.840,00)	(20,01)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.072.485.297,00	780.001.170,00	292.484.127,00	37,50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.814.336.787,00	2.952.380.943,00	(138.044.156,00)	(4,68)
Badan Pendapatan Daerah	4.346.174.474,00	4.146.820.503,00	199.353.971,00	4,81
Satuan Polisi Pamong Praja	2.471.400.955,00	2.177.346.110,00	294.054.845,00	13,51
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.894.142.776,00	1.524.742.632,00	369.400.144,00	24,23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.894.488.381,00	12.272.699.778,00	(378.211.397,00)	(3,08)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.103.463.119,33	3.337.314.630,00	766.148.489,33	22,96
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.019.548.553,00	2.266.632.886,00	(247.084.333,00)	(10,90)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.219.926.778,00	2.429.151.004,00	(209.224.226,00)	(8,61)
Dinas Perdagangan	1.965.642.813,00	1.864.151.682,00	101.491.131,00	5,44
Dinas Lingkungan Hidup	9.448.691.508,00	8.557.981.749,00	890.709.759,00	10,41
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.921.296.159,00	39.948.191.029,00	(26.894.870,00)	(0,07)
Dinas Perikanan	1.905.303.387,00	1.727.324.550,00	177.978.837,00	10,30
Dinas Perhubungan	7.983.169.108,00	9.617.409.555,00	(1.634.240.447,00)	(16,99)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.509.812.441,74	12.179.162.620,81	4.330.649.820,93	35,56
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.610.767.435,00	1.091.710.366,00	519.057.069,00	47,55
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.348.266.714,00	1.289.965.327,00	58.301.387,00	4,52
Inspektorat	916.959.750,00	809.969.073,00	106.990.677,00	13,21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.254.465.151,00	2.131.378.558,00	(876.913.407,00)	(41,14)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.613.166.834,00	1.773.098.799,00	(159.931.965,00)	(9,02)
Dinas Sosial	2.134.676.384,00	2.038.703.780,00	95.972.604,00	4,71
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	75.024.116.371,70	60.178.193.110,10	14.845.923.261,60	24,67
Kecamatan Bukit Kapur	2.158.114.925,00	2.050.730.738,00	107.384.187,00	5,24



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Dumai Barat	2.181.317.145,00	2.270.941.983,00	(89.624.838,00)	(3,95)
Kecamatan Dumai Kota	2.647.218.028,00	2.548.343.057,00	98.874.971,00	3,88
Kecamatan Dumai Selatan	2.497.687.893,00	2.313.051.417,00	184.636.476,00	7,98
Kecamatan Dumai Timur	2.849.923.467,00	2.567.554.295,00	282.369.172,00	11,00
Kecamatan Medang Kampai	1.523.555.504,00	1.392.377.666,00	131.177.838,00	9,42
Kecamatan Sungai Sembilan	2.253.196.474,00	2.186.067.365,00	67.129.109,00	3,07
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	864.026.773,00	975.065.247,00	(111.038.474,00)	(11,39)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.951.751.556,00	3.433.637.700,00	518.113.856,00	15,09
Jumlah	286.493.347.356,47	263.283.318.272,74	23.210.029.083,73	8,82

Realisasi akun Beban Jasa LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Jasa Kantor - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	12.063.378.723,00	6.368.523.248,00	5.694.855.475,00	89,42
Sekretariat DPRD	2.596.579.506,00	1.234.476.536,00	1.362.102.970,00	110,34
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	794.692.370,00	374.760.000,00	419.932.370,00	112,05
Dinas Kesehatan	8.695.008.154,00	3.108.603.797,00	5.586.404.357,00	179,71
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	790.533.942,00	497.684.632,00	292.849.310,00	58,84
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	747.380.637,00	182.678.730,00	564.701.907,00	309,12
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.006.015.454,00	567.270.000,00	438.745.454,00	77,34
Badan Pendapatan Daerah	2.037.493.080,00	822.572.390,00	1.214.920.690,00	147,70
Satuan Polisi Pamong Praja	945.390.147,00	116.352.188,00	829.037.959,00	712,52
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.226.139.016,00	303.161.133,00	922.977.883,00	304,45
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.167.309.941,00	9.822.945.054,00	1.344.364.887,00	13,69
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.918.621.791,00	336.645.314,00	2.581.976.477,00	766,97
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	405.440.053,00	71.021.176,00	334.418.877,00	470,87
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	864.752.378,00	379.121.166,00	485.631.212,00	128,09
Dinas Perdagangan	1.575.181.983,00	236.167.902,00	1.339.014.081,00	566,98
Dinas Lingkungan Hidup	8.267.402.198,00	247.244.549,00	8.020.157.649,00	3243,82



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.904.462.728,00	15.922.281.232,00	2.982.181.496,00	18,73
Dinas Perikanan	1.544.251.748,00	924.108.300,00	620.143.448,00	67,11
Dinas Perhubungan	6.514.128.342,00	1.490.882.360,00	5.023.245.982,00	336,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.681.971.127,00	449.970.437,00	4.232.000.690,00	940,51
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	905.418.130,00	396.192.916,00	509.225.214,00	128,53
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	764.954.340,00	325.098.448,00	439.855.892,00	135,30
Inspektorat	268.610.700,00	68.127.783,00	200.482.917,00	294,27
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	637.506.201,00	786.552.108,00	(149.045.907,00)	(18,95)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	960.184.530,00	480.818.699,00	479.365.831,00	99,70
Dinas Sosial	792.774.187,00	117.849.153,00	674.925.034,00	572,70
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	16.144.157.323,30	4.647.314.611,10	11.496.842.712,20	247,39
Kecamatan Bukit Kapur	1.750.784.925,00	1.048.565.738,00	702.219.187,00	66,97
Kecamatan Dumai Barat	1.823.363.585,00	900.412.483,00	922.951.102,00	102,50
Kecamatan Dumai Kota	2.238.544.278,00	1.110.440.977,00	1.128.103.301,00	101,59
Kecamatan Dumai Selatan	2.082.958.993,00	1.095.498.972,00	987.460.021,00	90,14
Kecamatan Dumai Timur	2.536.662.467,00	1.018.750.420,00	1.517.912.047,00	149,00
Kecamatan Medang Kampai	1.106.569.704,00	393.297.666,00	713.272.038,00	181,36
Kecamatan Sungai Sembilan	1.937.785.924,00	963.721.810,00	974.064.114,00	101,07
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	237.093.973,00	90.601.832,00	146.492.141,00	161,69
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	747.011.302,00	309.994.100,00	437.017.202,00	140,98
Jumlah	122.680.513.880,30	57.209.707.860,10	65.470.806.020,20	114,44

2. Beban Jasa Asuransi - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	106.502.130,00	8.686.295,83	97.815.834,17	1126,09
Sekretariat DPRD	134.132.575,00	69.477.625,00	64.654.950,00	93,06
Dinas Kesehatan	12.585.708.100,00	9.901.363.624,00	2.684.344.476,00	27,11
Satuan Polisi Pamong Praja	7.054.788,00	7.571.002,00	(516.214,00)	(6,82)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.379.167,33	3.354.166,00	4.025.001,33	120,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.363.120,00	12.079.390,00	(8.716.270,00)	(72,16)
Dinas Tenaga Kerja	1.008.000,00	418.880,00	589.120,00	140,64



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
dan Transmigrasi				
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.743.737.686,40	110.692.090,00	2.633.045.596,40	2378,71
Kecamatan Dumai Kota	7.920.000,00	7.706.340,00	213.660,00	2,77
Jumlah	15.596.805.566,73	10.121.349.412,83	5.475.456.153,90	54,10

3. Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	459.462.135,00	383.595.764,00	75.866.371,00	19,78
Sekretariat DPRD	199.987.000,00	213.032.125,00	(13.045.125,00)	(6,12)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	92.705.190,00	62.766.770,00	29.938.420,00	47,70
Dinas Kesehatan	57.706.441,00	101.572.243,00	(43.865.802,00)	(43,19)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.131.370,00	9.003.520,00	127.850,00	1,42
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	62.719.660,00	24.741.440,00	37.978.220,00	153,50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72.109.122,00	81.693.243,00	(9.584.121,00)	(11,73)
Badan Pendapatan Daerah	56.680.560,00	52.742.919,00	3.937.641,00	7,47
Satuan Polisi Pamong Praja	61.382.520,00	112.409.920,00	(51.027.400,00)	(45,39)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.000.030,00	17.998.999,00	1.031,00	0,01
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	52.357.440,00	28.539.500,00	23.817.940,00	83,46
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	52.453.431,00	49.826.700,00	2.626.731,00	5,27
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.998.000,00	15.317.710,00	(7.319.710,00)	(47,79)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	19.884.600,00	11.155.000,00	8.729.600,00	78,26
Dinas Perdagangan	54.016.630,00	32.802.280,00	21.214.350,00	64,67
Dinas Lingkungan Hidup	238.516.310,00	159.925.700,00	78.590.610,00	49,14
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.726.400,00	289.732.920,00	(265.006.520,00)	(91,47)
Dinas Perikanan	63.071.639,00	52.663.250,00	10.408.389,00	19,76
Dinas Perhubungan	75.677.766,00	97.237.595,00	(21.559.829,00)	(22,17)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.550.226,00	395.336.797,00	(126.786.571,00)	(32,07)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.797.805,00	11.179.950,00	5.617.855,00	50,25
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.352.508,00	90.262.469,00	(79.909.961,00)	(88,53)
Inspektorat	97.645.050,00	98.179.290,00	(534.240,00)	(0,54)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.450.000,00	8.889.000,00	3.561.000,00	40,06
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.501.004,00	16.139.100,00	20.361.904,00	126,17
Dinas Sosial	45.460.697,00	37.480.327,00	7.980.370,00	21,29
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	47.495.933,00	36.313.685,00	11.182.248,00	30,79
Kecamatan Bukit Kapur	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	7.348.560,00	5.389.500,00	1.959.060,00	36,35
Kecamatan Dumai Kota	8.848.750,00	11.033.340,00	(2.184.590,00)	(19,80)
Kecamatan Dumai Selatan	10.961.000,00	7.326.445,00	3.634.555,00	49,61
Kecamatan Dumai Timur	6.161.500,00	9.872.875,00	(3.711.375,00)	(37,59)
Kecamatan Medang Kampai	26.300.800,00	23.435.000,00	2.865.800,00	12,23
Kecamatan Sungai Sembilan	5.290.550,00	6.085.555,00	(795.005,00)	(13,06)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.626.800,00	51.935.415,00	691.385,00	1,33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74.388.614,00	52.540.400,00	21.848.214,00	41,58
Jumlah	2.407.186.041,00	2.659.576.746,00	(252.390.705,00)	(9,49)

4. Beban Jasa Sewa Gedung - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	255.177.000,00	788.269.500,00	(533.092.500,00)	(67,63)
Sekretariat DPRD	681.459.998,00	693.177.000,00	(11.717.002,00)	(1,69)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.460.000,00	238.810.000,00	(221.350.000,00)	(92,69)
Dinas Kesehatan	184.410.000,00	157.690.000,00	26.720.000,00	16,94
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.000.000,00	18.521.000,00	1.479.000,00	7,99
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.760.000,00	2.970.000,00	(210.000,00)	(7,07)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.248.500,00	20.400.000,00	13.848.500,00	67,88
Badan Pendapatan Daerah	33.250.000,00	7.800.000,00	25.450.000,00	326,28
Satuan Polisi Pamong Praja	20.000.000,00	67.480.000,00	(47.480.000,00)	(70,36)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	62.280.000,00	122.760.000,00	(60.480.000,00)	(49,27)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35.000.000,00	36.700.000,00	(1.700.000,00)	(4,63)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	212.422.000,00	171.200.000,00	41.222.000,00	24,08
Dinas Perdagangan	774.000,00	0,00	774.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	49.390.000,00	(9.390.000,00)	(19,01)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	202.600.000,00	322.381.000,00	(119.781.000,00)	(37,16)
Dinas Perikanan	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	0,00	119.900.000,00	(119.900.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.900.000,00	69.528.000,00	(29.628.000,00)	(42,61)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.300.000,00	16.950.000,00	12.350.000,00	72,86
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.357.420,00	12.514.330,00	37.843.090,00	302,40
Inspektorat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.927.500,00	48.500.000,00	(22.572.500,00)	(46,54)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.385.000,00	34.143.500,00	(13.758.500,00)	(40,30)
Dinas Sosial	4.095.000,00	12.080.000,00	(7.985.000,00)	(66,10)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	24.250.000,00	37.000.000,00	(12.750.000,00)	(34,46)
Kecamatan Dumai Kota	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	30.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00	6000,00
Kecamatan Dumai Timur	25.000.000,00	37.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)
Kecamatan Medang Kampai	33.950.000,00	50.000.000,00	(16.050.000,00)	(32,10)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.820.000,00	59.039.800,00	(17.219.800,00)	(29,17)
Jumlah	2.222.806.418,00	3.220.694.130,00	(997.887.712,00)	(30,98)

5. Beban Jasa Sewa Kendaraan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	767.400.000,00	513.330.187,00	254.069.813,00	49,49
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	37.426.550,00	13.050.000,00	24.376.550,00	186,79



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	4.626.000,00	(4.626.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.220.000,00	12.380.000,00	(2.160.000,00)	(17,45)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.963.611,00	10.947.200,00	3.016.411,00	27,55
Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	5.600.000,00	1.900.000,00	33,93
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43.460.380,00	41.783.200,00	1.677.180,00	4,01
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	117.584.980,00	174.180.000,00	(56.595.020,00)	(32,49)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	60.390.000,00	46.299.838,00	14.090.162,00	30,43
Dinas Perdagangan	2.080.000,00	3.150.000,00	(1.070.000,00)	(33,97)
Dinas Lingkungan Hidup	19.600.000,00	8.720.000,00	10.880.000,00	124,77
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	262.138.000,00	264.819.977,00	(2.681.977,00)	(1,01)
Dinas Perikanan	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	0,00	151.800.000,00	(151.800.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.280.000,00	12.521.000,00	(10.241.000,00)	(81,79)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.080.000,00	1.760.000,00	8.320.000,00	472,73
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.349.446,00	12.100.000,00	24.249.446,00	200,41
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.105.700,00	52.432.450,00	(19.326.750,00)	(36,86)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.529.000,00	13.234.000,00	(7.705.000,00)	(58,22)
Dinas Sosial	54.262.000,00	332.705.300,00	(278.443.300,00)	(83,69)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	13.340.800,00	26.648.200,00	(13.307.400,00)	(49,94)
Kecamatan Bukit Kapur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.414.500,00	19.200.000,00	8.214.500,00	42,78
Jumlah	1.577.224.967,00	1.787.287.352,00	(210.062.385,00)	(11,75)



6. Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.683.593.000,00	5.000.930.000,00	682.663.000,00	13,65
Jumlah	5.683.593.000,00	5.000.930.000,00	682.663.000,00	13,65

7. Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	1.294.405.000,00	2.193.833.000,00	(899.428.000,00)	(41,00)
Sekretariat DPRD	52.100.000,00	35.600.000,00	16.500.000,00	46,35
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	21.060.000,00	18.000.000,00	3.060.000,00	17,00
Dinas Kesehatan	60.500.000,00	89.150.000,00	(28.650.000,00)	(32,14)
Badan Pendapatan Daerah	5.000.000,00	31.100.000,00	(26.100.000,00)	(83,92)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	49.750.000,00	(49.750.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45.100.000,00	15.000.000,00	30.100.000,00	200,67
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000,00	21.000.000,00	(6.000.000,00)	(28,57)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	70.329.750,00	36.870.000,00	33.459.750,00	90,75
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.110.000,00	295.075.000,00	(267.965.000,00)	(90,81)
Dinas Perikanan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	3.000.000,00	96.000.000,00	(93.000.000,00)	(96,88)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39.100.000,00	58.100.000,00	(19.000.000,00)	(32,70)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.719.700,00	34.980.000,00	(4.260.300,00)	(12,18)
Dinas Sosial	23.900.000,00	22.200.000,00	1.700.000,00	7,66
Kecamatan Bukit Kapur	47.000.000,00	49.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,08)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Dumai Barat	24.000.000,00	24.000.000,00	,	0,00
Kecamatan Dumai Kota	32.700.000,00	30.700.000,00	2.000.000,00	6,51
Kecamatan Dumai Selatan	18.020.000,00	25.000.000,00	(6.980.000,00)	(27,92)
Kecamatan Dumai Timur	6.630.000,00	4.815.000,00	1.815.000,00	37,69
Kecamatan Medang Kampai	12.565.000,00	4.300.000,00	8.265.000,00	192,21
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	24.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,67)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.649.140,00	24.116.400,00	8.532.740,00	35,38
Jumlah	1.905.888.590,00	3.216.289.400,00	(1.310.400.810,00)	(40,74)

8. Beban Jasa Konsultasi - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	430.614.000,00	236.048.000,00	194.566.000,00	82,43
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	18.491.666,70	0,00	18.491.666,70	100,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.074.000,00	0,00	13.074.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.152.600,00	7.800.000,00	10.352.600,00	132,73
Badan Pendapatan Daerah	0,00	10.916.000,00	(10.916.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	17.858.000,00	(17.858.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	211.365.000,00	965.718.400,00	(754.353.400,00)	(78,11)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.795.000,00	15.609.000,00	(814.000,00)	(5,21)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	24.730.000,00	(24.730.000,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	14.967.700,00	38.500.000,00	(23.532.300,00)	(61,12)
Dinas Lingkungan Hidup	136.444.000,00	114.155.500,00	22.288.500,00	19,52



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	20.102.000,00	(20.102.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	148.200.000,00	436.132.000,00	(287.932.000,00)	(66,02)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.447.902.897,64	757.775.200,00	2.690.127.697,64	355,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	716.228.600,00	584.435.000,00	131.793.600,00	22,55
Kecamatan Dumai Barat	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	11.400.000,00	(11.400.000,00)	(100,00)
Jumlah	5.231.975.464,34	3.294.979.100,00	1.936.996.364,34	58,79

9. Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	173.000.000,00	185.450.000,00	(12.450.000,00)	(6,71)
Jumlah	173.000.000,00	185.450.000,00	(12.450.000,00)	(6,71)

10. Beban Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	45.000.000,00	84.500.000,00	(39.500.000,00)	(46,75)
Sekretariat DPRD	436.500.000,00	251.950.000,00	184.550.000,00	73,25
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	437.197.000,00	799.456.000,00	(362.259.000,00)	(45,31)
Dinas Kesehatan	22.384.000,00	0,00	22.384.000,00	100,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	80.580.000,00	(80.580.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	197.450.000,00	152.670.694,00	44.779.306,00	29,33
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	78.600.000,00	(78.600.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	88.750.000,00	(88.750.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan	128.670.000,00	0,00	128.670.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pangan dan Pertanian				
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	22.500.000,00	29.750.000,00	(7.250.000,00)	(24,37)
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Dinas Perdagangan	17.370.000,00	48.261.500,00	(30.891.500,00)	(64,01)
Dinas Lingkungan Hidup	83.000.000,00	102.000.000,00	(19.000.000,00)	(18,63)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.000.000,00	139.500.000,00	(72.500.000,00)	(51,97)
Dinas Perhubungan	42.000.000,00	65.700.000,00	(23.700.000,00)	(36,07)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.500.000,00	164.500.000,00	(62.000.000,00)	(37,69)
Inspektorat	63.480.000,00	41.830.000,00	21.650.000,00	51,76
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.500.000,00	47.000.000,00	(15.500.000,00)	(32,98)
Dinas Sosial	18.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.743.934.265,00	2.167.018.528,00	(423.084.263,00)	(19,52)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00		0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	198.950.000,00	132.450.000,00	66.500.000,00	50,21
Jumlah	3.750.935.265,00	4.501.516.722,00	(750.581.457,00)	(16,67)

11. Beban Honorarium PNS - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	2.749.245.100,00	2.688.205.000,00	61.040.100,00	2,27
Sekretariat DPRD	441.100.000,00	431.300.000,00	9.800.000,00	2,27
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	367.810.000,00	340.500.000,00	27.310.000,00	8,02
Dinas Kesehatan	4.277.385.500,00	9.345.156.083,00	(5.067.770.583,00)	(54,23)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	517.700.000,00	476.550.000,00	41.150.000,00	8,63
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109.000.000,00	116.680.000,00	(7.680.000,00)	(6,58)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.168.050.000,00	1.087.150.000,00	80.900.000,00	7,44
Badan Pendapatan Daerah	1.470.603.334,00	1.192.452.500,00	278.150.834,00	23,33



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Satuan Polisi Pamong Praja	826.045.000,00	547.880.000,00	278.165.000,00	50,77
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	276.130.000,00	146.830.000,00	129.300.000,00	88,06
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	241.870.000,00	347.790.000,00	(105.920.000,00)	(30,46)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	370.485.000,00	243.390.000,00	127.095.000,00	52,22
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.391.600.000,00	1.463.000.000,00	(71.400.000,00)	(4,88)
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	238.770.000,00	184.610.000,00	54.160.000,00	29,34
Dinas Perdagangan	208.800.000,00	141.280.000,00	67.520.000,00	47,79
Dinas Lingkungan Hidup	295.530.000,00	233.680.000,00	61.850.000,00	26,47
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.522.366.000,00	2.289.254.500,00	233.111.500,00	10,18
Dinas Perikanan	86.180.000,00	67.010.000,00	19.170.000,00	28,61
Dinas Perhubungan	394.640.000,00	283.067.600,00	111.572.400,00	39,42
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.269.181.162,10	323.231.141,81	945.950.020,29	292,65
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.446.500,00	205.217.500,00	(18.771.000,00)	(9,15)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	248.550.000,00	237.150.000,00	11.400.000,00	4,81
Inspektorat	374.940.000,00	239.050.000,00	135.890.000,00	56,85
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	198.450.000,00	150.745.000,00	47.705.000,00	31,65
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	349.710.000,00	489.000.000,00	(139.290.000,00)	(28,48)
Dinas Sosial	573.500.000,00	476.320.000,00	97.180.000,00	20,40
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	46.094.224.665,00	35.837.997.176,00	10.256.227.489,00	28,62
Kecamatan Bukit Kapur	57.700.000,00	61.100.000,00	(3.400.000,00)	(5,56)
Kecamatan Dumai Barat	43.750.000,00	71.900.000,00	(28.150.000,00)	(39,15)
Kecamatan Dumai Kota	84.050.000,00	83.100.000,00	950.000,00	1,14
Kecamatan Dumai Selatan	87.700.000,00	71.870.000,00	15.830.000,00	22,03
Kecamatan Dumai Timur	37.300.000,00	30.850.000,00	6.450.000,00	20,91



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Medang Kampai	48.850.000,00	100.200.000,00	(51.350.000,00)	(51,25)
Kecamatan Sungai Sembilan	45.500.000,00	45.500.000,00	,	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.400.000,00	263.540.000,00	(119.140.000,00)	(45,21)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.440.800.000,00	2.479.655.000,00	(38.855.000,00)	(1,57)
Jumlah	70.238.362.261,10	62.792.211.500,81	7.446.150.760,29	11,86

12. Beban Honorarium Non PNS – LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	596.315.000,00	7.175.310.000,00	(6.578.995.000,00)	(91,69)
Sekretariat DPRD	212.400.000,00	1.644.925.000,00	(1.432.525.000,00)	(87,09)
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	25.900.000,00	755.550.000,00	(729.650.000,00)	(96,57)
Dinas Kesehatan	571.100.000,00	6.300.330.000,00	(5.729.230.000,00)	(90,94)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	86.800.000,00	614.900.000,00	(528.100.000,00)	(85,88)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.900.000,00	428.400.000,00	(418.500.000,00)	(97,69)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	158.200.000,00	881.650.000,00	(723.450.000,00)	(82,06)
Badan Pendapatan Daerah	169.610.500,00	1.523.445.000,00	(1.353.834.500,00)	(88,87)
Satuan Polisi Pamong Praja	163.757.500,00	910.100.000,00	(746.342.500,00)	(82,01)
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	91.225.000,00	764.550.000,00	(673.325.000,00)	(88,07)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.800.000,00	880.978.108,00	(858.178.108,00)	(97,41)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	41.200.000,00	2.060.510.000,00	(2.019.310.000,00)	(98,00)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	55.900.000,00	456.050.000,00	(400.150.000,00)	(87,74)
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	18.200.000,00	635.600.000,00	(617.400.000,00)	(97,14)
Dinas Perdagangan	64.600.000,00	1.357.800.000,00	(1.293.200.000,00)	(95,24)
Dinas Lingkungan Hidup	36.700.000,00	7.452.289.200,00	(7.415.589.200,00)	(99,51)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.013.026.080,00	18.493.284.200,00	(16.480.258.120,00)	(89,11)
Dinas Perikanan	162.800.000,00	649.800.000,00	(487.000.000,00)	(74,95)
Dinas Perhubungan	69.650.000,00	5.867.500.000,00	(5.797.850.000,00)	(98,81)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.200.000,00	4.129.204.355,00	(3.968.004.355,00)	(96,10)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.700.000,00	274.300.000,00	(250.600.000,00)	(91,36)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.700.000,00	463.500.000,00	(418.800.000,00)	(90,36)
Inspektorat	12.200.000,00	229.300.000,00	(217.100.000,00)	(94,68)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37.900.000,00	391.300.000,00	(353.400.000,00)	(90,31)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.500.000,00	503.950.000,00	(485.450.000,00)	(96,33)
Dinas Sosial	390.285.500,00	838.300.000,00	(448.014.500,00)	(53,44)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	5.236.491.000,00	13.986.856.500,00	(8.750.365.500,00)	(62,56)
Kecamatan Bukit Kapur	4.900.000,00	585.170.000,00	(580.270.000,00)	(99,16)
Kecamatan Dumai Barat	13.000.000,00	841.600.000,00	(828.600.000,00)	(98,46)
Kecamatan Dumai Kota	10.275.000,00	1.024.675.000,00	(1.014.400.000,00)	(99,00)
Kecamatan Dumai Selatan	10.275.000,00	835.075.000,00	(824.800.000,00)	(98,77)
Kecamatan Dumai Timur	4.200.000,00	1.297.675.000,00	(1.293.475.000,00)	(99,68)
Kecamatan Medang Kampai	9.550.000,00	545.000.000,00	(535.450.000,00)	(98,25)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.400.000,00	876.320.000,00	(873.920.000,00)	(99,73)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	142.400.000,00	256.600.000,00	(114.200.000,00)	(44,51)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.200.000,00	115.800.000,00	(64.600.000,00)	(55,79)
Jumlah	10.743.260.580,00	86.047.597.363,00	(75.304.336.783,00)	(87,51)

13. Beban Honorarium Pengelola Dana BOS - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.843.434.151,00	0,00	12.843.434.151,00	100,00
Jumlah	12.843.434.151,00	0,00	12.843.434.151,00	100,00

14. Beban Barang dan Jasa BLUD - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8,435,158,833.00	0.00	8,435,158,833.00	100.00
Jumlah	8,435,158,833.00	0.00	8,435,158,833.00	100.00

15. Beban Makanan dan Minuman - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	3.892.913.300,00	4.318.206.000,00	(425.292.700,00)	(9,85)
Sekretariat DPRD	1.913.656.000,00	2.042.526.000,00	(128.870.000,00)	(6,31)
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan	111.817.500,00	179.747.000,00	(67.929.500,00)	(37,79)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pelatihan				
Dinas Kesehatan	1.482.133.800,00	1.060.990.000,00	421.143.800,00	39,69
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	59.210.000,00	157.155.000,00	(97.945.000,00)	(62,32)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.031.000,00	61.213.000,00	(2.182.000,00)	(3,56)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	302.697.500,00	263.270.500,00	39.427.000,00	14,98
Badan Pendapatan Daerah	376.087.000,00	336.521.000,00	39.566.000,00	11,76
Satuan Polisi Pamong Praja	315.753.000,00	316.503.000,00	(750.000,00)	(0,24)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157.508.350,00	93.844.500,00	63.663.850,00	67,84
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	109.697.000,00	68.928.716,00	40.768.284,00	59,15
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	248.054.750,00	258.552.000,00	(10.497.250,00)	(4,06)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	113.110.500,00	204.079.000,00	(90.968.500,00)	(44,58)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	467.028.050,00	556.412.000,00	(89.383.950,00)	(16,06)
Dinas Perdagangan	11.302.500,00	6.190.000,00	5.112.500,00	82,59
Dinas Lingkungan Hidup	167.779.000,00	181.082.000,00	(13.303.000,00)	(7,35)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.255.289.800,00	1.560.707.000,00	(305.417.200,00)	(19,57)
Dinas Perikanan	33.000.000,00	22.243.000,00	10.757.000,00	48,36
Dinas Perhubungan	701.465.000,00	816.915.000,00	(115.450.000,00)	(14,13)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.690.909,00	691.365.000,00	5.325.909,00	0,77
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	414.950.000,00	141.910.000,00	273.040.000,00	192,40
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	137.995.000,00	84.771.200,00	53.223.800,00	62,79
Inspektorat	99.094.000,00	117.492.000,00	(18.398.000,00)	(15,66)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	254.550.750,00	476.910.000,00	(222.359.250,00)	(46,62)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	160.137.600,00	101.453.500,00	58.684.100,00	57,84
Dinas Sosial	144.319.000,00	133.009.000,00	11.310.000,00	8,50
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.282.884.630,00	2.743.313.320,00	(460.428.690,00)	(16,78)
Kecamatan Bukit Kapur	289.810.000,00	298.875.000,00	(9.065.000,00)	(3,03)
Kecamatan Dumai Barat	232.555.000,00	290.255.000,00	(57.700.000,00)	(19,88)
Kecamatan Dumai Kota	228.020.000,00	271.687.400,00	(43.667.400,00)	(16,07)
Kecamatan Dumai Selatan	237.372.900,00	259.081.000,00	(21.708.100,00)	(8,38)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Dumai Timur	203.369.500,00	172.291.000,00	31.078.500,00	18,04
Kecamatan Medang Kampai	266.570.000,00	261.145.000,00	5.425.000,00	2,08
Kecamatan Sungai Sembilan	201.220.000,00	237.640.000,00	(36.420.000,00)	(15,33)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	214.670.000,00	226.951.000,00	(12.281.000,00)	(5,41)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	323.063.000,00	222.942.000,00	100.121.000,00	44,91
Jumlah	18.164.806.339,00	19.236.176.136,00	(1.071.369.797,00)	(5,57)

16. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	264.870.000,00	179.751.000,00	85.119.000,00	47,35
Satuan Polisi Pamong Praja	17.700.000,00	14.850.000,00	2.850.000,00	19,19
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	37.604.000,00	(37.604.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	63.000.000,00	(63.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	418.970.000,00	431.605.000,00	(12.635.000,00)	(2,93)

17. Beban Pakaian Kerja - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	223.450.000,00	194.035.000,00	29.415.000,00	15,16
Sekretariat DPRD	18.800.000,00	19.600.000,00	(800.000,00)	(4,08)
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	8.000.000,00	29.760.000,00	(21.760.000,00)	(73,12)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.900.000,00	32.200.000,00	3.700.000,00	11,49
Badan Pendapatan Daerah	0,00	16.600.000,00	(16.600.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	106.818.000,00	0,00	106.818.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.589.000,00	19.300.000,00	15.289.000,00	79,22
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.694.000,00	3.500.000,00	7.194.000,00	205,54
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8.000.000,00	5.515.000,00	2.485.000,00	45,06
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	1.540.000,00	1.750.000,00	(210.000,00)	(12,00)
Dinas Perdagangan	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Lingkungan Hidup	163.720.000,00	6.000.000,00	157.720.000,00	2628,67
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	13.920.000,00	(13.920.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	34.408.000,00	192.275.000,00	(157.867.000,00)	(82,10)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.680.000,00	172.721.300,00	(20.041.300,00)	(11,60)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.200.000,00	25.350.000,00	(10.150.000,00)	(40,04)
Dinas Sosial	66.200.000,00	7.760.000,00	58.440.000,00	753,09
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	216.708.000,00	0,00	216.708.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.400.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	28,57
Kecamatan Medang Kampai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.336.000,00	46.937.000,00	(12.601.000,00)	(26,85)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.455.000,00	6.500.000,00	7.955.000,00	122,38
Jumlah	1.183.908.000,00	800.523.300,00	383.384.700,00	47,89

18. Beban Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	740.565.000,00	0,00	740.565.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	59.970.000,00	0,00	59.970.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	118.925.000,00	0,00	118.925.000,00	100,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	113.425.000,00	0,00	113.425.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	245.610.000,00	0,00	245.610.000,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.095.000,00	0,00	86.095.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.475.000,00	0,00	15.475.000,00	100,00
Dinas Sosial	21.880.000,00	0,00	21.880.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Dumai Timur	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Jumlah	1.522.470.000,00	0,00	1.522.470.000,00	100,00

19. Beban Pakaian Lainnya - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	0,00	1.133.945.000,00	(1.133.945.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	2.956.800,00	(2.956.800,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	140.047.450,00	(140.047.450,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	381.403.000,00	(381.403.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.494.800,00	(3.494.800,00)	(100,00)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.713.048.000,00	385.133.200,00	1.327.914.800,00	344,79
Dinas Perikanan	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	157.950.000,00	(157.950.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	52.380.000,00	(52.380.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	47.500.000,00	(47.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	35.885.000,00	(35.885.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	1.713.048.000,00	2.448.695.250,00	(735.647.250,00)	(30,04)



D. Beban Pemeliharaan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
12.388.459.271,94	15.881.811.593,00	(3.493.352.321,06)	(22,00)

Beban Pemeliharaan menurut jenisnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.23 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Beban Pemeliharaan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Beban Pemeliharaan Tanah	79.870.000,00	378.800.000,00	(298.930.000,00)	(78,91)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.772.279.384,00	4.240.629.633,00	531.649.751,00	12,54
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	5.559.009.459,94	10.156.638.260,00	(4.597.628.800,06)	(45,27)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	577.007.000,00	145.291.700,00	431.715.300,00	297,14
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.665.000,00	911.842.000,00	(884.177.000,00)	(96,97)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Dana Bos	1.370.128.428,00	0,00	1.370.128.428,00	100,00
Beban Pemeliharaan Website	2.500.000,00	17.700.000,00	(15.200.000,00)	(85,88)
Belanja Pemeliharaan Sistem/Aplikasi	0,00	30.910.000,00	(30.910.000,00)	(100,00)
Jumlah	12.388.459.271,94	15.881.811.593,00	(3.493.352.321,06)	(22,00)

Biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan memelihara aset Kota Dumai, baik aset sumber daya manusia maupun aset peralatan, kendaraan dan gedung. Realisasi beban pemeliharaan selama TA 2018 sebesar Rp12.388.459.271,94 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp15.881.811.593,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp3.493.352.321,06 atau 22,00% dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Pemeliharaan Tanah - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
RSUD	0,00	378.800.000,00	(378.800.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	79.870.000,00	0,00	79.870.000,00	100,00
Jumlah	79.870.000,00	378.800.000,00	(298.930.000,00)	(78,91)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	139.668.830,00	121.315.000,00	18.353.830,00	15,13
Sekretariat DPRD	94.000.040,00	94.225.809,00	(225.769,00)	(0,24)
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	276.047.759,00	141.069.619,00	134.978.140,00	95,68
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	87.900.000,00	128.936.000,00	(41.036.000,00)	(31,83)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.805.000,00	16.405.000,00	400.000,00	2,44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.205.000,00	15.761.000,00	12.444.000,00	78,95
Badan Pendapatan Daerah	156.772.800,00	55.774.842,00	100.997.958,00	181,08
Satuan Polisi Pamong Praja	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00	100,00
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	12.000.000,00	24.725.000,00	(12.725.000,00)	(51,47)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	47.825.000,00	40.050.000,00	7.775.000,00	19,41
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65.949.930,00	78.200.000,00	(12.250.070,00)	(15,67)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11.795.000,00	21.341.000,00	(9.546.000,00)	(44,73)
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	36.540.000,00	32.040.000,00	4.500.000,00	14,04
Dinas Perdagangan	10.354.500,00	9.250.000,00	1.104.500,00	11,94
Dinas Lingkungan Hidup	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.755.000,00	1.188.554.320,00	(1.027.799.320,00)	(86,47)
Dinas Perikanan	75.870.000,00	166.417.200,00	(90.547.200,00)	(54,41)
Dinas Perhubungan	210.729.200,00	129.900.000,00	80.829.200,00	62,22
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.185.000,00	180.639.100,00	38.545.900,00	21,34
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.880.000,00	34.650.000,00	(6.770.000,00)	(19,54)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Inspektorat	30.000.000,00	29.900.500,00	99.500,00	0,33
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.350.000,00	21.800.000,00	4.550.000,00	20,87
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.190.000,00	84.683.000,00	(12.493.000,00)	(14,75)
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.603.168.325,00	1.537.247.743,00	1.065.920.582,00	69,34
Kecamatan Bukit Kapur	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	29.605.000,00	15.587.000,00	14.018.000,00	89,93
Kecamatan Dumai Selatan	13.500.000,00	13.550.000,00	(50.000,00)	(0,37)
Kecamatan Dumai Timur	9.525.000,00	0,00	9.525.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	11.650.000,00	800.000,00	10.850.000,00	1356,25
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	105.413.000,00	57.807.500,00	47.605.500,00	82,35
Jumlah	4.772.279.384,00	4.240.629.633,00	531.649.751,00	12,54

3. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	652.674.535,00	1.285.503.200,00	(632.828.665,00)	(49,23)
Sekretariat DPRD	92.680.000,00	0,00	92.680.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	206.372.900,00	70.917.080,00	135.455.820,00	191,01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	199.699.000,00	118.000.000,00	81.699.000,00	69,24
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.400.000,00	227.397.000,00	(222.997.000,00)	(98,07)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	608.000,00	608.000,00		0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	184.490.000,00	0,00	184.490.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	52.775.000,00	137.800.000,00	(85.025.000,00)	(61,70)
Dinas Perdagangan	14.500.000,00	110.533.000,00	(96.033.000,00)	(86,88)
Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	535.223.000,00	(505.223.000,00)	(94,39)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	724.459.483,00	(724.459.483,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	68.520.000,00	1.346.986.297,00	(1.278.466.297,00)	(94,91)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	149.676.000,00	(149.676.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	99.748.000,00	(99.748.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.835.820.724,94	5.260.387.200,00	(1.424.566.475,06)	(27,08)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	84.002.000,00	0,00	84.002.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	103.465.000,00	88.900.000,00	14.565.000,00	16,38
Jumlah	5.559.009.459,94	10.156.638.260,00	(4.597.628.800,06)	(45,27)

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	577.007.000,00	145.291.700,00	431.715.300,00	297,14
Jumlah	577.007.000,00	145.291.700,00	431.715.300,00	297,14

5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	36.600.000,00	(36.600.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	(100,00)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	142.118.000,00	(142.118.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	624.394.000,00	(624.394.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
RSUD	0,00	51.190.000,00	(51.190.000,00)	(100,00)
Inspektorat	27.665.000,00	28.290.000,00	(625.000,00)	(2,21)
Jumlah	27.665.000,00	911.842.000,00	(884.177.000,00)	(96,97)

6. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Dana Bos - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.370.128.428,00	0,00	1.370.128.428,00	100,00
Jumlah	1.370.128.428,00	0,00	1.370.128.428,00	100,00

7. Beban Pemeliharaan Website - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)
Jumlah	2.500.000,00	17.700.000,00	(15.200.000,00)	(85,88)

8. Belanja Pemeliharaan Sistem/Aplikasi - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	30.910.000,00	(30.910.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	30.910.000,00	(30.910.000,00)	(100,00)

E. Beban Perjalanan Dinas - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
61.377.808.688,00	56.426.363.931,00	4.951.444.757,00	8,78

Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.24BebanPerjalanan Dinas Tahun 2018

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2018
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.820.683.925,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.847.463.644,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dana BOS	3.709.661.119,00
Jumlah	61.377.808.688,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan realisasi sebesar Rp61.377.808.688,00 jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp56.426.363.931,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp4.951.444.757,00 atau 8,78% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.25Perbandingan BebanPerjalanan Dinas LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	9.349.047.204,00	10.216.951.019,00	(867.903.815,00)	(8,49)
Sekretariat DPRD	9.706.857.931,00	9.135.245.954,00	571.611.977,00	6,26
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.175.804.729,00	1.488.104.000,00	(312.299.271,00)	(20,99)
Dinas Kesehatan	2.570.930.605,00	1.174.748.722,00	1.396.181.883,00	118,85
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	975.434.506,00	1.185.438.246,00	(210.003.740,00)	(17,72)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	437.741.084,00	190.578.050,00	247.163.034,00	129,69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.160.971.998,00	2.635.895.630,00	525.076.368,00	19,92
Badan Pendapatan Daerah	2.859.665.310,00	2.410.608.938,00	449.056.372,00	18,63
Satuan Polisi Pamong Praja	627.271.523,00	568.749.238,00	58.522.285,00	10,29
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.059.880.610,00	904.484.667,00	155.395.943,00	17,18
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.139.012.147,00	1.196.116.725,00	(57.104.578,00)	(4,77)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.424.490.988,00	1.827.632.825,00	596.858.163,00	32,66
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	612.591.057,00	700.679.221,00	(88.088.164,00)	(12,57)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	818.975.265,00	683.816.104,00	135.159.161,00	19,77
Dinas Perdagangan	851.929.833,00	621.241.838,00	230.687.995,00	37,13
Dinas Lingkungan Hidup	1.003.985.799,00	643.063.855,00	360.921.944,00	56,13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.753.332.952,00	6.684.358.639,00	68.974.313,00	1,03
Dinas Perikanan	468.054.581,00	365.475.800,00	102.578.781,00	28,07
Dinas Perhubungan	381.477.397,00	640.113.524,00	(258.636.127,00)	(40,40)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.903.020.966,00	2.212.661.500,00	(309.640.534,00)	(13,99)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	922.676.609,00	553.126.396,00	369.550.213,00	66,81
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	572.324.162,00	683.078.803,00	(110.754.641,00)	(16,21)
Inspektorat	2.079.086.000,00	1.925.191.050,00	153.894.950,00	7,99
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	780.180.392,00	972.044.169,00	(191.863.777,00)	(19,74)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.652.258.035,00	748.383.064,00	903.874.971,00	120,78
Dinas Sosial	747.071.570,00	762.883.619,00	(15.812.049,00)	(2,07)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	934.178.100,00	913.259.800,00	20.918.300,00	2,29
Kecamatan Bukit Kapur	163.625.303,00	155.999.438,00	7.625.865,00	4,89
Kecamatan Dumai Barat	266.357.401,00	183.864.917,00	82.492.484,00	44,87
Kecamatan Dumai Kota	251.509.700,00	200.041.530,00	51.468.170,00	25,73
Kecamatan Dumai Selatan	252.753.603,00	243.004.076,00	9.749.527,00	4,01
Kecamatan Dumai Timur	208.086.129,00	173.523.494,00	34.562.635,00	19,92



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kecamatan Medang Kampai	250.269.450,00	215.790.795,00	34.478.655,00	15,98
Kecamatan Sungai Sembilan	185.707.233,00	241.861.573,00	(56.154.340,00)	(23,22)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.726.375,00	400.404.045,00	5.322.330,00	1,33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.425.522.141,00	2.567.942.667,00	857.579.474,00	33,40
Jumlah	61.377.808.688,00	56.426.363.931,00	4.951.444.757,00	8,78

Realisasi akun Perjalan Dinas Dalam Daerah LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	119.700.000,00	58.409.000,00	61.291.000,00	104,93
Sekretariat DPRD	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	2.700.000,00	30.900.000,00	(28.200.000,00)	(91,26)
Dinas Kesehatan	1.463.899.419,00	0,00	1.463.899.419,00	100,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	229.900.000,00	176.850.000,00	53.050.000,00	30,00
Badan Pendapatan Daerah	207.000.000,00	156.150.000,00	50.850.000,00	32,56
Satuan Polisi Pamong Praja	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	100,00
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	95.700.000,00	59.300.000,00	36.400.000,00	61,38
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	38.760.000,00	9.800.000,00	28.960.000,00	295,51
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	192.600.000,00	52.800.000,00	139.800.000,00	264,77
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	58.800.000,00	29.100.000,00	29.700.000,00	102,06
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	643.063.855,00	(643.063.855,00)	(100,00)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.430.000,00	3.187.919.310,00	(3.142.489.310,00)	(98,57)
Dinas Perikanan	41.400.000,00	12.300.000,00	29.100.000,00	236,59
Dinas Perhubungan	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.884.506,00	192.336.000,00	8.548.506,00	4,44
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	442.960.000,00	47.150.000,00	395.810.000,00	839,47



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72.000.000,00	102.950.000,00	(30.950.000,00)	(30,06)
Inspektorat	984.600.000,00	1.107.300.000,00	(122.700.000,00)	(11,08)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	972.044.169,00	(972.044.169,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	444.650.000,00	185.300.000,00	259.350.000,00	139,96
Dinas Sosial	0,00	12.050.000,00	(12.050.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	81.393.438,00	(81.393.438,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	72.400.000,00	(72.400.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	400.404.045,00	(400.404.045,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62.700.000,00	24.600.000,00	38.100.000,00	154,88
Jumlah	4.820.683.925,00	7.694.919.817,00	(2.874.235.892,00)	(37,35)

2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	9.229.347.204,00	10.158.542.019,00	(929.194.815,00)	(9,15)
Sekretariat DPRD	9.652.857.931,00	9.081.245.954,00	571.611.977,00	6,29
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.173.104.729,00	1.457.204.000,00	(284.099.271,00)	(19,50)
Dinas Kesehatan	1.107.031.186,00	1.174.748.722,00	(67.717.536,00)	(5,76)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	959.234.506,00	1.185.438.246,00	(226.203.740,00)	(19,08)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	437.741.084,00	190.578.050,00	247.163.034,00	129,69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.931.071.998,00	2.459.045.630,00	472.026.368,00	19,20
Badan Pendapatan Daerah	2.652.665.310,00	2.254.458.938,00	398.206.372,00	17,66
Satuan Polisi Pamong Praja	580.471.523,00	568.749.238,00	11.722.285,00	2,06
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	964.180.610,00	845.184.667,00	118.995.943,00	14,08
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.100.252.147,00	1.186.316.725,00	(86.064.578,00)	(7,25)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.231.890.988,00	1.774.832.825,00	457.058.163,00	25,75
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	612.591.057,00	696.779.221,00	(84.188.164,00)	(12,08)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	818.975.265,00	683.816.104,00	135.159.161,00	19,77



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perdagangan	793.129.833,00	592.141.838,00	200.987.995,00	33,94
Dinas Lingkungan Hidup	1.003.985.799,00	0,00	1.003.985.799,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.998.241.833,00	3.496.439.329,00	(498.197.496,00)	(14,25)
Dinas Perikanan	426.654.581,00	353.175.800,00	73.478.781,00	20,81
Dinas Perhubungan	381.477.397,00	617.613.524,00	(236.136.127,00)	(38,23)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.702.136.460,00	2.020.325.500,00	(318.189.040,00)	(15,75)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	479.716.609,00	505.976.396,00	(26.259.787,00)	(5,19)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.324.162,00	580.128.803,00	(79.804.641,00)	(13,76)
Inspektorat	1.094.486.000,00	817.891.050,00	276.594.950,00	33,82
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	780.180.392,00	0,00	780.180.392,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.207.608.035,00	563.083.064,00	644.524.971,00	114,46
Dinas Sosial	747.071.570,00	750.833.619,00	(3.762.049,00)	(0,50)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	934.178.100,00	913.259.800,00	20.918.300,00	2,29
Kecamatan Bukit Kapur	163.625.303,00	74.606.000,00	89.019.303,00	119,32
Kecamatan Dumai Barat	266.357.401,00	183.864.917,00	82.492.484,00	44,87
Kecamatan Dumai Kota	251.509.700,00	200.041.530,00	51.468.170,00	25,73
Kecamatan Dumai Selatan	252.753.603,00	243.004.076,00	9.749.527,00	4,01
Kecamatan Dumai Timur	208.086.129,00	173.523.494,00	34.562.635,00	19,92
Kecamatan Medang Kampai	250.269.450,00	143.390.795,00	106.878.655,00	74,54
Kecamatan Sungai Sembilan	185.707.233,00	241.861.573,00	(56.154.340,00)	(23,22)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.726.375,00	0,00	405.726.375,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.362.822.141,00	2.543.342.667,00	819.479.474,00	32,22
Jumlah	52.847.463.644,00	48.731.444.114,00	4.116.019.530,00	8,45

3. Beban Perjalanan Dinas Dana BOS - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.709.661.119,00	0,00	3.709.661.119,00	100,00
Jumlah	3.709.661.119,00	0,00	3.709.661.119,00	100,00



F. Beban Subsidi - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
0,00	2.442.348.000,00	(2.442.348.000,00)	(100,00)

Beban Subsidi merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kota Dumai dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan pada TA 2017 dengan realisasi sebesar Rp2.442.348.000,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp2.442.348.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Perbandingan Beban Subsidi LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Beban Subsidi	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	2.442.348.000,00	(2.442.348.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	2.442.348.000,00	(2.442.348.000,00)	(100,00)

G. Beban Hibah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
11.098.600.000,00	15.760.901.892,00	(4.662.301.892,00)	(29,58)

Rincian Beban Hibah 2018 terdiri dari:

Tabel 5.4.27 Beban Hibah Tahun 2018

Beban Hibah	Realisasi 2018
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.193.600.000,00
Beban Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan	1.905.000.000,00
Jumlah	11.098.600.000,00

Realisasi Beban hibah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.098.600.000,00. Jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp15.760.901.892,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp4.662.301.892,00 atau 29,58 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.28 Perbandingan Beban Hibah LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
PPKD	11.098.600.000,00	7.645.200.000,00	3.453.400.000,00	45,17
Dinas Kesehatan	0,00	201.502.000,00	(201.502.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	2.219.186.000,00	(2.219.186.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	3.900.750.000,00	(3.900.750.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	230.250.000,00	(230.250.000,00)	(100,00)



SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.564.013.892,00	(1.564.013.892,00)	(100,00)
Jumlah	11.098.600.000,00	15.760.901.892,00	(4.662.301.892,00)	(29,58)

H. Beban Bantuan Sosial - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
0,00	1.032.500.000,00	(1.032.500.000,00)	(100,00)

Rincian Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2018

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2018
Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat pada SKPD	0,00
Jumlah	0,00

Realisasi Beban bantuan sosial per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.00 Jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp1.032.500.000,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.032.500.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
PPKD	0,00	1.032.500.000,00	(1.032.500.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.032.500.000,00	(1.032.500.000,00)	(100,00)

I. Beban Penyusutan - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
162.218.551.611,14	150.906.460.966,03	11.312.090.645,11	7,50

Beban Penyusutan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.31 Beban Penyusutan LO Tahun 2018

Beban Penyusutan	Realisasi 2018
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.362.302.049,26
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.927.721.763,10
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.754.491.165,56
Beban Amortisasi	174.036.633,22
Jumlah	162.218.551.611,14



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2018 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp162.218.551.611,14 jika dibandingkan Beban Penyusutan TA 2017 sebesar Rp150.906.460.966,03 maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.312.090.645,11 atau 7,50% dan dirincikan sebagai berikut:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	6.703.419.906,03	6.780.189.864,66	(76.769.958,64)	(1,13)
Sekretariat DPRD	1.408.961.056,39	1.687.129.457,44	(278.168.401,05)	(16,49)
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	282.063.253,04	295.239.133,60	(13.175.880,56)	(4,46)
Dinas Kesehatan	4.819.472.621,34	4.550.676.661,44	268.795.959,90	5,91
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	302.957.257,14	672.027.414,21	(369.070.157,07)	(54,92)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	366.600.346,46	300.398.070,14	66.202.276,32	22,04
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	720.304.933,21	772.969.910,00	(52.664.976,79)	(6,81)
Badan Pendapatan Daerah	1.166.108.329,83	1.242.659.004,14	(76.550.674,31)	(6,16)
Satuan Polisi Pamong Praja	247.421.692,86	281.318.535,81	(33.896.842,95)	(12,05)
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	196.309.967,62	278.990.546,44	(82.680.578,82)	(29,64)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	337.222.106,25	307.410.359,24	29.811.747,01	9,70
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	402.419.576,06	546.033.492,46	(143.613.916,40)	(26,30)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	205.409.481,80	258.530.819,30	(53.121.337,50)	(20,55)
Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	237.586.764,29	252.863.889,29	(15.277.125,00)	(6,04)
Dinas Perdagangan	412.341.520,57	291.079.331,28	121.262.189,29	41,66
Dinas Lingkungan Hidup	1.203.601.582,59	1.229.814.357,68	(26.212.775,09)	(2,13)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.880.268.108,48	12.548.300.781,51	(2.668.032.673,03)	(21,26)
Dinas Perikanan	365.057.195,02	484.293.660,78	(119.236.465,76)	(24,62)
Dinas Perhubungan	1.908.752.292,74	2.275.767.104,05	(367.014.811,31)	(16,13)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.940.693.089,28	3.320.621.318,33	(379.928.229,05)	(11,44)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	261.196.407,14	244.186.165,80	17.010.241,34	6,97
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	372.805.653,57	426.695.641,07	(53.889.987,50)	(12,63)
Inspektorat	268.937.517,86	289.930.031,23	(20.992.513,38)	(7,24)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	279.560.555,00	255.452.440,63	24.108.114,37	9,44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	513.088.113,51	481.396.618,52	31.691.494,99	6,58
Dinas Sosial	296.451.237,86	250.300.865,00	46.150.372,86	18,44
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19.695.267.216,44	16.666.409.261,24	3.028.857.955,20	18,17
Kecamatan Bukit Kapur	168.893.515,27	166.636.548,04	2.256.967,23	1,35
Kecamatan Dumai Barat	130.614.500,00	151.444.500,00	(20.830.000,00)	(13,75)
Kecamatan Dumai Kota	146.875.471,43	205.274.926,43	(58.399.455,00)	(28,45)
Kecamatan Dumai Selatan	206.837.430,43	189.083.430,42	17.754.000,00	9,39
Kecamatan Dumai Timur	156.985.971,86	289.930.031,23	(132.944.059,37)	(45,85)
Kecamatan Medang Kampai	166.989.110,71	172.428.239,29	(5.439.128,58)	(3,15)
Kecamatan Sungai Sembilan	135.903.720,71	193.907.485,71	(58.003.765,00)	(29,91)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	771.151.199,86	958.598.152,00	(187.446.952,14)	(19,55)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	683.773.346,61	551.665.445,82	132.107.900,79	23,95
Jumlah	58.362.302.049,26	59.869.653.494,25	(1.507.351.444,98)	(2,52)

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	1.205.521.431,92	1.111.956.517,71	93.564.914,21	8,41
Sekretariat DPRD	385.306.009,37	324.721.208,76	60.584.800,61	18,66
Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	75.251.069,53	77.361.342,08	(2.110.272,56)	(2,73)
Dinas Kesehatan	933.536.581,73	602.517.260,60	331.019.321,13	54,94
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.952.033,00	10.819.055,27	132.977,73	1,23
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.019.394,78	60.850.339,95	12.169.054,83	20,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	130.186.204,05	87.836.481,13	42.349.722,92	48,21
Badan Pendapatan Daerah	124.570.480,67	104.247.935,19	20.322.545,48	19,49
Satuan Polisi Pamong Praja	14.000.000,00	8.330.843,72	5.669.156,28	68,05
Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	15.027.878,20	15.982.805,00	(954.926,80)	(5,97)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.571.536,56	20.419.470,25	152.066,31	0,74
Dinas Ketahanan Pangan dan	168.835.435,48	161.243.230,98	7.592.204,50	4,71



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pertanian				
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	64.853.068,33	54.523.316,40	10.329.751,93	18,95
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	326.098.815,36	52.933.119,93	273.165.695,43	516,06
Dinas Perdagangan	335.153.095,72	382.563.931,21	(47.410.835,49)	(12,39)
Dinas Lingkungan Hidup	157.730.753,59	295.222.368,79	(137.491.615,20)	(46,57)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.997.264.329,96	7.156.749.983,00	(1.159.485.653,04)	(16,20)
Dinas Perikanan	88.785.676,20	99.870.427,92	(11.084.751,72)	(11,10)
Dinas Perhubungan	2.460.866.999,87	3.344.920.982,39	(884.053.982,52)	(26,43)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	701.628.287,67	899.974.619,45	(198.346.331,79)	(22,04)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.234.840,78	23.011.985,88	18.222.854,90	79,19
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81.279.166,72	82.376.320,72	(1.097.154,00)	(1,33)
Inspektorat	84.226.160,59	71.003.584,69	13.222.575,90	18,62
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.218.364,99	9.225.419,16	(7.054,17)	(0,08)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.013.078,77	24.372.099,63	37.640.979,14	154,44
Dinas Sosial	51.458.403,05	47.724.716,64	3.733.686,41	7,82
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.737.989.280,31	1.320.338.974,82	417.650.305,49	31,63
Kecamatan Bukit Kapur	79.980.927,94	40.588.794,56	39.392.133,38	97,05
Kecamatan Dumai Barat	77.610.717,92	74.453.152,71	3.157.565,21	4,24
Kecamatan Dumai Kota	71.595.004,34	59.528.418,31	12.066.586,03	20,27
Kecamatan Dumai Selatan	77.377.250,04	33.635.793,86	43.741.456,18	130,04
Kecamatan Dumai Timur	118.893.174,89	71.003.584,69	47.889.590,21	67,45
Kecamatan Medang Kampai	53.848.945,16	46.895.590,18	6.953.354,98	14,83
Kecamatan Sungai Sembilan	70.570.929,76	59.023.289,77	11.547.639,99	19,56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.148.132,00	9.148.132,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.118.303,85	0,00	12.118.303,85	100,00
Jumlah	15.927.721.763,10	16.845.375.097,36	(917.653.334,27)	(5,45)

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	12.914.225,00	50.069.125,00	(37.154.900,00)	(74,21)
Badan Pendapatan Daerah	4.815.975,00	1.947.125,00	2.868.850,00	147,34



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.423.962.288,75	1.842.176.271,25	581.786.017,50	31,58
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	112.526.056,05	39.631.756,05	72.894.300,00	183,93
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	126.755.561,23	82.863.293,33	43.892.267,90	52,97
Dinas Perdagangan	10.530.445,00	10.530.445,00	,	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.021.360,00	45.625.064,00	(36.603.704,00)	(80,23)
Dinas Perikanan	44.849.372,62	118.616.448,00	(73.767.075,38)	(62,19)
Dinas Perhubungan	362.427.937,66	352.518.937,66	9.909.000,00	2,81
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.618.362.499,24	70.781.317.242,48	13.837.045.256,76	19,55
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	100.000,00	,	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.396.145,00	18.396.145,00	,	0,00
Dinas Sosial	312.500,00	312.500,00	,	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.516.800,00	17.068.000,00	(7.551.200,00)	(44,24)
Jumlah	87.754.491.165,56	73.361.172.352,78	14.393.318.812,77	19,62

4. Beban Beban Amortisasi - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Pendapatan Daerah	0,00	58.745.603,25	(58.745.603,25)	(100,00)
Dinas Pendidikan	0,00	66.710.000,00	(66.710.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	39.043.018,75	(39.043.018,75)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	46.296.250,00	(46.296.250,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	4.125.000,00	(4.125.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	4.125.000,00	(4.125.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	4.097.500,00	(4.097.500,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	70.267.883,22	232.314.274,65	(162.046.391,43)	(69,75)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.750.000,00	27.000.000,00	(6.250.000,00)	(23,15)
Dinas Kesehatan	55.400.000,00	60.400.000,00	(5.000.000,00)	(8,28)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.125.000,00	12.250.000,00	(6.125.000,00)	(50,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	12.375.000,00	249.915.875,00	(237.540.875,00)	(95,05)
Dinas Sosial	5.431.250,00	10.862.500,00	(5.431.250,00)	(50,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.687.500,00	7.375.000,00	(3.687.500,00)	(50,00)
Jumlah	174.036.633,22	830.260.021,65	(656.223.388,43)	(79,04)

J. Beban Penyisihan Piutang - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
7.331.282.938,22	13.402.804.404,74	(6.071.521.466,52)	(45,30)

Beban Penyisihan Piutang dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 5.4.32Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2018

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2018 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.634.548.677,42
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	22.164.000,00
Beban Penyisihan Piutang BLUD	674.570.260,80
Jumlah	7.331.282.938,22

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Piutang sebelum Tahun Anggaran 2018 dan pada Tahun Anggaran 2018 yang disisihkan sesuai dengan kualitas umur piutang yang ditentukan pada Peraturan Walikota.

Beban Penyisihan Piutang TA 2018 adalah sebesar Rp7.331.282.938,22 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp13.402.804.404,74 maka mengalami penurunan sebesar Rp6.071.521.466,52 atau -45,30% dan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.33Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Kesehatan	1.908.000,00	1.770.000,00	138.000,00	7,80
Badan Pendapatan Daerah	6.634.548.677,42	9.805.726.390,74	(3.171.177.713,32)	(32,34)
RSUD Kota Dumai	674.570.260,80	3.595.308.014,00	(2.920.737.753,20)	(81,24)
Dinas Lingkungan Hidup	20.256.000,00	0,00	20.256.000,00	100,00
Jumlah	7.331.282.938,22	13.402.804.404,74	(6.071.521.466,52)	(45,30)

K. Beban Bantuan Keuangan - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	0,00	0,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun anggaran 2018



sebesar Rp2.245.267.080,00, jika dibandingkan Realisasi Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.245.267.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.34BebanBantuan Keuangan LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	0,00	0,00
Jumlah	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	0,00	0,00

L. Beban Lain-lain - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
8.855.146.682,01	10.129.798.183,00	(1.274.651.500,99)	(12,58)

Beban Lain,lain menurut Jenisnya dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 5.4.35BebanBantuan Keuangan LO Tahun 2018

Beban Lain,lain	Tahun 2018 (Rp)
Beban Penurunan Nilai Investasi	5.783.287.295,60
Beban Lain,lain	0,00
Beban Modal yang tidak dikapitalisir	3.071.859.386,41
Jumlah	8.855.146.682,01

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.855.146.682,01 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp10.129.798.183,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.274.651.500,99 atau -12,58% dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Penurunan Nilai Investasi - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
PPKD	5.783.287.295,60	4.985.209.622,00	798.077.673,60	16,01
Jumlah	5.783.287.295,60	4.985.209.622,00	798.077.673,60	16,01

2. Beban Lain-lain - LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	0,00	1.125.600.000,00	(1.125.600.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	21.525.000,00	(21.525.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.178.874.253,00	(1.178.874.253,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	30.700.000,00	(30.700.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	58.500.000,00	(58.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	76.562.000,00	(76.562.000,00)	(100,00)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	507.722.536,00	(507.722.536,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	42.500.000,00	(42.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	27.500.000,00	(27.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	23.500.000,00	(23.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	11.200.000,00	(11.200.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	3.150.683.789,00	(3.150.683.789,00)	(100,00)

3. Beban Modal yang tidak dikapitalisir – LO

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sekretariat Daerah	576.849.000,00	37.312.000,00	539.537.000,00	1446,01
Dinas Kesehatan	165.843.620,97	141.789.262,00	24.054.358,97	16,96
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	24.385.000,00	(24.385.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	100,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	192.248.900,00	3.350.000,00	188.898.900,00	5638,77
Dinas Lingkungan Hidup	99.770.000,00	0,00	99.770.000,00	100,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.434.917.943,00	994.960.995,00	439.956.948,00	44,22
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dinas Perhubungan	162.314.000,00	177.763.000,00	(15.449.000,00)	(8,69)
Dinas Perdagangan	227.700.000,00	70.031.500,00	157.668.500,00	225,14
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	178.800.922,44	440.325.700,00	(261.524.777,56)	(59,39)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	7.832.000,00	(7.832.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	14.676.000,00	(14.676.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	19.304.000,00	(19.304.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	9.350.000,00	(9.350.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	36.810.315,00	(36.810.315,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	7.480.000,00	14.115.000,00	(6.635.000,00)	(47,01)
Jumlah	3.071.859.386,41	1.993.904.772,00	1.077.954.614,41	54,06

3. Surplus/(Defisit) Dari Operasi - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
139.350.283.135,15	135.186.202.962,20	4.164.080.172,95	3,08

Realisasi Surplus dari Operasi pada TA 2018 Rp139.350.283.135,15 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp135.186.202.962,20 maka mengalami kenaikan sebesar Rp4.164.080.172,95 atau 3,08%.

4. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2018 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp0,00 maka tidak mengalami perubahan.

A. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
0,00	0,00	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan Kerugian akibat penjualan Aset Tetap Tahun Anggaran 2018. Realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar per 31



Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp0,00 maka tidak mengalami perubahan.

5. Surplus/(Defisit) – LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
139.350.283.135,15	135.186.202.962,20	4.164.080.172,95	3,08

Jumlah Surplus sebesar Rp139.350.283.135,15 tersebut merupakan (Surplus)/Defisit, LO Pemerintah Kota Dumai untuk TA 2018 dimana jumlah pendapatan, LO secara keseluruhan lebih besar dari jumlah Beban, total Pendapatan LO selama TA 2018 sebesar Rp1.264.356.718.755,11 sementara total Beban selama TA 2018 sebesar Rp1.125.006.435.619,96 serta defisit penjualan Aset Non Lancar tahun 2018 sebesar Rp0,00.

A. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA Tahun 2018

1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Pajak LO dengan Penapatan Pajak LRA

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	127.964.097.216,00	145.075.023.215,33	(17.110.925.999,33)

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LO dan Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun 2018 minus sebesar Rp17.110.925.999,33

Rincian selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan Pajak Daerah LRA Tahun 2018 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.36 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun 2018

Pendapatan Pajak Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
Pajak Hotel	3.569.533.379,00	3.768.505.143,00	(198.971.764,00)
			Pembayaran piutang tahun 2017 (32.239.756,00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (231.211.520,00)
Pajak Restoran	5.583.367.638,00	5.692.965.593,00	(109.597.955,00)
			Pembayaran piutang tahun 2017 (103.037.109) dan Penambahan piutang tahun 2018 (212.635.054)
Pajak Hiburan	984.303.315,00	1.004.340.265,00	(20.036.950,00)
			Pembayaran piutang tahun 2017 (12.964.149.00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (33.001.099.00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Pendapatan Pajak Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
Pajak Penerangan Jalan PLN	19.609.529.109,00	20.155.815.867,00	(546.286.758,00)
			Piutang tahun 2017
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	14.312.249.023,00	14.125.079.709,00	187.169.314,00
			Pembayaran piutang tahun 2017 (587.272.303.00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (400.102.989.00)
Pajak Galian Gol. C	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.383.250.108,00	1.424.611.132,00	(41.361.024,00)
			Pembayaran piutang tahun 2017 (30.676.670.00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (72.037.694.00)
Pajak Sarang Burung Walet	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00
Pajak Reklame	1.815.886.998,00	2.300.282.859,33	(484.395.861,33)
			Pembayaran piutang tahun 2017 (42.642.148,00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (527.038.009,33)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB,P2)	74.437.783.477,00	90.335.228.478,00	(15.897.445.001,00)
			Pembayaran piutang tahun 2017 (1.178.003.179.00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (17.075.448.180.00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
Pajak BPHTB	6.153.714.169,00	6.153.714.169,00	0,00
Jumlah	127.964.097.216,00	145.075.023.215,33	(17.110.925.999,33)

2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Retribusi LO dengan Penapatan Retribusi LRA

a. Pendapatan Retribusi

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	30.677.523.061,00	30.329.343.622,00	348.179.439,00

Selisih antara Pendapatan Retribusi LO dan Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2018 sebesar Rp348.179.439,00

Rincian selisih Pendapatan Retribusi LO dan Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2018 dapat diperjelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Tabel 5.4.37 Perbandingan PendapatanRetribusi – LO dan dan Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2018

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	505.315.000,00	505.315.000,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	90.169.000,00	118.113.000,00	(27.944.000,00)
			Penambah Piutang Dishub Tahun 2018
Retribusi Pelayanan Pasar	577.675.000,00	577.675.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	491.807.250,00	491.807.250,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	27.282.000,00	29.216.000,00	(1.934.000,00)
			Pembayaran Piutang Dishub Tahun 2017 (446.000,00) dan Penambahan Piutang Dishub (2.380.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	137.956.000,00	137.956.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	777.829.000,00	771.435.000,00	6.394.000,00
			Pembayaran Piutang retribusi 2017 mess pemda (6.750.000,00) PT Pembangunan Dumai BUMD (7.704.000,00) daan Penambahan Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Dinas Kesehatan (7.520.000,00) dan Sewa Ruangan/Gedung Dinas Perhubungan (540.000,00)
Retribusi Terminal	18.003.831.000,00	17.945.441.000,00	58.390.000,00
			Pelunasan Piutang Dishub Tahun 2017
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	439.689.500,00	439.689.500,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	136.548.100,00	79.115.600,00	57.432.500,00
			Pelunasan Piutang Dishub Tahun 2017
Retribusi Pelayanan Bandar Udara	78.987.800,00	78.987.800,00	0,00
Retribusi izin mendirikan Bangunan	9.084.555.299,00	9.084.555.299,00	0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Retribusi izin Gangguan/ Keramaian	299.758.112,00	43.917.173,00	255.840.939,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
			Pembayaran Piutang Tahun 2017 (258.728.139,00) dan Penambahan piutang tahun 2018 (2.887.200,00)
Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	520.000,00	520.000,00	0,00
Jumlah	30.677.523.061,00	30.329.343.622,00	348.179.439,00

3. Pengungkapan Perbedaan Lain-lain PAD Yang SahLO dengan Lain-lain PAD Yang SahLRA

a. Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	118.823.646.066,64	126.754.804.397,73	(7.931.158.690,09)

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA Tahun 2018 minus sebesar Rp7.931.158.690,09

Rincian selisih Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA Tahun 2018 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.38 Perbandingan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan Lain-lain PAD Yang Sah LRA Tahun 2018

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Daerah	1.987.983.135,91	1.987.983.135,91	0,00
Jasa Giro Kas Bendahara	220.639.393,00	215.618.319,00	5.021.074,00
			Bunga Rekening Dana Bos
Bunga Rekening Dana BOS	0,00	5.021.433,00	(5.021.433,00)
			Jasa Giro Kas Bendahara
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	1.721.887.887,00	1.581.232.860,00	140.655.027,00
			Pelunasan Piutang Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau Tahun Lalu
Pendapatan Bunga Deposito BSM	560.319.833,27	559.906.092,36	413.740,91
			Pelunasan Piutang Pendapatan Bunga Deposito BSM Tahun Lalu
Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri	7.095.205,47	7.095.205,47	0,00
Pendapatan Pajak	1.130.032.271,00	1.150.848.415,00	(20.816.144,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
			Pembayaran piutang Denda pajak tahun 2017 (398,683,246) dan Penambahan piutang denda pajak 2018 (419,499,390)
Pendapatan Denda Retribusi	38.006.889,00	55.391.859,00	(17.384.970,00)
			Pembayaran piutang Denda pajak tahun 2017 (5,801,589) dan Penambahan piutang denda pajak 2018 (23,186,559)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	472.145.738,07	472.145.738,07	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.594.250.715,76	1.594.250.715,76	0,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	175.914.500,00	175.914.500,00	0,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
Lain,lain PAD yang Sah Lainnya	2.600.817.399,85	2.600.817.399,85	0,00
Fasilitas Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	96.273.930.627,21	102.993.207.197,00	(6.719.276.569,79)
			Penambahan piutang Jasa Layanan umum Blud
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	790.115.000,00	(790.115.000,00)
			Penambahan Piutang Pendapatan Blud
Pendapatan BLUD Puskesmas	11.936.822.112,10	12.308.225.511,10	(371.403.399,00)
			Penambahan Piutang Pendapatan Blud Puskesmas
Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Lain,lain Pendapatan BLUD Yang Sah	0,00,	153.231.016,21	(153.231.016,21)
			Penambahan Piutang Lain , lain Pendapatan Blud yang sah
Jumlah	118.823.646.066,64	126.754.804.397,73	(7.931.158.690,09)

4. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer LO dengan Pendapatan Transfer LRA

a. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	909.581.771.656,23	921.681.145.885,00	(12.099.374.228,77)



Selisih antara Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA Tahun 2018 minus sebesar Rp12.099.374.228,77

Rincian selisih Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA Tahun 2018 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.39 Perbandingan Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan	810.190.491.050,00	810.190.491.050,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi	86.741.473.606,23	98.840.847.835,00	12.099.374.228,77 Penambahan Piutang Tahun 2018
Bantuan Keuangan	12.649.807.000,00	12.649.807.000,00	0,00
Jumlah	909.581.771.656,23	921.681.145.885,00	(12.099.374.228,77)

5. Pengungkapan Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	36.059.720.000,00	37.792.480.899,00	(1.732.760.899,00)

Selisih antara Lain-lain Pendapatan yang Sah LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA Tahun 2018 minus sebesar Rp1.732.760.899,00

Rincian selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA Tahun 2018 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.40 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA Tahun 2018

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih dan Ket (Rp)
Pendapatan Hibah	36.059.720.000,00	37.792.480.899,00	(1.732.760.899,00) Pendapatan Hibah Berupa Hibah Gedung dan Bangunan (272,077,000) dan Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat (267,242,000) Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga (223,864,614.00) Hibah Dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (404.914.190,00) Hibah Dari BKKBN (359.405.095,00) dan Hibah Dari Kementerian Dalam Negeri (205.258.000,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah	36.059.720.000,00	37.792.480.899,00	(1.732.760.899,00)

B. Pengungkapan Perbedaan Beban LO dan Beban LRA Tahun 2018

1. Pengungkapan Perbedaan Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2018

a. Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2018

Beban Persediaan	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	85.386.210.634,00	107.850.852.965,17	(22.464.642.331,17)

Selisih antara Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2018 sebesar minus Rp22.464.642.331,17

Rincian selisih Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.41 Perbandingan Beban Persediaan LO dan Beban Persediaan LRA Tahun 2018

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	16.435.975.774,00	33.416.456.405,67	(16.980.480.631,67)
Beban Persediaan Bahan/Material	18.389.074.575,00	37.576.493.867,50	(19.187.419.292,50)
Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor	9.679.927.555,00	9.679.927.555,00	0,00
Beban Cetak dan Penggandaan	10.607.821.600,00	12.617.795.753,00	(2.009.974.153,00)
Beban Makan dan Minum	972.090.331,00	972.090.331,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
Beban Pakaian kerja lapangan	75.388.000,00	75.388.000,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.004.466.450,00	4.518.966.450,00	485.500.000,00
Beban Persediaan Dana BOS	24.202.746.349,00	8.975.014.603,00	15.227.731.746,00
Jumlah	85.386.210.634,00	107.850.852.965,17	(22.464.642.331,17)

2. Pengungkapan Perbedaan Beban Jasa LO dan Beban Jasa LRA Tahun 2018

a. Beban Jasa LO dan Beban Jasa LRA Tahun 2018

Beban Jasa	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	309.989.225.262,74	286.493.347.356,47	23.495.877.906,27

Selisih antara Beban Jasa LO dan Beban Jasa LRA Tahun 2018 sebesar Rp23.495.877.906,27



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Rincian selisih Pendapatan Retribusi LO dan Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2018 dapat diperjelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.42 Perbandingan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2018

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Jasa Kantor	119.283.443.625,00	122.680.513.880,30	(3.397.070.255,30)
Beban Jasa Asuransi	15.504.024.491,00	15.596.805.566,73	(92.781.075,73)
Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	2.311.993.281,00	2.407.186.041,00	(95.192.760,00)
Beban Jasa Sewa Gedung	2.222.806.418,00	2.222.806.418,00	0,00
Beban Jasa Sewa Kendaraan	1.577.224.967,00	1.577.224.967,00	0,00
Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat	5.683.593.000,00	5.683.593.000,00	0,00
Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor	1.905.888.590,00	1.905.888.590,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi	9.180.788.025,00	5.231.975.464,34	3.948.812.560,66
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.966.456.000,00	3.750.935.265,00	(784.479.265,00)
Beban Honorarium PNS - LO	72.504.693.516,00	70.238.362.261,10	2.266.331.254,90
Beban Honorarium Non PNS - LO	6.571.224.580,00	10.743.260.580,00	(4.172.036.000,00)
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	2.689.611.952,00	12.843.434.151,00	(10.153.822.199,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	44.405.394.478,74	8.435.158.833,00	35.970.235.645,74
Beban Makanan dan Minuman	18.170.686.339,00	18.164.806.339,00	5.880.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	418.970.000,00	418.970.000,00	0,00
Beban Pakaian Kerja	1.183.908.000,00	1.183.908.000,00	0,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	1.522.470.000,00	1.522.470.000,00	0,00
Beban Pakaian Lainnya	1.713.048.000,00	1.713.048.000,00	0,00
Jumlah	309.989.225.262,74	286.493.347.356,47	23.495.877.906,27



5. PENJELASAN POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

1. Ekuitas Awal

Tahun2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
2.479.324.864.985,34	3.156.961.629.905,11	(677.636.764.919,77)	(21,46)

Saldo Awal Ekuitas tahun 2018 adalah Sebesar Rp2.479.324.864.985,34 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp3.156.961.629.905,11 maka mengalami penurunan sebesar Rp677.636.764.919,77 yang merupakan saldo akhir Ekuitas TA

2. Surplus/(Defisit) – LO

Tahun2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
139.350.283.135,15	135.186.202.962,20	4.164.080.172,96	3,08

Surplus/(defisit) – LO sebesar Rp139.350.283.135,15 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar Rp135.186.202.962,20 maka mengalami kenaikan sebesar Rp4.164.080.172,96 atau 3,08% Merupakan Suplus atas kegiatan operasional (Basis Akrua) , sehingga akan menambah nilai Ekuitas Awal pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2017.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
117.857.467.197,47	(812.822.967.881,97)	930.680.435.079,43	(114,50)

Dampak Kumulatif Atas Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Mengurangi Ekuitas Awal 2018 sebesar Rp117.857.467.197,47 jika dibandingkan pada TA 2017 sebesar minus Rp812.822.967.881,97 maka mengalami kenaikan sebesar Rp930.680.435.079,43atau 114,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Rincian Dampak Kumulatif Atas Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Mengurangi Ekuitas Awal 2018 Tahun Anggaran 2018

Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	RASIO %
			(Rp)	
Koreksi Kas Lainnya - Kas Dana Bos	0,00	(138.955.983,00)	138.955.983,00	(100,00)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	RASIO %
			(Rp)	
Koreksi Piutang	1.186.640.349,24	318.117.553,15	868.522.796,10	273,02
Koreksi Penyisihan Piutang	2.843.213.283,93	3.757.430.597,10	(914.217.313,17)	(24,33)
Koreksi Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi	(846.288.500,00)	(57.502.500,00)	(788.786.000,00)	1.371,74
Koreksi Persediaan	234.454.949,00	0,00	234.454.949,00	
Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
Koreksi Aset Tetap	216.116.929.231,36	(90.382.627.443,92)	306.499.556.675,28	(339,11)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(85.893.463.232,26)	(722.170.487.708,58)	636.277.024.476,32	(88,11)
Koreksi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(700.000.000,00)	700.000.000,00	(100,00)
Koreksi Aset Tidak Berwujud	(1.290.515.000,00)	(403.993.549,29)	(886.521.450,71)	219,44
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.562.085.682,53	(3.004.965.848,96)	4.567.051.531,49	(151,98)
Koreksi Aset Lain-lain	(16.736.008.504,42)	(1.451.452.718,00)	(15.284.555.786,42)	1.053,05
Koreksi Utang Beban	212.235.938,29	0,00	212.235.938,29	
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.749.901.719,54	(1.749.901.719,54)	(100,00)
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	(338.432.000,00)	338.432.000,00	(100,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	468.182.999,79	0,00	468.182.999,79	
Koreksi Penyisihan Investasi Non Permanen lainnya	(1.800.000,00)	0,00	(1.800.000,00)	
	117.857.467.197,47	(812.822.967.881,97)	930.680.435.079,43	(114,50)

a. Koreksi Piutang

Tabel 5.5.2 Rincian Koreksi Piutang Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	RSUD	(659.298.338,00)	Koreksi tambah piutang BLUD
2	BPKAD-PPKD	1.848.406.069,91	Koreksi tambah piutang DBH Provinsi
3	Badan Pendapatan Daerah	(2.467.382,67)	Koreksi kelebihan/kurang catat pada piutang pajak.
	Total	1.186.640.349,24	

b. Koreksi Penyisihan Piutang

Tabel 5.5.3 Rincian Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	427.500,00	Koreksi Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2017
2	RSUD	3.163.478.008,00	Koreksi kurang penyisihan piutang BLUD



No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Badan Pendapatan Daerah	(320.692.224,07)	Koreksi kelebihan/kurang catat pada penyisihan piutang pajak dan retribusi tahun 2017
	Total	2.843.213.283,93	

c. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tabel 5.5.4 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap PNS Bukan Bendahara Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	BPKAD-PPKD	(846.288.500,00)	Koreksi pencatatan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2017
	Total	(846.288.500,00)	

d. Koreksi Persediaan

Tabel 5.5.5 Rincian Koreksi Persediaan Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	234.454.949,00	Koreksi tambah persediaan hibah dari BKKBN
	Total	234.454.949,00	

e. Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tabel 5.5.6 Rincian Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	BPKAD - PPKD	1.800.000,00	Koreksi pencatatan investasi non permanen
	Total	1.800.000,00	

f. Koreksi Aset Tetap

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
216.116.929.231,36	(90.382.627.443,92)	306.499.556.675,28	(339,11)

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan pembetulan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, Koreksi Nilai Aset pada SKPD Tahun 2018 sebesar Rp216.116.929.231,36 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.7 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Koreksi Nilai Aset 2018 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	(110.262.070.064,86)	Koreksi transfer masuk dari disdik ke dinkes, Penghapusan P3D Gedung Dari Disdik Dumai Ke Disdik Provinsi Riau, Koreksi Kurang Catat Aset tetap dan Koreksi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	SKPD	Koreksi Nilai Aset 2018 (Rp)	Keterangan
			Atas Tambahan ekstrakomptable S.D 2017. Dan Koreksi Pencatatan aset kelompok alat bantu.
2	Dinas Kesehatan	(1.624.234.232,00)	Koreksi Aset Penghapusan Tahun 2002, Koreksi Aset Tetap Dibawah Nilai Kapitalisasi (ekstracomptable) S.D Tahun 2017, Koreksi Masuk/Keluar Dari Disdik Berupa Tanah, Koreksi Nilai Pemeliharaan Blud. Dan Koreksi kekurangan input kelompok aset peralatan dan mesin.
3	RSUD	(2.310.783.341,20)	Koreksi Penambahan Aset ekstrakomptable Apbd 1997-2017 Dan Penghapusan Aset Lain-Lain. Koreksi tambah aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, koreksi pencatatan jalan irigasi jembatan.
4	Dinas Pekerjaan Umum	327.532.707.382,79	Koreksi Tranfer Keluar Aset Peralatan Dan Mesin, Gedung Bangunan, Penghapusan Aset, Koreksi Pencatatan Atas Jaminan Uang Muka, Hasil Inventarisasi Tanah Badan Jalan Dan Hibah Dari Kementrian Dirjen Bina Marga. Dan Koreksi kurang aset tanah, Koreksi kurang aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.
5	Dinas Perhubungan	(8.953.567.141,00)	Koreksi Transfer Masuk Dari Setda Ke Dishub, Penghapusan Tanah, Koreksi Atas Peralatan Dan Mesin Dan Bangunan Gedung Ke Aset Lainnya (ekstracomptable Di Bawah Tahun 2012), Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Pada Peralatan Dan Mesin, Bangunan Gedung, Koreksi Atas Bangunan Gedung-Tugu Peringatan. Koreksi pencatatan aset tanah, koreksi kurang aset peralatan dan mesin, Koreksi aset kurang gedung dan bangunan.
6	Dinas Lingkungan Hidup	(14.167.083.150,00)	Koreksi Hibah Dari Dih Ke Kanwil Kemenkumham Riau (Lapas), Mutasi Keluar Bangunan Gedung Ke Dispora, Mutasi Keluar Kontruksi Dalam Pengerjaan Ke Dispora Dan ekstrakomptable 2017 Ke Bawah.
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(400.811.500,00)	Koreksi Transfer Keluar Aset Tetap Pm Ke Dinas Sosial dan Penambahan Ekstracomptable.
8	Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB	(3.800.000,00)	Koreksi Penambahan ekstrakomptable Untuk Aset Gedung Dan Bangunan.
9	Dinas Sosial	326.944.000,00	Koreksi Transfer Masuk Peralatan Dan Mesin Dari Disdukcapil Ke Dinsos, Koreksi Aset Tetap Ekstracomptable Pada Peralatan Dan Mesin Dan Bangunan Gedung Tahun 2017.
10	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	(124.399.999,91)	Transfer Keluar Dari Disperkop Ukm Ke Dinas Ketahanan Pangan. Dan Koreksi pencatatan aset peralatan dan mesin, penambahan ekstrakomptable.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	SKPD	Koreksi Nilai Aset 2018 (Rp)	Keterangan
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	15.524.795.170,54	Transfer Masuk Dari Perkim Ke Diskopar, Transfer Masuk Dari Dispupr Ke Disparpora, Dan Transfer Keluar Dari Diskopar Ke Bkpp. Dan penambahan ekstracomptable.
12	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	
13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	155.433.000,00	Transfer masuk /keluar aset Gedung dan Bangunan, koreksi Aset Alat-alat Kantor tahun 2017 yang merupakan extracomptable, Koreksi Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan Transfer Keluar Instalasi listrik. Dan Penambahan ekstracomptable.
14	Sekretariat Daerah	(2.331.697.389,60)	Mutasi Masuk Dari Dinas Pupr, Mutasi Masuk Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Mutasi Ke Satpolpp, Mutasi Ke Kecamatan Bukit Kapur, Mutasi Ke Bpkad, Penghapusan Rumah Camat Dumai Timur Yang Terbakar, Reklas Ke Aset Tetap Dari Ekstracomptable Dan Reklas Ke Ekstracomptable Dari Aset Tetap.
15	Sekretariat DPRD	(814.778.155,00)	Koreksi Kebijakan Akuntansi ekstracomptable Peralatan Dan Mesin Yang Belum Dikeluarkan S.D Tahun 2011.
16	Inspektorat	(52.047.076,00)	Transfer Masuk Dari Dispupr Ke Inspektorat tahun 2013 Rp 8.200.000. dan penambahan Ektracomptable.
17	Kecamatan Dumai Barat	(211.906.500,00)	Penambahan Aset dari ekstracomptable tahun 2017 (Koreksi Pencatatan).
18	Kecamatan Dumai Timur	(154.370.095,95)	Transfer Masuk Aset Gedung Dan Bangunan Dari Pupr Pengurangan Aset Tanah dan penambahan ekstracomptable.
19	Kecamatan Bukit Kapur	1.852.537.764,57	Koreksi atas Gedung dan Bangunan Transfer Masuk dari PUPR, Koreksi atas Tanah Transfer Masuk dari Setda, dan Koreksi atas ekstracomptable.
20	Kecamatan Sungai Sembilan	(57.682.259,26)	Mutasi Masuk Paving Block Kantor Lurah Basilam Baru dari Dinas PU, Mutasi Masuk Rumah Dinas Lurah Batu Teritip dari Dinas PU dan koreksi Peralatan dan Mesin yang Nilainya dibawah Kapitalisasi (ekstracomptable).
21	Kecamatan Dumai Kota	319.758.990,93	Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan Dan Mesin, Transfer Masuk Aset Dan Bangunan Rehabilitasi Kantor Lurah Bintang Dari PUPR, Transfer Masuk Pembangunan Gudang Kantor Lurah Dumai Kota Dari PUPR, Transfer Masuk Aset Dan Bangunan Rehabilitasi Kantor Lurah Sukajadi Dari PUPR, ekstracomptable tahun 2006-2013.
22	Kecamatan Dumai Selatan	3.667.812.243,85	Koreksi Catat Gedung Dan Bangunan Dan Koreksi Pengurangan Aset Tanah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	SKPD	Koreksi Nilai Aset 2018 (Rp)	Keterangan
23	Kecamatan Medang Kampai	(105.943.438,00)	Penambahan Ekstracomptable.
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(56.546.626,00)	Penambahan ekstracomptable (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Alat Kantor Lainnya, Meubelair, Alat Pengukur Waktu, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dan Personal Komputer) dan Penambahan ekstracomptable (Alat Komunikasi Telephone). Dan koreksi pencatatan kelompok aset alat rumah tangga.
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	122.842.900,00	Transfer Masuk Aset Peralatan Dan Mesin dan Koreksi Ekstracomptable Aset Peralatan Dan Mesin.
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(61.826.423,00)	Penambahan Aset Peralatan Dan Mesin (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Peralatan Mini Komputer Dan Personal Komputer, Penambahan Hibah Aset Alat Angkutan Darat Bermotor, Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2017, Dan Koreksi Penambahan ekstracomptable.
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	134.723.000,20	Koreksi Aset Ekstrakomtable Double Pencatatan Atas Aset Peralatan Dan Mesin (Alat Laboratorium, Meubelair Dan Peralatan Studio Visual), Transfer Masuk Gedung Tempat Pendidikan Dari Dinas Ukm, Dan Koreksi Aset Ekstrakomtable Kurang Pencatatan Atas Aset Peralatan Dan Mesin Dan Gedung (Alat Pemeliharaan Tanaman Dan Bangunan Gedung Kantor).
28	Dinas Perikanan	(6.940.911.533,00)	Koreksi Penyerahan Aset P3D Diskanlut Riau dan Koreksi Ekstrakomtable.
29	Dinas Perdagangan	(581.927.666,67)	Penambahan ekstracomptable dan Koreksi Pengurangan Aset Tanah.
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(234.840.000,00)	Koreksi Akumulasi Penyusutan (Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor), Koreksi Atas Peralatan Dan Mesin (Alat Rumah Tangga Lainnya, Dan Koreksi Aset Tetap Lainnya (Kendaraan Bermotor Penumpang). dan reklas ke koreksi akumulasi penyusutan.
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(265.303.395,00)	Koreksi Alat-alat Rumah Tangga TA 2017 dan Koreksi Alat Angkutan Darat Bermotor Transfer Keluar Setda tahun 2017. Dan ekstracomptable.
32	BPKAD	646.200.239,61	Koreksi Atas Akumulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin tahun 2017 Dan Transfer Masuk Gedung (Bangunan Gudang). Dan reklas ke koreksi akumulasi penyusutan.
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(40.030.150,00)	Penambahan Ekstracomptable.
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(48.509.500,00)	Reklas dari JIJ ke peralatan dan mesin.
35	Badan Pendapatan Daerah	(373.219.824,68)	Penambahan Ekstracomptable, Penambahan aset dari belanja pemeliharaan gedung.
36	Badan Pengelolaan Keuangan	(0,01)	Reklas ke koreksi akumulasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	SKPD	Koreksi Nilai Aset 2018 (Rp)	Keterangan
	dan Aset		penyusutan.
37	PPKD	16.011.464.000,00	Transfer masuk Ke Pengelola Barang Milik Daerah Kota Dumai (Bpkad) Dari Satpol Pp Berupa Gedung Kantor Eks.Satpol Pp tahun 1980 Rp433.992.000 Dan Transfer Masuk Ke Pengelola Barang Milik Daerah Kota Dumai (Bpkad) Dari Satpol Pp Berupa Instalasi Gedung Kantor Eks.Satpol Pp tahun 1980 Rp3.350.000.
	Total	216.116.929.231,36	

g. Koreksi Akumulasi Penyusutan

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	RASIO %
(85.893.463.232,26)	(722.170.487.708,58)	636.277.024.476,32	(88,11)

Tabel 5.5.8 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2018

NO	SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2018 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.699.160.358,82	Koreksi pencatatan.
2	Dinas Kesehatan	887.293.591,06	Koreksi Akumulasi Penyusutan akibat penghapusan, kurang catat atau lebih catat dan ekstrakomtable.
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	(265.905.552,70)	Koreksi akumulasi penyusutan peralatan & mesin dan gedung dan bangunan tahun 2017.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(136.205.154.303,23)	Koreksi pencatatan
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	127.492.437,50	Koreksi akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya akibat kapitalisasi umur ekonomis.
6	Satuan Polisi Pamong Praja	83.324.436,20	Koreksi Akumulasi Penyusutan menjadi ekstrakomtable, Reklas ke ATW, Lebih catat penyusutan, Koreksi Pencatatan, Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor yang di Transfer Ke Pengelola BMD dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Kerja (eks Gdg Serbaguna) yang berasal dari Setda.
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(108.601.801,38)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin dan jalan.
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(40.400.299,15)	Koreksi Akumulasi Penyusutan menjadi ekstrakomtable dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin dan Gedung dan Bangunan.
9	Dinas Sosial	(127.687.685,01)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin, Koreksi Tambah Dan Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Dan Gedung Dan Bangunan, Koreksi Ekstracomtable Dan Transfer Masuk Penyusutan Pada Alat Angkutan Darat Bermotor Dari Disdukcapil.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2018 (Rp)	Keterangan
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(383.811.787,77)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	207.678.333,05	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan (Transfer Keluar ke Setda) tahun 2017, dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.216.019.339,98	Akumulasi Penyesutan Transfer Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Dispora Tahun 2017
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.379.970,00	Koreksi Pencatatan Penyusutan Alat Kantor tahun 2017, Koreksi Penyusutan Gedung Kantor tahun 2017, Dan Koreksi Penyusutan Mobil Dinas tahun 2017 Yang Di Transfer Keluar Ke Dinas Sosial.
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(7.341.871,66)	koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan perhitungan kelompok aset alat rumah tangga, koreksi penambahan akumulasi penyusutan akibat kapitalisasi umur ekonomis, dan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penambahan ekstrakomptable.
15	Dinas Perhubungan	13.076.905.219,23	Koreksi pencatatan.
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	416.041.205,63	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	519.418.757,90	Pengurangan Akumulasi Penyusutan ekstrakomptable, Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan tahun 2017, Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Akibat Kapitalisasi Umur Ekonomis TA. 2017 Gedung dan Bangunan dan Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Akibat Kapitalisasi Umur Ekonomis tahun. 2017.
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1.458.621.745,13)	Akumulasi Penyusutan Transfer masuk Mobil Dari Disperkim, Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan ke BKPP, Penambahan Akumulasi Penyusutan Bangunan Sungai untuk Pengamanan dan Penambahan Akumulasi Irigasi /Bangunan Air.
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	287.136.201,10	Koreksi Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.
20	Dinas Perikanan	3.948.162.944,15	Koreksi pencatatan.
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	763.401.497,22	Koreksi Akumulasi penyusutan atas double catat aset extracomptable Peralatan dan mesin dan gedung bangunan, dan Koreksi Akumulasi penyusutan atas kurang catat aset extracomptable Peralatan dan mesin dan gedung bangunan.
22	Dinas Perdagangan	(1.858.099.505,42)	Koreksi AKumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin tahun 2017, AKum Penyusutan Penambahan ekstrakomptable, Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Karna Kapitalisi Umur ekonomis.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

NO	SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2018 (Rp)	Keterangan
23	Sekretariat Daerah	(751.827.268,45)	akumulasi penyusutan atas mutasi masuk dari beberapa SKPD, koreksi atas kesalahan penghitungan akumulasi penyusutan s.d 2017, akumulasi penyusutan atas penghapusan rumah camat Dumai Timur yang terbakar, dan akumulasi penyusutan atas reklas dari ekstracomptable ke aset tetap.
24	Sekretariat DPRD	298.930.114,47	Koreksi Akumulasi Penyusutan Atas Alat Kantor Peralatan dan mesin.
25	Kecamatan Dumai Barat	254.790.749,99	Koreksi AKumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Akibat Kapitalisasi Umur Ekonomis dan Akumulasi Penyusutan Aset ekstracomptable Penambahan.
26	Kecamatan Dumai Timur	(400.930.489,70)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Dan Gedung Bangunan tahun 2017, Koreksi Akumulasi Penyusutan Akibat Kapitalisasi Umur Ekonomis tahun 2017 Dan Akumulasi Penyusutan Transfer Masuk Aset Gedung Dari Pupr.
27	Kecamatan Bukit Kapur	(317.732.224,41)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2017.
28	Kecamatan Medang Kampai	14.945.656,19	koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan tahun 2017 dan Koreksi Kurang Akibat Koreksi Pencatatan tahun 2017.
29	Kecamatan Sungai Sembilan	105.324.123,26	Koreksi Lebih atau Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin tahun 2017 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
30	Kecamatan Dumai Kota	15.467.850,24	Koreksi Lebih atau Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin.
31	Kecamatan Dumai Selatan	12.936.824,18	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin dan Gedung dan Bangunan.
32	Inspektorat	(48.041.567,22)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Kapitalisasi Gedung Kantor tahun 2017.
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(214.272.015,49)	Koreksi pencatatan
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(105.631.387,31)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin dan Gedung dan Bangunan.
35	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(52.409.750,14)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin dan Gedung dan Bangunan.
36	Badan Pendapatan Daerah	324.196.411,71	Koreksi pencatatan.
	Total	(85.893.463.232,26)	



h. Koreksi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
(1.290.515.000,00)	(403.993.549,29)	(886.521.450,71)	219,44

Tabel5.5.9Rincian Koreksi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	(375.928.000,00)	Koreksi atas penghapusan software
2	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.100.000,00)	Koreksi atas penghapusan software
3	Sekretariat Daerah	(19.800.000,00)	Koreksi atas penghapusan software
4	Dinas Perhubungan	(812.337.000,00)	Koreksi atas koreksi aset lain-lain (Penghapusan Aset Tidak Berwujud)
5	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	(15.350.000,00)	Penghapusan barang berupa Software Perpustakaan.
6	Kecamatan Bukit Kapur	(33.000.000,00)	Koreksi atas penghapusan software
7	Kecamatan Medang Kampai	(33.000.000,00)	Koreksi atas penghapusan software
		(1.290.515.000,00)	

i. Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
1.562.085.682,53	(3.004.965.848,96)	4.567.051.531,49	(151,98)

Tabel5.5.10Rincian Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	5.000.000,00	Koreksi Salah Catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud Dinas Kesehatan Tahun 2017.
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.740.625,00	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud Karena Telah di reklas ke Aset Tetap JJI).
3	Dinas Perhubungan	734.419.875,00	Jurnal Koreksi atas Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud atas penghapusan Aset Tidak Berwujud.
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	39.600.000,00	Pengurangan Amortisasi.
5	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	15.350.000,00	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akibat Adanya Penghapusan Aset Tak Berwujud.
6	Sekretariat Daerah	585.975.182,52	Koreksi kesalahan pencatatan akumulasi amortisasi ATB s.d 2017 dan Akumulasi amortisasi ATB atas penghapusan Software SPPD bagian Umum (tindak lanjut LHP 2017).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
7	Kecamatan Bukit Kapur	33.000.000,00	Penghapusan Amortisasi Dari Aset Tak Berwujud Yang Telah Dihapuskan.
8	Kecamatan Medang Kampai	33.000.000,00	Penghapusan Amortisasi Aset Tak Berwujud Akibat Penghapusan Asetnya.
9	Badan Pendapatan Daerah	0,01	Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
TOTAL		1.562.085.682,53	

j. Aset Lain-lain

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
(16.736.008.504,42)	(1.451.452.718,00)	(15.284.555.786,42)	1.053,05

Tabel 5.5.11 Rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	(1.300.000,00)	Koreksi aset rusak berat yang diusulkan P3D ke Prov Riau.
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(39.600.000,00)	Koreksi atas penghapusan software.
3	Sekretariat Daerah	(319.428.500,00)	Koreksi penghapusan aset lain- lain.
4	Sekretariat DPRD	342.725.000,00	Koreksi atas koreksi aset lain-lain .
5	Dinas Perikanan	(450.425.000,00)	Koreksi penyerahan aset lain-lain P3D ke Prov. Riau.
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(16.267.980.004,42)	Koreksi aset peralatan dan mesin atau ekstrakomptable.
		(16.736.008.504,42)	

k. Koreksi Hutang Beban

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
212.235.938,29	0,00	212.235.938,29	

Tabel 5.5.12 Rincian Koreksi Hutang Beban Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	212.235.938,29	koreksi atas semua hutang blud tahun 2017
Total		212.235.938,29	



l. Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
468.182.999,79	0,00	468.182.999,79	

Tabel 5.5.13 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	468.182.999,79	Koreksi kurang aset ke kemitraan pihak ketiga.
	Total	468.182.999,79	

m. Koreksi Penyisihan Investasi Non Permanen lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
		(Rp)	
(1.800.000,00)	0,00	(1.800.000,00)	

Tabel 5.5.14 Rincian Koreksi Penyisihan Investasi Non Permanen lainnya Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	BPKAD - PPKD	(1.800.000,00)	Koreksi tambah Penyisihan Investasi Non Permanen lainnya
	Total	(1.800.000,00)	

4. EKUITAS AKHIR

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	RASIO %
2.736.532.615.317,96	2.479.324.864.985,34	257.207.750.332,62	10,37

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 sebesar Rp2.736.532.615.317,96.



6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas Pemerintah Kota Dumai disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi/yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendapatan serta belanja pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dana BOS telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Arus Kas ini. Laporan arus kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	Rasio (%)
287.047.788.389,13	254.358.928.735,71	32.688.859.653,42	12,85

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kota Dumai selama satu periode akuntansi. Mutasi antar kas tidak termasuk dalam arus kas aktivitas operasi, sehingga pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun 2018 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2017 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp287.047.788.389,13 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2018, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp254.358.928.735,71 terdapat kenaikan sebesar Rp32.688.859.653,42 atau sebesar 12,85%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Rincian Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Pendapatan Pajak Daerah	127.964.097.216,00	94.993.765.288,91	32.970.331.927,09	34,71
Pendapatan Retribusi Daerah	30.677.523.061,00	35.859.444.250,00	(5.181.921.189,00)	(14,45)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.189.648.098,00	1.626.568.826,00	563.079.272,00	34,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.749.846.066,64	132.973.140.452,90	(14.223.294.386,26)	(10,70)
Dana Bagi Hasil Pajak	58.145.053.156,00	42.924.641.373,00	15.220.411.783,00	35,46
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	158.526.075.439,00	141.483.331.564,00	17.042.743.875,00	12,05
Dana Alokasi Umum	427.188.089.000,00	408.643.780.000,00	18.544.309.000,00	4,54
Dana Alokasi Khusus	166.331.273.455,00	162.541.133.653,00	3.790.139.802,00	2,33
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	86.741.473.606,23	84.630.386.181,00	2.111.087.425,23	2,49



URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.649.807.000,00	79.317.243.063,00	(66.667.436.063,00)	(84,05)
Penerimaan Hibah	36.059.720.000,00	0,00	36.059.720.000,00	0,00
Jumlah	1.225.222.606.097,87	1.184.993.434.651,81	40.229.171.446,06	3,39

Tabel 5.6.2. Rincian Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	465.147.119.027,00	612.935.735.378,00	(147.788.616.351,00)	(24,11)
Pembayaran Barang	459.683.831.601,74	304.333.455.458,10	155.350.376.143,64	51,05
Pembayaran Subsidi	0,00	2.442.348.000,00	(2.442.348.000,00)	100,00
Pembayaran Hibah	11.098.600.000,00	7.645.200.000,00	3.453.400.000,00	45,17
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	1.032.500.000,00	(1.032.500.000,00)	100,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	938.174.817.708,74	930.634.505.916,10	7.540.311.792,64	0,81

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	Rasio (%)
(174.150.434.182,00)	(272.551.039.157,83)	98.400.604.975,83	(36,10)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (aset non keuangan) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan Tahun 2018 sebesar minus Rp174.150.434.182,00 bila dibanding dengan Tahun 2017 sebesar minus Rp272.551.039.157,83 terdapat penurunan sebesar Rp98.400.604.975,83 atau sebesar 36,10 % dengan rincian:

Tabel 5.6.3. Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	73.800.000,00	19.842.000,00	53.958.000,00	271,94
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	100,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	73.800.000,00	69.842.000,00	3.958.000,00	5,67

Tabel 5.6.4. Rincian Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	24.348.949.518,00	108.136.910.898,83	(83.787.961.380,83)	(77,48)
Perolehan Gedung dan Bangunan	58.284.644.837,00	57.217.635.253,00	1.067.009.584,00	1,86
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.697.002.491,00	106.910.476.006,00	(25.213.473.515,00)	(23,58)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.893.637.336,00	355.859.000,00	9.537.778.336,00	2.680,21
Jumlah	174.224.234.182,00	272.620.881.157,83	(98.396.646.975,83)	(36,09)

c. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(420.000.696,61)	(698.015.155,39)	278.014.458,78	(39,83)

Aktivitas keluar masuk aktivitas transitoris adalah aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2018 sebesar minus Rp420.000.696,61 terdiri dari Arus Masuk Kas yang berasal dari Penerimaan PFK (Pajak Pusat) sebesar Rp64.499.429.897,00, Penerimaan PFK Lainnya yang merupakan Pengembalian Pendapatan Transfer Provinsi sebesar Rp0,00 dan Koreksi Tambah SILPA Tahun 2017 Rp0,00. Sedangkan Arus Keluar Kas terdiri dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp64.499.429.897,00 yang merupakan penyeteroran pajak pusat dan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) Lainnya Rp0,00, serta koreksi kurang SILPA Tahun 2017 sebesar Rp186.159.787,61 dan pengeluaran pengembalian bantuan Keuangan provinsi Rp234.000.000,00. Berikut rincian arus kas dari aktivitas transitoris :

Tabel 5.6.5. Rincian Arus Kas Masuk

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.499.429.897,00	80.734.379.087,46	(16.234.949.190,46)	(20,11)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	0,00	186.159.787,61	(186.159.787,61)	(100,00)



URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Koreksi Tambah SILPA Tahun 2016	0,00	10.000,00	(10.000,00)	(100,00)
Jumlah	64.499.429.897,00	80.920.548.875,07	(16.421.118.978,07)	(20,29)

Tabel 5.6.6. Rincian Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	Rasio (%)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.499.270.806,00	81.280.122.030,46	(16.780.851.224,46)	(20,65)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang SILPA	186.159.787,61	338.442.000,00	(152.282.212,39)	(45,00)
Pengeluaran Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00	100,00
Jumlah	64.919.430.593,61	81.618.564.030,46	(16.699.133.436,85)	(20,46)

d. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	Rasio (%)
112.477.353.510,52	(18.890.125.577,51)	131.367.479.088,03	(695,43)

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2018 adalah Rp112.477.353.510,52 merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp287.047.788.389,13 dan Penjumlahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp174.150.434.182,00 serta Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris sebesar minus Rp420.000.696,61 dan bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar minus Rp18.890.125.577,51 terdapat peningkatan sebesar Rp131.367.479.088,03 atau sebesar 695,43 %.

e. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD RSUD, dan Kas di BLUD Puskesmas

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	Rasio (%)
23.890.167.792,70	42.780.293.370,21	(18.890.125.577,51)	(44,16)

Saldo Awal Kas di BUD dan Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 sebesar Rp23.890.167.792,70 terdiri dari saldo awal Kas BUD pada saat awal Tahun 2018 sebesar Rp16.052.857.478,52 ditambah saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 sebesar Rp58.000.000,00, Kas di bendahara penerimaan Rp75,54 serta saldo awal kas lainnya Rp58.371.062,00, saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp7.720.939.176,64 Bila dibandingkan dengan Tahun



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

2017 sebesar Rp42.780.293.370,21 terjadi penurunan sebesar Rp18.890.125.577,51 atau sebesar 44,16%.

f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD RSUD, dan Kas di BLUD

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	Rasio (%)
136.367.521.303,22	23.890.167.792,70	112.477.353.510,52	470,81

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 sebesar Rp136.367.521.303,22 terdiri dari kas di Kas Daerah sebesar Rp116.017.573.189,01, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.519.591,00, Kas di BLUD RSUD sebesar Rp19.003.355.587,96, Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.254.905.618,25, dan Kas Lainnya (Dana BOS) sebesar Rp88.167.317,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp23.890.167.792,70 terjadi peningkatan sebesar Rp112.477.353.510,52 atau sebesar 470,81%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2017 (Rp)	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	116.017.573.189,01	16.052.857.478,52
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.519.591,00	58.000.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	75,54
4	Kas di BLUD RSUD	19.003.355.587,96	7.226.094.392,49
5	Puskesmas Dumai Kota	235.865.779,38	52.325.557,85
6	Puskesmas Dumai Barat	47.826.830,67	4.683.152,30
7	Puskesmas Bukit Kapur	160.954.344,00	37.468.438,02
8	Puskesmas Sungai Sembilan	247.198,10	29.915.007,27
9	Puskesmas Medang Kampai	66.618.728,37	1.820.255,98
10	Puskesmas Bumi Ayu	265.954.863,28	220.943.382,79
11	Puskesmas Bukit Timah	9.651.036,47	105.102,03
12	Puskesmas Jayamukti	185.256.623,97	2.171.381,12
13	Puskesmas Purnama	36.290.891,24	15.142.748,63
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	246.239.322,77	130.269.758,16
15	Kas Lainnya (Dana BOS)	88.167.317,00	58.371.062,00
	Jumlah	136.367.521.303,22	23.890.167.792,70

g. Saldo Akhir Kas

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	Rasio (%)
136.367.521.303,22	23.890.167.792,70	112.477.353.510,52	470,81

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 sebesar Rp136.367.521.303,22 terdiri dari kas di Kas Daerah sebesar



Rp116.017.573.189,01, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.519.591,00, Kas di BLUD RSUD sebesar Rp19.003.355.587,96, Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.254.905.618,25, dan Kas Lainnya (Dana BOS) sebesar Rp88.167.317,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp23.890.167.792,70 terjadi peningkatan sebesar Rp112.477.353.510,52 atau sebesar 470,81%.



BAB VI

PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI LAINNYA

1. Profil Kota Dumai

Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50.

Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.727,38 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang berlaku tanggal 1 Desember 2016, Struktur Organisasi Pemerintah Kota Dumai mengalami perubahan dengan struktur baru sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Lima Badan yaitu:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Sembilan Belas Dinas :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;



- 5) Dinas Sosial;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11) Dinas Perdagangan;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- 17) Dinas Perikanan;
- 18) Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

RSUD telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.

g. Tujuh Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Dumai Barat;
- 2) Kecamatan Dumai Timur;
- 3) Kecamatan Bukit Kapur;
- 4) Kecamatan Medang Kampai;
- 5) Kecamatan Sungai Sembilan.
- 6) Kecamatan Dumai Kota.
- 7) Kecamatan Dumai Selatan.

2. Kepala Daerah Kota Dumai

Walikota dan Wakil Walikota Dumai periode tahun 2010-2015 TMT 12 Agustus 2010 s.d 12 Agustus 2015 adalah H. Khairul Anwar, SH sebagai Walikota dan dr. H. Agus Widayat, MM sebagai Wakil Walikota. Setelah masa jabatan walikota Dumai periode 2010-2015 berakhir tanggal 12 Agustus 2015, diangkat Drs. H. Arlizman Agus, MM sebagai Penjabat Walikota Dumai masa jabatan TMT 12 Agustus 2015 s.d 17 Februari 2016. Sekarang yang menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai masa jabatan tahun 2016 -2021 TMT 17 Februari 2016 s.d 17 Februari 2021 adalah Drs. H. Zulkifli AS, M.Si sebagai Walikota dan Eko Suharjo, SE sebagai Wakil Walikota Dumai.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Pimpinan DPRD Kota Dumai dengan masa jabatan 2014- 2019 adalah sebagai berikut :



- a. Gusri Effendi (Ketua)
- b. Idrus (Wakil Ketua)
- c. Zainal Abidin (Wakil Ketua)

4. Pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh UEK Simpan Pinjam

Investasi Dana bergulir lembaga Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP) dimulai sejak tahun 2005. Dana Bergulir tersebut merupakan program kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau yang berupa penyaluran dana bergulir kepada kelompok usaha ekonomi di tiap kelurahan. Pada Tahun Anggaran 2009 nilai dana bergulir UEK-SP senilai Rp4.000.000.000,00 masih tercantum sebagai bagian dari Investasi Pemerintah Kota Dumai sedangkan di Tahun Anggaran 2011 terdapat pencairan dana untuk UEK-SP Kelurahan Kampung Baru sebesar Rp500.000.000,00, sehingga dana bergulir seluruhnya senilai Rp5.500.000.000,00. Namun Dana Bergulir tersebut tidak dapat disajikan sebagai bagian dari Investasi Pemerintah Kota Dumai karena dana bergulir tersebut memang tidak dimaksudkan sebagai investasi pemerintah, yaitu tidak ada kewajiban return berupa bunga maupun pengembalian nilai pokok ke kas daerah. Meskipun demikian, dana bergulir tersebut tetap dibawah kendali pengawasan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai melalui SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga pengelolanya adalah UEK-SP. Berdasarkan surat dari Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat nomor 900/DISKOPUKM&PM/118 tanggal 24 April 2012 dana awal sejumlah Rp5.500.000.000,00 tersebut di atas mengalami perkembangan dana sejumlah Rp20.765.632.000,00. Selain itu, dalam laporan tersebut diuraikan bahwa dana UEK-SP yang diserap oleh masyarakat sejumlah Rp15.765.632.000,00 dengan jumlah peminjam sebanyak 2.561 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk tunggakan pinjaman sejumlah Rp707.677.240,00.

5. Pengelolaan pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN

Pengelolaan pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN pada FKTP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Peraturan ini berlaku bagi Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Sehingga Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari Rekening BUD.

6. Informasi tambahan lainnya

- a. Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 sesuai dengan pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 disusun dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD (konsolidasian). Namun demikian, proses tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Agar diperoleh hasil yang optimal, maka proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 dilakukan dengan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan OPD. Kegiatan ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan angka dalam Laporan Keuangan OPD dengan SPJ Fungsional, data SP2D yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bukti setor UP/GU/TU, laporan tahun sebelumnya, dan melihat keterkaitan penambahan asset tetap dengan realisasi belanja modal.

- b. Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah Kota Dumai tidak mengalami perubahan, namun hanya mengalami perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas untuk pengakuan realisasi belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2018 secara keseluruhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yakni APBD, sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

WALIKOTA DUMAI,

Drs. H. ZULKIFLI AS, M.Si

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017, dengan memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2013 untuk standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan kecuali diatur lain dalam SPKN Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
- d. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan LKPD Tahun 2018 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2018;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2018;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Perubahan SAL (LPSAL) Tahun 2018;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua asersi manajemen dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan beban daerah serta pembiayaan yang disajikan dalam LRA dan Laporan Operasional Tahun 2018 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

- b. Kelengkapan

Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi pendapatan daerah, belanja dan beban daerah serta pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2018 telah dicatat dalam LRA dan Laporan Operasional.

- c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau merupakan hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat benar-benar merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

- d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, pendapatan, beban dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, dan merupakan alokasi anggaran Tahun 2018.

- e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah diklasifikasi sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap Perencanaan Pemeriksaan

- 1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan.

- 2) Pemahaman Entitas dan Proses Bisnis

Pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara

umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas yang diperiksa, serta untuk mengidentifikasi dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh entitas dalam mencapai tujuan.

3) Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya digunakan untuk mengetahui dan menilai apakah terdapat hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yang mempengaruhi kewajaran penyajian dan atau kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan Tahun 2018 dan untuk menentukan kemungkinan terjadinya penyimpangan berulang seperti yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya.

4) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

Pelaksanaan Prosedur Analitis awal bertujuan untuk merencanakan sifat, saat, dan lingkup terhadap prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya atau prosedur pemeriksaan yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti pemeriksaan untuk saldo akun atau kelas transaksi tertentu.

5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern

Pemahaman atas sistem pengendalian intern bertujuan mengkaji pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (*misstatement* dan *fraud*).

Pemahaman atas sistem pengendalian intern tersebut membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, dan (3) mendesain prosedur pengujian substantif.

6) Identifikasi dan Penilaian Risiko Awal

Identifikasi dan Penilaian Risiko Awal bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi yang disebabkan oleh salah saji ataupun *fraud*, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemeriksa melakukan penilaian risiko untuk setiap saldo akun atau kelompok akun maupun siklus yang signifikan. Prosedur penilaian awal tentang risiko ini kemudian dihadapkan untuk setiap asersi laporan keuangan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) menetapkan tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima Pemeriksa (*Acceptable Audit Risk*) untuk tingkat laporan keuangan entitas;
- b) memperoleh pemahaman dan penilaian tentang risiko terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan (*risk of misstatement in financial statement*);
- c) menetapkan risiko deteksi;

- d) menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pemeriksaan untuk mendapat bukti pemeriksaan selanjutnya. Penentuan sifat, saat dan luas dari prosedur pemeriksaan dapat didasarkan pada interpretasi risiko deteksi yang diperoleh dari formula risiko pemeriksaan; dan
 - e) merencanakan pengujian terinci (*test of details*).
- 7) Penetapan Batas Materialitas Awal
- Penetapan Batas Materialitas Awal bertujuan untuk menentukan batasan materialitas dalam perencanaan pemeriksaan yang akan dilakukan, dengan input dokumen berupa: a) hasil penelaahan umum atas entitas; b) hasil pemahaman SPI; c) hasil penilaian risiko pemeriksaan; d) kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya terutama mengenai penilaian risiko dan materialitas; dan e) data laporan keuangan entitas.
- 8) Penentuan Metode Uji Petik
- Penentuan Metode Uji Petik bertujuan untuk menentukan metode dan teknik pemilihan uji petik yang tepat dalam pengujian yang akan dilaksanakan. Pemeriksa menentukan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional. Uji petik merupakan elemen uji yang diambil oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan tentang kualitas informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Metode uji petik yang dilakukan dapat menggunakan metode statistik atau nonstatistik.
- 9) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa
- Langkah ini dilakukan dengan tujuan diantaranya menyusun Tim Pemeriksa dengan komposisi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan penugasan. Tim Pemeriksa secara kolektif harus memiliki pemahaman yang cukup atas standar akuntansi dan pengetahuan yang memadai atas pemeriksaan keuangan.
- 10) Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kegiatan Perorangan (PKP).
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan
- 1) Pelaksanaan Pengujian Pengendalian Internal
- Pengujian terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan Pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Dalam pengujian desain SPI, Pemeriksa mengevaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara itu, pengujian implementasi SPI dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang diperiksa.
- Hasil pengujian SPI juga digunakan untuk menentukan asersi-asersi dari laporan keuangan entitas yang diperiksa, seperti: a) keberadaan dan keterjadian; b) kelengkapan; c) hak dan kewajiban; d) penilaian dan pengalokasian; dan e) penyajian dan pengungkapan.

2) Penyesuaian Tingkat Risiko dan Tingkat Materialitas Setelah Pengujian Pengendalian

Setelah dilakukan pengujian pengendalian, Pemeriksa mengevaluasi kembali tingkat risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Evaluasi risiko tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan interim. Risiko pengendalian dan risiko deteksi yang telah ditetapkan di tahap identifikasi dan penilaian risiko awal dapat berubah dan dimutakhirkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian.

Indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*) yang terdeteksi dari hasil pengujian pengendalian berpengaruh signifikan terhadap risiko pemeriksaan secara keseluruhan dan tingkat materialitas yang ditetapkan.

3) Penyesuaian Prosedur Pengujian/Pemeriksaan

Penyesuaian prosedur pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian baik yang mendukung bukti SPI yang efektif maupun yang menunjukkan ketidakefektifan SPI entitas.

4) Pelaksanaan Pengujian Substantif

Pengujian ini meliputi pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan.

Pengujian substantif transaksi dan saldo dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas laporan keuangan pihak yang diperiksa, yaitu: (1) Keberadaan dan keterjadian, (2) Kelengkapan, (3) Hak dan kewajiban, (4) Penilaian dan alokasi, dan (5) Penyajian dan pengungkapan.

5) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Substantif

Tujuan dilakukan prosedur substantif adalah untuk mendeteksi salah saji baik secara individu maupun gabungan yang menyebabkan salah saji material pada tingkat asersi di laporan keuangan. Prosedur substantif meliputi pengujian terinci (*test of details*) atas transaksi, saldo akun pengungkapan, dan prosedur analitis.

6) Pelaksanaan Prosedur Tambahan jika diperlukan

Prosedur pemeriksaan tambahan dapat dilakukan apabila diperlukan. Prosedur tambahan dilakukan apabila Pemeriksa merasa bahwa bukti yang diperoleh dari hasil pengujian substantif dirasa belum memadai dari segi kecukupan dan ketepatan sehingga Pemeriksa perlu memperoleh tambahan bukti lagi untuk mendukung opininya. Selain itu dapat juga dilakukan apabila Pemeriksa dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan indikasi terjadi kecurangan.

7) Penyusunan dan Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Jurnal Penyesuaian

Tujuan tahap ini adalah menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan dan jurnal koreksi untuk dilakukan pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan, dengan input dokumen berupa: a) himpunan TP/LTP; b) tanggapan resmi dan tertulis; dan c) surat penyampaian TP.

8) Perolehan Surat Representasi

Surat representasi menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pimpinan entitas atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pimpinan/Manajemen Entitas yang diperiksa. Surat representasi merupakan bagian dari bukti yang diperoleh Pemeriksa, namun tidak merupakan pengganti bagi penerapan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai bagi pendapat Pemeriksa atas laporan keuangan.

9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Akhir

Prosedur analitis akhir diterapkan untuk menilai kesimpulan akhir yang diperoleh dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

10) Penilaian Risiko dan Materialitas Akhir

Setelah pengujian pengendalian dan pengujian substantif, Pemeriksa mengevaluasi kembali tingkat risiko dan materialitas (PM dan TM) yang ditetapkan, apakah nilai tersebut masih sesuai/tepat untuk digunakan. Jika masih ditemukan salah saji material di tingkat saldo akun maupun laporan keuangan secara keseluruhan yang tidak dapat dikoreksi, maka Pemeriksa mempertimbangkan kembali tingkat risiko dan materialitas yang ditetapkan. Penyesuaian tingkat risiko dan materialitas tersebut akan berpengaruh terhadap kesimpulan akhir yaitu opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan.

c. Pelaporan

Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan dan Pembahasan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP).

Penyusunan KHP bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, dengan dokumen input berupa:

- a) Temuan Pemeriksaan (TP);
- b) Tanggapan entitas atas TP;
- c) Risalah diskusi pembahasan TP dan Ikhtisar koreksi;
- d) Laporan Keuangan yang telah disesuaikan dengan iktisar koreksi; dan

- e) *Worksheet* laporan keuangan setelah koreksi.
- 2) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi Pemeriksa dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, Pimpinan Entitas, dan pihak lain yang berkepentingan. Dokumen input yang digunakan berupa: a) konsep LHP; b) tanggapan tertulis dan resmi atas konsep LHP; c) Rencana Aksi dari entitas; dan d) risalah diskusi.

6. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan interim dilaksanakan selama 30 hari kalender dari 5 Februari s.d. 6 Maret 2019 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci selama 30 hari kalender dari 3 April s.d. 16 April 2019 dan 21 April s.d. 6 Mei 2019.

7. Objek Pemeriksaan

LKPD Pemerintah Kota Dumai TA 2018 terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangan. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menggunakan aplikasi dalam penerapan LKPD berbasis akrual.

Dalam penyusunan LKPD, Pemerintah Kota Dumai menyelenggarakan jurnal akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Jurnal akrual tersebut diidentifikasi, dicatat, diklasifikasi, diikhtisar, dan disajikan serta diinterpretasikan dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Selanjutnya, jurnal akrual dari seluruh OPD dikonsolidasikan dengan menggunakan aplikasi SIMDA.

SIMDA menghasilkan Laporan Keuangan berupa LRA, LPSAL, NERACA, LO, LPE, dan LAK. Namun, aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Dumai belum dapat menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Sehingga Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun CaLK dilakukan secara manual.

9. Batasan Pemeriksaan

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen entitas. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa beranggapan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah menyediakan data dan informasi yang material untuk

keperluan pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018 tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan ataupun penyimpangan, tapi untuk memberikan keyakinan bahwa LKPD entitas yang diperiksa bebas dari salah saji material. Akan tetapi, jika dari pemeriksaan ditemukan penyimpangan, tim pemeriksa wajib mengungkapkan penyimpangan tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Prosedur-prosedur itu dilakukan karena disadari bahwa kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh entitas dalam pelaksanaan APBD. Namun, pemeriksaan ini tidak memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Pemeriksa berkewajiban menginformasikan bila ada perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang mungkin ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa hanya menguji kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kewajaran laporan keuangan termasuk asersi manajemen entitas yang diperiksa. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR JENIS PUNGUTAN DAN DASAR HUKUM PUNGUTAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Pajak Daerah

No.	Jenis Pungutan	Dasar Pungutan
1	2	3
1.	Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C	Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2011 dan Perda Kota Dumai No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
2.	Pajak Hiburan	Perda Kota Dumai No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
3.	Pajak Penerangan Jalan	Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
4.	Pajak Hotel	Perda Kota Dumai No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
5.	Pajak Restoran	Perda Kota Dumai No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
6.	Pajak Reklame	Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
7.	Pajak Sarang Burung Walet	Perda Kota Dumai No. 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Burung Walet
8.	Pajak Air Tanah	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
9.	Pajak Parkir	Perda Kota Dumai No. 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Perda Kota Dumai No. 05 Tahun 2011 Tentang BPHTB

Retribusi Daerah

No.	Jenis Pungutan	Dasar Pungutan
1	2	3
1	Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC	Perda Kota Dumai No 21 Tahun 2011
2	Retribusi Pelayanan Pasar - Tempat Bongkar Muat	Perda Kota Dumai No 21 tahun 2011
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2012
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2014
5	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2000
6	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2000
7	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2008
8	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	Perda Kota Dumai No. 11 Tahun 2008
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Perda Kota Dumai No. 19 Tahun 2011
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Perda Kota Dumai No. 20 Tahun 2011
11	Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	Perda Kota Dumai No. 20 Tahun 2011
12	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	Perda Kota Dumai No. 21 Tahun 2011
13	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	Perda Kota Dumai No. 21 Tahun 2011
14	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	Perda Kota Dumai No. 21 Tahun 2011
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perda Kota Dumai No. 22 Tahun 2011
16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
17	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
18	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2011
19	Retribusi Pelayanan Bandar Udara	Perda Kota Dumai No. 23 tahun 2011
20	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Perda Kota Dumai No. 24 Tahun 2011
21	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	Perda Kota Dumai No. 24 Tahun 2011
22	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Perda Kota Dumai No. 24 Tahun 2011
23	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014
24	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2012
25	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2012
26	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
27	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
28	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
29	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
30	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
31	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
32	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
33	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
34	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
35	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	Perda Kota Dumai No. 6 Tahun 2014
36	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perda Kota Dumai No. 7 Tahun 2014
37	Retribusi Rumah potong Hewan	Perda Kota Dumai No. 8 Tahun 2012
38	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Perda Kota Dumai No. 9 Tahun 2012
39	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Perwako Dumai No. 20 Tahun 2010
40	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Perda Kota Dumai No. 13 Tahun 2017

Lampiran Penerimaan dan Posisi Kas BOS Per 31 Desember 2018 pada SDN di Kota Dumai

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL TAHUN 2018	BUNGA JANUARI S/D SEPTEMBER 2018	PENERIMAAN TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2018	REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR	BUNGA OKTOBER S/D DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD NEGERI 001 BINTAN	193.577,00	55.914,00	516.800.000,00	516.800.000,00	249.491,00	1.437,00
2	SD NEGERI 001 BUKIT KAPUR	270.596,00	32.363,00	272.640.000,00	272.640.000,00	302.959,00	714,00
3	SD NEGERI 001 LUBUK GAUNG	256.488,00	15.606,00	146.880.000,00	146.880.000,00	272.094,00	341,00
4	SD NEGERI 001 RIMBA SEKAMPUNG	517.779,00	24.123,00	431.840.000,00	431.840.000,00	541.902,00	1.171,00
5	SD NEGERI 001 TELUK MAKMUR	358.999,00	11.209,00	199.360.000,00	199.660.000,00	70.208,00	601,00
6	SD NEGERI 002 BAGAN BESAR	1.932.455,00	23.774,00	404.960.000,00	406.900.000,00	16.229,00	1.059,00
7	SD NEGERI 002 BASILAM BARU	244.783,00	24.536,00	209.920.000,00	210.040.000,00	149.319,00	2.301,00
8	SD NEGERI 002 GUNTUNG	124.556,00	20.751,00	201.120.000,00	201.120.000,00	145.307,00	2.725,00
9	SD NEGERI 002 RATU SIMA	41.714,00	28.455,00	493.600.000,00	493.670.169,00	-	1.344,00
10	SD NEGERI 003 BANGSAL ACEH	166.571,00	10.513,00	81.760.000,00	81.760.000,00	177.084,00	898,00
11	SD NEGERI 003 BUKIT KAPUR	347.805,00	38.632,00	349.600.000,00	349.680.000,00	306.437,00	3.762,00
12	SD NEGERI 003 PANGKALAN SESAI	315.770,00	38.701,00	667.680.000,00	667.680.000,00	354.471,00	1.603,00
13	SD NEGERI 003 PELINTUNG	12.837,00	41.534,00	337.760.000,00	337.760.000,00	54.371,00	1.874,00
14	SD NEGERI 003 SUKAJADI	27.201,00	13.008,00	227.360.000,00	227.240.000,00	160.209,00	644,00
15	SD NEGERI 004 BAGAN BESAR	274.299,00	46.384,00	416.000.000,00	416.300.000,00	20.683,00	4.972,00
16	SD NEGERI 004 BANGSAL ACEH	1.008.356,00	25.705,00	207.360.000,00	208.280.000,00	114.061,00	2.343,00
17	SD NEGERI 004 BUKIT DATUK	874.934,00	30.776,00	521.760.000,00	521.760.000,00	905.710,00	4.861,00
18	SD NEGERI 004 MUNDAM	337.392,00	34.447,00	292.800.000,00	293.140.000,00	31.839,00	3.250,00
19	SD NEGERI 004 TELUK BINJAI	745.591,00	52.613,00	458.560.000,00	458.290.000,00	1.068.204,00	4.289,00
20	SD NEGERI 005 BUKIT KAPUR	340.959,00	55.275,00	462.560.000,00	462.560.000,00	396.234,00	1.266,00
21	SD NEGERI 005 BUKIT TIMAH	188.784,00	65.448,00	481.120.000,00	481.312.000,00	62.232,00	5.544,00
22	SD NEGERI 005 LUBUK GAUNG	71.787,00	31.405,00	255.360.000,00	255.462.000,00	1.192,00	3.952,00
23	SD NEGERI 005 PELINTUNG	317.975,00	18.456,00	123.680.000,00	123.680.000,00	336.431,00	2.076,00
24	SD NEGERI 005 TELUK BINJAI	610.943,00	48.923,00	411.360.000,00	411.360.000,00	659.866,00	5.462,00
25	SD NEGERI 006 BANGSAL ACEH	238,00	9.832,00	88.960.000,00	88.960.000,00	10.070,00	977,00
26	SD NEGERI 006 BUKIT KAPUR	76.635,00	33.668,00	492.800.000,00	492.800.000,00	110.303,00	5.788,00
27	SD NEGERI 006 MEKAR SARI	310.919,00	11.027,00	180.640.000,00	180.640.000,00	321.946,00	1.082,00
28	SD NEGERI 006 TELUK BINJAI	789.256,00	35.406,00	284.000.000,00	284.000.000,00	824.662,00	4.346,00
29	SD NEGERI 006 TELUK MAKMUR	-	1.360.650,00	256.320.000,00	256.320.000,00	1.360.650,00	2.871,00
30	SD NEGERI 007 BAGAN BESAR	305.807,00	23.822,00	420.160.000,00	420.160.000,00	329.629,00	4.868,00
31	SD NEGERI 007 PELINTUNG	73.929,00	6.593,00	48.640.000,00	48.660.000,00	60.522,00	635,00
32	SD NEGERI 007 PURNAMA	107.057,00	23.776,00	392.160.000,00	392.160.000,00	130.833,00	3.740,00
33	SD NEGERI 007 TANJUNG PENYEMBAL	171.425,00	67.084,00	448.000.000,00	448.000.000,00	238.509,00	4.156,00
34	SD NEGERI 007 TELUK BINJAI	2.188.302,00	33.848,00	308.800.000,00	308.800.000,00	2.222.150,00	789,00
35	SD NEGERI 008 BUKIT KAPUR	401.839,00	26.307,00	399.840.000,00	400.040.000,00	228.146,00	3.589,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL TAHUN 2018	BUNGA JANUARI S/D SEPTEMBER 2018	PENERIMAAN TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2018	REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR	BUNGA OKTOBER S/D DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
36	SD NEGERI 008 BUMI AYU	475.622,00	25.938,00	418.080.000,00	418.080.000,00	501.560,00	897,00
37	SD NEGERI 008 LUBUK GAUNG	216.124,00	41.737,00	398.560.000,00	398.560.000,00	257.861,00	4.633,00
38	SD NEGERI 008 PURNAMA	332.597,00	41.589,00	397.760.000,00	397.760.000,00	374.186,00	3.712,00
39	SD NEGERI 009 BAGAN KELADI	190.199,00	15.907,00	164.640.000,00	164.720.000,00	126.106,00	583,00
40	SD NEGERI 009 KAYU KAPUR	826.744,00	28.337,00	470.080.000,00	470.080.000,00	855.081,00	3.149,00
41	SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS	127.396,00	32.714,00	306.400.000,00	306.400.000,00	160.110,00	999,00
42	SD NEGERI 009 TANJUNG PENYEMBAL	154.819,00	41.552,00	393.120.000,00	393.120.000,00	196.371,00	3.734,00
43	SD NEGERI 010 JAYAMUKTI	1.204.628,00	36.525,00	298.880.000,00	298.880.000,00	1.241.153,00	1.542,00
44	SD NEGERI 010 KAYU KAPUR	93.976,00	19.183,00	171.680.000,00	171.680.000,00	113.159,00	521,00
45	SD NEGERI 010 RATU SIMA	18.594.330,00	79.384,00	801.600.000,00	800.739.006,00	19.534.708,00	2.030,00
46	SD NEGERI 011 BUKIT KAPUR	348.239,00	12.040,00	206.560.000,00	206.600.000,00	320.279,00	555,00
47	SD NEGERI 011 DUMAI KOTA	860.241,00	13.888,00	246.880.000,00	246.880.000,00	874.129,00	685,00
48	SD NEGERI 011 MEKAR SARI	603.121,00	45.714,00	367.200.000,00	367.200.000,00	648.835,00	3.386,00
49	SD NEGERI 011 TANJUNG PENYEMBAL	120.738,00	24.785,00	207.520.000,00	207.665.000,00	523,00	2.863,00
50	SD NEGERI 012 BASILAM BARU	144.955,00	7.644,00	52.320.000,00	52.460.000,00	12.599,00	79,00
51	SD NEGERI 012 PURNAMA	43.019,00	18.384,00	319.200.000,00	319.200.000,00	61.403,00	3.529,00
52	SD NEGERI 013 BASILAM BARU	203.012,00	13.752,00	110.720.000,00	110.720.000,00	216.764,00	1.236,00
53	SD NEGERI 013 BUKIT NENAS	1.601,00	8.819,00	121.120.000,00	121.000.000,00	130.420,00	1.581,00
54	SD NEGERI 013 BULUH KASAP	703.483,00	34.479,00	325.280.000,00	325.280.000,00	737.962,00	854,00
55	SD NEGERI 013 MEKAR SARI	69.629,00	8.948,00	162.560.000,00	162.595.000,00	43.577,00	1.786,00
56	SD NEGERI 014 BASILAM BARU	250.196,00	22.481,00	218.560.000,00	218.560.000,00	272.677,00	3.015,00
57	SD NEGERI 014 BULUH KASAP	55.020,00	28.475,00	249.280.000,00	249.280.000,00	83.495,00	2.722,00
58	SD NEGERI 014 GURUN PANJANG	274.797,00	33.712,00	225.760.000,00	225.760.000,00	308.509,00	2.493,00
59	SD NEGERI 014 SIMPANG TETAP	531.934,00	66.992,00	590.400.000,00	590.400.000,00	598.926,00	6.432,00
60	SD NEGERI 015 BAGAN KELADI	975,00	18.821,00	185.440.000,00	185.440.000,00	19.796,00	2.594,00
61	SD NEGERI 015 BASILAM BARU	82.985,00	13.063,00	112.160.000,00	112.160.000,00	96.048,00	1.545,00
62	SD NEGERI 015 BULUH KASAP	312.497,00	58.617,00	520.800.000,00	520.760.000,00	411.114,00	4.868,00
63	SD NEGERI 015 GURUN PANJANG	653.936,00	34.897,00	291.040.000,00	291.040.000,00	688.833,00	3.229,00
64	SD NEGERI 016 BASILAM BARU	187.970,00	15.939,00	133.600.000,00	133.700.000,00	103.909,00	1.447,00
65	SD NEGERI 016 BUKIT KAPUR	88.490,00	10.581,00	94.400.000,00	94.400.000,00	99.071,00	1.288,00
66	SD NEGERI 016 BUKIT TIMAH	1.172.598,00	27.325,00	346.720.000,00	346.720.000,00	1.199.923,00	3.263,00
67	SD NEGERI 016 BULUH KASAP	845,00	33.071,00	316.640.000,00	287.424.400,00	29.249.516,00	3.465,00
68	SD NEGERI 017 BATU TERITIP	111.100,00	19.588,00	169.120.000,00	169.250.000,00	688,00	2.332,00
69	SD NEGERI 017 BULUH KASAP	31.255,00	26.637,00	181.120.000,00	181.155.000,00	22.892,00	2.029,00
70	SD NEGERI 017 PURNAMA	39.261,00	24.215,00	374.720.000,00	374.720.000,00	63.476,00	3.501,00
71	SD NEGERI 018 BATU TERITIP	291.792,00	26.141,00	200.640.000,00	200.640.000,00	317.933,00	2.688,00
72	SD NEGERI 018 PURNAMA	363.379,00	31.045,00	280.000.000,00	280.240.000,00	154.424,00	3.814,00
73	SD NEGERI 019 BASILAM BARU	291.857,00	32.128,00	252.960.000,00	252.960.000,00	323.985,00	2.436,00
74	SD NEGERI 019 BUMI AYU	160.977,00	48.765,00	433.600.000,00	433.600.000,00	209.742,00	1.217,00
75	SD NEGERI 019 PANGKALAN SESAI			26.240.000,00	26.240.000,00	-	359,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL TAHUN 2018	BUNGA JANUARI S/D SEPTEMBER 2018	PENERIMAAN TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2018	REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR	BUNGA OKTOBER S/D DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
76	SD NEGERI 020 BATU TERITIP	550,00	21.499,00	213.760.000,00	213.780.550,00	1.499,00	665,00
77	SD NEGERI 020 JAYA MUKTI	1.345.540,00	36.978,00	357.440.000,00	357.440.000,00	1.382.518,00	988,00
78	SD NEGERI 021 BASILAM BARU	460,00	8.412,00	95.840.000,00	95.848.412,00	460,00	320,00
79	SD NEGERI 021 TANJUNG PALAS	296.340,00	52.235,00	461.760.000,00	461.760.000,00	348.575,00	4.329,00
80	SD NEGERI 022 JAYAMUKTI	1.150.256,00	30.524,00	524.000.000,00	523.454.000,00	1.726.780,00	1.434,00
81	SD NEGERI 023 TELUK BINJAI	174.701,00	12.266,00	115.840.000,00	115.840.000,00	186.967,00	1.281,00
82	SD NEGERI 024 TELUK BINJAI	69.088,00	21.197,00	194.560.000,00	194.560.000,00	90.285,00	421,00
83	SD NEGERI 025 TELUK BINJAI	143.998,00	18.496,00	297.760.000,00	297.760.000,00	162.494,00	3.263,00
84	SD NEGERI 026 SUKAJADI	390.184,00	45.705,00	360.000.000,00	360.000.000,00	435.889,00	3.363,00
85	SD NEGERI 027 BUKIT BATREM	634.337,00	35.265,00	615.360.000,00	615.560.000,00	469.602,00	1.475,00
86	SD NEGERI 028 SRI PULAU	35.758,00	8.316,00	63.840.000,00	63.840.000,00	44.074,00	707,00
87	SD NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI	1.298.968,00	34.651,00	281.440.000,00	282.080.000,00	693.619,00	3.114,00
	Jumlah	49.764.075,00	3.869.920,00	26.217.120.000,00	26.192.345.537,00	78.408.458,00	205.761,00

Lampiran Penerimaan dan Posisi Kas BOS Per 31 Desember 2018 pada SMPN di Kota Dumai

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL TAHUN 2018	BUNGA JANUARI S/D SEPTEMBER 2018	PENERIMAAN TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2018	REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR	BUNGA OKTOBER S/D DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI	390.719,00	50.740,00	504.600.000,00	504.600.000,00	441.459,00	4.696,00
2	SMP NEGERI 1 DUMAI	156.285,00	54.285,00	858.200.000,00	858.200.000,00	210.570,00	2.159,00
3	SMP NEGERI 2 DUMAI	3.924.676,00	189.244,00	875.800.000,00	875.800.000,00	4.113.920,00	2.094,00
4	SMP NEGERI 3 DUMAI	263.734,00	48.996,00	850.800.000,00	850.800.000,00	312.730,00	2.333,00
5	SMP NEGERI 4 DUMAI	3.781,00	100.396,00	897.200.000,00	897.200.000,00	104.177,00	3.921,00
6	SMP NEGERI 5 DUMAI	58.744,00	50.823,00	664.000.000,00	664.000.000,00	109.567,00	2.737,00
7	SMP NEGERI 6 DUMAI	1.093.015,00	46.699,00	692.400.000,00	692.400.000,00	1.139.714,00	1.764,00
8	SMP NEGERI 7 DUMAI	463.228,00	50.873,00	819.000.000,00	819.000.000,00	514.101,00	7.171,00
9	SMP NEGERI 8 DUMAI	101.319,00	29.813,00	289.200.000,00	289.200.000,00	131.132,00	2.541,00
10	SMP NEGERI 9 DUMAI	225.622,00	36.874,00	361.200.000,00	361.200.000,00	262.496,00	1.120,00
11	SMP NEGERI 11 DUMAI	1.101.004,00	29.419,00	394.800.000,00	394.800.000,00	1.130.423,00	1.150,00
12	SMP NEGERI 12 DUMAI	100.028,00	24.361,00	241.800.000,00	241.800.000,00	124.389,00	2.719,00
13	SMP N 13 DUMAI	128.280,00	38.863,00	324.800.000,00	324.800.000,00	167.143,00	704,00
14	SMP NEGERI 14 DUMAI	137.140,00	63.913,00	856.600.000,00	856.600.000,00	201.053,00	7.953,00
15	SMPN 15 DUMAI	99.596,00	22.345,00	306.200.000,00	306.200.000,00	121.941,00	630,00
16	SMP NEGERI 16 DUMAI	15.059,00	4.726,00	79.000.000,00	79.000.000,00	19.785,00	191,00
17	SMPN 17 DUMAI	652,00	9.924,00	126.800.000,00	126.800.000,00	10.576,00	302,00

2/5

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL TAHUN 2018	BUNGA JANUARI S/D SEPTEMBER 2018	PENERIMAAN TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2018	REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR	BUNGA OKTOBER S/D DESEMBER 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
18	SMP N 18 DUMAI	212.388,00	6.802,00	96.400.000,00	96.400.000,00	219.190,00	271,00
19	SMPN 19 DUMAI	121.978,00	14.710,00	144.400.000,00	144.400.000,00	136.688,00	314,00
20	SMP NEGERI 20 DUMAI	8.721,00	8.755,00	163.600.000,00	163.600.000,00	17.476,00	784,00
21	SMP NEGERI 21 DUMAI	524,00	9.124,00	186.400.000,00	186.400.000,00	9.648,00	910,00
22	SMP NEGERI 22 DUMAI	494,00	6.816,00	109.400.000,00	109.400.000,00	7.310,00	1.146,00
	Jumlah	8.606.987,00	898.501,00	9.842.600.000,00	9.842.600.000,00	9.505.488,00	47.610,00
	Total	58.371.062,00	4.768.421,00	36.059.720.000,00	36.034.945.537,00	87.913.946,00	253.371,00

LAMPIRAN PIUTANG GAJI PNS

No	Nama	JUMLAH	No. SKPP Gaji	Tanggal SKPP Gaji	No. SK Pemberhentian	Tanggal SK Pemberhentian	TMT Pemberhentian	Keterangan
1	H. TAUFIK, S.Sos, M.Si	86.709.600,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/20	22 APRIL 2019	798/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 OKTOBER 2015	
2	PAZWIR, S.Sos	147.397.000,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/28	22 APRIL 2019	809/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2015	
3	WAN RAMLI, ST, MT	57.107.200,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/10	22 APRIL 2019	802/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	30 NOVEMBER 2016	
4	NUR ISTIQLAL, ST	41.009.050,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/26	22 APRIL 2019	814/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2017	
5	ANDY SASTRA AHMAD, ST	41.976.800,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/24	22 APRIL 2019	808/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	30 NOVEMBER 2016	
6	BUDI MARMAN, ST	35.672.300,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/18	22 APRIL 2019	804/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 JANUARI 2017	
7	FAISAT, ST	34.786.600,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/12	22 APRIL 2019	806/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2017	
8	T.M.NASIR	26.994.600,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/23	22 APRIL 2019	811/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2016	
9	INDRA SAPUTRA	3.745.000,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/17	22 APRIL 2019	807/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2018	
10	ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG	68.803.000,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/27	22 APRIL 2019	805/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 OKTOBER 2015	
11	SYAHDI RAHMAN, SE	23.092.600,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/19	22 APRIL 2019	803/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MEI 2017	
12	AHMAD BUDIMAN	3.940.600,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/25	22 APRIL 2019	813/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2018	
13	ELZA AGUSTA	47.612.800,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/21	22 APRIL 2019	815/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	30 NOVEMBER 2016	
14	MUHAMMAD NASIR NUR	59.680.900,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/11	22 APRIL 2019	799/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 JANUARI 2016	
15	HAVELAL HUSSA	2.468.100,00	876.1/SKPP/BPKAD/2019/22	22 APRIL 2019	812/BKPP/2018	21 DESEMBER 2018	31 MARET 2018	
16	RONY CUSTER, A.Ma	2.719.100,00	876.1/SKPP/BPKAD/2018/75	17 JULI 2018	159/BKPP/2014	30 MEI 2014	Juni 2014	
17	JANZEN,A.MKL	2.768.200,00	876.1/SKPP/BPKAD/2018/76	17 JULI 2018	439/BKPP/2017	31 MEI 2017	Juni 2017	
18	ADI SAPUTRA	61.353.700,00	876.1/SKPP/BPKAD/2018/77	20 JULI 2018	459/BKPP/2017	12 JUNI 2017	31 AGUSTUS 2015	
19	PUJA DERMAWANTO	32.330.200,00	876.1/SKPP/BPKAD/2018/78	20 JULI 2018	118/BKPP/2017	28 FEBRUARI 2017	September 2015	
20	SAFRIONO	27.509.700,00	876.1/SKPP/BPKAD/2018/78.1	20 AGUSTUS 2018	119/BKPP/2017	28 FEBRUARI 2017	September 2015	
21	Drs. ASYARI	63.628.700,00	876.1/SKPP/BPKAD/2018/96	23 OKTOBER 2018	00005/KEPKA/TDH/05/17	23 MEI 2017	JANUARI 2016	
22	YETTI YENLINDAWATI, S.Sos, M.Si	13.835.800,00			608/BKPP/2018	25 SEPTEMBER 2018		Pemberhentian Sementara 50 %
23	SUHERLINA	17.482.000,00	900/65/Perben -BPKAD	6 Maret 2019	290/BKPSDM/2019	11 MARET 2019	31 DESEMBER 2018	
24	NOVIAR INDRA PUTRA NST,M.Si	21.734.800,00	900/64/Perben -BPKAD	6 Maret 2019	289/BKPSDM/2019	11 MARET 2019	31 DESEMBER 2018	
25	WIDAWATI	8.721.300,00	900/67/Perben -BPKAD	6 Maret 2019	291/BKPSDM/2019	11 MARET 2019	31 DESEMBER 2018	
26	RENI MULYANTI	11.702.500,00			672/BKPP/2018	15 OKTOBER 2018		Pemberhentian Sementara 50%
	JUMLAH	944.782.150,00						

**DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR
DINAS PERDAGANGAN PERIODE 2007**

No	Nama Debitur	Alamat	Besar pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
1	DASLINAWATI	JL.Gadja mada No.37 B	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
2	RAMLI	Jl.Sei Siak No.47	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000
3	SAMAH SARI	Jl.Sei Siak No.33 B	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
4	ISMAN	Gg.karya III NO.19	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
5	DEWI ELIANA	JL.Hangtuah Gg.karya III No.13	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
6	BUTET	JL.gadja mada Gg.ikhshan	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000
7	MARTINA	JL.sei masang no 119	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
8	ZULBAIDAH	JL.hayam wuruk Gg.Bajopa no.01 A	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
9	MURJIONO	JL.Gadja mada No.61	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
10	EDWAR SUTAN	Gg.Ikhsan No.2	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
11	BURHANUDIN	JL.Sei Roakan No.80,RT.002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
12	NIKSON HUTAPEA	JL.Sei Roakan No.57,RT.001	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
13	YULI AFNI	JL.sei masang No. 128,RT 003	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
14	PAIDI	JL.Gadja mada NO.13 RT 003	2.500.000	2007	2007		2.500.000	-
15	FITRIANTO	JL.Hangtuah No.217,RT 002	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
16	ERNAWATI	JL.hayam wuruk Gg.Bajopa no.09	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
17	RIDWAN	JL.Gadja mada No.37	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000
18	DARMIWATI.A	JL.Lepin No.39 A	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
19	LENI MARLINA	JL.Jend.Sudirman	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
20	NURAINI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bakti No.86	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
21	YETNAWATI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bakti	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
22	NELIS WARTI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bakti No.83	2.500.000	2007	2007		2.500.000	-
23	AHMAD	JL.Kartini	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
24	NASRUL	JL.baru	2.500.000	2007	2007		2.500.000	-
25	NASIRUDDIN	JL.Baru Gg.PLN No.41	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
26	BUYUNG	JL.Baru,RT 010	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
27	NANA MAYA SARI	Gg.Sepakat No.97,rt 001	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
28	SOVIA ENGGRAIN	JL.Baru Gg.PLN No.47,RT 010	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
29	HERNIATI	JL.Baru Gg.Sepakat	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
30	ELNA	JL.Bintan Gg.Kuini,RT 008	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
31	LINHAWATI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bhakti No 38	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
32	TEGUH WIONO	JL.Jend.Sudirman GG.Manggis No 32	2.500.000	2007	2007	100.000	2.400.000	-
33	DARMIWIS YETI	JL.Jend.Sudirman Gg.Bhakti No 84	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
34	YEYEN RIALNI	Jl.Sudirman Gg.DR.Wahidin NO 18	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
35	INDRA YUSRIANTO	Jl.Sudirman Gg.Manggis NO 36	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
36	INONG FITRIANI	JL.Baru NO 01	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
37	ERNIATI	JL Sudirnam GG.damai no. 4	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
38	ROSMADAR	JL.Baru NO 5 RT 010	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
39	SAHARMEN	Jl.Sukajadi Gg.satria LR.Ubudiyah No.78	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	500.000
40	TAHER	JL.Paris NO 25 RT 020	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
41	AYUSMAN	JL.Bintan GG.pustaka RT 009	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
42	MARGONO	JL.Bintan GG.Seroja NO 06 RT 008	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
43	NASRIL	Jl.Sukajadi Gg.Paris NO 45 RT 020	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
44	JAMALUDDIN	Jl.Sukajadi Gg.Paris NO 35 RT 020	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
45	YUSDAR	JL.sukajadi Gg.Paris	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
46	NASRIL	JL.sukajadi Gg.Paris No 21 RT 020	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
47	MARDIALIS	JL.Bintan Gg pusaka NO 20 RT 009	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
48	YULIA NELFITA	JL.Bintan Gg.sambu No 05RT 004	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
49	NET	JL.Bintan Gg pusaka RT 009	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
50	MARJOHAN	JL.Bintan Gg ubudiyah	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
51	YURNALIS	JL.Bintan Gg pusaka no 22 Rt 009	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
52	LOKITA EKA. P	Jl.Bintan Gg.Ampera NO 26 RT 001	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
53	AGUSTI JOHAN	Jl.Bintan Gg.ubudiyahn NO 51	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
54	SITI CHODIJAH	GG.sempurna RT 002	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
55	KAMAN	Jl.bintan Gg permai RT 017	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
56	BAHARUDDIN	Jl.bintan Gg permai RT 017	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
57	RUDI WANTORO	Jl.Sukajadi Gg.Damai NO 08 RT 002	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
58	BAKRI	Jl.sukajadi Gg.Bali NO 354	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
59	ALI MANTO	JL.Sukajadi Gg.semangka Rt 020	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
60	DEDI MUSWARDI	JL.Sukajadi Gg.satria RT 012	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
61	SUJIONO	JL.sukajadi GG bali RT 006	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
62	JASRI	Jl.Baru Gg.Muttaqin No 19 RT 015	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
63	JIMRUS	JL.Pauhjaya No 22	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
64	ARFA NATALIA. P	Jl.Cendana Rt 011	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000
65	WAGINO	JL.Muslim No 20 Rt 020	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
66	DAVID.S	Gg.rantau No 64 rt 014	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
67	SUBANDI	JL.Kusuma Gg rantau NO 02 Rt 014	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
68	MULYANI	JL.Kusuma No 64 RT 014	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
69	SYAHRUDI	JL.Kusuma No 54 RT 014	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
70	RUBIAH	JL.Kusuma Gg plamboyan No 23	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
71	ASMAWIRDA	JL.Kusuma No 46 RT 002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
72	TETI IRAWATY	JL.Plamboyan No 20 C	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
73	TIARMAYA	Jl.kusuma Gg Huller No 2 RT 020	2.500.000	2007	2007	400.000	2.100.000	400.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
74	SAWITRI	Gg bima sakti No 01 Rt 003	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
75	YETTI MELLI	JL.Budi kemuliaan	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
76	EMBUT	JL.pauh jaya Gg.mutiara No.08 A	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
77	JAENAL KHUSIDIN	JL.Cendana No 510	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
78	HEIMIYAH ROTONGA	JL Pamboyan Rt 002	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
79	GUSMIERIVA	JL. Sultan Syarif Kasim Gg. Taufik No. 19	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
80	RIDUAN	JL. Sudirman Gg. Sentosa No.21 RT.001	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
81	SULASTRI	JL.Cemara Gg.Akasia No.85 Rt.001	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
82	DASRIZAL	JL.Sudirman Gg.Muslimin No.241	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
83	HUSNA	JL.Sudirman Gg.Sentosa No.29 Rt.001	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
84	SUDIRMAN	JL.Cemara No.106 Rt.001	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
85	YURNALIS	JL.Perjuangan Rt.002	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
86	DESNIWATI	JL.Sudirman Gg.Mulia No.05 Rt.002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
87	BETRI MAIFAL	Gg.Sadar Rt.003	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
88	ATUN	JL Sudirman Gg.Srilanggam No.56	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
89	MARADU HUTASOIT	JL.Suwardaya No.17 Rt.006	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
90	SURIANI	JL.Sejahtera No.39 Rt.006	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
91	RAFLIS	JL.Terikat Gg.binjai RT.008	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
92	NURAINI	JL.Terikat GG.Bersemai RT.008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
93	RATNA	JL.Terikat Gg.Binjai No.21 rt.008	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
94	INGGA	JL.Terikat Gg.binjai RT.008	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
95	ANDI SETIAWAN	JL.Sudirman Gg.Terikat RT.008	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
96	DERMAN	JL.Terikat Gg.binjai RT.008	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
97	YUHENDRI	JL.Sudirman Gg.Terikat RT.008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
98	MUJIANO	JL.Sisimangaraja RT.009	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
99	NELMAWATI	JL.Sutomo Gg.Panam Jaya RT.009	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
100	ZANIDAR	JL.Sutomo Gg.Panam Jaya RT.010	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
101	NELFITRI	JL.Sudirman Gg.Mulia RT.010	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
102	SADDIAH	JL.Sisimangaraja KP.Baru II No.39	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
103	ERIZAL	JL.Sisimangaraja Rt.011	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
104	HELMI N	JL. KP. Baru II No 89 RT.011	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
105	JONAI	JL. KP. Baru II No 54 RT.011	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
106	RICO N	JL.Sisimangaraja KP.Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
107	BENY HENDRICAL	KP. Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
108	MURNIATI	Gg. KP. Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
109	ISMAIL	JL.Sisimangaraja KP.Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
110	YULIAWATY	JL.Cemara Gg.Akasia II RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
111	WAINIS	JL.Cemara Gg. KP Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	400.000	2.100.000	400.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
112	ROSNI DAR	JL. Cemara Gg.KP Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
113	RICKY NELSON	JL.Sudirman Gg.Sadar No 41 RT.011	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000
114	ERNAWATI	JL.Cemara Gg. KP Baru II No 47 RT.011	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
115	ERNAWATI	JL.Cemara Gg. KP Baru II No 122 RT.012	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
116	MUSLIM ST.MUDO	JL.Sisimangaraja Gg.KP Baru II	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
117	NURHAYATI	JL.Cemara No 85 RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
118	RENI SARTIKA	JL.Sisimangaraja Gg.KP Baru II	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
119	NERWATI	JL.Sisimangaraja Gg.KP Baru II	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
120	MARNI	JL.Cemara Gg.Akasia II No 89 RT.011	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
121	IRSAL	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.011	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
122	M. YESRI	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.012	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
123	RISMARITA	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.013	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
124	DESMAR	JL.Cemara Gg.Kp Baru II RT.014	2.500.000	2007	2007	300.000	2.200.000	-
125	DIMA SARI SIREGAR	Gg.Kp Baru I RT.012	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
126	ELMI	JL.Sisimangaraja KP.Baru I No.24	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
127	FARIDA	JL.Air Bersih No.10 RT.015	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
128	NANG DEWI	JL.Kesehatan RT.012	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
129	SARINAH	JL.Air Bersih RT.016	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
130	JUSNIATI	JL.Almubidin Gg.mujahirin No.16 RT.016	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
131	ROMA TAMBA ULI	JL.Air Bersih Gg.Ali Akbar RT.016	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
132	SABARUDDIN	JL.Sudirman Gg.Tabano No.52 RT.022	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
133	DISMAYENI	JL. Perjuangan rt 010	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
134	ELMAYETTI	JL.Perjuangan rt 009	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
135	ABDI NASUTION	Bukit batrem I	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
136	ALI NURDIN HRHP	Bukit batrem rt 009	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
137	INDRA JAYA	JL.Jawa I RT.006	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
138	SYAFRIL	JL.Gunung Merapi No.156 RT.004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
139	MURNI	JL.Gunung Merbabu RT.002	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
140	SAHRIZAL	JL.Gunung Selamat Gg.Kanal No.37	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
141	RIFANI UMAR	JL.Gunung Merapi No.127 RT.009	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
142	AFRIZAL	JL.Siak No.104 rt.005	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
143	RAHMAN	JL.Budi Utomo RT.001	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000
144	JUNIMAR	JL.M.Saleh RT. 001	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
145	AGUSTINA ABAS	JL.Gunung Louser No.11 RT.003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
146	ZULKIPLI EFFENDI	JL. Gunung Selamat No.20 RT.003	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
147	ASRIYATI	JL.Nona No.101 RT. 010	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
148	ARMANIAR ABAS	JL.Gunung Louser No.139 RT.003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
149	EKO SETIA BUDI	JL.Gunung Selamat RT.004	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
150	AHMAD SUWANDI	JL.Gunung Seulawah Gg.Kerinci RT.005	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
151	JAMIAH	JL.Gunung Louser Gg.Merapi	2.500.000	2007	2007	300.000	2.200.000	-
152	ROHANI	JL.Gunung Louser Gg.Merapi	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
153	SARIFAH AINI	JL.Gunung Louser Gg.Merapi RT.03	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
154	RUZITA	JL.Gunung Louser Gg.Merapi RT.006	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
155	ROFEAH	JL.Jawa	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000
156	ELI IRMA	JL.Nona Gg.Celincing RT.006	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
157	GEMPUR ARIADI	JL.Gunung Selamat RT.004	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
158	ERKASMI	JL.Gunung Selamat No.235 RT.004	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
159	SAHRIAL	JL.Nona RT.11	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
160	AZMIYATI	JL.Gunung Merapi No 1 RT.010	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
161	RUSDianto	JL.Gunung Seulawah Gg.Kerinci No.03	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
162	DARWIZAR	JL.Gunung Selamat Gg.Sentosa RT.004	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
163	RASMANI	JL.Gunung Louser Gg.Merpati RT.006	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
164	MURWATI	JL.Gunung Selamat	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
165	WAN SAMSIDAR	JL.Tenaga No.155 RT.003	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
166	ABD.GAFAR	JL.Cempaka Gg.Kemuning RT.012	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
167	WAN ZAITUN	JL.Tenaga Gg.Tenaga RT.004	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
168	AZWAR ST.PRAPATIH	JL.Dtk Laksamana No.114 RT.012	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
169	MARLIS	JL.Tenaga Gg.Tenaga No.73 RT.004	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
170	SY. TATI FITRI	JL.Kamboja Gg.Saudara RT.015	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
171	DEDEH HERLAWATI	JL.Teratai N0.02	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
172	YURMAN	JL.Kamboja Gg.Lumba-Lumba No.38	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
173	HASFURIYAH		2.500.000	2017	2017	-	2.500.000	-
174	M.NASRUL IBRAHIM	JL.Kamboja Gg.saudara No.68 RT.015	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
175	TENGGU MARWATI	JL.Kamboja Gg.Saudara RT.015	2.500.000	2007	2007		2.500.000	-
176	SARIFAH MURNI	JL.Kamboja Gg.saudara No.24 RT.015	2.500.000	2007	2007		2.500.000	-
177	SUMARNI	JL.sliwangi No.20 RT 011	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
178	KAMARUDDIN	JL.Tanjung sari Gg.Baru	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
179	AHMAD DAHLAN	JL.bangun Sari RT 004	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000
180	MARYANI	JL.bangun Sari No 084 , RT 005	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
181	SYAPRUARDI	JL.Sebayak No.21,RT 001	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
182	RAMLAH	Jl.tanjung sari rt 005	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
183	EDWAR FRANS. G	JL. Siliwangi gg kemuning rt 008	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
184	SITI RONA NASUTION	JL.Bukit Datuk lama no 37 B	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
185	RATNA WILIS	JL.Raya Bukit datuk rt 002	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
186	SUKARTI	JL.Bukit Datuk lama gg teladan II no 53	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
187	ERMIWATI	JL.Marlan jaya rt 010	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
188	YOYCE GRETHA	JL.Marlan jaya rt 011	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
189	MAYLI EFRIZAN	JL.Tunas muda	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
190	NURMA	JL. Raya Bukit Datuk no.17 rt	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
191	RINALDO	JL.Bukit Datuk Lama gg.murni no.7	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
192	NURMADIAH	JL. Bukit Datuk Lama (jl.simp.mesjid)	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
193	INDO NAS	JL.Pulau Payung gg.Spirok,rt 005	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
194	HALIMAH	JL.Tega lega gg bhakti,rt006	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
195	BOYATIN	JL.Pulau Payung gg industri,rt007	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
196	RONO SAMSUL B	JL.Pesantren km.04 rt 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	1.700.000	500.000
197	MAHDALENI	BTN Bumi dumai baru C2,NO18	2.500.000	2007	2007	800.000	-	500.000
198	SUKAPTI	JL.Bangun jinawi	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
199	ZUBAIDAH	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
200	RAMLAN	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
201	YUSPI	JL.Cendrawasih gg jawa rt 007	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
202	SUHERMAN	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
203	AISYAH	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000
204	MISRATUN	JL.Cendrawasih No 26B rt 003	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
205	YUSNIDAR	JL.Rajawali rt 003	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
206	SAYED ABD KADIR	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
207	ABDUL WAHAB	JL.Cendrawasih gg jawa rt 007	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
208	RAZALI	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
209	ANGGA DEWANTARA	JL.Cendrawasih rt 003	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
210	ZALITA	JL.Merak rt 003	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
211	ENI SRI WAHYUNI	JL.Cendrawasih gg jawa rt 006	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
212	SYARIPAH	JL.Budi kemuliaan rt 001	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
213	LENI MARLINA	JL.Cendrawasih rt 001	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
214	ALI HASAN	JL.Nelayan laut gg senangin rt 005	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
215	SYAFRIANI	JL.Nelayan laut gg senangin rt 006	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
216	HANUM	JL.Nelayan laut gg teluk pauh	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
217	NURIMAH	JL.Nelayan laut gg senangin rt 008	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
218	ANDI ARWANDA	JL.Benteng gg kubu, rt 007	2.500.000	2007	2007	200.000	2.300.000	-
219	ANDI ERIANTO	JL.Benteng rt 008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
220	NURHAYATI YUNUS	JL.Teladan No 52,rt 008	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
221	M. EFENDI	JL.Teduh	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
222	ISA HANSORI LUBIS	JL.Siak pasar Rt 009	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
223	SUTARTIK	JL.Nelayan darat gg turi No.01 A	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000
224	RISNAWATI	JL.Bengkalis gg bayangkara rt 012	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000
225	FADLUL MUHSIN	JL.Dermaga gg baruna rt 009	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
226	YUSNELI	JL.Dr.wahidin gg pangeran rt 015	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
227	IDRUS FADLLY	JL.Melur Rt 008	2.500.000	2007	2007	2.400.000	100.000	500.000
228	SRINGATIN	JL.Raja ali haji rt 023	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
229	SARILA	JL.Daeng taugik Gg putri rt009	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
230	RASMI	JL.RAJA ALI HAJI Rt 023	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
231	ZAINUN	JL.Bahagia rt 011	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000
232	CHOIRUDDIN LUBIS	JL.Rindu laut rt 020	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
233	SUMIATIN	JL.Dr.wahidin Rt 001	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
234	IRIANTO	JL.Prof.M.yamin Rt 017	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
235	ROKIAH	JL.Kenanga rt 011	2.500.000	2007	2007		2.500.000	-
236	PARTIK	JL.Raja ali haji rt 021	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
237	ROJIAH	JL.Meranti gg rambutan rt 011	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
238	DARWISAH	JL.Sadar rt 006	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
239	DALISMA	JL.Dock yard gg durian l,rt 013	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
240	RUSLAN	JL.Dock yard Gg hasanah rt 005	2.500.000	2007	2007	700.000	1.800.000	500.000
241	HAMIDAH	JL.Pkl.sena No 28	2.500.000	2007	2007	1.600.000	900.000	500.000
242	SOGINEM	JL.Pkl.sena gg sekar	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
243	JULIANA YAFISMI	JL.Budi dharma rt 010	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
244	KAHARMAN	JL.Harapan rt 007	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
245	ABDUL KARIM	JL.Parit pisang mas rt 007	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
246	RAMLI	JL.Parit sadak no 41	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
247	ASMAIHINNI	JL.Utama(jl harapan0rt 008	2.500.000	2007	2007	200.000	2.300.000	200.000
248	NURIZAM	JL.Sri kembar rt 001	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
249	JAMIN	JL.Sukajadi gg hidayat rt 017	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
250	HADI CANDARA	JL.Budi kemuliaan rt 001	2.500.000	2007	2007	2.000.000	500.000	500.000
251	LASTRI	JL.Budi kemuliaan gg kedondong	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
252	YUL MASRI	JL.Ombak gg buntu rt 019	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
253	FIRDAUS	JL.Budi kemuliaan No 111 rt 005	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
254	YARNI	JL.Kelapa no 26 rt 001	2.500.000	2007	2007	1.200.000	1.300.000	500.000
255	TENGGU RIZAWATI	JL.Rambutan no 8	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
256	JASNELI	JL.Kelapa no 47 rt 002	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
257	ALI YASAR	JL.Dock yard gg gambir,rt 006	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
258	ASNIZAR	JL. sei teras gg bahagia	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
259	HAMIDAH	JL. sei teras gg bahagia no 10	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
260	AMZANI	JL. sei teras gg bahagia no 10	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
261	DASRIAL	JL. sei teras gg mutiara	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
262	ABDUL HAKIM LUBIS	JL. sei Teras gg delta no 03	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
263	LEGIAT	JL.Impres l rt 018	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
264	MALIKI	Gg sahabat rt 018	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
265	RAFEAH	RT.021	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
266	SUKIMAN	JL. panam rt 017	2.500.000	2007	2007	300.000	2.200.000	-
267	SUHARI	JL. panam rt 018	2.500.000	2007	2007	2.100.000	400.000	500.000
268	YUSUF BAKO	JL. Dumai-Duri gg serasi rt 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
269	ISTIONO	JL .Panam rt 009	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	-
270	SITI UMINATURROHMAH	JL .suka jadi rt011	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
271	M.YUSUF	JL .Pendidikan RT. 004	2.500.000	2007	2007	1.000.000	1.500.000	500.000
272	PONIRAN	JL .Martaram RT. 003	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
273	SUKATMI	JL .Agenda RT 005	2.500.000	2007	2007	1.500.000	1.000.000	500.000
274	NAZRA HELMASARI	JL .Agenda RT. 006	2.500.000	2007	2007	800.000	1.700.000	500.000
275	MISINEM	Bukit Nenas RT. 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
276	SUWARTINI	JL .Dumai-Duri RT. 002	2.500.000	2007	2007	900.000	1.600.000	500.000
277	DAHLIANA	JL . Agenda RT . 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
278	YANTO	JL .Garuda	2.500.000	2007	2007	100.000	2.400.000	-
279	BAKRI	JL .Raya PU RT. 006	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
280	ERLINDA	Mampu Jaya RT. 022	2.500.000	2007	2007	1.400.000	1.100.000	500.000
281	RAHMAT SUNARYA	JL .Utama RT. 007	2.500.000	2007	2007	2.200.000	300.000	500.000
282	SAWIYEM	JL .SMU mampu jaya RT. 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
283	SUEP	JL .SMU mampu jaya RT. 003	2.500.000	2007	2007	1.900.000	600.000	500.000
284	DIANA LAFITA	JL. Dumia-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
285	YULINAR	JL. Dumia-sei pakning RT. 005	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
286	SAZALI	JL. Mattaim RT. 004	2.500.000	2007	2007	500.000	2.000.000	500.000
287	NIAR	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
288	KAMARUDIN	JL. Masjid RT. 005	2.500.000	2007	2007	1.700.000	800.000	500.000
289	ROBIYAH	JL. Mattaim RT. 004	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
290	SUTIYAH	Selinsing RT. 011	2.500.000	2007	2007	1.800.000	700.000	500.000
291	KHAIRUL A	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
292	YUSNIWATI	Jl .HM.sidik	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
293	AMRIL	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
294	JAMAAN	JL. Dumai-sei pakning RT. 004	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
295	MUHAMAD YUSUF	Jl .lestari rt 002	2.500.000	2007	2007	600.000	1.900.000	500.000
296	JUMINGAN	JL. Dumai-sei pakning RT.001	2.500.000	2007	2007	1.100.000	1.400.000	500.000
297	TUMIJAH	JL. Sidomulyo RT .004	2.500.000	2007	2007	1.300.000	1.200.000	500.000
298	MATDIO CANDRA	JL .Lestari RT .002	2.500.000	2007	2007	2.500.000	-	500.000
299	DULAS SIREGAR	JL. Dumai-sei pakning RT. 003	2.500.000	2007	2007	-	2.500.000	-
300	BASRI	JL. Mangga Gg.Mangga No.3-C	2.500.000	2007	2007	2.300.000	200.000	500.000
JUMLAH			750.000.000			388.500.000	361.500.000	120.000.000

**DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR
DINAS PERDAGANGAN PERIODE 2008**

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
1	ALAM SURI	JL.SABAR MENANTI GG.PERWIRA	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
2	ALI AMRAN	JL.MERAK	2.500.000	2008	2008	1.100.000	1.400.000	500.000
3	ALIN	JL.BUDI KEMULIAN GG.KEDABU	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	0
4	ALI TASAR	JL.TENAGA GG.TALO	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
5	ALJUMALIS	JLTENAGA NO.1	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
6	AMALI	JL.CENDRAWASIH GG.JAWA	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
7	AMINAH	JL.TENAGA NO.4	2.500.000	2008	2008	0	2.500.000	500.000
8	ANCUN	GG.MAWAR	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000
9	ANEM	JL.NURI	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
10	ANDRI	JL.SEI TERAS GG.KENARI	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
11	ANITA	JL.JAWA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
12	ASFAR	JL.TEDUH GG.SEJAGAT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
13	ASRAL	JL.TENGGU AKBAR NO 02	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
14	ASEP NURDIN	JL.SEI.TERAS	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
15	AZIZMAR	JL.H.WURUK GG.KARYA I NO.373	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
16	AZRANEDI	JL.PERWIRA NO.20 A	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
17	AZIZAH	JL.MERDEWKA GG.RAHMAN	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
18	AZMAN	JL.BIMA SAKTI GG.AN-NUR	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
19	AGUS NALDI	JL.RAYA KM.09	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
20	ARLEN	JL.BUDI KEMULIAN GG.KEDABU	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
21	ABAS	JL.SENTOSA NO.09	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
22	A.KADIR	JL.PUNAK GG.IKHLAS	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
23	ABU KASIM	JL.BUDI KEMULIAAN NO 115	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
24	ADRI	JL.TENAGA GG.TULANG NO 27	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
25	ACH.SUPARNO	JL.PEMUDA NO.03	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
26	AFMAWATI	JL.JEND.SUDIRMAN GG.SADAR	2.500.000	2008	2008	1.500.000	1.000.000	500.000
27	AFNAL	JL.ARIFIN AHMAD GG.AL-AMIN NO.20	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
28	AFRIDA	JL.BUDI KEMULIAN NO.25	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
29	AHMAD DENIS	JL.PARIS	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
30	BUDI HARTONO	JL.BUKIT DATUK LAMA GG.MAKMUR	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
31	BAINAR	JL.JEND.SUDIRMAN GG SADAR NO 23	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
32	BUSRAK	JL.BINJAI II	2.500.000	2008	2008	0	2.500.000	500.000
33	BOIRAN	JL.GARUDA GG TAMBUSAI NO 433	2.500.000	2008	2008	0	2.500.000	500.000
34	BUSRI	JL.BUDI KEMULIAAN GG KEDABU NO 02	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
35	BUDIMAN	JL.KESUMA GG SENTUL NO 307	2.500.000	2008	2008	1.400.000	1.100.000	500.000
36	DESI SUSANTI	JL.TUNAS MUDA NO 08	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
37	DARLIS	JL.RAYA BUKIT DATUKK GG ANUGRAH	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
38	DARIMAN	JL.SIMP BUKIT DATUK	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
39	DARMA KUSUMA	JL.CENDAWASIH	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
40	DESNI ELFIRA	JL.BUDI KEMULIAAN GG KEDONDONG	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	0
41	DARNIS	JL.JEND.SUDIRMAN GG RAHMAT	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000
42	DEDE AWAN	JL.RAYA KM 08	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
43	DEWI RATINA	JL.CEMPEDAK GG KELAPA NO 3 B	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	0
44	DOLMAT JOHAR	JL.BEREMBANG GG KELAPA NO 14	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
45	DONA SINTA	JL.CEMPEDAK GG KELAPA NO 133	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
46	DAPUTUA PASARIBU	JL.PULAU PAYUNG GG DANAU TOBA	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
47	EDI GADI	JL.BUDI KEMULIAAN/PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
48	ERDINAL	JL.RAYA KM 09	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
49	ERMAWATI	JL.PANG.DIPENEGORO GG PALA NO 02 A	2.500.000	2008	2008	1.400.000	1.100.000	500.000
50	EDI SUSRISMANTO	JL.KESUMA GG SENTUL NO 30	2.500.000	2008	2008	200.000	2.300.000	500.000
51	EDI TIAWARMAN	GG DUKU	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
52	ERWAN	JL.KELAPA 3	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
53	ERNA WATI	JL.RAJAWALI NO 19	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
54	EDI SUWIRMAN	JL.JEND.SUDIRMAN GG SADAR NO 84	2.500.000	2008	2008	800.000	1.700.000	500.000
55	ENDRI	JL.BUDI KEMULIAAN	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
56	EDI SUSANTO	JL.DERMAGA LAUT	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
57	ELI FITRIYENI	JL.GARUDA NO 22	2.500.000	2008	2008	1.000.000	1.500.000	500.000
58	ENDESMAN EFENDI	JL.JANUR KUNING GG ALAMIN NO 20	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
59	EDI ISMANTO	JL.RAJAWALI RT 02	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
60	FATIMAH	JL.CEMPEDAK GG.KELAPA SAWIT NO.22	2.500.000	2008	2008	900.000	1.600.000	500.000
61	FIKAL	JL.CENDAWASIH GG JAWA	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
62	FITRI MAYENI	JL TAKARI GG MULYA	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
63	HENDRI	JL.KASWARI UJUNG	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
64	HARMAN	JL.AHMAD DAHLAN	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
65	HENDRA WARMAN	JL.JANUR KUNING GG IKHLAS	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
66	HASAN NASUTION	JL.BUDIKEMULIAAN NO 03	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
67	HARUN HASANI	JL.RAJAWALI	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
68	HERMANTO	JL BUDI KEMULIAAN	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
69	HASAN	JL.RAYA KP.TENGAH	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
70	HENDON H SYAM	JL.RAJAWALI	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
71	HUSNIMAR	JL.SIMPANG TETAP	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
72	HASBULLA	GG.PARIS NO 14	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
73	HERIYANTO	JL.BANGUN SARI	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
74	HALIMAH	JL.TANJUNG JAYA	2.500.000	2008	2008	700.000	1.800.000	500.000
75	INDRA PRAYOGA	JL.BEREMBANG GG KELAPA	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
76	INDAH	JL.SEI.TERAS	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
77	IDRIS	JL.MELUR	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
78	IDAL	JL.CENDRAWASIH GG.JAWA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
79	IKAL	JL.BUDI KEMULIAN PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
80	ISMENDRI	JL.MERANTI GG.MAHONI NO. 16	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000
81	ISKANDAR DINATA	JL.WISMA AJI	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
82	JASMAN	JL.BINTAN GG.BARAT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
83	JUNEDI	JL.MUSLIM	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
84	JAMALIS	JL SUKAJADI GG PALA NO 08	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000
85	JUNETTI	JL.TEDUH GG.SEJAGAT	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
86	JONI KASMET	JL.DERMAGA DARAT	2.500.000	2008	2008	1.400.000	1.100.000	500.000
87	JAMILUS	JL.RAYA BUKIT DATUK	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
88	JETMULIADI	JL.MERANTI II GG.MERPATI	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
89	KARDIO ZALOGO	JL.BUDI KEMULIAAN GG KELAPA	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
90	KATYO	JL.PATTIMURA GG.JAWA	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
91	KATIMAH	JL.BANGUN SARI	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
92	LISMAR	JL HANGTUAH GG KARYA I	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000
93	LELA RAHMAWATI	JL.BELIMBING GG BINJAI I	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
94	LUKMAN	JL.RAYA KM.09	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
95	M.YUNAN	JL.CENDAWASIH GG JAWA	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
96	N.ANTON DERMAWAN B	JL.T.AKBAR NO 01	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
97	MHD.YUSUF	JL.BELIMBING GG BINJAI II	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
98	MURNIATY	JL.RAYA KM 7,5 NO 03	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
99	MUNJIAH	JL.SEI.TERAS	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
100	MARATUANA HARAHAHAP	JL.SEI.TERAS	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
101	MUSLIM	JL.PROF.M.YAMIN GG BEREMBANG	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
102	M.KARIMIN	GG.KELAPA	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
103	MUHAMMAD YAZID	JL.CEMPEDAK	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000
104	MUHAMMAD QOSIM	JL.SEI.TERAS GG DELTA	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
105	MARA PAHU SIREGAR	JL.SEI.TERAS	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
106	MASRI SUSANTO	JL.BELIMBING GG BINJAI	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
107	MUJUR NAINGGOLAN	JL.BUKIT DATUK LAMA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
108	MUHAMMAD ARIFIN	JL.ANGGUR	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
109	MASWALDI	JL.MERANTI 02 GG CENDANA	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
110	MANSUR	JL.RAJA ALI HAJI GG ANUGRAH	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
111	MARLIS	JL.BANGUN SARI	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
112	MUHAMMAD ISHAK	JL.CEMPEDAK GG FITRAH NO 02	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
113	MAIZAR	JL.BEREMBANG GG KELAPA NO 11	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
114	MISNAWATI	JL.SUNAN KALIJAGA GG CEMARA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
115	MARIAM	JL.GADJAH MADA NO 01	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000
116	MARDINUS	JL.JL.BUDI KEMULIAN /PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
117	MARIDI	JL.RAJA ALI HAJI GG SADAM	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000
118	MAIMUNAH C/Q SYAMSIDAR	JL.SUKAJADI GG PALA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
119	MEGAWATI SITOMPUL	JL.SEI.TERAS	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
120	M.ARIS	JL.RAJAWALI	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
121	MAHADI	JL.CENDAWASIH UJUNG	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
122	MARDI	JL.BINTAN GG.PARIS	2.500.000	2008	2008	1.000.000	1.500.000	500.000
123	MIRAWATI	JL.PARIT PISANG MAS	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
124	M.YUSUF TONGAH	JL.CENDANA GG SEPAKAT	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
125	MASRAINI	JL.DATUK LAKSAMANA	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
126	NURJANAH	JL.BUDI KEMULIAN	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
127	NURJANNAH	JL.CEMPEDAK NO.01	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
128	NASRIZAL	JL.JANUR KUNING GG IKHLAS	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
129	NURMADIAH	JL.RAYA BUKIT DATUK GG ASMAT	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
130	ROSDIANA	JL.DAENG TAUGEK GG.PUTRI	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
131	RENI TRIANA	JL.BUDI KEMULIAN NO.27	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
132	RUKIAH	JL.TEDUH	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
133	REFIAN ZULFI	JL.SEI TERAS	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
134	RUDI SATRIA	JL.SEI TERAS GG.DELTA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
135	RAHMAD GULTOM	JL.TEDUH GG.SEJANGAT	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000
136	RIANDI	JL.RAJAWALI	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
137	ROHANI	JL.BEREMBANG	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
138	ROSLAN	JL.RAYA KM.7,5	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
139	RAHMAN	JL.BAHTERA	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
140	ROSMANIAR	JL.GAJAH MADA GG.SURAU	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
141	ROSMERI	JL.BEREMBANG	2.500.000	2008	2008	1.100.000	1.400.000	500.000
142	RUSLAN	JL.KELAPA GG.KAPAS	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	500.000
143	RABA 'ANI	JL.JEND.SUDIRMAN GG.KARYA I	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
144	RAFLIS	JL.BUDI KEMULIAN /PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
145	RUSMAINI	JL.DR.WAHIDIN NO.51	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
146	RIKDUAN	JL.TERATAI GG.DEWA	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
147	RUSLI	JL.PUNAK NO.80	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
148	SABARYATI	JL.SUKAJADI GG.PALA NO.02	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000
149	SARUDIN	JL.RAYA KM.9	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
150	SAMSUL HADI	JL.BELIMBING GG.BINJAI II	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
151	SUDIRMAN	JL.RAYA KM.08	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
152	SUGIONO	JL.ARJUNA	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
153	SYAFRIADI	J.RAYA KM.10	2.500.000	2008	2008	1.800.000	700.000	0
154	SUHARDI	JL.BANGUN SARI	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
155	SUDIRMAN	JL.JEND .SUDIRMAN GG.PASAR BARU	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
156	SYAHRAL	JL.TENAGA	2.500.000	2008	2008	400.000	2.100.000	500.000
157	SUPRASTYO	JL.SULTAN SYARIF KASIM GG.TAUFIK NO.20	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	0
158	SYAFRIADI	JL.BEREMBANG GG.KELAPA	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
159	SYAFRI	JL.BINTAN GG.PARIS 1	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
160	SITI MUNAWAROH	JL.PERJUANGAN	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
161	SIMAN	JL.SIMPAN STIK NO.10	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000
162	SEPRIANI	JL.BUDI KEMULIAN GG.KEDABU NO.03 C	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
163	SABRINA TIANO	JL.TEDUH GG.H.MALIK	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000
164	SARNO S	JL.RAJAWALI	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
165	SUARDI	JL.BUDI KEMULIAN	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000
166	SAPARIS	JL.CENDRAWASIH GG.JAWA	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
167	SOFIYAN	JL.KUSUMA GG.RANTAU	2.500.000	2008	2008	1.400.000	1.100.000	500.000
168	SYAFUDIN	JL.CENDRAWASIH	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
169	SUDIRMAN LINTANG	JL.RAYA BUKIT DATUK GG.SELAMAT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
170	SYARIPUDIN	JL.BUKIT DATUK GG.TELADAN N0.32	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
171	SITI KAERANI	JL.MERANTI II GG.FLAMBOYAN	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
172	SAYMSUDIN	JL.TENAGA GG.TALO	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
173	SUARDI	JL.JAWA II	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
174	SYAHRAL	JL.CENDRAWASIH GG.JAWA	2.500.000	2008	2008	2.000.000	500.000	500.000
175	SAMSILUS	JL.BUDI KEMULIAN /PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
176	SORITUA PULUNGAN	JL.BANGUN SARI	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
177	TUSRINA	JL.OMBAK GG.MURNI 1	2.500.000	2008	2008	1.000.000	1.500.000	500.000
178	TONI HELFIS	JL.BINTAN GG.ASNAR	2.500.000	2008	2008	1.300.000	1.200.000	500.000
179	TUKIEM	JL.LEPIN	2.500.000	2008	2008	1.500.000	1.000.000	500.000
180	UMAR SEMAN	JL.GAJAH MADA GG.SURAU NO.18	2.500.000	2008	2008	1.600.000	900.000	500.000
181	UPIK	JL.BUDI KEMULIAN/ PETAK PANJANG	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
182	UMAR	JL.RAYA KM.10	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000

No	Nama Debitur	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Jumlah Tertunggak	Jumlah Pembayaran	Dana Blokir
				Awal Tahun	s/d			
183	UZNI AFZANI	JL.CEMPEDAK GG.KELAPA NO.133 A	2.500.000	2008	2008	1.700.000	800.000	500.000
184	VIVI INDRIANI / INDRA G	JL.JEND.SUDIRMAN GG.JAMBU	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	0
185	WAN NURZANI	JL.TUNAS MUDA NO 10	2.500.000	2008	2008	500.000	2.000.000	500.000
186	WAHYU	JL.BELIMBING GG.BINJAI 2 NO 03	2.500.000	2008	2008	2.300.000	200.000	500.000
187	WAHYU	JL.RAYA KM .05	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
188	YUSNIDAR	JL.BUDI KEMULIAN	2.500.000	2008	2008	2.100.000	400.000	500.000
189	YURIZAL	JL.BUDI KEMULIAAN NO.70	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
190	YULIARTI	JL.KASWARI UJUNG	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
191	YOSSE RIZAL	JL.HANG TUAH GG.KARYA 1 NO.28	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
192	ZAIMAR	JL.BEREMBANG GG.KELAPA	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
193	ZAIDIN	JL.DR.WAHIDIN	2.500.000	2008	2008	1.900.000	600.000	500.000
194	PONIJAN	JL.TEDUH GG.CENGAL	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
195	ZULPAHMI	JL.JEND.SUDIRMAN GG.KARYA 1	2.500.000	2008	2008	2.500.000	0	500.000
196	ZULFITRI	JL.BINTAN GG.DARAT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
197	ZAINURI	JL.H.A.A GG.ADEM AYEM NO.01	2.500.000	2008	2008	900.000	1.600.000	-
198	ZAINUDDIN	JL.DERMAGA LAUT	2.500.000	2008	2008	2.400.000	100.000	500.000
199	ZAINUDDIN H	JL.ARIFIN AHMAD	2.500.000	2008	2008	1.400.000	1.100.000	500.000
200	ZA HAR	JL.JANUR KUNING GG.IKHLAS	2.500.000	2008	2008	2.200.000	300.000	500.000
JUMLAH			500.000.000			399.900.000	100.100.000	96.500.000
JUMLAH 2007 DAN 2008			1.250.000.000			788.400.000	461.600.000	216.500.000
SISA YANG PENYALURAN								571.900.000

**DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN
UKM TAHUN 2007
FASILITASI PENGEMBANGAN UKM KELUARGA MISKIN**

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
1	ABD. BASID	Jl. Inpres II Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
2	ABD. RAHMAN. HSB	Jl. Gajah Mada No.125	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 400.000
3	ABDULLAH	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
4	ABDURAHMAN	Gg. Family Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
5	ABU SALIM	Jl. Siliwangi	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
6	AGUS SALIM	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
7	AMIRUDIN	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
8	AMNAH	Jl. Bukit Datuk Lama No.23 A	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 900.000
9	ANAN	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bunga I No. 31	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
10	ASLAMIA	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Anugrah	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
11	BAHAR	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
12	BENNY RAHMAN	Jl. Bintang Gg. Asnar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
13	BIL THAHER	Jl. Hayam Wuruk No. 35 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 500.000
14	BOHARTI	Jl. Gajah Mada Gg. Rimija	Rp 2.500.000	2007	-	Rp 2.000.000
15	BUSTAMI	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	-	Rp 2.000.000
16	CHADIJAH	Jl. Gajah Mada No.68	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
17	DAHLIAR	Jl. Gajah Mada Gg. Ikhsan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
18	DARUSIN	Jl. Pasar Pulau Payung Gg. Sapirok	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
19	DASWIR	Jl. Hang Tuah No. 4 B	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
20	DAYURNI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No.299	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
21	DEWATI HUTASUHUT	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurnia	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
22	DIMAN	Jl. Gajah Mada No.55	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
23	EDI SURANTO	Jl. Gajah Mada	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
24	ERMANTO	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3 No.13	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
25	FARIDA	Jl. Jend Sudirman Gg. Bakti No.110	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 900.000
26	FATURRAHMAN	Jl. Jend Sudirman Gg. Linggasari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
27	INEL ALIMAR	Jl. Jend Sudirman Gg. Damai No. 9	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.000.000
28	HAMDI	Jl. Jend Sudirman Gg. Karya III No. 15	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
29	HANDOYO	Jl. Balai Benih Ikan Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
30	HARUN. M	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
31	Hj. AISYAH USMAN	Jl. Gajah Mada No. 74 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
32	IJAL	Jl. Hayam Wuruk No.24	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
33	ISKANDAR	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
34	JULI	Jl. Teladan Gg. Nurul Amal	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
35	JUNIATUN	Jl. Janur Kuning Gg. Rekening No.7	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
36	KAMISAH	Jl. Gajah Mada Gg. Rimija No.346	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
37	KARMAWI SAHIDIN	Jl. Hang Tuah	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
38	KHAIRUL	Perumnas Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
39	KOK JONG/AYONG	Jl. Gajah Mada No.223	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
40	LANGKIR	Jl. Kesatria No. 45	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
41	LENA	Jl. Hayam Wuruk No. 44	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 480.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
42	M. RUSLAN	Jl. Hang Tuah Gg. Ampera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
43	M. SIDDIK	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3 No. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
44	M. ZAINI	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
45	MARIANI	Jl. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp -
46	MARJOHAN	Jl. Hang Tuah Gg. Pembaharuan No.12	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
47	MARLIS	Jl. Hayam Wuruk	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
48	MARTI	Jl. Gajah Mada No.42	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
49	MASRIL	Jl. Jend. Sudirman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
50	MASRUL	Jl. Pauh Jaya No.41 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
51	METDIA ASRA	Jl. Janur Kuning Gg. Hidayah	Rp 2.500.000	2007	-	Rp 2.000.000
52	MUHAMMAD NUR	Jl. Hang Tuah Gg. Mutiara No.84	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
53	MUIS	Jl.Cendrawasih Gg. Almisak	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
54	MUKHIDIN	Jl. Teladan No. 34 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
55	MURNI	Gg. Linggasari No. 45	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
56	NANI WARDHANI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Bhakti No.92	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
57	NIRDAWATY	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No. 35	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
58	NURAINI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Bakti No. 92	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
59	NURAINI	Gg. Hidayah Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
60	PERLAUNGAN HARAHAP	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
61	RAHMAN	Gg. Kelapa Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
62	RATINAH	Jl. Jend. Sudirman Gg. Linggasari No. 40	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
63	RAZALI	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
64	ROSNAILY	Jl. Kartini No. 25	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
65	RUSLI	Jl. Cendrawasih Ujung	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
66	SARIANI	Gg. Linggasari No. 6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
67	SATIRAN	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
68	SERIK RAHAYU	Jl. Teladan No.42 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
69	SLAMET PRIJONO	Jl. Teladan Gg. Restu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
70	SOLEMAN	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
71	SUHARMI	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan No. 226	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
72	SUHATRIL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Manggis No. 36	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
73	SUMARTI	Jl. Gajah Mada No. 52	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
74	SUNARDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wahidin No. 59	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
75	SUPARJO	Jl. KUD Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
76	SUPIAH	Jl. Gajah Mada No. 233	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
77	SURYONO	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
78	SUWANDI EFFENDI	Jl. Mekarsari RT 02 Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
79	SUYONO	Gg. Family Bagan Besar	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
80	SYAMSIMAR	Jl. Cempedak Gg. Kelapa No.133 C	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
81	SYAMSU RIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg.Wahidin No. 14	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.100.000
82	SYARIFAH	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
83	TAHERMAN	Gg.Weda	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
84	TENGKU RAHMAN	Jl. Cendrawasih Ujung	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
85	TRISNO	Jl. Gajah Mada Gg. H. Marian No. 135	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
86	TUGIMAN/ BIE NGO	Jl. Hayam Wuruk No.68	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
87	TUKIRIN	Jl. Teladan Gg. Restu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
88	WAWAN SUHENDRA	Jl. Bintang Gg. Linggasari No.13	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
89	WENDRI	Jl. Sudirman Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
90	WENDRIZON	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
91	WERMAN	Jl. Hang Tuah No.70 A	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
92	WIDAGDO	Jl. Teladan No. 35 Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
93	YANIDI	Jl. Janur Kuning No. 85	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
94	YASRIL	Gg. Linggasari	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
95	YULI	Jl. Janur Kuning Gg. Iklas No.2	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
96	YULINAR	Jl. Gajah Mada Gg. Surau No. 18	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
97	YULISMA	Gg. Linggasari No. 3	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
98	YUNIWAH HENDRI	Jl. Hang Tuah Gg. Karya 3 No. 17	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
99	ZAITUN	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kedabu No. 6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
100	ZARMAN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Linggasari No. 55	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
101	ZULHERMAN	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kedondong	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
102	ZULKIFLI	Jl. Sudirman Gg. Bakti No. 10	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
103	AGAHON SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
104	AGUS	Jl. Gajah Mada No. 133	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
105	AGUSSALIM HARAHAHAP	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
106	AHMAT HASIM	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
107	AJIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Terikat No. 58	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
108	AKHIRUDDIN BATUBARA	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
109	ALIRMAN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tarikat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
110	ALMAN SYAHPUTRA N	Jl. Bahtera No. 38	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
111	AMIR HUSIN	Jl. Datuk Laksamana No. 28	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
112	ANTHON MIZWAR	Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
113	ASNELFI	Gg. Tapiannauli No.1	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
114	ASNIMAR	Jl. Swadaya Gg. Ratna Sari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
115	AZIZAH	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli No. 22 B	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
116	AZMIYEDI	Jl. Nasional Ujung No. 294	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
117	BALLYAN BATUBARA	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
118	BANDA RAMBE	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurnia	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
119	BASRI	Jl. Jend. Sudirman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
120	DARISMAN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Damai RT.11	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
121	DARWIN MUKHTAR	Jl. S.S. Kasim	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
122	DESMAWATI	Jl. Bintang No.23 A	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
123	EDI	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
124	EDI PUTRA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
125	EDI PUTRA SINAGA	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
126	EDI WARSON	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
127	ELVA RIZA	Jl. Teladan Gg. Muslim Nur	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
128	ERNI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
129	ERNITA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No. 17	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
130	ERSON	Jl. Jend. Sudirman Gg. Maju	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
131	FAJAR	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
132	FETMAWATI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
133	FITRI HERAWATI	Jl. Jend Sudirman Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
134	HADY ISWANTO	Jl. Pendowo Gg. Parit Kesit No. 14	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
135	HARIS YULIANTO	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
136	HENDRA SAPUTRA Z	Jl. Hang Tuah Gg. Lumayan No. 229	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
137	HENDRI YANTO	Jl. Sukajadi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
138	HERMANTO	Jl. Swadaya	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
139	HERU WITOYO	Jl. Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
140	INDAH WAHYUNI	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
141	ISKANDAR	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wahidin No. 60	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
142	ISMAWATI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
143	JASMAN	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
144	JUMIATIN	Jl. Teladan Gg. Nurul Iman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
145	JUNIAR HUTABARAT	Jl. Kesuma Gg. Cengkeh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
146	KHAILIDAR	Jl. Kelakap 7 Comp. BTN ASRI No. G 05	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
147	KOBOL PARDEDE	Jl. Pendowo Gg. Taruli Bkt Batrem	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
148	LAMSIAH	Gg. Bunga	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
149	LISTRIWATI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No. 07	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
150	LUSMAN TAMBI	Jl. Budi Kemuliaan Petak Panjang	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
151	M. YUNUS. M	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
152	MAIYAR	Jl. Linggasari No. 70	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
153	MARIN	Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
154	MARNELI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
155	MASRI	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
156	MAWARDI	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
157	MAYUNI	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
158	MELDA ROSBITA	Jl. Utama Karya Gg. Kesehatan No. 79	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
159	MISMAM	Jl. Cendrawasih	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
160	MUHAMMAD	Jl. Jend. Sudirman	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
161	MUHAMMAD ALI	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Hikmah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
162	MUHAMMAD ASRANI	Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
163	MUJIRAH	Jl. Gajah Mada No. 17	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
164	MURSAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No. 13	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
165	MUSLIM	Jl. Terikat Gg. Tembok	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
166	NANDO	Jl. Bintang Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
167	NASRIL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
168	NAZIRMAN	Jl. Bintang Gg. Damat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
169	NISRAWATI SIREGAR	Jl. Daeng Taugik Gg. Sempurna	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
170	NOFIENDRI	Jl. Kesatria No. 01	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
171	NOVENDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli No. 20 C	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
172	NURDIANA	Gg. Linggasari No. 56	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
173	NURITA SIREGAR	Jl. Kesuma Gg. Melati	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
174	P. PANGGABEAN	Jl. Kesuma, Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
175	PIJAH	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
176	RADINUS	Jl. Terikat Ujung No. 67	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
177	RIDWAN	Jl. Datuk Laksamana No. 49	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
178	RONI CHANDRA PARDEDE	Jl. Siliwangi No. 5	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
179	ROSMANIAR	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
180	RUSLI IBRAHIM	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
181	SAFRUDIN	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
182	SAIFUL ANWAR	Jl. Arifin Ahmad No. 14	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
183	SAJUK TANJUNG	Jl. Kasuari Ujung Jembatan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
184	SARIFUDIN	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
185	SAYUTI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Terikat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
186	SITI LANGGUR SIMAMORA	Jl. Raya Bukit Datuk Lama Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
187	SRI HARYANTI	Jl. Bahtera	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
188	SUARNO	Jl. Kesatria No.13	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
189	SUDIRMAN LINTANG	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
190	SUMI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Damai	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
191	SUPRAPTI	Jl. Baruna Gg. Suar 2	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
192	SYAIFUL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
193	SYARIFUDDIN	Jl. Tapiannauli Gg. Musolla No. 20	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
194	SYULASTRI NASUTION	Jl. Setia Budi	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
195	TAMRIN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
196	TANDO	Jl. Bintang Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
197	TAUFIK PRIANTO	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No. 33	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
198	UMI MELANI	Jl. Gajah Mada Gg. Surau No. 5	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 600.000
199	YUL ASMINA	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
200	YUSMADELI	Jl. Kesuma Gg. Baru No. 7	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
201	YUSWARDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sadar. No. 27	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
202	ZAINAL ABIDIN	Jl. Jend Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
203	ZULFAN ISKANDAR H	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Anugrah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
204	ZULHELMI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 27	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
205	ABBAS	Jl. Budi Dharma	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
206	ABDUL GANI SIMANJUNTAK	Jl. Panca Karya No. 16 RT. 14	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
207	ABDUL KADIR	Jl. Jaya Indah Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
208	ABDUL SYUKUR	Jl. Punak Purnama	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
209	ABDUR RAHMAN	Jl. Jawa Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
210	ALI ANDY HARAHAP	Gg. Satria RT. 12	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
211	ALILUDIN	Jl. Sukajadi Gg. Kartini No. 23	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
212	ALIM S.	Jl. Al-Mubin Ujung	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
213	ALINAFIAH HASIBUAN	Jl. Panca Karya RT 14	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
214	AMIRUDDIN	Jl. Dock Yard Gg. Serai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
215	ANDESPAH MICAN	Jl. Jend Sudirman Gg. Tapiannauli	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
216	ANDINI MARET	Jl. Tapiannauli Gg. Inpress No. 08	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
217	ANIMAR	Jl. Merdeka Baru Gg. Hijrah No. 31	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
218	ARIFIN MANIK	Jl. M. Saleh Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
219	ASIYAH	Jl. Dock Yard Gg. Hasanah No.12 b	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
220	BURHANUDDIN RAMBE	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Ilham No.2	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
221	BUSIRAN	Jl. Jawa Rt. II Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
222	CHARLES BRONSON	Jl. Gunung Bromo Gg. Restu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
223	DONA MARIA	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
224	DUANDA PURNAMA	Jl. Pendowo Gg. Nangka	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
225	EDIZAL	Jl. BTN Asri C-09	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
226	EMA YURTI	Jl. Hang Tuah Gg. Karya II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
227	ENDRIZAL	Jl. Terikat Gg. Pematang	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
228	ERMAN	Jl. Merdeka Baru Gg. Amsal No. 3	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
229	ERMAN	Jl. Panca Karya RT 14	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
230	ERNALIS NASUTION	Jl. Perjuangan Gg. Mandiri	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
231	ERNI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Maju No.20	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
232	ERWIN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
233	HARMADI	Jl. Jawa Gg. Jawa	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
234	HARTATI	Jl. Terikat Ujung	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
235	HARUN	Jl. Dock Yard Gg. Lengkuas	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
236	HELDI	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa I	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
237	HENDRICK. H	Jl. Jawa Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
238	IKRAM ZUCHRA	Jl. Perjuangan No. 10 Bukit Batrem	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
239	INDRAYATI	Jl. Swadaya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
240	ISNO	Jl. Simp. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
241	IWAN EFFENDI	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
242	JAMALUS	Jl. Merdekan Baru Gg. Hijrah No. 140	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
243	JOHAN HARAHAHAP	Jl. Ali Akbar No. 59	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.900.000
244	JUSMANIAR	Jl. Bromo Ujung RT. 12	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
245	KASMIATUN	Jl. Perintis Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
246	KHOLID	Jl. Meranti / Jl. Bintang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
247	LATIFAH	Jl. Janur Kuning Gg. Rekening	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
248	LINA SIREGAR	Jl. Jawa No.03 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
249	M. TAON NASUTION	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
250	M. YUSUP HARAHAHAP	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Ilham	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
251	MAIMUNAH	Jl. Simp. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
252	MARYATI D.	Jl. Bukit Datuk Lama No.57	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
253	MASDELINA RAMBE	Jl. Keluarga RT.09	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 600.000
254	MASRENI	Jl. Baru No. 25	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
255	MASUHERDI	Jl. Nenas No. 39	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
256	MEI SURNI	Jl. Gunung Gg. Satria	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
257	MHD. HUSEIN	Jl. Tenaga Gg. Dahlia	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
258	MOCH ICHSAN	Jl. Merdeka Baru Gg. Ali Akbar No. 23	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
259	MOH. SHOLIKHAN	Jl. Kesuma Gg. Melati No. 101	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 400.000
260	MUHAMMAD BADRUN	Jl. Punak Purnama	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
261	MUHAMMAD DANIEL P	Jl. Ombak Gg. Mulia I No. 28	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
262	MUHAMMAD NURZALI	Jl. M. Saleh Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 2.000.000
263	MUJIATI	Jl. Meranti I Gg. Sempurna	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
264	MUSA	Jl. Dock Yard Gg. Kunyit	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
265	MUSLIMAH	Jl. Pemuda Darat 03	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
266	MUSTAFA KAMAL	Jl. Merdeka Baru Gg. Hijrah	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
267	MUZIAR TANJUNG	Jl. Semangka	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
268	NUR SANI SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
269	NURAINI	Jl. Batu Bintang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
270	RAHMAD ILAHI	Gg. Moring Jaya Mukti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
271	RONAL HIDAYAT	Jl. Budi Kemuliaan No. 06	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
272	RONNY BAHAR	Jl. Jend. Sudirman Gg. Terikat No. 41	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
273	SA'I	Jl. Rajawali	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
274	SAMINI	Jl. Perintis Gg. Semangat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
275	SARIPUDIN	Gg. Restu RT.14 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
276	SRI WAHYUNI	BTN Kesuma Permai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
277	SRIYATIN	Jl. M. Saleh Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
278	SUARNI	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bapoja No.6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
279	SUDIRMAN	Jl. Gunung Kerinci No.2	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
280	SUJARWO	Jl. Said Umar RT. 03	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
281	SUKARTI	Jl.Dock Yard Gg. Kunyit	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
282	SUMARNI	Jl. Janur Kuning Gg. Arjuna No.01	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
283	SUMARTIN / ATUN	Gg. Bunga I No. 19	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
284	SUNARTO	Jl. Pulau Mampu Gg. Surau	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
285	SUPARDI	Jl. Budi Utomo Gg. M. Saleh No.81	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
286	SUPRIYANTO	Jl. Gajah Mada Gg. Bunga II	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
287	SUWARNI	Jl. Janur Kuning Gg. Rekening No.89	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
288	SYAFNITA	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
289	SYAFRI WENDRA	Jl. Sei. Teras Gg. Durian I	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
290	SYAMSUDDIN	Jl. Merdeka Baru Gg. Amsal	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
291	SYARBAINI	Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
292	TOHAR AHMAD	Jl. Seulawah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
293	TUMIN	Jl. Jawa RT 12 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
294	UJANG	Jl. Pangkalan Sena No. 26	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
295	WAN SOPIAH	Jl. Pemuda Darat Gg. Kencana	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
296	WARLIS	Jl. Sudirman Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
297	YELPEN EFENDI	Jl. Al-Mubin Ujung No. 6	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
298	YULHELMI	Jl. Jend Sudirman Gg. Karya III No. 276	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
299	YURLIANIS	Jl. Jend Sudirman Gg. Tapiannauli No.30	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
300	YURNI	Gg. Mulia Ujung	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 500.000
301	YURNIATI	Jl. Terikat Gg.Masyarakat	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
302	YUSMAWATI	Jl. Al-Mubin Ujung	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
303	ZAINIL	Jl. Swadaya	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
304	ZAINUL ARIF	Jl. Pendowo Gg. Nangka	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
305	ZULBAIRI	Jl. Gunung Merapi RT 9 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
306	ZULKIFLI	Jl. Sei. Teras	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
307	ABD MALIK	Jl. Gunung Selamat No. 46 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
308	ABDUL GANI	Jl. Siak Gg. Kopi	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
309	ABDUR RAHMAN	Jl. Sukajadi Gg. Sukasari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
310	AFRIZAL	Gg. Al-Mubin II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
311	AFRIZAL JASUR	Jl. Panca Karya Gg. Pesisir II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
312	AGUSRI	Jl. Jend Sudirman Gg. Sadar No. 26 A	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
313	AGUSTINUS SIHOTANG	Jl. Raya Bagan Besar Simp. Panti	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
314	AHMAD HANIF	Jl. Sabar Menanti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
315	ALI NURDI	Jl. Gunung Bromo Gg. Damai No. 24	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
316	AMASDIATI	Jl. Cemara	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
317	AMINUDIN	Jl. Bintang Gg. Ubudiyah	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
318	ANISAH	Jl. Makmur	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
319	ANITA CAROLINA	Jl. Mangga No. 33	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
320	ANTO SUGIANTO	Jl. Budi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
321	ARLENA	Jl. Salak Gg. Salak II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
322	ASMANIAR	Jl. Sukajadi Gg. Semangka No. 59	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 700.000
323	ASNAH	Jl. Makmur Gg. Dahlia	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
324	AZMUR	Jl. Ali Akbar Tengah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
325	BAKAR	Jl. Tanjung Sari Gg. Damai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
326	BENI CHUDRI	Jl. Arifin Ahmad Gg. Ambarawa	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
327	BOYAMIN	Jl. Ombak / Jl. Sempurna No.46	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
328	CARLI SYAHPUTRA	Jl. Budi Kemuliaan RT.001	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
329	DARMIATI	Jl. H.T Said Umar Gg. Sejati II	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
330	DARMIUS	Jl. Budi Gg. Lestari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
331	DARWATIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sentosa No. 9 A	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
332	DENDI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Bakti	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
333	DESMIYATI	Jl. Sukajadi Gg. Cermat No. 18	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
334	EDI SAPUTRA PA	Jl. Bangun Sari	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
335	ENDI WARNEFIS	Jl. Hidayat No.12	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 500.000
336	ERMI LINDAYANTI	Jl. Kartini No.28	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 600.000
337	EVA FITRI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 27	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
338	HASAN BASRI	Jl. Mesjid RT.02	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
339	HASANUDDIN	Jl. Samudera RT. 02	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
340	HAYATI	Jl. Pinang Kampai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
341	HENDRA	Jl. Sukajadi Gg. Durian	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
342	HERLINA	Jl.Tanjung Sari RT. 05	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
343	IHWAN SALEH HARAHAP	Jl. Leppin RT. 023	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
344	IIN SETIANI	Jl. Ombak Gg. Cengkeh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.700.000
345	INDRI NURNASRI	Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
346	JANUAR EFFENDI	Jl. Perjuangan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
347	JONI WARMAN	Jl. Perwira	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
348	KAMARIYAH	Jl. Bukit Datuk Lama	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
349	LENI	Jl. Cemara	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
350	LINAWATI	Jl. Mattaim	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
351	M. YAHYA	Jl. Budi Gg. Rudi I	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
352	MAIMUNAH	Jl. Inpres I Gg. Sahabat Bagan Besar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
353	MANAHAN SITANGGANG	Jl. Gunung Merapi No. 22 A	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
354	MARIANI	Jl. Bintang Gg. Ampera No. 31	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
355	MASPERI	Jl. Natuna Gg. Merak	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
356	MEGAWATI	Jl. Budi Kemuliaan / Petak Panjang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
357	MHD. NUR	Jl. Jawa RT. 12 Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
358	MUHAMAD HASYIM	Jl. Mulia Jaya RT. 10	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
359	MUHAMMAD CANDRA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No. 7	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
360	NASRI	Jl. Gunung Merapi	Rp 2.500.000	2007	2010	Rp -
361	NASROL	Jl. Gunung Merapi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
362	NAULI	Jl. Gunung Bromo Gg. Damai	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
363	NELIDA	Jl. Imam Bonjol No. 07	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
364	NOVI MURIANA	Jl. Barembang No. 23 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
365	NURAINIK	Jl. Gunung Bromo Gg. Damai No. 10	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
366	NURCAYA	Jl. Gunung Merapi	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
367	NURLISAH	Gg. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
368	NURMIYATI	Jl. Sisimangaraja	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
369	NURSIHA	Jl. Natuna	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
370	RAMLI. H	Jl. Mesjid RT.02	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
371	RANAWATI	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
372	RISMAN	Mampu Jaya RT. 01	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
373	RISWANDI	Gg. Sepakat Tengah	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
374	ROSLAINI	Jl. Perumahan No. 01	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
375	ROSMANIAR	Jl. Sukajadi Gg. Semangka No. 21	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 900.000
376	RUDI	Pematang Duku RT. 015	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
377	RUSLIYANTO	Jl. Raya Bukit Timah Km. 7 Gg. Mulyosari	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 200.000
378	S. SURYONO	Jl. Bengkalis Gg. Bhayangkara	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.500.000
379	SAHRUL	Jl. Bintang Gg. Permai No. 126	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
380	SALMAH	Jl. Tanjung Sari Gg. Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
381	SALWAN DALIMUNTE	Jl. Leppin RT. 023	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
382	SAMSUDIN	Jl. Budi Kemuliaan Petak Panjang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
383	SARLAN	Jl. Wisma Haji Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
384	SITI ASMAN	Jl. Pemuda Darat Gg. Kencana	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
385	SLAMAT	Jl. Patimura Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
386	SLAMET SUGIANTO	Jl. Pemuda Gg. Karya No. 1	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
387	SOFIAN	Jl. Makmur	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
388	SOINEM	Gg. Satria RT. 13	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
389	SOPIAN	Jl. Budi Kemuliaan RT.001	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
390	SUARNI	Jl. Panca Karya Gg. Pesisir II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
391	SUDIRMAN	Jl. Panca Karya	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
392	SUGIMIN	Mampu Jaya RT. 08	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.500.000
393	SUHARNO	Jl. Takari Gg. Tenggiri No. 8B	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
394	SULASTRI	Jl. Sempurna No. 32	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
395	SUMARDI	Jl. Pemuda Gg. Cemara II	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
396	SUMARNI	Jl. Paris Gg. Paris I No. 50	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
397	SUMARTINI	Jl. Salam No. 5 B	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
398	SUMIATIN	Jl. Sukajadi Gg. Kartini	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
399	SUNAWATI	Jl. Kesehatan SDN. 025	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
400	SURATMI	Jl. Sukajadi Gg. Salam No. 5 B	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
401	SURIANTO	Jl. Mesjid Gg. Sukaramai RT.003	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
402	SURYANI	Jl. Kesuma Gg. Cengkeh No. 04	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
403	SUSDI HERWANDI	Jl. Budi Kemuliaan RT. 001	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
404	SUTRIMO	Jl. Sepakat RT. 16	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
405	SUWARTONO	Jl. Kakap No. A. 03	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
406	SYAFRIL	Jl. Baru Gg. Merapi	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
408	SYAFRUDIN	Jl. Budi Gg. Lestari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
409	SYAHRAL ISKANDAR	Jl. Sadar No. 16	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
410	SYAMSIDAR	Jl. Bintang Gg. Paris I	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
411	SYARIFAILIS	Jl. Gajah Mada No.228	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
412	TASLIM TANJUNG	Jl. Takari No. 78	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
413	TAUFIK	Jl. Mesjid RT. 03 Mundam	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
414	THOMSON HUTAGAOL	Jl. Karya Abadi	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 900.000
415	TUMIJAH	Jl. Makmur Gg. Dahlia	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
416	UJANG	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sadar No. 26	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
417	WIDIAWATI	Jl. Gunung Slamet Gg. Kanai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
418	YANDRI	Gg. Sadar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.300.000
419	YANTI ANDRIANI	Jl. Tanjung Sari Gg. Baru	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.400.000
420	YENI SUMARNI	Jl. Perwira Bumi Ayu	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.600.000
421	YULIA ASTUTY	Jl. Gunung Bromo	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.700.000
422	YULIATI MARNI	Jl. Natuna No. 14	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
423	YULKASMAN	Jl. Ombak Gg. Makmur	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.900.000
424	YUSMAINI	Jl. Bintang Gg. Damai No. 02	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
425	ZAHARI	Jl. Panam Jaya No. 21	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
426	ZAINIDAR	Jl. Makmur Gg. Tanjung	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
427	ZULFAN SIDIK	Jl. Patimura Gg. Jawa	Rp 2.500.000	2007	2007	Rp 1.800.000
428	ZULHIJAH NST	Jl. Simpang Bukit Datuk Lama No. 50	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
429	ZULJAFISAL	Gg. Sadar	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.100.000
430	ZULKIFLI	Jl. Tanjung Sari	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
431	AMINAH	Jl. Kaswari Gg. Murai No. 61 B	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
432	AMKA	Jl. Mattaim	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
433	AMRIL HAMID	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 1.000.000
434	ARIFNAL	Jl. Sukajadi Gg. Satria	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
435	ARMEN	Gg. Sentosa No. 6	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
436	ASMAN	Jl. Raya PU RT. 02 Bangsal Aceh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
437	ASWIN AZANI SIREGAR	Jl. Leppin	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
438	ATAN	Jl. Sukabumi RT. 06	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
439	AULIA NUR	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
440	BAHARUDDIN	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 19	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
441	BAIDIR	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.300.000
442	BAKHTIAR	Jl. Semangka Gg. Semangka III No. 07	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
443	EFLI CHANDRA	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tangkas No. 2	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
444	ELDAWATI	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 600.000
445	ENDANG PURWATI	Jl. Bintang	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
446	ERLINDA	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 43	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
447	ERNISAH	Jl. Budi Kemuliaan No. 113 Dumai	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
448	FITRIATI	Gg. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
450	HARTATI	Jl. Bintang Gg. Wella	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 700.000
451	HURDANIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Tarikat	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
452	JAMAL	Jl. Teduh No. 14	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 100.000
453	JUMIATI	Jl. Bintang Gg. Darul Jadid	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
454	KASILAH	Jl. Bintang No. 34	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
455	KURNIA WIJAYA	Jl. Budi Kemuliaan Pasar Kelapa	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
456	M. MACHRUS	Jl. Sukabumi RT. 06	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
457	M. SYAMSIR	Jl. Budi Kemuliaan No. 141	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000

No.	Nama Debitor	Alamat	Besar Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Tahun Awal	s/d	
458	NIRMALA	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
459	NOFRITA	Jl. Bintang Gg. Darul Djadid	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 100.000
460	NORDILLA	Jl. Raya PU RT. 02 Bangsal Aceh	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.600.000
461	NORMIAH	Jl. Rimbun Jaya RT. 04	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
462	NOSWITA	Gg. Kapas No. 15	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
463	NURFITRIE JULIARTI	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
464	NURHAINI	Jl. Cempedak Gg. Kelapa No. 33	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
465	NURHAYANI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Pasar Baru No. 3	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 800.000
466	NURHAYATI	Mampu Jaya RT. 19	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
467	NURLAILA	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
468	NURSIDA	Jl. Bintang Gg. Paris II	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
469	RAHMA YULIS	Jl. Gunung Lauser	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
470	RAMLAN	Jl. Tega Lega No. 83	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
471	RATNAWATI	Jl. Barembang Gg. Kelapa No. 28	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
472	RATNO	Jl. Leppin RT. 023	Rp 2.500.000	2007	2010	Rp -
473	RAZIDIN	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 700.000
474	RESMAN HUTAGAOL	Jl. Leppin No. 56	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
475	ROSLAINI SIREGAR SIAGIAN	Gg. Selamat RT. 4	Rp 2.500.000	2007	2010	Rp -
476	RUSLI	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kedabu	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
477	SARPANI	Mampu Jaya RT. 22	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
478	SITI ROHANI	Sukabumi RT. 6	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.700.000
479	SUGIANTO	Jl. Kapas RT. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
480	SUKIRMAN	Jl. Kapas RT. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 400.000
481	SURNI	Mampu Jaya RT. 25	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 800.000
482	SUSI LAWATI	Jl. Panam Jaya	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.800.000
483	SUTIKNO	Jl. Kipas RT. 20	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 300.000
484	SYAFRI	Jl. Merdeka Gg. Rahman	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.100.000
485	SYAFRIL	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
486	SYAFRINALIS	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 200.000
487	SYAMSIDI	BTN Panorama Blok B No. 8	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.000.000
488	UJANG MASNOR	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
489	WAIDAH	Jl. Raya PU RT. 02 Bangsal Aceh	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
490	YANTI MARGARETA	Jl. Bintang No. 22	Rp 2.500.000	2007	2008	Rp 1.200.000
491	YUNIMAR TETI	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru No. 21	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp -
492	YUSMINAR	Gg. Kandis	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 500.000
493	ZAHRIL RAFLI	Jl. Budi Kemuliaan	Rp 2.500.000	2008	2009	Rp -
494	AMIRUDDIN	Jl. Tenaga	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.800.000
495	ARIANTO NASUTION	Jl. Anggrek	Rp 2.500.000	2008	2010	Rp 500.000
496	BUDIATI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Sadar No.95	Rp 2.500.000	2007	2009	Rp 900.000
497	DINAR SIAGIAN	Jl. Tenaga Gg. Buntu No. 13	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.600.000
498	LUKMAN BATUBARA	Jl. Cempaka No.26	Rp 2.500.000	2008	2009	Rp 600.000
499	NURMA	Jl. Nusantara Gg. Nusa	Rp 2.500.000	-	-	Rp 2.000.000
500	TONI SUGANDA	Jl. Tenaga	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.800.000
501	YENNITA	Jl. Tenaga No. 04	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.800.000
502	ALIDAR	Jl. Terikat Gg. Binjai	Rp 2.500.000	2008	2008	Rp 1.700.000
TOTAL			Rp 1.250.000.000			Rp 512.580.000

**DAFTAR PINJAMAN DAN TUNGGAKAN
UKM TAHUN 2008
FASILITASI PENGEMBANGAN UKM KELUARGA MISKIN**

No	Nama Debitur	Alamat	Besarnya Pinjaman	Pengembalian		Sisa
				Awal Tahun	s/d	
1	A. RAHMAN	Jl. Panca Karya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
2	ABAS	Jl. Merdeka Baru Gg. Swadaya No. 87	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
3	ABBIN SADLI MATONDANG	Jl. Bukit Datuk Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
4	ABD. RAJAB SIREGAR	Jl. Remuska No. 17	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
5	ABDUL MANAN	Jl. Sultan Syarif Kasim	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
6	ABDUL RAHMAN RITONGA	Jl. Pasar Pulau Payung Gg. Sipirok	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
7	ABDUL RAHMAN. S	Jl. Teladan Gg. Lestari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
8	ABDUL SALAM SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurnia	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.200.000
9	ABDULLAH	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
10	ABDULLAH	Jl. Hayam Wuruk Gg. Firdaus No. 272	2.500.000,00			Rp2.000.000
11	ABU SALIM	Jl. Leppin Gg. Sawit I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
12	ADI RAHMAD	Jl. Sri Pulau	2.500.000,00			Rp2.000.000
13	ADRI	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
14	AFFAN	Jl. Hang Tuah Gg. Hang Jebat No. 15	2.500.000,00			Rp2.000.000
15	AFRIAYANTO	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jambu	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
16	AFRIYONO	Jl. Merdeka Gg. Rahman No. 10	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
17	AFRIZAL	Jl. Gajah Mada Gg. Rimija No. 11 B	2.500.000,00			Rp2.000.000
18	AGUS. S	Jl. Bintang Gg. Batrem	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
19	AHMAD TARMIZI	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa I No. 02	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
20	AKMALIUS	Gg. Durian	2.500.000,00			Rp2.000.000
21	AKMUR EBO	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kuini	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
22	ALBUSRI	Jl. Berembang Gg. Padi	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
23	ALFERIS RAJAGUKGUK	Jl. Mataram	2.500.000,00			Rp2.000.000
24	ALI AMSA SIAGIAN	Jl. Panca Karya RT. 15	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
25	ALI BASRIL	Jl. Budi Kemuliaan	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
26	ALI ISRON RANGKUTI	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
27	ALI MAHFI	Jl. Sukajadi Gg. Semangka No. 55	2.500.000,00			Rp2.000.000
28	ALISMAN	Jl. Teratai No. 66	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
29	ALIZAR	Jl. Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
30	AMBAK JANG	Jl. Tenaga Gg. Warsa No. 223	2.500.000,00			Rp2.000.000
31	AMIN NUDDIN	Jl. Air Bersih Gg. Mujair No. 05	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.400.000
32	AMINAH	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
33	AMRAN YUS. M	Jl. Pinang Kampai	2.500.000,00			Rp2.000.000
34	AMRI	Jl. Baru Gg. H. Usman No. 66	2.500.000,00	2008	2010	Rp200.000
35	AMRIL	Jl. Sabar Menanti No. 47	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
36	AMSYARUDDI SURYA	Jl. Janur Kuning Gg. KPKN RT. 01	2.500.000,00			Rp2.000.000
37	ANDRI EKA SAPUTRA	Jl. Kaswari	2.500.000,00			Rp2.000.000
38	ANTO DARMAWAN	Jl. Swadaya Gg. Bumi Sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
39	ANWAR	Jl. Hangtuah Gg. Nyiur No. 78	2.500.000,00			Rp2.000.000
40	ANWAR BAYANG	Jl. Teratai Gg. Rahmat No. 73	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
41	APRIANTO	Jl. Sidoarjo Gg. Dharmawan	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.000.000
42	ARDISON	Jl. Bintang Gg. Selamat	2.500.000,00			Rp2.000.000

43	ARI ALIN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
44	ARIF	Jl. Bintan Gg. Paris 1	2.500.000,00			Rp2.000.000
45	ARIFUDDIN	Jl. Kusuma Gg. Cemara	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
46	ARIS	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
47	ARISMANTO	Jl. Sejahtera No. 49	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
48	ARSAD	Jl. Hayam Wuruk Gg. Martoba No. 275	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
49	ASIAH	Jl. Bintan Gg. Permai No. 118	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
50	ASMAH	Jl. Tenaga No. 273	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
51	ASNAH	Jl. Bades Mundam	2.500.000,00			Rp2.000.000
52	ASRIL	Jl. Bintan Gg. Damai No. 08	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.600.000
53	ASRIL	Jl. Cempedak Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.300.000
54	ASRIL	Jl. Cempedak Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
55	ASRIL	Gg. Kandis	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
56	ASRIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Maju No. 18	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
57	ASRUL CHANIAGO	Jl. Belimbing Gg. Tampoi III	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
58	ASWARUDDIN LUBIS	Jl. Cempaka Gg. Kemuning	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
59	AWALUDDIN/MAIMUNAH	Jl. S. S. Kasim Gg. Taufik	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
60	AZUAN	Jl. Belimbing	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
61	BAIDAR	Jl. Jeruk No. 5 A	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
62	BAKKARENG	Jl. Rindu Darat	2.500.000,00	2008	2011	Rp1.200.000
63	BAMBANG PRASETYA	Jl. Swadaya II Gg. Mayang Sari No. 47	2.500.000,00			Rp2.000.000
64	BASUKI	Jl. Kenanga No. 303	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
65	BAYU	Jl. Jaya Indah	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.300.000
66	BUDI	Jl. Cempaka	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.300.000
67	BUJANG KOTO	Jl. Merdeka Baru Gg. Swadaya	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
68	CECEP SUBRATA	Jl. Leppin	2.500.000,00			Rp2.000.000
69	CHARLES	Jl. Pendowo Gg. Akasia	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
70	DAHNIAR	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
71	DAHNIL ARIFIN	Jl. Sudirman Gg. Wella No. 187	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.700.000
72	DANSEN TOGATOROP	Jl. Siliwangi	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.800.000
73	DARFISON	Jl. Hayam Wuruk Gg. Bajopa No. 10	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
74	DARIAH	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.500.000
75	DARMADI	Jl. Kusuma Gg. Cempedak No. 3	2.500.000,00			Rp2.000.000
76	DARMAN	Jl. Semangka	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
77	DEFRIZAL	Jl. Berembang Gg. Padi	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
78	DELVA HENDRA	Jl. Teladan No. 18	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
79	DIANA NINGSIH	Jl. Bukit Datuk Lama Gg. Murni No. 43	2.500.000,00			Rp2.000.000
80	DILAM	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2009	2011	Rp0
81	DISMAN TARNADO	Jl. Kusuma Gg. Satria No. 278	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.400.000
82	DODIMAN	Gg. Wela	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
83	DRAJAT	Jl. Mekar Sari	2.500.000,00	2009	2010	Rp1.000.000
84	DWI SISWORO SUPRIANTO	Jl. Mataram	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
85	EDDY SIREGAR	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00			Rp2.000.000
86	EDI	Jl. Tanjung Jaya No. 2	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
87	EDI ERWANTO	Jl. Meranti I	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
88	EDI FARIZAL	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
89	EDI SUJONO	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000

90	EDI SUPRIANTO	Jl. Raja Ali Haji Gg. Anugrah	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
91	EDWAR	Jl. Belimbing	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
92	EDWAR TAMPUBOLON	Jl. Kusuma No. 1	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
93	EDY SUMARNO	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
94	EFFENDY	Gg. Jambu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
95	ELIA MESRA	Jl. Bromo Gg. Remuska No. 13	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
96	EMA	Jl. Bintan Gg. Pasar Baru No. 39	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
97	ENDANG	Gg. Leppin	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
98	ERIKA BR. HUTAGALUNG	Jl. Simp. Bukit Datuk Lama	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
99	ERIKSON SIREGAR	Jl. Imam Munandar	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
100	ERMA	Jl. Sejahtera Gg. Swadaya	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
101	ERWISISWATI / AMRIL RAHIM	Jl. Nasional No. 48 B	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
102	ESAH	Jl. Teratai Gg. Cendana No. 44	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
103	ESTINA ARITONANG	Jl. Budi Indah	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
104	EVI	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
105	FARDIZAL	Jl. Swadaya Gg. Ratna Sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
106	FATIMAH	Jl. Teratai	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
107	FERI CANDRA	Jl. Bintan Gg. Paris I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
108	FERIZAL	Jl. Janur Kuning Gg. Ikhlas RT. 01	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
109	FIKTOR LUMBAN BATU	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
110	GORHANA SIREGAR	Jl. Leppin No. 09	2.500.000,00			Rp2.000.000
111	GOSNER SIBARANI	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2011	Rp0
112	GUSMANIZON	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00			Rp2.000.000
113	GUSMIATI	Jl. Bintan Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
114	HADI KOESNAZI	Jl. Bahtera Pel. TPI Lama	2.500.000,00			Rp2.000.000
115	HAFISA PUTRA	Jl. Anggrek	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
116	HAIRUL SALEH	Jl. Tanjung Sari Gg. Baru	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.400.000
117	HALIMAH	Jl. Bintan Gg. Batam No. 70	2.500.000,00	2008	2011	Rp0
118	HALIMAH	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
119	HAMLET NASUTION	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 30	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
120	HAMZAH SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Rahmat	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
121	HANAFI	Jl. Bahtera	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
122	HARDIAN	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00			Rp2.000.000
123	HARIATI	Jl. Bahtera	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
124	HARTUTI	Jl. Hang Tuah Gg. Karya II No 265	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
125	HASAN	Jl. Sukajadi Gg. Mulia No. 6	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
126	HASMAR NASUTION	Jl. Keluarga RT. 11	2.500.000,00			Rp2.000.000
127	HASTARA MEGA TARUM PAKAI	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jihad	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
128	HASYIM PULUNGAN	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
129	HENDRA PUTRA	Jl. Budi Kemuliaan Petak Panjang	2.500.000,00	2008	2011	Rp1.200.000
130	HENDRI APRIZAL	Jl. Kamboja Gg. Tirta II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
131	HENDRI DOL	Jl. Semangka Ujung	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
132	HERDIN GEA	Jl. Merdeka Baru No. 27	2.500.000,00	2009	2011	Rp0
133	HERLIN	Jl. Bintan Gg. Barat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
134	HERMAN	Jl. Jawa I RT. 06 Bumi Ayu	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
135	HERMAN	Jl. Panca Karya RT. 15	2.500.000,00	2009	2010	Rp1.700.000
136	HERMAN	Jl. Hang Tuah Gg. Karya II RT. 01	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000

137	HERMAN	GG. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
138	HERMANTO	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
139	IDRIS	Jl. Jend. Sudirman Gg. Becek No. 01	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
140	IRMANSYAH	Jl. Sungai Masang No. 118	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
141	IRWANSYAH	Jl. Swadaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
142	ISKANDAR	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2007	2010	Rp500.000
143	ISKANDAR	Jl. Bima Sakti Gg. An-nur	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
144	ISMAIL. S	Jl. Belimbing Gg. Binjai I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
145	ISWANTO	Jl. Sentosa 2	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
146	JAINAL	Jl. Mampu Jaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
147	JANIAR. J	Gg. Bunga No. 13	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
148	JASMAN	Jl. Simpang Pulai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
149	JASMAN	Jl. Terikat Gg. Pematang	2.500.000,00			Rp2.000.000
150	JASNAH	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
151	JASRIL	Gg. Manggis	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
152	JASRIL	Jl. Rindu Darat	2.500.000,00	2008	2010	Rp200.000
153	JEFRIYADI	Jl. Gajah Mada No. 91	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
154	JEFRY CHANDRA MANALU	Jl. Panca Karya No. 90	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
155	JENNI	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
156	JON FRIZAL	Jl. Bahagia	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
157	JONI SUPRAPTO	Jl. Imam Bonjol Gg. Prabot No. 22	2.500.000,00			Rp2.000.000
158	JULIANA	Jl. Baru	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
159	JULIFRIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Karya IV No. 01	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.800.000
160	JUMADIONO	Jl. Bintang Gg. Ubudiyah No. 76	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
161	JUNAIDI	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00			Rp2.000.000
162	JURIANTO	Jl. Kamboja Gg. Tirta 1 No. 11	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
163	JURMIN	Gg. Tri Patra	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
164	KADIR SYAHPRI YUDA	Jl. Pangkalan Sena No. 41	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
165	KADIRMAN	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
166	KAMARIAH	Jl. Lepin	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
167	KAMARIAH	Jl. Teratai	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
168	KARDANIS	Jl. Hang Tuah Gg. Karya III No. 17	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
169	KARIMUNADI	Jl. Natuna Gg. Merak	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
170	KARTINI	Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
171	KARTINI BR. REGAR	Jl. Gunung Merpati Gg. Nona I No 54	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
172	KARYANTO	Jl. Nangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
173	KASDI	Jl. Dock Yard Gg. Durian I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
174	KASIRIN PURBA	Jl. Sri Pulau	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
175	KASLIMANTO	Jl. Jend Sudirman	2.500.000,00			Rp2.000.000
176	KASMINSYAH	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
177	KATAN	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp900.000
178	KHAIRUL NAS	Jl. Pendowo	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
179	KHODIJAH	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
180	KRISTANTO	Jalan Raya Bukit Datuk	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
181	KUNTUM	Jl. Samudra	2.500.000,00			Rp2.500.000
182	KURNIAWAN	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
183	LELY RAHANUM	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000

184	LIJANG	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
185	LUKMAN	Jl. Sei Masang No. 137	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
186	M. JAMAL	Jl. Bintang Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
187	M. KADIR	Gg. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
188	M. KHOLIL	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
189	M. NUR	Jl. Gajah Mada Gg. Bunga No. 355	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
190	M. RASID	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
191	M. SAMIN	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
192	M. USMAN	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00			Rp2.000.000
193	M. YUSUF	Jl. Muslim	2.500.000,00	2008	2010	Rp600.000
194	MAHMUDIN	Kampung Tuo	2.500.000,00			Rp2.000.000
195	MAINAH	Jl. Teratai	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
196	MAKMUR	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
197	MENGAMBIT MANALU	Jl. Kesuma Gg. Rantau No. 54	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.600.000
198	MARATEMEN GULTOM	Jl. Leppin	2.500.000,00	2009	2010	Rp2.000.000
199	MARDIUS	Gg. Sepakat Ujung No. 7	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
200	MARGONO	Jl. DR. Wahidin Purnama	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
201	MARIANI	Jl. Utama	2.500.000,00			Rp2.000.000
202	MARUDUT MANIK	Jl. Perjuangan	2.500.000,00	2008	2010	Rp200.000
203	MARWAN	Jl. Baru Gg. H. Usman No. 60	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
204	MARWANTO	Jl. Nangka	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
205	MARYADI	Jl. KUD Gg. Nurul Iman	2.500.000,00			Rp2.000.000
206	MARYAM. M	Jl. Gunung Selamat No. 45	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.000.000
207	MASDEWA	Jl. Bukit Datuk Gg. Kurnia	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
208	MASJIDAN	Jl. Merdeka Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
209	MASKUT RAMBE	Jl. Jeruk	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
210	MASRUL	Jl. Swadaya RT. 03	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
211	MASTER SIMATUPANG	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
212	MHD. ALIMIN	Jl. Anggrek No. 401	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
213	MHD. DIAR	Jl. Sri Pulau	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
214	MISWAN	Jl. Parit Tugu	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
215	MOSIR SIREGAR	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
216	MUHAMAD ARSIL	Jl. Cempedak Gg. Apel No. 02 D	2.500.000,00			Rp2.000.000
217	MUHAMMAD IKBAL	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00			Rp2.000.000
218	MUHAMMAD NAZI	Jl. Pemuda Darat	2.500.000,00			Rp2.000.000
219	MUHAMMAD NUR	Jl. Sukajadi	2.500.000,00			Rp2.000.000
220	MUHAMMAD NUR	Jl. Jend Sudirman Gg. Wella	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
221	MUHAMMAD RIZAL	Gg. DT. Tabano No. 52	2.500.000,00	2008	2010	Rp600.000
222	MUHSIN MUSLIM	Jl. Pemuda Darat Gg. Bukit Batu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
223	MULYADI	Jl. Sisingamangaraja Gg. Sadar	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
224	MUNIR	Gg. Kelapa No. 6 A	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.400.000
225	MUNZIR	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
226	MUSLIM	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
227	MUSTAFA	Jl. Budi Darma No. 8	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
228	MUSTAFA KAMAL	Jl. Swadaya Gg. Kopi	2.500.000,00	2008	2010	Rp700.000
229	MUTIARA BR. SIAGAN	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
230	MUTIRAH	Jl. Baru RT. 16 Kayu Kapur	2.500.000,00	2008	2010	Rp700.000

231	NAFISAH	Jl. Jeruk Gg. Apel	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
232	NAJARUDIN	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
233	NASRIANTO	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2009	Rp100.000
234	NASRUL	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp900.000
235	NAWAWI YASSIN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
236	NAZARUDDIN	Jl. Bunga Tujuh	2.500.000,00			Rp2.000.000
237	NGATNO	Jl. Wahidin	2.500.000,00			Rp2.000.000
238	NOFENDRA	Jl. Kesuma No 46	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
239	NORMAN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
240	NOVIAN ADIL	Jl. Baru No 67 Dumai	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
241	NURAINI	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00			Rp2.000.000
242	NURHAYATI	Jl. Teratai Gg. Dewa No. 2	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
243	NURIAH	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kuini No 09	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
244	NURLELA	Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
245	NURSIB	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp900.000
246	OOM KUMALASARI	Jl. Sentosa II	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
247	PANI	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
248	PARLIN SIAGIAN	Jl. Leppin	2.500.000,00			Rp2.000.000
249	PATIMAH	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
250	POLI YADI	Jl. Bintang Gg. Paris I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
251	RAHIMAH	Jl. Rindu Darat	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
252	RAJAB	Jl. Bintang Gg. Paris I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
253	RAMINAH	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Ilham	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.000.000
254	RAMLI	Jl. Budi Kemuliaan Gg. Petai	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
255	RASIMAH	Jl. Panca Karya	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
256	RASMI BATUBARA	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Kurni	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
257	RATNA DEWI	Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Sipirok	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
258	RIANTO. P/SOGIYEM	Jl. Pattimura Gg. Jawa	2.500.000,00			Rp2.000.000
259	RIDHO SUMARJI	Jl. Kamboja	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
260	RIDWAN	Jl. Sukarela	2.500.000,00			Rp2.000.000
261	RIDWAN	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
262	RIZAL	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wella	2.500.000,00			Rp2.000.000
263	RIZAWATI	Jl. Kamboja Gg. Tirta No. 07	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
264	ROBINSON RAMBE	Jl. Panca Karya RT. 14	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
265	ROGANDA SIANTURI	Jl. Mataram	2.500.000,00			Rp2.000.000
266	ROHANA	Jl. Jawa I Bumi Ayu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
267	ROMIDUN	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
268	ROSLAWATI RANTAU	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
269	ROSNIATI HARAHAP	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat No. 09	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.400.000
270	RUDIAT	Jl. Rajawali	2.500.000,00			Rp2.000.000
271	RUSLAN USMAN	Jl. Cendana Gg. Sepakat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
272	RUSLI	Jl. Swadaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
273	RUSLI. B	Jl. Sukamaju	2.500.000,00			Rp2.000.000
274	RUSLIADI	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
275	RUSMAN	Jl. Sudirman Gg. Maju No 55	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
276	RUSMIATI	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.200.000
277	RUSNA	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000

278	SAHRIN HARAHAP	Jl. Swadaya Gg. Ratna sari	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
279	SAIBUN	Jl. Belimbing Gg. Binjai II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
280	SAMSIDIR	Jl. Baru	2.500.000,00	2008	2010	Rp600.000
281	SAMSUL ANWAR	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
282	SAMUEL SAMOSIR	Jl. Bumi Ayu No. 56	2.500.000,00			Rp2.000.000
283	SAPARUDIN RITONGA	Jl. Panca Karya	2.500.000,00			Rp2.000.000
284	SAPRI	Jl. Leppin Gg. Leppin I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
285	SAPRI GUNAWAN	Jl. Bahtera	2.500.000,00			Rp2.000.000
286	SARING	Jl. Mataram	2.500.000,00	2008	2010	Rp400.000
287	SARIPAH/ABDUL WAHAB (ALM)	Jl. Sungai Rokan No. 61	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
288	SARTONO	Jl. Sejahtera RT. 06	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
289	SAWAL	Jl. Swadaya	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
290	SAYED RAHMAD	Jl. Simpang Pulai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
291	SHINTA SIHOMBING	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
292	SITI AJAR	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
293	SITI HOTNA	Jl. Bukit Datuk Gg. Rahmat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
294	SLAMAT	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
295	SOLIKUN	Gg. Kelapa	2.500.000,00			Rp2.000.000
296	SRI MARJONO	Jl. Nenas	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
297	SRI SUBIYANTI	Jl. Cendana Gg. Taruna No. 5	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
298	SUDIRMAN	Jl. Pangkalan Sena RT. 14	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
299	SUDIRMAN	Gg. Assalam Bagan Besar	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
300	SUDIRMAN SINURAT	Jl. Jendral Sudirman Gg. Leppin	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
301	SUGINEM	Jl. Tenaga Gg. Thalau	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
302	SUGITO	Jl. Rejo Sari	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
303	SUGIYANTO	Jl. H. Arifin Ahmad Gg. Utama	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
304	SUHARNO	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
305	SUHARNO	Jl. Cempedak Gg. Apel	2.500.000,00			Rp2.000.000
306	SUHARTINI	Jl. Cendrawasih	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
307	SUHERI	Jl. Perintis No. 7	2.500.000,00	2008	2009	Rp800.000
308	SUKRI	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
309	SULAIMAN. S/ ROSMALA DEWI	Jl. Sukaramai	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
310	SULARNO	Jl. Sentosa II	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
311	SUMO	Gg. Saudara	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
312	SUPARDI	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
313	SUPARMAN	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
314	SUPIYAN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.000.000
315	SUPRAYETNO	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa No. 41	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
316	SUPRIYANTO	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
317	SURATI	Gg. Cendrawasih Purnama	2.500.000,00	2008	2010	Rp100.000
318	SURIONO	Jl. Panam Bkt. Kayu Kapur	2.500.000,00	2009	2010	Rp0
319	SUTARTO	Gg. Kelapa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
320	SUTEJO	Jl. Leppin	2.500.000,00			Rp2.000.000
321	SUTOMO	Jl. Jeruk Ujung No. 74 B	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
322	SUTRISNO	Jl. Raya Dumai - Duri	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
323	SYAFII	Jl. Meranti	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
324	SYAFRI	Jl. SUkaramai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000

325	SYAFRIZAL	Jl. Gunung Bromo Gg. Bungsu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
326	SYAFRIZAL	Jl. Susunan Kalijaga Gg. Cemara Purnama	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.500.000
327	SYAHRIAL	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa	2.500.000,00	2008	2010	Rp0
328	SYAHRIAL	Jl. Bintang Gg. Pasar Baru	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
329	SYAHRIL	Jl. Sukajadi Gg. Semangka	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
330	SYAIFUDDIN	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
331	SYAIFUL BAHRI	Jl. Jawa	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
332	SYAMSU	Jl. Hangtuh No. 37	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.700.000
333	SYAMSUAR SAID	Jl. Leppin	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
334	SYAMSUDDIN HARAHAP	Jl. Gajah Mada Gg. Remija No. 07	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000
335	SYAMSUL BAHRI	Jl. Sentosa	2.500.000,00			Rp2.000.000
336	SYAMSUL BAHRI	Jl. Bintang Gg. Paris II	2.500.000,00	2008	2008	Rp2.200.000
337	SYARIFUDIN	Jl. Leppin Gg. Mushola	2.500.000,00			Rp2.000.000
338	SYARIFUDDIN	Hl. Harapan Gg. Akasia	2.500.000,00	2009	2010	Rp800.000
339	SYOFYAN EFENDI	Gg. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
340	TABRANI	Jl. Takari Gg. Mulia No. 08	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
341	TAMRIN	Jl. Assalam	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
342	TARMIZI	Jl. Sukaramai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.800.000
343	TAUFIK HIDAYAT	Jl. Pangeran Hidayat	2.500.000,00	2008	2010	Rp800.000
344	TIAR. D	Jl. Assalam	2.500.000,00			Rp2.000.000
345	TINI	Gg. Famili	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
346	TOLOT	Jl. Assalam	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
347	TULUS	Jl. Punak	2.500.000,00	2008	2011	Rp0
348	UJI	Jl. Cemara Gg. Kampung Baru No. 122	2.500.000,00			Rp2.000.000
349	UMAR ABDULLAH	Jl. Nangka	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
350	URDI	Jl. Budi Kemuliaan NO. 93 Pasar Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
351	URIP. AK	Jl. Kesuma Gg. Flamboyan No 25	2.500.000,00			Rp2.000.000
352	USMAN	Jl. Sentosa I	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
353	WAHYUDIN	Jl. Sentosa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
354	WAN AHMAD	Jl. Raja Ali Haji	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
355	WAN ISMAIL	Jl. Tanjung Sari	2.500.000,00	2008	2010	Rp1.600.000
356	WATAP	Jl. Kelapa	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.300.000
357	WIDODO	Jl. Patimura Gg. Jawa	2.500.000,00	2010	2010	Rp1.900.000
358	WIRDA	Jl. Baru Gg. Sepakat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
359	YANDRI DARMAWAN	Gg. Darul Jadid	2.500.000,00			Rp2.000.000
360	YONG HENDRIK	Jl. Berembang Gg. Padi	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
361	YUSLAILA NASUTION	Jl. Bahtera	2.500.000,00	2008	2010	Rp500.000
362	YUSNI	Jl. Kesehatan Gg. Al Mubin II	2.500.000,00			Rp2.000.000
363	YUSRI	Jl. Bintang Gg. barat	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
364	YUZALMAN	Jl. Sisingamangaraja	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
365	ZAHARAH	Jl. Arifin Ahmad	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
366	ZAINAL ABIDIN	Jl. Lembaga Gg. Syamsul Bahri No. 1 A	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.200.000
367	ZAINUL ARIFIN	Jl. Jend. Sudirman Gg. Wella	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
368	ZAINULLAH ST. SINARO	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jambu	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.100.000
369	ZAKIR	Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya No. 21	2.500.000,00			Rp2.000.000
370	ZAMZAMI	Jl. Kampung Tuo	2.500.000,00			Rp2.000.000
371	ZULFAHMI	Jl. Kesuma No. 290	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.700.000

372	ZULFI. Z	Jl. Pemasarakatan	2.500.000,00	2008	2010	Rp300.000
373	ZULHENDRI	Jl. Swadaya Gg. Ratna sari	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
374	ZULKIFLI	Jl. Parit Tugu	2.500.000,00			Rp2.000.000
375	ZULKIFLI	Jl. Cermai	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
376	ZULPAKAR	Jl. Rajawali	2.500.000,00			Rp2.000.000
377	BAHRUM	Jl. Perjuangan Belakang Pemda	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
378	HERWAN	Jl. Berembang Gg. Padi No 1 B	2.500.000,00			Rp2.000.000
379	MUHAMMAD DENI	Jl. Berembang Gg. Padi no. 03	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
380	HARMAN	Jl. Teduh Gg. Serumpun	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.600.000
381	USMAN	Jl. Mataram	2.500.000,00			Rp2.000.000
382	SOFYAN EFENDI	Jl. Nona	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
383	INDRA JAYA	Jl. Belimbing	2.500.000,00			Rp2.000.000
384	ADRIYATI	Jl. Nona Ujung	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.800.000
385	MUHAMMAD HAMID	Jl. Nona	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
386	MARSINAH	Jl. Jeruk No. 21	2.500.000,00	2008	2010	Rp900.000
387	TAMRIN	Jl. Air Bersih Gg. Ali Akbar Tengah	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
388	DJAMAL	Jl. Pendowo Kel. Bukit Batrem	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
389	MOHAMMAD ALIMIN DALIMUNTE	Jl. Caltex Lama Gg. Sabar Menanti	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
390	MARWAN	Jl. Sungai Pakning	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
391	YUNIZAR	Jl. Simpang Bukit Datuk	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.400.000
392	SAIFULLOH	Jl. Remuska	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.500.000
393	SUHADI	Jl. Belimbing	2.500.000,00	2008	2009	Rp1.700.000
394	ROSITA SIMATUPANG	Jl. Teladan Ujung No 94	2.500.000,00	2009	2009	Rp1.900.000
395	ELI/ NASIR (CERAI)	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00			Rp2.000.000
396	YUSMARDI	Jl. Kesuma Ujung No 96	2.500.000,00			Rp2.000.000
397	SUDARNO	Jl. Celincing	2.500.000,00			Rp2.000.000
398	RAJAMIN HASIBUAN	Jl. Sabar Menanti	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
399	SAMSIR SIREGAR	Jl. Panca Karya No. 34	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
400	UJENG SAPUTRA	Jl. Perwira	2.500.000,00	2008	2008	Rp1.900.000
TOTAL			1.000.000.000,00			Rp573.300.000
SISA 2007 dan 2008			2.250.000.000,00			Rp 1.085.880.000